

PERUBAHAN KUA

PERUBAHAN
KEBIJAKAN
UMUM
APBD

PENDAPATAN DAERAH
BELANJA DAERAH
PEMBIAYAAN DAERAH
BELITUNG TIMUR



2021

APBD



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : 02 Tahun 2021
TANGGAL : 7 September 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. BURHANUDIN
Jabatan : Bupati Belitung Timur
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2. a. Nama : FEZZI UKTOLSEJA, SE, MM
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
b. Nama : ROHALBA, S.Pt
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
c. Nama : SULADI, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Belanja serta rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

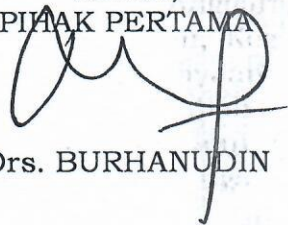
Manggar, 7 September 2021

PIMPINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

selaku,
PIHAK PERTAMA


Drs. BURHANUDIN

selaku,
PIHAK KEDUA


EZZZI UKTOLSEJA, SE, MM
KETUA

ROHALBA, S.Pt
WAKIL KETUA


SULADI, S.E
WAKIL KETUA



**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang memuat berbagai perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD, perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Perubahan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah diatur dalam peraturan perundangan tersebut dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD perubahan Tahun 2021. Dengan demikian diharapkan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang dihasilkan saling bersesuaian satu sama lain.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengamanatkan bahwa sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 161 Ayat (2) disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

Seiring waktu berjalan pada Tahun 2021 dilakukan penyesuaian (*refocusing*) anggaran pendapatan dan belanja untuk anggaran penanganan COVID-19 yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya. Sehingga perubahan tersebut harus dituangkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kementerian Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

APBD Kabupaten Belitung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam pelaksanaannya, selama tahun anggaran 2021, khususnya Semester I berjalan terjadi perubahan-perubahan terhadap realisasi dari asumsi yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk menampung perubahan-perubahan tersebut.

Oleh karena itu, diharapkan dengan disusunnya perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 ini dapat mengakomodir hal-hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, Pemerintah Daerah akan mempedomani perubahan KUA ini sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 disusun dalam rangka untuk menyediakan dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Perubahan Tahun 2021,



untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Secara khusus, tujuan penyusunan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
2. Menyesuaikan perubahan target penerimaan Pendapatan Daerah, perkiraan belanja dan pembiayaan;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
4. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan atau pengurangan alokasi anggaran dan penjadualan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
5. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan efisien, memberikan arah dan target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan yang disertai dengan pendapatan daerah, mengoptimalkan pelaksanaan APBD dan meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memanfaatkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2021, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang



- Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



20. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 431);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 3).
37. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 35).



BAB II
KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi dan nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Arah kebijakan perekonomian di tahun 2021 juga disusun dengan memperhatikan arahan pada RPJMD-P tahun 2016-2021. Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Belitung Timur di tahun 2021 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global, termasuk dampak dari mewabahnya COVID-19. Dan diperkirakan perekonomian Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan akan menurun seiring dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Tidak jauh berbeda dengan tahun 2020 kondisi perekonomian daerah tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berdasar dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi ditahun 2021 adalah:

1. Perlambatan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19.
2. Perbaikan ekonomi global diperkirakan lebih rendah dari perkiraan.
3. Berlanjutnya perlambatan ekonomi dunia dan negara-negara mitra dagang lainnya;
4. Pelemahan/ Penurunan harga komoditas CPO, karet, timah dibandingkan perkiraan sebelumnya.
5. Potensi kenaikan inflasi yang berasal dari faktor kenaikan harga beberapa komoditas.
6. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur Kabupaten Belitung Timur merupakan suatu keharusan untuk mendukung perekonomian lokal maupun provinsi dan nasional mengingat posisi strategis Kabupaten Belitung Timur dalam konstelasi ekonomi nasional dan regional.
7. Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
8. Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2018-2020)



tercatat rata-rata sebesar 36,20% dari total penerimaan pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

9. Belum optimalnya kegiatan pada sektor pertambangan terutama pertambangan timah dan pasir.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur (2019), yaitu dengan melihat perkembangan data PDRB ADHB maupun ADHK sepanjang tahun 2005-2019 yang terus menerus mengalami peningkatan, maka diproyeksikan pertumbuhan ekonomi domestik tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2019, sejalan dengan perbaikan harga komoditas yang berdampak pada meningkatnya ekspor, pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga Bank dan ekspansi belanja pemerintah. Untuk mendukung optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Kabupaten Belitung Timur, diperlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Daerah yaitu :

A. Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi

1. Peningkatan daya saing daerah melalui:

- Peningkatan Kualitas SDM, melalui (1) Melakukan optimalisasi alokasi anggaran khususnya pada sektor pendidikan, (2) Meningkatkan rata-rata lama sekolah, (3) Mengembangkan pendidikan non formal dan kejuruan, (4) Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui training dan kursus, (5) Adanya Balai Latihan Kerja;
- Mendukung Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur, melalui prioritas pembangunan konektivitas antar wilayah, logistik dan komunikasi antara lain melalui pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, jaringan telekomunikasi, jaringan transmisi kelistrikan dan sebagainya;
- Mengoptimalkan peran fiskal daerah dengan optimalisasi PAD dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah;
- Menciptakan lingkungan usaha produktif yang menarik dunia usaha dan investasi antara lain dengan memberikan kemudahan ijin dan pemberian insentif kepada investor yang akan berinvestasi, penyederhanaan dan harmonisasi peraturan, pelayanan Terpadu Satu Atap dan kemudahan pembebasan lahan;
- Meningkatkan jumlah penggunaan pembayaran nontunai (e-payment) khususnya untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

2. Pengembangan sektor pertanian melalui:

- Peningkatan produksi pertanian melalui: pengaturan pola tanam pertanian, pemetaan daerah sentra produksi, dan pengaturan waktu tanam antar daerah;



- Peningkatan program ekstensifikasi pertanian, melalui program cetak sawah dan pemetaan lahan produktifitas pertanian;
- Pengembangan infrastruktur pertanian melalui pembangunan irigasi, embung, gudang, dan jalan sarana produksi pertanian;
- Dukungan kepada kelompok tani melalui bantuan teknis dan pendampingan, bantuansarana produksi pertanian, dan alat atau mesin pertanian;
- Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian untuk penciptaan nilai tambah.

3. Pengembangan sektor perikanan tangkap melalui:

- Memberikan kemudahan perizinan dalam mengembangkan korporasi perikanan ataupun peningkatan kelembagaan untuk nelayan berskala UMKM;
- Peningkatan hasil pengolahan perikanan sebagai mata pencaharian substitusi (alternatif) selama nelayan tidak melaut (karena cuaca dan paceklik ikan);
- Harmonisasi kebijakan pemerintah terkait kewenangan pemanfaatan perikanan;
- Peningkatan daya saing perikanan budidaya melalui pengembangan pembenihan perikanan serta industri pakan yang berkualitas dengan harga relatif murah. Di samping itu, diperlukan peranan Dinas Perikanan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan, terutama melalui pendampingan dan penyuluhan;
- Pengembangan pasar sentra/lelang hasil pertanian dan perikanan.

4. Pengembangan sektor industri dan perdagangan melalui:

- Mempermudah akses permodalan bagi UMKM;
- Standarisasi produk UMKM;
- Meningkatkan skala pasar produk UMKM;
- Peningkatan Kualitas SDM bagi pelaku UMKM;
- Operasi pasar secara berkala.

5. Pengembangan sektor Pariwisata melalui:

- Pembangunan Infrastruktur Pariwisata, melalui penyediaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana pariwisata ditempat-tempat wisata;
- Peningkatan Kualitas SDM;
- Penyelenggaraan Event-Event nasional dan internasional;
- Pengembangan teknologi informasi pariwisata.

6. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Sektor Prioritas melalui:



- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata;
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

B. Pengendalian Inflasi

Untuk mencapai sasaran inflasi tahun 2021 sebesar $5\% \pm 1\%$ (yoy), beberapa rekomendasi upaya pengendalian inflasi di Bangka Belitung antara lain :

1. Upaya Pengendalian Inflasi dari sisi Produksi

a. Sektor Pertanian.

- Pemetaan lahan dan produktifitas pertanian;
- Pelatihan dan implementasi teknologi pertanian;
- Pelatihan kelembagaan kelompok tani dengan memberikan pelatihan pengembangan kelembagaan kelompok tani potensial untuk menjadi koperasi tani dan corporate farming.

b. Sektor Perikanan.

- Pemetaan produktivitas perikanan dan wilayah perikanan;
- Pelatihan dan implementasi teknologi kelautan dan perikanan;
- Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan koperasi nelayan;
- Implementasi Galeri Nelayan dan Lembaga Keuangan Mikro melalui program pengembangan UMKN unggulan nelayan;
- Dukungan pembuatan sertifikasi hak atas tanah untuk nelayan;
- Optimalisasi penyaluran kredit program dengan memfasilitasi nelayan yang potensial untuk dapat memanfaatkan kredit program untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

c. Sektor Peternakan.

- Pemetaan lokasi dan kapasitas sentra peternakan dengan melakukan pemetaan terkait lokasi dan kapasitas sentra peternakan melalui focus group discussion dan tinjauan lapangan;
- Pengembangan kapasitas SDM peternakan melalui pelatihan dan bantuan teknis.

2. Upaya Pengendalian Inflasi dari sisi Distribusi dan Tata Niaga.

a. Pemetaan surplus dan defisit komoditas pangan;

b. Penjajakan pendirian pasar baru dan/atau revitalisasi pasar existing serta pasar induk melalui studi maupun koordinasi dan komunikasi antar instansi;

c. Optimalisasi toko tani dan Tempat Pelelangan Ikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan toko tani untuk mengefisienkan jalur distribusi komoditas pangan dan perikanan;



- d. Inspeksi dan pemantauan stok pangan di distributor dengan melakukan koordinasi dantinjau lapangan/sidak ke distributor untuk mengawasi cadangan pangan;
 - e. Penyaluran Raskin;
 - f. Operasi pasar dan pasar murah (Bazaar);
 - g. Edukasi kepada distributor bahan pangan mengenai persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk kegiatan yang dilarang dan perjanjian kemitraan yang dilarang;
 - h. Meningkatkan perdagangan antar daerah;
 - i. Optimalisasi jalur distribusi di pelabuhan dan bandara.
3. Upaya Pengendalian Inflasi dari sisi Infrastruktur dan konektivitas.
 - a. Pembangunan akses jalan ke sentra produksi;
 - b. Pembangunan sarana irigasi;
 - c. Pembuatan kajian atau analisis terkait inflasi angkutan udara;
 4. Upaya Pengendalian Inflasi dari sisi pola konsumsi.
 - a. Edukasi kepada masyarakat mengenai inflasi.
 - b. Edukasi kepada pelaku usaha.
 5. Upaya Pengendalian Inflasi dari sisi informasi dan komunikasi.
 - a. Penguatan akurasi data;
 - b. Pemantauan dan Diseminasi harga komoditas strategis;
 - c. Pengembangan pusat harga pangan strategis;
 - d. Pemantauan harga jelang hari raya;
 - e. Edukasi kepada wartawan, humas dan protokol pemerintah daerah.
 6. Upaya Pengendalian Inflasi dari sisi kelembagaan.
 - a. Capacity Building untuk anggota TPID;
 - b. Penguatan program kerja TPID;
 - c. Penyusunan program kerja TPID 2017 dan 2018 sesuai roadmap pengendalian inflasi Bangka Belitung;
 - d. Meningkatkan koordinasi Pengendalian inflasi melalui TPID;
 - e. Sinkronisasi program kerja TPID;
 - f. Penyampaian rekomendasi ke Kementerian Perhubungan dan Pokjanas TPID.

Dengan belum meredanya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional hingga saat ini, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur



pada Tahun 2021 masih tetap dengan tema pada RKPD awal yaitu **“PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PEMULIHAN EKONOMI SERTA PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL”**, dengan fokus pembangunan mengacu pada kebijakan nasional yang masih berlanjut sampai Perubahan KUA tahun 2021 yaitu

1. meningkatkan pemulihan perekonomian masyarakat;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
3. meningkatkan jaringan pengaman sosial masyarakat miskin.

Sehingga fokus pembangunan pada Perubahan KUA tahun 2021 masih tetap pada:

1. Memulihkan Stabilitas Ekonomi;
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan;
3. Peningkatan pemerataan layanan berkualitas berkelanjutan;
4. Perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak COVID-19 terhadap aset produktif;
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja;
6. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus berlangsung, dan dampaknya yang diperkirakan masih akan dialami hingga beberapa tahun mendatang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha mengalami kondisi yang sulit. Namun demikian, untuk memberikan panduan dalam perencanaan pembangunan daerah, maka kerangka pendanaan disusun dengan berbagai asumsi yang akan terus dilakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan, baik faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan RKPD 2021 berjalan secara paralel dengan penyusunan proyeksi pendapatan periode 2021-2026. Proyeksi pendapatan tahun 2021 menggunakan perhitungan berdasarkan realisasi angka di tahun 2020 yang menurun karena adanya pandemi COVID-19, sehingga perlu digunakan beberapa asumsi dalam menetapkan kerangka pendanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 agar proyeksi lebih realistis dengan kondisi terkini. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dengan didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah yang melakukan



pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sampai saat ini sedang dilakukan pengkajian untuk dibentuk Satuan Kerja Perangkat Kerja tersendiri yang akan mengelola pendapatan daerah.

2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi para aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana untuk pemungutan dan pelayanan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, kerja sama dengan berbagai pihak terkait, sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah serta peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang dan berbagai upaya lainnya.
3. Meningkatkan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah, mengoptimalkan pengelolaan kas daerah untuk menghasilkan pendapatan giro dan deposito dan meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya untuk lain-lain PAD yang Sah.
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam perolehan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendapatkan reward berupa insentif bagi pemerintah daerah.

Perhitungan proyeksi pendapatan daerah pada periode 2021–2026, didasarkan pada berbagai pertimbangan dan asumsi. Pertimbangan dan asumsi tersebut diantaranya meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, potensi pendapatan, kebijakan dari pemerintah (pusat dan provinsi). Perhitungannya dilakukan secara rasional, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Realisasi pendapatan daerah beberapa tahun terakhir serta kondisi pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha serta pandemi COVID-19 saat ini merupakan faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan proyeksi pendapatan daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021, dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Belitung Timur. Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Belitung Timur.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkenaan dengan belanja daerah, azas umum yang digunakan adalah efisiensi, efektifitas dan transparansi yang merupakan salah satu hal selalu diutamakan, terutama jika



keadaan keuangan (APBD) defisit. Efisiensi anggaran merupakan Kebijakan Umum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melakukan penghematan belanja daerah. Berikut ini langkah-langkah penghematan yang telah dilakukan adalah:

1. Pembahasan APBD pada tahun anggaran 2021 dibahas dengan lebih selektif dan disesuaikan dengan prioritas program serta berdasarkan kebutuhan yang menyentuh kepada masyarakat;
2. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan dan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa;
3. Melakukan perhitungan yang real terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan dengan membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB), Survey harga, dan menyusun Kerangka Acuan Kerja;
4. Efektivitas dan efisensi dalam pengeluaran belanja.
5. Melakukan *refocusing* anggaran sesuai dengan alokasi dan prioritas penanganan COVID-19 dalam bidang penanganan Kesehatan, pemulihan ekonomi dan penanganan dampak sosial dengan tetap memperhatikan belanja wajib untuk pelayanan dasar bagi masyarakat.

BAB III

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Kebijakan-Kebijakan yang mendasari APBN 2021 ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, keberhasilan untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut sangat dipengaruhi berbagai dinamika, baik yang terjadi di tingkat global maupun domestik yang merupakan tantangan sekaligus peluang.

Kerja keras Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2020, khususnya dalam upaya menahan dampak pandemi COVID-19 telah berhasil menjaga perekonomian Indonesia dari risiko kontraksi yang lebih dalam. Kebijakan stimulus fiskal sebagai instrumen *countercyclical* dimanfaatkan untuk penanganan kesehatan serta program pemulihan ekonomi nasional yang menjadi motor utama dalam mendukung perbaikan pertumbuhan ekonomi yang dilanjutkan di dalam kebijakan APBN Tahun 2021.

Kebijakan pendapatan negara pada APBN Tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur, melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta peningkatan pelayanan PNPB kepada masyarakat. Di sisi lain, kebijakan belanja negara diarahkan untuk (1) melanjutkan penanganan kesehatan akibat COVID-19, utamanya melalui peningkatan supply side dan pengadaan vaksin, serta (2) melanjutkan program perlindungan sosial. Sementara itu, kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan untuk mendukung BUMN, BLU, dan Sovereign Wealth Fund; meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ultra mikro (UMi), dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); serta memberikan dukungan terhadap pendidikan melalui dana abadi pendidikan tinggi, penelitian, dan kebudayaan.

Dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi di tahun 2021, dialokasikan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp.699,4 triliun dalam beberapa klaster berikut: (1) penanganan sektor kesehatan, (2) perlindungan sosial, (3) dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, (4) insentif pajak dan usaha, serta (5) program prioritas.



Dalam perjalanannya, program PEN akan merespon secara fleksibel kebutuhan pendanaan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi termasuk melakukan pergeseran alokasi antar klaster. Dalam pelaksanaan APBN tahun 2021, Pemerintah akan senantiasa mengantisipasi kebutuhan dalam merespon perkembangan kasus COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian secara terukur dengan tetap menjaga tata kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang sangat besar terhadap perekonomian global yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi 3,3 persen di tahun 2020 yang merupakan angka terendah dalam 20 tahun terakhir. Tahun 2021 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Sinyal pemulihan ekonomi global dapat terlihat dimana beberapa negara sudah tumbuh positif di kuartal 1 2021, seperti Tiongkok, AS, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Selain itu, perdagangan global juga semakin membaik dengan *Purchasing Managers Index* (PMI) berada pada zona ekspansif serta permintaan barang mesin dan elektronik tumbuh tinggi. Indikasi pemulihan ekonomi global juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan. Stabilitasnya pasar keuangan global juga turut berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi dimana aliran modal ke negara-negara emerging market masih dalam tren positif.

Mulai pulihnya perekonomian global juga turut diikuti perbaikan ekonomi domestik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi, serta aktivitas perdagangan internasional. Manfaat stimulus fiskal dan peran penting APBN terus meningkat dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi. Sinyal pemulihan dalam negeri terlihat dari beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan positif, seperti indeks manufaktur, konsumsi listrik kelompok industri dan bisnis, kenaikan indeks keyakinan konsumen, serta penjualan kendaraan bermotor.

Program vaksinasi diharapkan dapat mendukung pengendalian pandemi sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Di berbagai negara, program vaksinasi COVID-19 terus diakselerasi untuk menurunkan tingkat penularan hingga tingkat kematian yang disebabkan COVID-19. Indonesia sudah memulai program vaksinasi COVID-19 secara resmi pada tanggal 13 Januari 2021 dimana Presiden Republik Indonesia menjadi penerima pertama vaksin tersebut. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, lebih dari 42,74 juta dosis vaksin COVID-19 telah berhasil didistribusikan dimana Indonesia menempati posisi ke-11 negara dengan jumlah pemberian dosis terbanyak. Selain percepatan program vaksinasi, pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat juga terus digencarkan dalam rangka pengendalian pandemi termasuk penerapan kebijakan pelarangan mudik lebaran pada tahun 2021.



Namun, risiko pandemi di tahun 2021 masih berpotensi meningkat terutama dengan potensi penyebaran yang lebih cepat dari varian baru COVID-19. Risiko pandemi ke depan perlu terus diwaspadai karena dapat menahan laju pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, ekspektasi pemulihan ekonomi tetap harus didukung dengan langkah responsif dan antisipatif penanganan pandemi melalui pelaksanaan vaksinasi yang lebih masif, serta penguatan tes, lacak, dan isolasi. Kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 5M juga harus ditingkatkan agar momentum pemulihan tetap dapat dilanjutkan.

APBN tetap menjadi instrumen utama dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi terlihat dari membaiknya indikator konsumsi, manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional. Pemulihan perekonomian global dan peningkatan harga komoditas dunia menjadi faktor pendukung membaiknya kinerja perekonomian nasional di semester I tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi nasional semester I tahun 2021 diperkirakan sudah berada dalam zona pertumbuhan positif.

Momentum pemulihan ekonomi pada semester I tahun 2021 tersebut membawa dampak positif terhadap pendapatan negara baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Pada semester I tahun 2021, realisasi pendapatan negara mampu tumbuh positif seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan kenaikan harga komoditas.

Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja positif sepanjang semester I terutama dipengaruhi oleh pemulihan aktivitas ekonomi terutama konsumsi dalam negeri serta peningkatan aktivitas perdagangan internasional. Tren pemulihan konsumsi masyarakat terus menguat sejalan dengan semakin membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut terefleksikan dalam peningkatan sektor pajak terutama di sektor industri pengolahan dan perdagangan. Sementara itu, meningkatnya aktivitas perdagangan internasional di Indonesia juga turut memberikan kontribusi positif penerimaan negara melalui sektor kepabeanan dan cukai. Di sisi lain, berbagai insentif perpajakan yang diberikan Pemerintah sejak tahun 2020 dalam mendukung dunia usaha tetap dilanjutkan pada tahun 2021 dan telah dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha.

Kinerja positif pada semester I juga ditunjukkan pada capaian PNBP utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas terutama harga minyak bumi, mineral dan batubara, serta perbaikan pada layanan Kementerian/Lembaga. Sementara itu, peningkatan pendapatan BLU didorong faktor kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar dunia.

Selanjutnya kinerja realisasi belanja negara pada semester I tahun 2021 mengalami peningkatan terutama untuk mendukung berbagai program penanganan kesehatan dampak pandemi, pelaksanaan vaksinasi, bantuan usaha mikro dan bantuan sosial. Peningkatan belanja negara tersebut dipengaruhi oleh akselerasi untuk mendukung pengendalian



COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional di tingkat pusat maupun daerah. Adapun realisasi PEN sampai dengan semester I tahun 2021 sebesar Rp.252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagunya sebesar Rp.699,4 triliun.

Strategi fiskal yang bersifat ekspansif dalam menjalankan kebijakan *countercyclical* dan membaiknya aktivitas ekonomi terlihat dalam realisasi pelaksanaan APBN sampai dengan semester I tahun 2021. Realisasi pendapatan negara mencapai sebesar Rp886,9 triliun dapat tumbuh 9,14 persen (yoy) atau mencapai 50,9 persen dari target APBN tahun 2021, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp1.170,1 triliun atau lebih tinggi 9,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit anggaran semester I tahun 2021 mencapai Rp283,2 triliun atau sebesar 1,72 persen terhadap PDB, meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Pembiayaan anggaran dilakukan sejalan dengan kebutuhan pembiayaan defisit dengan kombinasi sumber pembiayaan anggaran yang efisien.

Pemulihan ekonomi global diperkirakan akan terus berlanjut pada semester II tahun 2021, yang terlihat dari tren penguatan aktivitas manufaktur, peningkatan perdagangan global, dan tren kenaikan harga komoditas. Pemerintah akan melanjutkan tren perbaikan ekonomi dengan mengoptimalkan dukungan APBN tahun 2021 termasuk program PEN yang disertai upaya akselerasi program vaksinasi COVID-19 dan penegakan disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencapai *herd immunity*.

Proyeksi pemulihan ekonomi nasional perlu mewaspadai berbagai risiko yang akan muncul pada semester II tahun 2021 terutama pada peningkatan kasus COVID-19 dengan munculnya varian-varian baru yang lebih mudah menular sebagaimana telah terlihat dalam lonjakan kasus di akhir bulan Juni 2021. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk sebagian wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut diperkirakan berdampak pada tren pemulihan yang diperkirakan akan termoderasi terutama dengan tertahannya aktivitas masyarakat pada awal semester II, meskipun investasi dan aktivitas perdagangan internasional diharapkan masih dapat terjaga.

Tabel 3.1**Realisasi dan Asumsi Dasar Makro Ekonomi RAPBN 2021**

Indikator	2019 (Realisasi)	2020 (Realisasi)	2021 (Realisasi)
Pertumbuhan Ekonomi (% year on year)	4,97	-2,19	-0,74
Inflasi (%)	3,5	2,0-4,0	1,33
SPN 3 bulan (%)	5,3	4,5	6,59 (SBN 10y)
Kurs Rupiah (Rp/US\$)	14.400	14.577	14.299
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	70	40,4	62,5
Lifting Minyak (ribu barell per hari)	750	707	663
Lifting gas (ribu barell setara minyak per hari)	1.250	983	1077

Sumber: Kementerian Keuangan

Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan berada pada kisaran 3,7 - 4,5 persen dengan memperhatikan kondisi peningkatan kasus COVID-19 dan dampak penerapan PPKM darurat. Tren pemulihan diproyeksikan kembali membaik pada bulan Agustus sampai dengan akhir tahun. Namun demikian, jika penerapan PPKM darurat berlanjut maka pertumbuhan ekonomi cenderung berada pada batas bawah atau berpotensi lebih rendah meskipun masih berada pada zona positif. Stabilitas ekonomi nasional diproyeksikan tetap terkendali seiring dengan perkembangan pasar keuangan yang kondusif dan inflasi yang diperkirakan meningkat secara bertahap mengikuti peningkatan permintaan. Di sisi lain, tren membaiknya permintaan akan komoditas utama terutama minyak bumi, mineral dan batubara diperkirakan masih berlanjut meskipun di semester II relatif stabil dan cenderung melandai.

Berdasarkan proyeksi makro fiskal di atas, penerimaan pajak diproyeksikan tetap dapat tumbuh positif, namun diperkirakan lebih rendah dari targetnya karena faktor pemulihan ekonomi yang lebih lambat dan kebutuhan lanjutan pemberian insentif kepada



dunia usaha. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai secara keseluruhan tahun 2021 dapat mencapai di atas target terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan signifikan dari pajak perdagangan internasional dampak kenaikan harga komoditas meskipun pada semester kedua diperkirakan tidak setinggi penerimaan yang terjadi pada semester pertama. Sementara itu, PNBP khususnya yang berasal dari Sumber Daya Alam diproyeksikan akan melampaui targetnya dalam APBN tahun 2021 dengan memperhitungkan tren pergerakan harga komoditas terutama minyak bumi, mineral dan batubara yang masih berlanjut. Di sisi lain, proyeksi PNBP non-SDA terutama akan didorong oleh pendapatan BLU sawit dampak peningkatan harga CPO di tahun 2021.

Di sisi belanja negara akan diarahkan untuk mendukung kebijakan penanganan kesehatan diantaranya melalui program vaksinasi COVID-19 yang akan diakselerasi, pemenuhan anggaran untuk insentif/santunan tenaga kesehatan, serta klaim pasien COVID-19. Di sisi lain APBN juga akan mendukung kebutuhan pelaksanaan PPKM darurat termasuk kebutuhan tambahan belanja pada program PEN. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tersebut, maka dilakukan kebijakan realokasi dan *refocusing* belanja negara. Selanjutnya, kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga akan diarahkan untuk penanganan kesehatan di daerah melalui earmarking dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 khususnya mendukung pelaksanaan vaksinasi dan kebijakan PPKM di daerah.

Laju inflasi pada semester I tahun 2021 berada pada level yang rendah yang menandakan belum pulihnya aktivitas ekonomi seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19. Sampai dengan semester I tahun 2021, inflasi tercatat sebesar 0,74 persen (ytd) atau 1,33 persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,96 persen (yoy). Setelah melemah di triwulan I, inflasi bergerak sedikit meningkat di triwulan II tahun 2021 meskipun tetap di level yang rendah. Hal tersebut didorong oleh peningkatan inflasi komponen harga bergejolak (*volatile food*) dan inflasi inti yang masih naik secara terbatas seiring perayaan HBKN Ramadan dan Idul Fitri.

Pada awal tahun 2021, inflasi komponen inti masih mengalami pelemahan didorong oleh permintaan masyarakat secara umum yang terbatas. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan kebijakan pembatasan sosial menyebabkan dorongan konsumsi masyarakat masih cenderung terbatas. Hal ini menyebabkan inflasi inti melemah hingga mencapai 1,18 persen (yoy) pada April 2021. Selain itu, faktor melemahnya harga emas global dan pemberian insentif penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor tertentu juga mendorong terjadinya penurunan inflasi inti. Nilai tukar rupiah dan ekspektasi inflasi yang terjaga mendorong laju inflasi inti masih bergerak

relatif stabil. Meskipun begitu, tingkat kepercayaan masyarakat kembali mengalami peningkatan dipengaruhi oleh kasus COVID-19 harian yang mulai menunjukkan arah penurunan serta proses vaksinasi yang terus diakselerasi sehingga mendorong confidence masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Momentum Ramadan dan Idul Fitri menjadi waktu yang tepat untuk mendorong konsumsi masyarakat. Inflasi inti meningkat pada Juni 2021 mencapai 1,49 persen (yoy). Berbagai kebijakan Pemerintah diharapkan dapat menjadi daya ungkit, seperti pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan insentif lainnya. Hal ini berdampak pada kenaikan laju inflasi, terutama untuk kelompok komoditas barang tahan lama, sandang, dan keperluan rumah tangga, serta sebagian kelompok jasa. Hal ini menjadi sinyal positif seiring upaya Pemerintah dalam memulihkan perekonomian domestik di tengah dinamika pandemi.

Di tengah permintaan masyarakat yang masih tumbuh terbatas, laju inflasi pangan mengalami tren peningkatan pada Februari—Mei 2021 dan mencapai titik tertinggi di bulan Mei sebesar 3,66 (yoy). Namun, inflasi volatile food pada Juni 2021 mengalami penurunan hingga mencapai 1,60 persen (yoy). Tren harga pangan global yang meningkat seiring supply yang terbatas dan naiknya biaya logistik menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan harga pangan domestik. Selain itu, gangguan cuaca dan gelombang tinggi mendorong kenaikan harga aneka bumbu dan ikan segar yang cukup signifikan pada triwulan I. Meskipun sempat menurun pada Februari 2021 karena faktor panen raya padi dan melimpahnya stok daging ayam dan telur, laju inflasi komponen harga bergejolak kembali mengalami peningkatan pada Maret—Mei 2021 dan menunjukkan tren penurunan pada akhir triwulan II tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan permintaan pada masa Ramadan dan menjelang Idul Fitri di tengah supply beberapa komoditas pangan yang juga masih terbatas. Meskipun demikian, beberapa komoditas mengalami penurunan harga karena normalisasi permintaan bahan pangan pasca Lebaran serta masih berlanjutnya panen beberapa komoditas bahan pangan, seperti pada komoditas aneka bumbu dan beberapa jenis buah dan sayuran.

Setelah mengalami peningkatan di awal tahun 2021, komponen administered price kembali menunjukkan tren peningkatan di akhir semester I tahun 2021 yang mencapai 0,49 persen (yoy). Pada triwulan I, tekanan inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan harga rokok akibat naiknya cukai tembakau serta rasionalisasi tarif beberapa ruas jalan tol. Meskipun begitu, kenaikan tarif cukai tembakau masih ditransmisikan secara terbatas pada harga rokok eceran mengingat daya beli masyarakat yang masih lemah. Tarif transportasi mengalami tren meningkat menjelang Idul Fitri karena kenaikan permintaan seiring mulai naiknya mobilitas masyarakat antardaerah. Meskipun terdapat larangan mudik pada tahun ini, masyarakat cenderung melakukan perjalanan sebelum periode larangan. Pada Juni



2021, tarif transportasi kembali mengalami moderasi seiring dengan penurunan tarif angkutan udara, angkutan antarkota, dan kereta api. Untuk komoditas energi, Pemerintah menempuh kebijakan untuk tidak mengubah harga energi domestik strategis, seperti pada tarif listrik, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) LPG 3 kg sebagai dukungan untuk mendorong pemulihan aktivitas rumah tangga dan industri kecil. Permintaan BBM dan BBRT juga masih melemah akibat dampak pandemi COVID-19.

Pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2021 bergerak fluktuatif terutama dipengaruhi oleh perkembangan pandemi COVID-19 serta dinamika di pasar keuangan global. Nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif dan cenderung mengalami depresiasi pada semester I tahun 2021. Di bulan Januari dan Februari 2021 nilai tukar rupiah bergerak cukup stabil dengan rata-rata sebesar Rp14.062 dan Rp14.044 per dolar AS, atau mengalami apresiasi jika dibandingkan dengan akhir tahun 2020. Penguatan nilai tukar rupiah pada awal tahun 2021 ini dipengaruhi oleh meningkatnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik yang ditopang oleh dimulainya program vaksinasi dalam negeri. Selain itu, tren penurunan kasus harian COVID-19 di dalam negeri serta perbaikan indikator perekonomian dalam negeri, seperti inflasi yang terjaga, surplus neraca perdagangan, serta perbaikan kinerja neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2020, juga turut memberikan sentimen positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Namun, menjelang akhir bulan Februari 2021 nilai tukar mulai mengalami tekanan yang disebabkan sentimen kenaikan imbal hasil US Treasury akibat ekspektasi kenaikan inflasi di AS.

Pada bulan Maret, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang mencapai Rp14.572 per dolar AS (end of period) dan rata-rata bulan Maret adalah sebesar Rp14.417 atau secara rata-rata di triwulan I tahun 2021 sebesar Rp14.184 per dolar AS. Faktor utama yang memberikan tekanan nilai tukar rupiah di bulan Maret adalah keberlanjutan sentiment kenaikan imbal hasil US Treasury, sehingga mengakibatkan tekanan di pasar obligasi domestik. Hal ini mendorong terjadinya capital outflow pada pasar keuangan domestik sehingga menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah. Selain itu, risiko ketidakpastian global juga meningkat akibat kembali meluasnya pandemi COVID-19, terutama di negara-negara Eropa dan Asia, serta penemuan varian baru COVID-19 di beberapa negara seperti Inggris dan India.

Di akhir April, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ditutup pada level Rp14.468 per dolar AS (end of period) atau terapresiasi jika dibandingkan penutupan di bulan Maret. Apresiasi nilai tukar tersebut didorong oleh tingginya arus modal asing yang masuk di Indonesia di bulan April. Hal ini tidak terlepas dari hasil rating S&P yang masih mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook negative pada

masa pandemi ini, di tengah banyaknya negara di dunia yang mengalami downgrade peringkat rating. Hal ini menjadi katalis positif oleh pelaku pasar karena cukup membuat nyaman investor untuk berinvestasi di Indonesia, di tengah masih tingginya tekanan di masa pandemi akibat kenaikan kasus COVID-19 global, terutama di India sebagai episentrum utama penyebaran kasus COVID-19. Secara bulanan, nilai tukar rata-rata bulan April 2021 berada pada level Rp14.557 per dolar AS, atau masih mengalami depresiasi dibandingkan rata-rata bulan Maret 2021, terutama dipengaruhi oleh masih adanya sentimen kenaikan imbal hasil *US Treasury* pada awal bulan April.

Dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya untuk menempuh langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada bulan Mei 2021, nilai tukar rupiah kembali menguat hingga rata-rata mencapai Rp14.343 per dolar AS yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti mulai meredanya sentimen kenaikan imbal hasil *US Treasury*, terjadinya penurunan suku bunga kredit perbankan dalam negeri, serta optimisme terhadap pemulihan ekonomi global, terutama yang terjadi di AS dan Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Di awal bulan Juni 2021, nilai tukar rupiah sempat mengalami apresiasi melanjutkan tren penguatan di akhir bulan Mei 2021. Namun, pergerakan nilai tukar mulai mengalami tekanan pada pertengahan bulan Juni hingga akhir Juni 2021, terutama dipicu oleh kekhawatiran investor terhadap sejumlah rilis data ketenagakerjaan, ekspektasi inflasi AS serta indikasi percepatan kenaikan suku bunga oleh *The Fed* di tahun 2023. Dari dalam negeri, lonjakan kasus COVID-19 domestik turut mewarnai pergerakan nilai tukar rupiah sehingga nilai tukar rupiah di akhir Juni 2021 ditutup pada level Rp14.496 per dolar AS. Namun, di tengah berbagai tekanan tersebut, investor asing masih mampu membukukan neto arus modal masuk di pasar keuangan domestik sehingga hal ini mampu menopang pergerakan nilai tukar rupiah. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah di bulan Juni berada pada level Rp14.340 per dolar AS atau masih relatif stabil dibandingkan rata-rata bulan Mei 2021.

Kenaikan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sejak pertengahan tahun 2020 terus berlanjut pada awal tahun 2021. Hal ini seiring dengan pelonggaran likuiditas global dan pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju, terutama dalam merespon dampak pandemi COVID-19. Faktor stabilitas pasar keuangan global dan domestik serta pengelolaan dan kinerja fiskal yang kuat mampu mendorong suku bunga SBN 10 tahun yang cukup rendah hingga rata-rata mencapai 6,17 persen pada



Januari 2021. Meskipun demikian, kondisi pasar keuangan yang cukup stabil di awal tahun 2021 masih menghadapi tantangan berupa faktor ketidakpastian yang masih cukup tinggi seperti ancaman gelombang kedua peningkatan kasus COVID-19. Hal ini akan berdampak terhadap proses pemulihan ekonomi global sehingga memengaruhi persepsi investor untuk beralih dari aset-aset yang berisiko tinggi.

Pada bulan Februari dan Maret 2021, tingkat suku bunga SBN 10 tahun mulai mengalami peningkatan didorong oleh faktor sentimen investor terhadap proses pemulihan ekonomi AS. Tekanan di pasar SBN domestik dipengaruhi oleh meningkatnya imbal hasil US Treasury 10 tahun yang mencatatkan nilai tertingginya dalam 10 tahun terakhir. Kenaikan tersebut terutama akibat membaiknya ekspektasi perekonomian AS yang didorong oleh pelebaran defisit fiskal AS, serta ekspektasi cepatnya kenaikan inflasi setelah disetujuinya stimulus fiskal sebesar US\$1,9 triliun.

Di sisi lain, beberapa faktor masih dapat memberikan sentimen positif yang dapat menahan pelemahan pasar finansial domestik lebih lanjut seperti (1) pemberian afikasi sovereign rating Indonesia oleh lembaga rating seperti Fitch yang memberikan rating dengan level BBB outlook stable, sehingga meningkatkan optimisme investor terhadap prospek perekonomian Indonesia ke depan; (2) keputusan The Fed yang masih menahan suku bunga acuan di level 0,00—0,25 persen, serta (3) langkah Bank Indonesia yang juga mempertahankan suku bunga acuannya pada level 3,50 persen. Mulai turunnya imbal hasil US Treasury pada bulan April 2021 memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja pasar keuangan domestik khususnya pasar SBN, sehingga terjadi penurunan yield SBN 10 tahun. Sampai dengan akhir Juni 2021 suku bunga SBN 10 tahun berada di level 6,59 persen (eop), sedangkan rata-rata yield SBN 10 tahun periode semester I tahun 2021 adalah sebesar 6,45 persen, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 7,29 persen.

Harga minyak mentah dunia mengalami peningkatan sejak kuartal keempat tahun 2020 dan mencapai rata-rata US\$43,2 per barel (Brent) sepanjang tahun 2020. Rata-rata harga minyak mentah dunia pada bulan Januari 2021 mencapai US\$55,3 per barel (Brent) dan terus meningkat hingga mencapai US\$65,7 per barel (Brent) pada bulan Maret 2021. Kenaikan harga minyak mentah dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan minyak dunia seiring dengan pulihnya aktivitas perekonomian global yang didukung program vaksinasi COVID-19 di sejumlah negara. Selain itu, terdapat optimisme pasar terhadap pelantikan Presiden AS di mana pemerintahan baru diharapkan dapat memberikan tambahan stimulus ekonomi untuk meningkatkan perekonomian AS. Penurunan stok minyak mentah AS juga turut memicu meningkatnya permintaan minyak yang cukup besar dari negara tersebut. Di

lain sisi, kesepakatan OPEC+ untuk melakukan pemotongan produksi sejak bulan Januari 2021 sebesar 7,2 juta barel per hari menyebabkan terjadinya penurunan suplai pasokan minyak mentah dunia yang berdampak pada peningkatan harga minyak mentah.

Pada bulan April 2021, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya didorong oleh peningkatan produksi minyak mentah dunia. Hal ini dikarenakan keputusan peningkatan produksi dari negara-negara OPEC+, di mana pada pertemuan 1 April 2021 telah menyepakati kenaikan produksi selama bulan Mei hingga Juli 2021. Selain itu, kebijakan Arab Saudi yang berencana untuk menghapus kebijakan tambahan pemotongan produksi juga berpotensi meningkatkan suplai minyak mentah dunia. Di lain sisi, penurunan harga minyak dipengaruhi oleh peningkatan kasus COVID-19 yang memengaruhi penurunan permintaan di negara konsumen utama minyak dunia, yaitu Brazil dan Uni Eropa. Sejalan dengan itu, di Kawasan Asia Pasifik juga mengalami tren yang sama dengan negara-negara lain di mana peningkatan kasus COVID-19 seperti di India, Jepang, Thailand, dan Filipina menyebabkan pengetatan lanjutan.

Harga minyak mentah dunia kembali meningkat di bulan Mei 2021 yang didorong oleh peningkatan permintaan minyak mentah dunia. Tren positif ini merupakan dampak dari perkembangan vaksinasi di AS dan Eropa yang menyebabkan restriksi diperlonggar. Kenaikan permintaan minyak global, terutama oleh Tiongkok dan Amerika Serikat juga mendorong harga meningkat. Mulai pulihnya aktivitas industri, penerbangan, dan obilitas masyarakat mendorong harga semakin meningkat di tengah produksi yang masih melakukan penyesuaian sebagai dampak investasi perusahaan minyak yang masih rendah. Namun, aktivitas rig secara global mulai meningkat seiring langkah negara produsen minyak untuk memperbaiki penerimaan dari hasil minyak. Faktor-faktor dari sisi permintaan dan penawaran tersebut berdampak pada pergerakan harga minyak mentah sepanjang semester I tahun 2021 yang cukup fluktuatif dan dibayangi risiko ketidakpastian. Pemulihan permintaan minyak mentah juga masih bergerak di tengah dinamika pandemi COVID-19 secara global. Sepanjang semester I tahun 2021, rata-rata harga minyak mentah utama dunia *Brent dan West Texas Intermediate* (WTI) masing-masing sebesar US\$65,1 per barel dan US\$62,0 per barel.

Sejalan dengan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada Januari 2021 berada di level US\$53,2 per barel, lebih rendah dibandingkan ICP Januari 2020 yang berada pada level US\$65,4 per barel. Selanjutnya, ICP kembali meningkat pada Februari 2021 hingga mencapai US\$60,4 per barel, lebih tinggi dibandingkan ICP Februari 2020 sebesar US\$56,6 per barel. Pada Maret 2021 ICP semakin meningkat menjadi US\$63,5 per barel, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ICP Maret 2020 saat penyebaran COVID-19 mulai meluas di Indonesia yaitu



sebesar US\$34,2 per barel. Pada April 2021, seiring dengan penurunan harga minyak mentah dunia, ICP juga mengalami sedikit penurunan menjadi US\$62,0 per barel. Seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah internasional, ICP di bulan Mei mengalami peningkatan menjadi US\$65,5 per barel dan kembali meningkat di bulan Juni pada level US\$70,2 per barel. Dengan kondisi harga minyak yang cenderung meningkat, rata-rata ICP pada semester I tahun 2021 mencapai US\$62,5 per barel, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata ICP pada semester I tahun 2020 sebesar US\$39,8 per barel.

Realisasi lifting minyak bumi Januari hingga Mei 2021 mencapai rata-rata sebesar 663 ribu barel per hari (rbph) dengan kecenderungan fluktuatif dengan tren menurun atau masih berada di bawah target APBN 705 rbph. Pada Januari 2021 lifting minyak bumi mencapai 645 rbph kemudian meningkat menjadi 673 rbph pada Februari 2021. Pada Maret 2021, lifting minyak kembali meningkat menjadi 710 rbph kemudian menurun pada bulan April 2021 pada level 643 rbph dan kembali turun pada bulan Mei 2021 sebanyak 642 rbph.

Di lain sisi, lifting gas bumi mencapai 1.114 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) pada bulan Januari 2021 kemudian mengalami penurunan menjadi 1.003 rbsmph pada Februari 2021. Pada Maret lifting gas sempat meningkat menjadi 1.041 rbsmph, namun kembali turun pada bulan April dan bulan Mei 2021 yaitu masing-masing mencapai 964 dan 910 rbsmph. Secara rata-rata lifting gas bumi sampai dengan bulan Mei mencapai 1.007 rbsmph.

Kinerja lifting minyak dan gas bumi sampai dengan bulan Mei terutama dipengaruhi oleh terjadinya keterlambatan eksekusi beberapa kegiatan pengeboran yang disertai dengan terjadinya *unplanned shutdown* serta mundurnya *onstream* beberapa lapangan. Hal ini mengakibatkan kinerja awal (entry point) beberapa sumur produksi yang rendah pada paruh pertama tahun 2021.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.

Struktur ekonomi mencerminkan peranan lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB, juga menggambarkan sektor-sektor unggulan yang menggerakkan perekonomian dalam satu wilayah. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Struktur ekonomi yang berasal dari nilai tambah masing-masing lapangan usaha merupakan gambaran dari seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi setiap lapangan usaha.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitong Timur (2019), selama lima tahun terakhir (2015-2019), struktur perekonomian kabupaten Belitong Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;

Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Konstruksi.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur (2019) menyebutkan bahwa distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 23,98 persen. Selanjutnya kategori lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,81 persen, disusul oleh kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,08 persen, kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,78 persen, dan yang terakhir kategori Konstruksi sebesar 8,57 persen.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi dan nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Arah kebijakan perekonomian di tahun 2021 juga disusun dengan memperhatikan arahan pada RPJMD-P tahun 2016-2021. Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Belitung Timur di tahun 2021 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global, termasuk dampak dari mewabahnya COVID-19. Dan diperkirakan perekonomian Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan akan menurun seiring dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Perekonomian Daerah Kabupaten Belitung Timur tidak dapat terlepas dengan kondisi perekonomian regional, nasional dan global. Faktor-faktor yang menunjang perekonomian daerah terdiri dari faktor yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah. Kebijakan dari pemerintah pusat yang terkait dengan sektor moneter dan sektor riil serta pengaruh kondisi perekonomian global akan berdampak pada kondisi perekonomian daerah. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah memunculkan berbagai keputusan-keputusan yang memiliki dampak ekonomi sebagai berikut :

1. Lesunya aktivitas ekonomi

Lesunya aktivitas ekonomi disebabkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi COVID-19, sehingga produksi menjadi terhambat akibat menurunnya permintaan dan sirkulasi tenaga kerja yang terbatas. Di Kabupaten Belitung Timur Sebagian besar masyarakat masih bergantung dengan pertambangan timah, walaupun harga komoditas unggulan biji timah di Belitung Timur mengalami peningkatan, namun produksi timah mengalami penurunan, Sementara itu, kurs mata uang rupiah juga terkoreksi pada angka di atas Rp. 14.000,-. Menurut beberapa sumber, pemulihan ekonomi akibat COVID-19 akan memakan waktu sampai dengan tahun 2022.



2. Meningkatnya angka pengangguran

Lesunya aktivitas ekonomi memiliki dampak ikutan lainnya seperti peningkatan angka pengangguran. Pekerja pada sektor wisata, perdagangan dan sektor lainnya mengalami kelesuan akibat rendahnya potensi pasar nasional dan daerah, sehingga kelesuan tersebut berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran.

3. Meningkatnya angka kemiskinan

Keputusan-keputusan pelaksanaan COVID-19 atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperkirakan akan sangat memukul rumah tangga rentan dan rumah tangga miskin akibat terbatasnya akses ke sumber pendapatan pada saat pandemi COVID-19 ini.

4. Meningkatnya angka kriminalitas

Peningkatan angka pengangguran akan berkontribusi dalam peningkatan angka kriminalitas dengan dalih pemenuhan kebutuhan pangan.

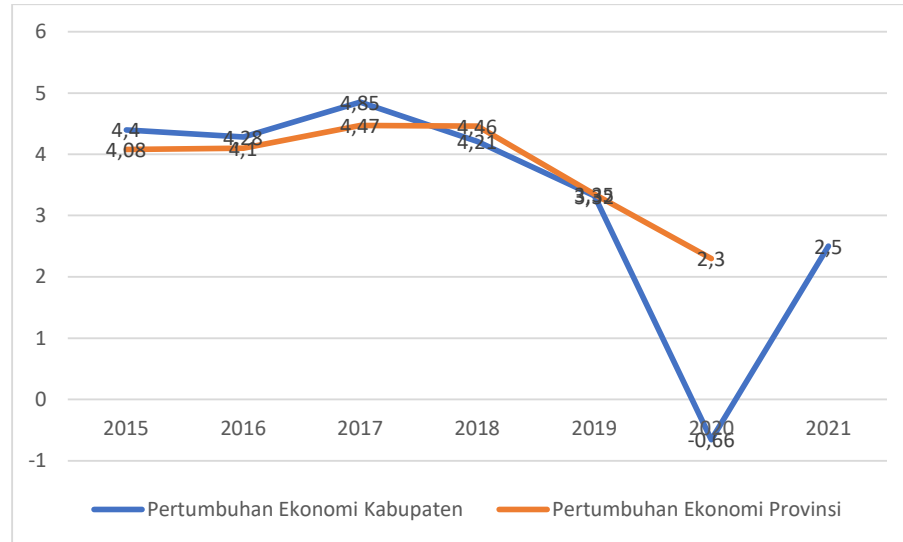
5. Meningkatnya inflasi

Salah satu penyebab utama inflasi di Kabupaten Belitung Timur adalah distribusi barang dan jasa. Adanya pembatasan mobilisasi barang dan jasa dari produsen ke konsumen diperkirakan akan menambah dorongan terjadinya inflasi.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2021 masih dibayangi risiko perlambatan akibat penyebaran COVID-19 dan hal ini menyebabkan terganggunya kinerja beberapa sektor seperti industri pengolahan logam timah, CPO, perikanan tangkap, serta pariwisata. Pemerintah daerah telah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan diperkirakan akan efektif tersalurkan pada semester II 2021. sehingga diperkirakan belanja pemerintah akan meningkat. Namun demikian pendapatan pemerintah daerah diperkirakan menurun terutama dari PAD sehingga akan menahan laju pertumbuhan belanja pemerintah daerah lebih lanjut .

Gambar 3.1

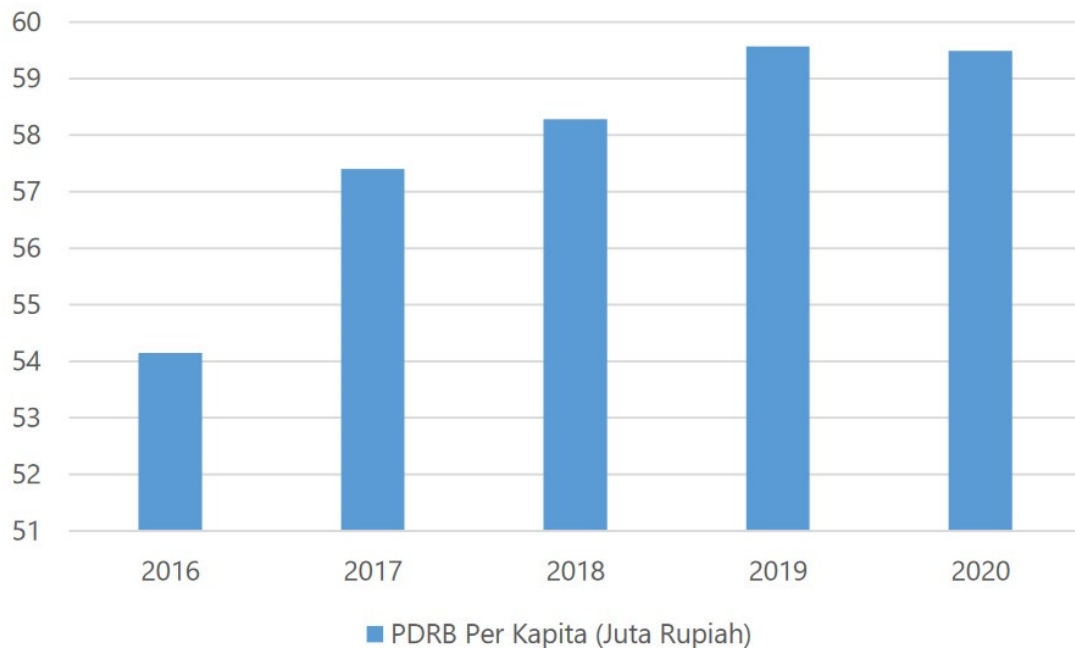
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen) Tahun 2015-2020
dan estimasi 2021**



Sumber : Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, BPS Babel - diolah

Kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan, dari 54,15 juta rupiah (2016) menjadi 59,57 juta rupiah (2019). Namun, pada tahun 2020 menurun menjadi 59,49 juta rupiah. Penurunan tersebut berkaitan dengan pandemi yang terjadi pada tahun tersebut.

Gambar 3.2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2016-2020



Tabel 3.2
Nilai dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pada PDRB Atas Dasar Atas
Harga Konstan (juta rupiah) Tahun 2016-2020

NO	SEKTOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	1.231.901,60	1.235.665,40	1.281.838,80	1.326.420,70	1.403.662,50
2	Pertambangan & Penggalan	908.899,20	980.436,20	982.415,60	975.812,50	961.916,40
3	Industri Pengolahan	930.183,10	1.018.538,90	1.060.917,40	1.090.445,30	1.085.072,70
4	Pengadaan Listrik, Gas	2.637,70	2.786,30	1.932,40	3.515,30	3.607,50
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	876,40	916,50	961,70	1.014,00	1.005,60
6	Konstruksi	376.512,10	380.095,30	396.340,40	416.598,90	401.661,20
7	Perdagangan Besar, Eceran,	494.900,30	530.403,10	565.876,80	578.434,30	527.652,50



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Belitung Timur

2021

NO	SEKTOR	2016	2017	2018	2019	2020
	Reparasi Mobil & Sepeda Motor					
8	Transportasi & Pergudangan	91.974,90	98.230,60	106.251,90	113.606,40	104.113,50
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	112.353,40	117.560,10	120.850,00	129.455,60	124.962,60
10	Informasi & Komunikasi	62.886,40	64.547,00	72.621,60	79.672,20	87.736,00
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	22.145,40	22.439,60	22.828,90	23.583,20	24.012,20
12	Real Estate	135.193,00	137.364,20	149.814,70	156.511,40	160.125,10
13	Jasa Perusahaan	13.778,70	13.982,00	15.559,70	16.160,30	14.218,30
14	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	292.317,50	295.920,00	317.345,80	341.771,10	322.547,50
15	Jasa Pendidikan	110.818,70	119.534,50	129.854,10	139.121,20	135.217,20
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	61.621,60	65.998,80	71.560,90	78.293,90	79.093,90
17	Jasa Lainnya	24.876,20	25.820,10	28.144,90	31.073,40	28.536,90
PDRB		4.873.876,20	5.110.238,60	5.325.115,60	5.501.489,70	5.465.141,60

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, 2020

Hampir semua sektor lapangan kerja di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan kinerja (kontraksi), tak terkecuali sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Berkurangnya operasional pabrik-pabrik di Jawa maupun daerah lain yang membutuhkan timah sebagai bahan baku juga berpengaruh terhadap berkurangnya permintaan timah dari Kabupaten Belitung Timur. Fenomena ini jelas mengganggu keberlangsungan aktivitas pertambangan dan industri pengolahan yang juga disertai penurunan harga timah dunia.

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020 dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi 10,12 persen dan diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5,82 persen. Sementara empat kategori usaha lain yang mengalami pertumbuhan meskipun rendah adalah pengadaan listrik dan gas; jasa keuangan asuransi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta real estate.

Mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah secara periodik. Indikator dimaksud adalah nilai tukar dan inflasi.



Perkembangan Nilai Tukar 7 –11 Juni 2021 rupiah menguat menjadi Rp 14.200 per dolar AS menguat 45 poin pada hari sebelumnya.

Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu II Juni 2021, perkembangan harga pada minggu II Juni 2021 masih relatif terkendali dan diperkirakan deflasi 0,09% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Juni 2021 secara tahun kalender sebesar 0,81% (ytd), dan secara tahunan sebesar 1,40% (yoy). Penyumbang utama deflasi Juni 2021 sampai dengan minggu kedua yaitu komoditas daging ayam ras dan cabai merah masing-masing sebesar -0,09% (mtm), tarif angkutan antarkota -0,06% (mtm), cabai rawit -0,04% (mtm), bawang merah -0,02% (mtm), kelapa, tomat dan daging sapi masing-masing sebesar -0,01% (mtm). Sementara itu, beberapa komoditas mengalami inflasi, antara lain telur ayam ras sebesar 0,04% (mtm) emas perhiasan sebesar 0,03% (mtm) minyak goreng, sawi hijau, kacang panjang, nasi dengan lauk dan rokok kretek filter masing-masing sebesar 0,01% (mtm).

Data dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bangka Belitung dan Badan Pusat Statistik (BPS) Babel menggambarkan pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung tercatat positif. Pertumbuhannya ada di angka 0,97 persen (dalam y-on-y) pada Triwulan I Tahun 2021 dan itu membuktikan kepiawaian Gubernur Erzaldi memutar otak agar perekonomian masyarakatnya tak lesu darah di masa pandemi.

Bahkan, data menampilkan perbandingan dengan pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera Triwulan I-2021. Luar biasanya, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung merupakan yang tertinggi (dalam y-on-y).

Jika dilihat secara umum, seluruh sektor unggulan di Bangka Belitung mengalami perbaikan. Berdasarkan data BPS diketahui PDRB pada sektor pertambangan dan penggalan yakni sebesar 21,02 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 19,75 persen; dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,90 persen.

Membaiknya kinerja sektor pertambangan dan pengolahan logam timah didorong oleh meningkatnya harga komoditas yang cukup signifikan akibat peningkatan permintaan di tengah 'penyembuhan' perekonomian global.

Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) April 2021 sebesar 124,50 atau naik 2,15 persen dibandingkan Maret 2021. Sedangkan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) April 2021 sebesar 124,94 atau naik 2,06 persen dibandingkan NTUP Maret 2021.

Kenaikan dua indikator kesejahteraan petani tersebut turut didorong oleh kenaikan harga beberapa komoditas unggulan di tingkat petani. Hal ini tentu saja membuat petani



Babel lega. Petani yang dulunya membiarkan lahannya terbengkalai kini mulai bersemangat. Apalagi harga komoditi pertanian seperti karet, sawit, dan lada semakin membaik. Harga lada misalnya, kini menyentuh harga Rp95 ribu. Kenaikan harga komoditas tersebut membuat tingkat konsumsi masyarakat perlahan membaik.

Kinerja pemerintah dan instansi lain dalam menangani penyebaran COVID-19 membuat pergerakan masyarakat mulai meningkat. Lapangan usaha mulai melakukan aktivitasnya.

Sedangkan pada ekspor barang dan jasa tercatat tumbuh sebesar 0,95 persen (y-on-y), lebih baik setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,63 persen (y-on-y). Peningkatan ekspor barang dan jasa didorong oleh peningkatan harga komoditas unggulan Babel, seperti timah, CPO, dan lada. Meskipun secara volume cenderung sama dengan tahun sebelumnya.

Pada bulan Juni 2021, Manggar mengalami inflasi sebesar 1,17 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,71 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2021 terhadap Juni 2020) sebesar 3,70 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,73 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,15 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,28 persen; kelompok transportasi sebesar 0,64 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,52 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,15 persen. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga pada bulan Juni 2021 di Manggar antara lain ikan kerisi, ikan ekor kuning, kangkung, bayam, tahu mentah, ikan tongkol, sawi hijau, udang basah, tempe, telur ayam ras, rokok kretek filter, terong, ban dalam motor, ikan tenggiri, ketimun, seng, ban luar motor, kacang panjang, daging sapi, sapu, terasi udang, jeruk, pensil hitam, emas perhiasan, rokok putih, minyak goreng, susu kental manis, sawi putih, penyedap masakan/vetsin, susu bubuk, wortel, pir, tepung terigu, dan tomat.

Komoditas yang mengalami penurunan harga pada bulan Juni 2021 di Manggar antara lain ikan bulat, cabai merah, beras, cabai rawit, bawang merah, kelapa, melon, minuman ringan, bawang putih, daging ayam ras, kol putih, ayam hidup, cumi-cumi.

Indeks Gini merupakan suatu ukuran umum untuk menunjukkan seberapa merata pendapatan atau kekayaan yang didistribusikan dalam suatu daerah secara menyeluruh.



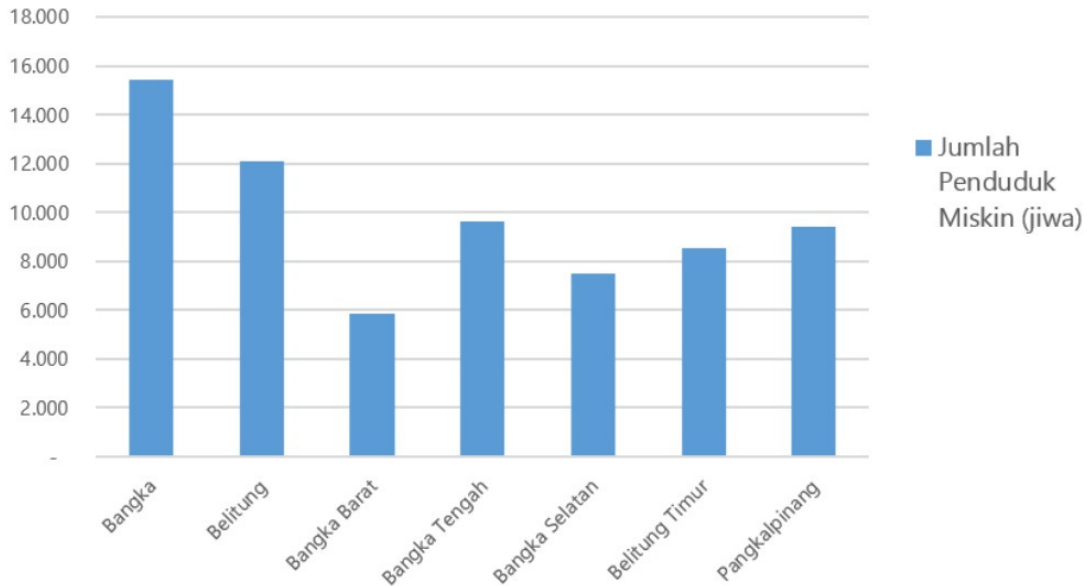
Indeks Gini memiliki nilai berkisar antara 0 sampai 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan tingkat distribusi yang sangat merata, sedangkan koefisien gini bernilai 1 menunjukkan distribusi yang sangat tidak merata atau ketimpangan yang terjadi secara sempurna. Capaian Indeks Gini Kabupaten Belitung Timur diasumsikan tidak berbeda jauh dengan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,270 dan meningkat menjadi 0,276 pada tahun 2020, atau $<0,3$ yang berarti masih masuk dalam kriteria ketimpangan rendah.

Kemiskinan adalah isu yang kompleks dan multidimensional, karena banyaknya pendekatan yang dilakukan terhadap kondisi yang disebut miskin, maka banyak definisi tentang kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2000), pada umumnya definisi kemiskinan mengacu kepada ide dasar bahwa kemiskinan adalah masalah “kekurangan” dalam “kesejahteraan”. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu situasi dengan suatu standar kehidupan yang “layak” tidak tercapai. Dalam menentukan standar kehidupan “layak”, BPS melakukan pengukuran kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

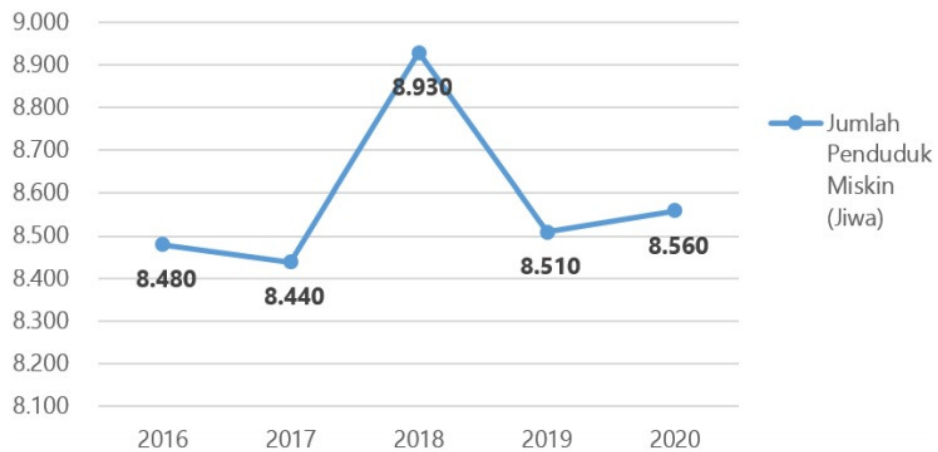
Dengan pendekatan ini kemudian ditentukan Garis Kemiskinan (yang merupakan gabungan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan), penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan penduduk miskin. Cara penentuan penduduk miskin semacam ini disebut penentuan kemiskinan absolut.

Kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur menempati urutan tertinggi kelima di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adanya pandemi COVID-19 juga memberikan dampak besar berkaitan dengan kemiskinan penduduk yaitu berhentinya aktivitas perekonomian masyarakat dan pendapatan yang menurun. Garis kemiskinan pada tahun 2020 sebesar Rp725.395,00 berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp721.455,00. Capaian ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sebesar Rp684.277,00 karena beberapa faktor salah satunya pola konsumsi masyarakat yang terus meningkat terhadap beberapa jenis komoditas makanan sedangkan suplai/produksi yang berkurang karena pandemi maupun kondisi cuaca. Di sisi lain, perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung fluktuatif. Tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 8.930 jiwa atau bertambah 490 jiwa dibanding tahun 2017, kemudian turun menjadi 8.510 pada tahun 2019 dan kembali naik pada tahun 2020 sebesar 8.560 jiwa atau bertambah 50 orang yang terkategori sebagai penduduk miskin.

Gambar 3.3
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bangka Belitung



Gambar 3.4
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Belitung Timur



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 3.3

Penyesuaian Asumsi Angka Kemiskinan Akibat Pandemi COVID-19 Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGKA KEMISKINAN SEBELUM COVID	ANGKA KEMISKINAN SETELAH COVID
1	Nasional	9,22%	12,37%
2	Provinsi Kep. Bangka Belitung	3,50%	3,53%
3	Kabupaten Belitung Timur	6,60%	6,90%-7,06%

Sumber : Bappelitbangda Prov. Kep. Bangka Belitung dan Bappelitbangda Kab. Belitung Timur tahun 2020

Sejalan dengan laju pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung triwulan II-2020 dibandingkan triwulan II-2019 yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 4,98 persen, turun bila dibandingkan capaian triwulan II-2019 yang tumbuh sebesar 3,45 persen, diperkirakan angka kemiskinan pada tahun 2020 akan mengalami peningkatan yaitu antara sebesar 6,90 -7,06 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 6,60 persen. Dimana Asumsi angka kemiskinan Provinsi dan Kabupaten pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebagaimana tabel diatas. Kondisi ini terjadi akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi banyak sektor ekonomi yang mengalami kontraksi. Upaya penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-program pemerintah pasca pandemi dalam penanggulangan masalah kemiskinan diharapkan dapat mengatasi pengentasan kemiskinan.

Guncangan ekonomi makro ini menyebabkan penurunan rata-rata pengeluaran per kapita di tingkat rumah tangga. Kemudian dampak lanjutannya adalah penurunan pengeluaran rumah tangga per kapita yang akan menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia khususnya di Belitung Timur, karena Kemiskinan di Indonesia diukur berdasarkan pengeluaran rumah tangga (Garis Kemiskinan). Garis Kemiskinan di Belitung Timur terus meningkat setiap tahun. Garis kemiskinan pada tahun 2019 sebesar Rp 684.277 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 622.396. Hasil analisis terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Belitung Timur didapatkan bahwa sebagian besar masyarakat miskin Belitung Timur bekerja di lapangan pekerjaan Pertanian perkebunan, pertambangan dan penggalian dan perikanan tangkap. Sementara penduduk yang bekerja di ketiga sektor ini banyak yang berstatus sebagai buruh. Penduduk yang bekerja sebagai buruh memiliki pendapatan relatif tetap dan atau sesuai UMP, namun ketika terjadi kenaikan harga barang menyebabkan Garis kemiskinan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan di Belitung Timur juga meningkat. Sementara pekerja di sektor

pertambangan dan nelayan juga bergantung pada cuaca, ketika cuaca kurang baik maka menyebabkan mereka tidak bisa bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin besar angka TPT di suatu daerah mengindikasikan terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Semakin tinggi angka TPAK mengindikasikan semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang aktif secara ekonomi.

Gambar 3.5

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi angkatan Kerja Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Perkembangan TPT dan TPAK Kabupaten Belitong Timur selama tahun 2016- 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, TPT Kabupaten Belitong Timur adalah sebesar 2,29 persen, dan pada tahun 2020 menjadi 3,93 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2020 semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja. Sementara itu, untuk TPAK Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2016 adalah sebesar 68,52, dan pada tahun 2020 menjadi 71,33. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tenaga kerja yang aktif secara ekonomi.

Tabel 3.4

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi angkatan Kerja Kabupaten

NO	URAIAN	SEBELUM COVID	SETELAH COVID
1	TPT Kabupaten Belitong Timur	1,59%	2,00%-2,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020



Angka pengangguran diperkirakan akan naik seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur. Kondisi ini disebabkan adanya pandemi COVID 19 yang mengakibatkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga daya beli masyarakat menurun dan berimbas kepada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Memperhatikan kondisi tersebut dan kebijakan pasca pandemi COVID 19 maka tahun 2021 diproyeksikan TPT sebesar 2,0 persen – 2,02 persen sebagaimana tabel diatas meningkat dari proyeksi sebelum COVID-19.

Menurut laporan ILO (2020), sektor yang terkena dampak dengan skala sedang adalah sektor konstruksi; keuangan dan asuransi; pertambangan. Sementara yang terdampak sedang-tinggi akibat COVID-19 adalah sektor seni, hiburan, rekreasi dan layanan lainnya; transportasi dan komunikasi. Sektor yang terdampak tinggi adalah jasa akomodasi dan makanan, perumahan; kegiatan bisnis dan administrasi, manufaktur, dan sektor terakhir adalah perdagangan grosir dan ritel; perbaikan kendaraan bermotor dan motor. Jumlah pengangguran di Kab Belitung Timur berdasarkan data publikasi oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2020 sebesar 3,93% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang diperkirakan masih mampu menyerap tenaga kerja berasal dari salah satu sektor primer yaitu sektor pertanian, Kehutanan, perikanan. Sebagian besar pekerja di sektor tersebut sebagai buruh dan berusaha sendiri. Wabah COVID-19 tidak akan terlalu mempengaruhi sektor tersebut, karena sektor tersebut terkena dampak skala rendah akibat COVID-19.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Kebijakan ekonomi Kabupaten Belitung Timur disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi dan Nasional yang bersifat dinamis serta memperhatikan dinamika perekonomian ekonomi global beberapa triwulan terakhir. Arah kebijakan perekonomian di tahun 2021 juga disusun dengan memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2021. Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Belitung Timur di tahun 2021 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global yang berdampak pandemi *COVID-19*. Kondisi perekonomian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 diproyeksikan akan tetap tumbuh melambat dengan asumsi berkurangnya pandemi *COVID-19* atau Belitung Timur menuju zona hijau pada pandemi *COVID-19*, yang antara lain didukung oleh kebijakan peningkatan kapasitas UMKM, komoditas lokal, peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan ekspor non migas yang secara gradual diperkirakan didukung oleh ekspor komoditas perkebunan seperti CPO, karet, lada dan timah yang harganya diharapkan akan membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya permintaan akan komoditas ekspor.

Dengan harapan ekonomi nasional, regional dan lokal akan tumbuh, maka diproyeksikan sumber-sumber ekonomi akan membawa dampak dalam menopang target perencanaan pendapatan daerah. Semakin tinggi penerimaan pemerintah pusat maka akan berpengaruh terhadap potensi naiknya penerimaan dana perimbangan/ transfer dari pemerintah pusat dan sebaliknya. Semakin tinggi penerimaan provinsi maka akan semakin berpengaruh terhadap potensi naiknya dana bagi hasil bagi provinsi. Selanjutnya, semakin tumbuhnya dunia usaha dan semakin membaiknya pelayanan pemerintah daerah diharapkan mampu mendukung tercapainya target Pendapatan Asli Daerah.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan terpenuhinya target pendapatan 2021. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah daerah telah berupaya untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Intensifikasi berkaitan dengan usaha untuk melakukan pungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Kegiatan ekstensifikasi diantaranya dialukan dengan cara memperbaiki data perpajakan dengan melakukan pendataan ulang dan pendataan baru bagi pembayar pajak dan retribusi daerah; dan melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak/retribusi daerah.



Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk memenuhi target PAD diantara lain melalui:

- a. melakukan pendataan dan pemutakhiran objek dan wajib pajak serta objek dan wajib retribusi daerah guna memperoleh data perpajakan yang terbaru;
- b. mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- c. melaksanakan perbaikan sistem pelayanan dan penyederhanaan mekanisme perpajakan daerah;
- d. meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah untuk menuju pelayanan prima;
- e. memperbaiki fasilitas-fasilitas obyek retribusi melalui berbagai perbaikan infrastruktur pendukung obyek retribusi;
- f. melakukan penyesuaian tarif retribusi melalui peninjauan terhadap Peraturan Daerah dan peraturan bupati secara berkala.
- g. memperbaiki kinerja dan efisiensi manajemen pada badan usaha milik daerah melalui pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap BUMD;
- h. melaksanakan optimalisasi anggaran melalui pengaturan anggaran (*Cash Budgeting*) agar tercapai efisiensi dan efektivitas anggaran dengan tetap menjaga likuiditas keuangan;
- i. Melakukan optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya untuk mendorong peningkatan penerimaan dari BLUD dan pendapatan kapitasi.

Kebijakan yang dilakukan dalam kaitannya memperoleh Dana Perimbangan yaitu sebagai berikut.

- a. Optimalisasi usulan melalui DAK kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait.
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama kepada instansi pemerintah pusat dalam rangka upaya untuk peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus.

Kebijakan yang dilakukan dalam kaitannya meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai melalui hibah dari pemerintah;



- b. Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi;
- c. Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk meraih bantuan keuangan dari Provinsi.

4.2 Perubahan target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada Perubahan APBD tahun anggaran Anggaran 2021 yang akan datang, pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp. 849.115.226.849 atau mengalami penurunan sebesar Rp.(3.987.845.582) atau (0,46)% dari APBD tahun anggaran anggaran 2021 sebesar Rp.853.103.072.431. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp.114.456.992.053 atau mengalami Peningkatan sebesar Rp. 1.201.801.783 atau 1,06% dari APBD tahun anggaran anggaran 2021 sebesar Rp.113.255.190.270. Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp. 711.767.265.440 atau mengalami penurunan sebesar Rp.(11.179.966.721) atau (1,55)% dari APBD tahun anggaran anggaran 2021 sebesar Rp.722.947.232.161. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan berjumlah Rp.22.890.969.356 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.5.990.319.356 atau 35,44% dari APBD 2021 sebesar Rp. 16.900.650.000.

Berdasarkan tabel 4.1, tergambar secara jelas bahwa secara umum pendapatan daerah diprediksi mengalami penurunan. Pada kelompok pendapatan asli daerah, kenaikan yang cukup signifikan diproyeksikan dari hasil pajak daerah. Pada kelompok dana perimbangan, proyeksi DAK pada Perubahan APBD tahun anggaran anggaran 2021 diperkirakan akan menurun dibandingkan APBD TA 2021 dengan harapan usulan DAK yang disampaikan ke pemerintah pusat dapat disetujui dengan jumlah lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya untuk kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, proyeksi kenaikan diperkirakan berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi seiring dengan potensi peningkatan pajak provinsi.

TABEL 4.1
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020– 2021

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	APBD 2021	TARGET PERUBAHAN APBD 2021
	APBD 2020		
PENDAPATAN DAERAH	776.507.166.240,43	853.156.026.849	849.115.226.849
Pendapatan Asli Daerah	102.159.584.856,04	113.255.190.270	114.456.992.053
Pendapatan Transfer	655.882.482.877,90	722.947.232.161	711.767.265.440



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Belitung Timur 2021

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18.465.098.506,49	16.900.650.000	22.890.969.356

Sumber data: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2021

Pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprediksi akan mencapai nilai Rp.114.456.992.053 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.1.201.801.783 atau 1,06% dibandingkan dengan target penerimaan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.113.255.190.270. Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksi mengalami peningkatan. Sementara itu, retribusi daerah yang dipisahkan diprediksi tidak mengalami kenaikan.

Pajak daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar Rp.661.953.276 atau 1,01 % dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2021. Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021, pajak daerah diproyeksikan akan mencapai nilai Rp.66.020.698.070 sedangkan APBD tahun anggaran 2021 target penerimaannya sebesar Rp.65.358.744.794.

Retribusi daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 diprediksi akan mengalami penurunan sebesar Rp.(288.300.000) atau (5,83) % dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2021. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, retribusi daerah diproyeksikan akan mencapai nilai Rp.4.657.807.500 sedangkan pada APBD tahun anggaran 2021 target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.4.946.107.500.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar Rp.557.261.717 atau 16,58 % dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2021. Pada perubahan APBD tahun anggaran 2021, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan akan mencapai nilai Rp.3.918.728.951 sedangkan pada APBD tahun anggaran 2021 target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.3.361.467.234.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar Rp.270.886.790 atau 0,68 %. Pada perubahan APBD tahun anggaran 2021, lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan akan mencapai nilai Rp.39.859.757.532 sedangkan pada APBD tahun anggaran 2021 target penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sebesar Rp39.588.870.742.



Penjabaran Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

TABEL 4.2

Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 -2021

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	TARGET APBD 2021	TARGET PERUBAHAN APBD 2021
	APBD 2020		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.159.584.856,04	113.255.190.270	114.456.992.053
Pajak daerah	58.519.124.050,59	65.358.744.794	66.020.698.070
Retribusi daerah	4.079.465.546,00	4.946.107.500	4.657.807.500
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.528.730.864,06	3.361.467.234	3.918.728.951
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	36.032.264.395,39	39.588.870.742	39.859.757.532

Sumber data : BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2021

Berikut ini disajikan perkembangan realisasi pajak daerah APBD tahun anggaran 2020, target APBD tahun anggaran 2021 dan proyeksi perubahan APBD tahun anggaran 2021.

TABEL 4.3

Realisasi dan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020-2021

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD 2020	TARGET APBD 2021	TARGET PERUBAHAN APBD 2021
HASIL PAJAK DAERAH	58.519.124.050,59	65.358.744.794	66.020.698.070
Pajak Hotel	65.238.000,00	109.019.900	59.329.000
Pajak Restoran	933.718.531,00	898.225.600	1.002.904.704
Pajak Hiburan	28.766.500,00	13.606.600	25.023.400
Pajak Reklame	283.796.470,00	282.603.000	334.804.970
Pajak Penerangan Jalan	5.546.234.161,39	5.500.100.000	5.500.100.000
Pajak Parkir	3.754.200,00	11.012.220	3.000.000
Pajak Air Tanah	2.724.904,00	2.000.000	4.817.465
Pajak Sarang Burung Walet	78.477.000,00	115.000.000	115.000.000
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	48.064.454.376,75	51.927.177.474	52.448.685.035
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.454.482.370,00	2.500.000.000	2.500.000.000
BPHTB	1.057.477.537,45	4.000.000.000	4.027.033.500

Sumber data : BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2021



Berikut ini disajikan perkembangan realisasi retribusi daerah APBD tahun anggaran 2020, target APBD tahun anggaran 2021 dan proyeksi perubahan APBD tahun anggaran 2021.

TABEL 4.4
Realisasi dan Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 – 2021

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	TARGET	TARGET
	APBD 2020	APBD 2021	PERUBAHAN APBD 2021
HASIL RETRIBUSI DAERAH	4.079.465.546	4.946.107.500	4.657.807.500
Retribusi Jasa Umum	2.235.293.020	2.368.355.000	2.010.315.000
Retribusi Jasa Usaha	1.542.367.261	2.353.752.500	2.422.492.500
Retribusi Perijinan Tertentu	295.175.265	224.000.000	225.000.000

Sumber data : BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2021

Berikut ini disajikan perkembangan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan APBD TA. 2020, target APBD TA 2021 dan proyeksi perubahan APBD TA 2021.

TABEL 4.5
Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020-2021

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	TARGET	TARGET
	APBD 2020	APBD 2021	PERUBAHAN APBD 2021
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.528.730.864,06	3.361.467.234	3.918.728.951

Sumber data : BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2020

Perkembangan realisasi lain-lain PAD yang Sah APBD tahun anggaran 2020, target APBD tahun anggaran 2021 dan proyeksi perubahan APBD TA 2021 disajikan di bawah ini.

TABEL 4.6
Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2020-2021

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	TARGET	TARGET
	APBD 2020	APBD 2021	PERUBAHAN APBD 2021
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	36.032.264.395,39	39.588.870.742	39.859.757.532



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Belitung Timur 2021

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	132.361.000,00	257.465.000	257.465.000
Penerimaan Jasa Giro	2.284.123.575,00	2.250.000.000	2.250.000.000
Pendapatan Bunga deposito	2.720.250.063,00	3.567.481.190	3.567.481.190
Pendapatan Denda Pajak	108.139.573,95	21.245.000	92.943.475
Pendapatan Denda Retribusi	20.159.950,00	13.350.000	13.350.000
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	22.756.091.690,38	21.892.380.146	21.892.380.146
Lain-lain PAD yang sah Lainnya	1.641.435.143,06	4.834.574.906	4.517.178.921
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	6.369.703.400,00	7.214.958.800	7.214.958.800

Sumber data : BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2020

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan dari Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa merupakan dana transfer yang termasuk ke dalam kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun tujuan pemberian Pendapatan Transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menjalankan pemerintahan dan menggali potensi ekonomi daerah.

Berikut ini disajikan perkembangan realisasi dana perimbangan APBD tahun anggaran 2020, target APBD tahun anggaran 2021 dan proyeksi perubahan APBD tahun anggaran 2021.

TABEL 4.7
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 – 2021

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	TARGET APBD 2021	TARGET PERUBAHAN APBD 2021
	APBD 2020		
PENDAPATAN TRANSFER	655.882.482.877,90	722.947.232.161	711.767.265.440
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	618.214.768.936,00	681.484.049.000	653.350.493.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.667.713.941,90	41.463.183.161	58.416.772.440



Sumber data : BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2021

Pendapatan transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

- Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-Perikanan.

- Dana Alokasi Umum (DAU).

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dana Transfer Khusus.

- DAK Fisik dan DAK Non Fisik

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, antara lain DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

b) Dana Insentif Daerah (DID)



Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan Transfer pada perubahan APBD tahun anggaran anggaran 2021 diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar Rp.(11.179.966.721) atau (1,55) %. Pada Perubahan APBD tahun anggaran anggaran 2021, Pendapatan Transfer diproyeksikan akan mencapai nilai Rp.711.767.265.440 sedangkan pada APBD tahun anggaran 2021 target Pendapatan Transfer sebesar Rp.722.947.232.161.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada perubahan APBD tahun anggaran anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.(28.133.556.000) atau (4,13) % menyesuaikan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Pada Perubahan APBD tahun anggaran anggaran 2021, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan akan mencapai nilai Rp.653.350.493.000 sedangkan pada APBD tahun anggaran 2021 target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.681.484.049.000.

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada perubahan APBD tahun anggaran anggaran 2021 diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar Rp.16.953.589.279 atau 40,89 %.



Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021, Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan akan mencapai nilai Rp.58.415.772.440 sedangkan pada APBD tahun anggaran 2021 target Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 41.463.183.161 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang bagi hasil Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hibah, Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota bersumber dari *sharing* pendapatan pajak provinsi kepada pemerintah Kabupaten/kota. Dana penyesuaian dan otonomi khusus berasal dari dana desa yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu di kabupaten/kota.

Pendapatan hibah pada APBD tahun anggaran Anggaran 2021 direncanakan berasal dari pendapatan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang ditransfer dari pemerintah pusat ke sekolah serta pendapatan hibah dari pihak ketiga. Dana BOS digunakan oleh sekolah untuk membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendapatan hibah dari pihak ketiga diperoleh dari berbagai sumbangan yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk perubahan APBD tahun anggaran 2021, pendapatan hibah diproyeksikan sebesar Rp.22.890.969.356 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.5.990.319.356 atau (35,44%) dari target penerimaan pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 16.900.650.000. Kenaikan ini terutama pengembalian sisa hibah tahun anggaran 2021..

Tabel 4.8 menyajikan perkembangan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2020, target tahun anggaran 2021 dan proyeksi perubahan tahun 2021.



TABEL 4.8
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2020– 2021

URAIAN	REALISASI APBD 2020	TARGET APBD 2021	TARGET PERUBAHAN APBD 2021
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.465.098.506,49	16.900.650.000	22.890.969.356
Pendapatan Hibah	18.465.098.506,49	16.900.650.000	22.890.969.356

Sumber data : BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2021



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

4.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan maupun Unsur Penunjang, Unsur Pendukung, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD. Perencanaan belanja daerah tahun 2021 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan, efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Rencana belanja daerah ditetapkan berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah yaitu dengan memperhitungkan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Perhitungan kedua komponen pokok dalam struktur APBD tersebut menunjukkan kemampuan *riil* keuangan Daerah dalam membiayai pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Kemampuan keuangan *riil* sebagai dasar untuk membiayai program/kegiatan dengan skala prioritas supaya berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016-2021 sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 dan perubahannya.

Belanja daerah tahun anggaran 2021 juga diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 termasuk penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang



Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

4.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan perkiraan kemampuan keuangan daerah, realisasi tahun 2020 dan target APBD 2021, maka belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diperkirakan menurun sebesar Rp.(13.046.094.893) atau turun sebesar (1,35)% dibandingkan dengan APBD Tahun anggaran 2021. Peningkatan dan penurunan belanja dapat dilihat antara lain pada Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar Rp.13.521.302.998 atau sebesar 1,93% dari jumlah Belanja Operasi APBD tahun anggaran 2021. Selanjutnya, Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp.(24.087.159.430,00) atau sebesar (15,20)% dari APBD tahun anggaran 2021, dan Belanja Tidak Terduga dialokasikan menurun sebesar Rp.(2.801.630.894) atau sebesar 74,74% dari APBD induk tahun anggaran 2021. Sementara itu untuk Belanja Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp. 321.392.433 atau sebesar 0,31 % dari Belanja Transfer APBD TA. 2021 yang disebabkan terjadi kenaikan Pendapatan Transfer dari Antar Daerah.

Berikut ini disajikan perkembangan realisasi belanja pada APBD TA.2019 dan APBD TA.2020, dengan APBD tahun anggaran 2021 dan target Perubahan APBD 2021.



TABEL 5.1
Realisasi dan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019– 2021

KELOMPOK BELANJA	REALISASI		APBD 2021	TARGET PAPBD 2021
	APBD 2019	APBD 2020		
BELANJA	865.889.382.198,07	774.272.054.766,96	967.362.274.849	954.316.179.956
Belanja Operasi	610.108.647.123,88	577.536.945.350,49	701.842.171.690	715.363.474.688
Belanja Modal	149.642.796.105,00	83.174.500.800,18	158.481.233.011	134.394.073.581
Belanja Tidak Terduga	0,00	11.380.110.712,00	3.748.591.256	946.960.362
Belanja Transfer	106.137.938.969,19	102.180.497.904,29	103.290.278.892	103.611.671.325

Sumber data: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2020

Berdasarkan alokasi Belanja, khususnya Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dialokasikan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang, Unsur Pendukung, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum yang dapat dijelaskan bahwa alokasi terbesar adalah untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan kepada penanggulangan dan penyehatan defisit yang terjadi pada anggaran. Optimalisasi pembiayaan daerah diarahkan melalui:

- a. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah, dengan strategi dan prioritas :
 - Efisiensi dan Efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah;
 - Optimalisasi penjualan kekayaan daerah berbasis analisa ekonomi biaya pemeliharaan;
- b. Minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah, dengan strategi prioritas selektif dan berdasarkan pendekatan analisa ekonomi di dalam penyertaan modal.
Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari :

- a) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
Di dalam struktur APBD Kabupaten Belitung Timur sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya pada APBD TA. 2021 tersebut ditargetkan sebesar Rp. 112.657.385.318 dan pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 103.683.345.758.
- b) penerimaan kembali pemberian pinjaman.
penerimaan kembali pemberian pinjaman pada APBD TA. 2021 ditargetkan sebesar Rp. 1.601.817.100 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.601.817.100 tetap atau tidak mengalami kenaikan dibanding APBD Tahun Anggaran 2021.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

- a) penyertaan modal (investasi) daerah
pengeluaran pembiayaan daerah, pembiayaan daerah dikeluarkan melalui penyertaan modal (investasi) daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tidak mengganggu penyertaan modal daerah dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.



b) pemberian pinjaman daerah;

Sedangkan pada bagian pengeluaran pembiayaan daerah, pembiayaan daerah dikeluarkan melalui pemberian pinjaman daerah Pada APBD TA. 2021 pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan sesuai dengan usulan OPD terkait.

c) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dikeluarkan melalui pembiayaan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 84.209.751.

Berkaitan dengan defisit anggaran, pembiayaan daerah dipergunakan untuk menutupi defisit yang terjadi. Pada APBD Tahun Anggaran 2021 defisit anggaran sebesar Rp. 114.259.202.418 dan selanjutnya pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 bertambah menjadi sebesar Rp.105.200.953.107.

Rincian Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 dijelaskan pada tabel berikut ini:

TABEL 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	APBD 2021	PERUBAHAN APBD 2021	Bertambah / (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	114.259.202.418	105.285.162.858	(8.974.039.560)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112.657.385.318	103.683.345.758	(8.974.039.560)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.601.817.100	1.601.817.100	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	114.259.202.418	105.285.162.858	(8.974.039.560)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	84.209.751	84.209.751
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	84.209.751	84.209.751
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	84.209.751	84.209.751
	Pembiayaan Netto	114.259.202.418	105.200.953.107	(9.058.249.311)



BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Berpedoman pada dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi, serta RPJMD-P tahun 2016-2021, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2021 dilaksanakan dengan tema **“PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PEMULIHAN EKONOMI SERTA PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL”**, dengan fokus pembangunan pada:

1. Memulihkan Stabilitas Ekonomi.
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan;
3. Peningkatan pemerataan layanan berkualitas berkelanjutan;
4. Perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak COVID-19 terhadap aset produktif;
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja;
6. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Mengacu pada tema dan fokus pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - a. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.
 - Penataan Struktur organisasi pemerintah;
 - penataan jumlah dan distribusi ASN;
 - Pengembangan sistem seleksi dan promosi secara terbuka;
 - peningkatan profesionalisasi ASN;
 - Pengembangan sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi;
 - peningkatan pelayanan publik;
 - peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur;
 - peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
 - peningkatan efisiensi belanja aparatur.
 - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
 - Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;



- Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan asli daerah dan optimalisasi sumber pendapatan daerah lainnya secara akuntabel
- c. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.
 - Penguatan kelembagaan dan birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik Optimalisasi pengawasan
- 2. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - a. Meningkatkan Rata-rata lama sekolah.
 - Menekan angka putus sekolah;
 - Peningkatan akses dan layanan pendidikan kesetaraan;
 - Peningkatan standar mutu pendidikan
 - b. Meningkatkan usia harapan hidup.
 - Peningkatan standar mutu Kesehatan;
 - menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - Konvergensi Stunting;
 - optimalisasi pelaksanaan gerakan masyarakat sehat.
 - c. Meningkatkan Pembangunan Gender.
 - Peningkatan peran dan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pembangunan.
 - d. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berbasis Masyarakat.
 - Fasilitasi forum masyarakat dalam pembangunan;
 - Penerapan Pola Padat Karya Tunai dalam Pelaksanaan Pembangunan.
 - e. Menurunnya Angka Kemiskinan.
 - Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, validitas data dan kapasitas SDM.
 - f. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja.
 - Peningkatan jenjang pendidikan tenaga kerja;
 - Peningkatan keterampilan tenaga kerja.
 - g. Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Pasca Pandemi COVID -19.
 - Meningkatkan Kebermanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Meningkatkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak.
- 3. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas.
 - a. Memulihkan Stabilitas Ekonomi di Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata.
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata;



- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
- b. Meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian daerah.
 - Mempermudah akses permodalan bagi UMKM;
 - Standarisasi produk UMKM;
 - Meningkatkan skala pasar produk UMKM;
 - Peningkatan Kualitas SDM bagi Pelaku UMKM.
- 4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Pengembangan ekonomi.i
 - a. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat akan kebutuhan infrastruktur dasar Untuk Pengembangan Ekonomi.
 - Peningkatan, Pemeliharaan dan Pembangunan jalan dan jembatan;
 - Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat;
 - Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku;
 - Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perhubungan.
- 5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana.
 - a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
 - Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
 - b. Berkurangnya tingkat resiko bencana.
 - Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dengan melakukan pemetaan kawasan resiko bencana.
- 6. Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - a. Meningkatkan Ketahanan Pangan.
 - Peningkatan ketersediaan pangan masyarakat;
 - Peningkatan stabilitas penyediaan pangan;
 - Peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat.

Kendala dan permasalahan pembangunan daerah merupakan “expectation gap” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan daerah yang akan menjadi agenda utama untuk ditangani melalui program dan kegiatan tahun 2021 dikelompokkan berdasarkan urusan, yang akan diuraikan sebagai berikut:



A. Ekonomi

1. Sektor Koperasi dan UMK

- a. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi pembangunan UMKM di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan hasil pendataan didapatkan beberapa kelompok dampak seperti berkurangnya pembeli, pendapatan menurun, penjualan tersendat, jumlah produksi dikurangi, produksi dihentikan sementara; dan/atau tenaga kerja diliburkan;
- b. Masih rendahnya daya saing produk usaha koperasi dan UMKM;
- c. Pengurus atau pengelola koperasi dan UMKM yang kurang kompeten;
- d. Kurangnya SDM aparatur pembina koperasi;
- e. Kurangnya pengetahuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi sebagai salah satu sarana pengembangan produk;
- f. Belum optimalnya pembinaan terhadap kualitas SDM pengelola koperasi;
- g. Belum maksimalnya pemetaan dan pengembangan kajian produk unggulan daerah terkini.

2. Sektor Industri

- a. Masih terbatasnya usaha dan kreatifitas pemasaran hasil industri masyarakat;
- b. Belum optimalnya promosi terpadu antar pelaku industri daerah dan sektor lainnya;
- c. Masih banyak IKM yang belum memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang ditempuh dalam proses;
- d. Kurangnya inovasi produk IKM yang menguasai teknologi, manajemen, informasi dan pasar;
- e. Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan sebagai salah satu sektor unggulan;
- f. Belum optimalnya pengembangan sentra industri yang ada;

3. Sektor Pariwisata

- a. Belum fokusnya lokasi destinasi wisata yang ingin dikembangkan;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan event kepariwisataan yang berskala nasional dalam menonjolkan budaya dan adat lokal;
- c. Belum optimalnya promosi investasi terpadu antar sektor terutama promosi pada media sosial;
- d. Belum optimalnya kerjasama pariwisata antar pemerintah daerah, pihak swasta dan lembaga adat daerah.



4. Sektor Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK);
- b. Belum diperbaharuinya data dan peta investasi Daerah Belitung Timur;
- c. Belum pernah menyusun peta study kelayakan investasi daerah;
- d. Belum adanya dokumen atau kajian tentang potensi-potensi daerah yang diprioritaskan secara umum setiap tahun bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal sudah menyusun buku “Profil Investasi Komoditas Unggulan kabupaten Belitung Timur” namun secara khusus belum melakukan study kelayakan untuk menentukan potensi-potensi investasi daerah yang diprioritaskan;
- e. Pemerintah kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan berkerjasama dengan Dinas terkait sudah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan komoditas unggulan daerah sehingga akan tersedia paket-paket investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor sehingga investor dapat berinvestasi di Kabupaten Belitung Timur, namun pelaksanaannya masih belum optimal.

5. Sektor Energi

- a. Masih ada beberapa daerah di pulau-pulau kecil berpenghuni yang belum teraliri jaringan listrik terbaru.

6. Sektor Perikanan

- a. Terganggunya aktivitas ekspor hasil perikanan akibat adanya pembatasan transportasi akibat adanya Pandemi COVID-19;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan perikanan budidaya;
- c. Belum tercukupinya SDM penyuluh perikanan di daerah terhadap manajemen usaha budidaya perikanan;
- d. Belum beroperasinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan hasil perikanan;
- f. Tata niaga hasil perikanan tangkap masih belum optimal.

7. Sektor Ketahanan Pangan

- a. Ketersediaan bahan makanan (terutama sembako) saat Pandemi COVID-19 harus senantiasa terjaga untuk memastikan akses pangan bagi masyarakat;
- b. Belum terbentuknya OPD yang menangani secara khusus tentang ketahanan pangan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan sawah yang diperuntukkan sebagai kawasan sawah/tanam padi;



- d. Masih kurangnya motivasi masyarakat untuk bertani;
 - e. Terdapat peluang konflik masyarakat terhadap sistem kemitraan dengan pihak swasta di kawasan HTI;
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi;
 - g. Belum optimalnya penyuluh pertanian;
 - h. Belum adanya produk unggulan bidang pertanian yang ingin dikembangkan sehingga belum fokus dalam pengembangannya;
 - i. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan keluarga.
8. Sektor Pemerintahan
- a. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih dalam predikat cukup;
 - b. Masih belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, yang ditandai dengan nilai indek reformasi birokrasi yang masih pada kategori cukup.
9. Sektor Pendidikan
- a. Masih tingginya angka putus sekolah;
 - b. Rendahnya penguasaan terhadap teknologi informasi pembelajaran melalui media daring dan media luring;
 - c. Jaringan internet yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler;
 - d. Angka harapan Lama sekolah belitung Timur tahun 2019 yaitu 11,51 tahun, menempati peringkat ke 6 se kabupaten/ kota se provinsi bangka Belitung dan masih rendah dari angka rata-rata provinsi kep. Bangka Belitung;
 - e. Kualitas pendidikan/ sekolah tingkat SD dan SMP dikabupaten Belitung Timur masih perlu ditingkatkan, dimana pada tahun 2019 baru 29 sekolah yang berakreditasi A, sedangkan yang berakreditasi B berjumlah 101 sekolah, dan akreditasi C berjumlah 1 sekolah.
10. Sektor Kesehatan
- a. Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan dan anak;
 - b. Meningkatnya masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebagai akibat dari pandemic COVID-19;
 - c. Belum semua Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) ditanggung jaminan kesehatannya oleh APBN; d. Belum optimalnya penerapan Program Rujuk Balik (PRB);
 - e. Laporan program dari rumah sakit umum daerah ke dinas kesehatan belum optimal;



- f. Belum maksimalnya ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan;
- g. Peran lintas sektor dalam mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan belum maksimal;
- h. Pemahaman masyarakat terhadap PTM (Penyakit Tidak Menular) masih kurang;
- i. Belum semua Fasyankes swasta melaporkan hasil layanan terkait SPM bidang Kesehatan;
- j. Minimnya ketersediaan Alat pelindung Diri (APD) di puskesmas dan RSUD untuk menangani COVID 19;
- k. Minimnya kesadaran masyarakat untuk menerakan berperilaku Hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan pakai sabun dan memakai masker.

11. Sektor Sosial

- a. Angka kemiskinan Belitung Timur berpotensi untuk meningkat pada tahun 2020 akibat pandemic COVID 19, khususnya jika pandemic COVID 19 tidak segera berakhir pada bulan Juni 2020, dimana dalam tahun anggaran 2020 pemerintah menganggarkan untuk Jaring pengaman Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 3 (tiga) bulan yaitu bulan April – Juni 2020;
- b. Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum dijadikan rujukan bagi seluruh OPD terkait dalam pemberian bantuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. Masih minimnya jumlah puskesmas di Kab. Belitung Timur;
- d. Rendahnya akses masyarakat miskin /PMKS pada kelembagaan lokal;
- e. Banyaknya potensi sumberdaya lokal yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS.

12. Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- b. Masih rendahnya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan dan belum efektifnya pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pembentukan BUMDes dan masih rendahnya penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi dikalangan masyarakat desa;
- d. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa;



- e. Rendahnya Pemanfaatan Hasil Karya Teknologi Tepat Guna, Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

13.Sektor Ketenagakerjaan

- a. Tingkat pendidikan dan kualitas angkatan kerja lokal masih rendah;
- b. Informasi bursa kerja yang relatif masih terbatas;
- c. Masih kurangnya aparatur Mediator, Instruktur Pelatihan dan Pengantar kerja;
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD terkait, terutama kendaraan operasional lapangan dan ruang mediasi;
- e. Masih kurangnya pemahaman perusahaan dan pekerja terhadap peraturan ketenagakerjaan;
- f. Kurangnya kemampuan/kompetensi penduduk usia kerja untuk ditempatkan;
- g. Masih kurangnya lapangan pekerjaan untuk menampung pencari kerja;
- h. Masih kurangnya motivasi masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

14.Sektor Kebudayaan

- a. Kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang kesenian;
- b. Keterbatasan seniman, budayawan yang mengembangkan kesenian tradisional secara mandiri;
- c. Skala prioritas baik dalam perencanaan program dan kegiatan maupun penganggaran belum sesuai dikarenakan anggaran yang terbatas;
- d. Belum optimalnya penatalaksanaan permuseuman yang disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan permuseuman dan arkeologi;
- e. Belum ditetapkannya cagar budaya sehingga pada saat ini status cagar budaya baru sampai tahap registrasi;
- f. Belum adanya studi kesejarahan yang komperhensif.

15.Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih Tingginya angka perkawinan usia anak Dimana pada tahun 2018 ada sebanyak 211 perkawinan usia anak dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 250 perkawinan usia anak;
- b. Masih tingginya angka perceraian Pada tahun 2019 angka perceraian di Belitung Timur sebanyak 329 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 407 kasus;
- c. Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak masih terjadi;
- d. Belum tersedia data pilah yang lengkap dan akurat di OPD;
- e. Kualitas SDM yang belum handal dalam dalam PUG, PUHA dan kurangnya peran serta lembaga masyarakat dan dunia usaha;



- f. Belum banyak tersedia sarana dan prasarana yang responsive gender dan anak.

16. Sektor Pertanahan

- a. Pembangunan sarana dan prasarana umum dan infrastruktur terkendala dengan status lahan baik kawasan hutan, maupun lahan masyarakat;
- b. Memastikan batas kawasan tanah pemerintah kabupaten (aset).

17. Sektor Infrastruktur Daerah

- a. Masih rendahnya target pencapaian layanan SPAM Terbatasnya pendanaan penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, maupun operasional dan pemeliharaan yang diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya tarif. Namun untuk Layanan air bersih melalui PDAM di Kabupaten Belitung Timur cenderung menurun meskipun PDAM Kabupaten Belitung Timur menerima tambahan fasilitas baru berupa pompa yang canggih dan sarana penyimpanan (reservoir) yang lebih besar;
- b. Belum optimalnya penyediaan jaringan drainase Belum optimalnya penyediaan jaringan drainase dikarenakan belum adanya rencana induk drainase di Kabupaten Belitung Timur untuk perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengelolaan air minum Pemanfaatan teknologi pengolahan air minum lebih bertujuan pada kualitas air yang sampai ke pelanggan. Penurunan kualitas air minum di pelanggan juga dipengaruhi oleh penurunan kualitas air baku dan penurunan efektifitas unit pengelolaan air minum karena umur teknis. Kondisi air baku yang korosif kabupaten Belitung Timur membutuhkan teknologi yang dapat memisahkan logam tersebut dengan air. Selain itu, perlu melakukan kajian mengenai sumber air baku terutama untuk melayani perkotaan Manggar, Gantung dan Damar dengan biaya produksi yang minim;
- d. Perlunya percepatan langkah percepatan pembebasan tanah untuk peningkatan jalan terutama menuju kawasan strategis seperti pelabuhan, pariwisata dan lain-lain Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur terutama pada kawasan strategis terkendala pembebasan lahan/tanah. Kompleksnya permasalahan pengadaan atau pembebasan tanah membutuhkan aparat yang memiliki kemampuan untuk memahami tentang prosedur pengadaan tanah, mulai dari tahapan



perencanaan sampai dengan penyerahan hasil. Tanah dan pembangunan merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada pembangunan tanpa tanah atau lahan. Pembangunan selalu membutuhkan lahan untuk mewujudkan berbagai proyek, baik oleh pemerintah maupun swasta. Namun permasalahan pengadaan tanah atau pembebasan lahan sering menimbulkan polemik, dari mulai sistem dan prosedur dalam pembebasan tanah, kebijakan yang dikeluarkan para pihak, substansi masalah, serta pandangan aparaturnya terhadap pembebasan tanah itu sendiri. Karena itu perlu keseriusan dari pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembebasan tanah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal dan bermanfaat;

- e. Kualitas sumber air baku yang belum memenuhi standar yang ditetapkan;
- f. Belum optimalnya pengelolaan IPLT Perlu dibentuknya UPT bersama dengan persampahan(TPA) sehingga pengelolaan lebih terkoordinasi;
- g. Sarana dan prasarana IPLT yang sudah ada belum optimal karena masih perbaikan dan penambahan fasilitas pelengkapannya oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

18.Sektor Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih rendahnya rasio rumah layak huni di Kabupaten Belitung Timur;
- b. Masih tingginya backlog perumahan di Kabupaten Belitung Timur;
- c. Masih terdapatnya kawasan kumuh.

19.Sektor Lingkungan Hidup

- a. Masih kurangnya jumlah tenaga pengawasan dan pembinaan dibidang lingkungan hidup;
- b. Masih kurangnya sarpas pengawasan lingkungan hidup;
- c. Tidak adanya keberlanjutan pengelolaan Bank sampah;
- d. Belum optimalnya luasan RTH sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang;
- e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Degradasi kualitas lingkungan hidup.

20.Sektor Perhubungan

- a. Belum adanya jaringan trayek yang terstruktur, terukur dan terpadu guna meningkatkan pelayanan angkutan umum;
- b. Belum adanya sarana dan prasarana uji kelayakan kendaraan bermotor;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan ASDP Manggar, Pelabuhan Dendang dan pelabuhan pengumpan lokal lainnya;



- d. Belum optimalnya pelayanan fasilitas perlengkapan jalan terutama penerangan jalan umum;
- e. Belum optimalnya SDM terampil dan memiliki kompetensi di bidang perhubungan.

21. Sektor Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya kerjasama informasi dengan berbagai media massa dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah daerah agar terwujud komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. Masih belum optimalnya pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui PPID. Hal ini dikarenakan belum lengkapnya perangkat pendukung PPID;
- c. Perlunya pengembangan lebih lanjut untuk pelayanan publik berbasis elektronik antara lain aplikasi layanan publik berbasis elektronik, layanan dokumentasi dan informasi hukum, layanan whistle blowing system dan layanan publik pemerintah daerah;
- d. Keterbatasan SDM sandi yang dimiliki dan keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan informasi berklasifikasi;
- e. Belum terlayannya jaringan internet yang memadai di beberapa desa.

22. Sektor Penanggulangan Bencana

- a. Keterbatasan jumlah personil pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- b. Masih kurang terampilnya pengetahuan SDM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- c. kurangnya sarana peralatan dan perlengkapan pelayanan penyelamatan bencana kebakaran;
- d. Belum adanya masterplan mitigasi bencana Kabupaten Belitung Timur.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021, meliputi:

- A. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.**
- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
 - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.



- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
- d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
 - b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
 - c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
 - a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
 - b) Program Pemasaran Pariwisata.
 - c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
 - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
 - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
 - e) Program Perizinan Usaha Pertanian.
 - f) Program Penyuluhan Pertanian
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
 - a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
 - b) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
- B. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.
 - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
 - b) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.
 - c) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
 - d) Program Pengembangan UMKM.
 - 2) Unsur Sekretariat Daerah.
 - a) Program Perekonomian dan Pembangunan.
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
 - a) Program Pengelolaan Pendidikan.
 - b) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Unsur Pendidikan dan Pelatihan.
 - a) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 5) Unsur Penelitian dan Pengembangan.
 - a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.



- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
 - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
 - d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
 - e) Program Penataan Bangunan Gedung.
 - f) Program Penyelenggaraan Jalan.
 - g) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - a) Program Pengembangan Perumahan.
 - b) Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
 - c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
 - a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - b) Program Penanggulangan Bencana.
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
 - a) Program Pemberdayaan Sosial.
 - b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
 - c) Program Rehabilitasi Sosial.
 - d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - e) Program Penanganan Bencana.
 - f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
 - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
 - b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
 - d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
 - e) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.



- f) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- g) Program Pengelolaan Persampahan.
- C. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.
 - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - a) Program Pengendalian Penduduk.
 - b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
 - c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
 - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - a) Program Pendaftaran Penduduk.
 - b) Program Pencatatan Sipil.
 - c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - d) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
 - a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - b) Program Penanggulangan Bencana.
 - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
 - a) Program Pemberdayaan Sosial.
 - b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
 - c) Program Rehabilitasi Sosial.
 - d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - e) Program Penanganan Bencana.
 - f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
 - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
 - a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
 - d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
 - a) Program Pengelolaan Pendidikan.
 - b) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
 - b) Program Perlindungan Perempuan.
 - c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.



- d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
- e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
 - b) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.
 - c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
 - a) Program Perencanaan Tenaga Kerja.
 - b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - c) Program Penempatan Tenaga Kerja.
 - d) Program Hubungan Industrial.
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - a) Program Penataan Desa.
 - b) Program Administrasi Pemerintahan Desa.
 - c) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - a) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
 - b) Program Pengembangan UMKM.
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
 - a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - b) Program Promosi Penanaman Modal.
 - c) Program Pelayanan Penanaman Modal.
 - d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
 - a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
 - c) Program Pengembangan Ekspor.
 - d) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
 - a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
 - b) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
- 15) Unsur Sekretariat Daerah.
 - a) Program Perekonomian dan Pembangunan.
- 16) Unsur Kewilayahan (Kecamatan).



- a) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- D. Revolusi Mental.
 - 1) Unsur Kepegawaian.
 - a) Program Kepegawaian Daerah.
 - 2) Urusan Pemerintahan Umum.
 - a) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
 - b) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - c) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
 - d) Program Keningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
 - a) Program Pengelolaan Pendidikan.
 - b) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Unsur Pendidikan dan Pelatihan.
 - a) Program Pendaftaran Penduduk.
 - b) Program Pencatatan Sipil.
 - c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - d) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
 - 5) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
 - a) Program Pengembangan Kebudayaan.
 - b) Program Pembinaan Sejarah.
 - c) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
 - d) Program Pengelolaan Permuseuman.
 - 6) Unsur Sekretariat Daerah.
 - a) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- E. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
 - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
 - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - c) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
 - d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
 - e) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
 - f) Program Pengembangan Permukiman.
 - g) Program Penataan Bangunan Gedung.



- h) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
- i) Program Penyelenggaraan Jalan.
- j) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
- k) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - a) Program Pengembangan Perumahan.
 - b) Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
 - c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
 - d) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 3) Unsur Kewilayahan (Kecamatan).
 - a) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
 - a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 - b) Program Pengelolaan Pelayaran.
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
 - a) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
 - b) Program Aplikasi Informatika.
- F. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
 - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
 - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
 - b) Program Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
 - d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - e) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH).
 - f) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH.
 - g) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
 - h) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
 - i) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
 - j) Program Pengelolaan Persampahan.



- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
 - a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - b) Program Penanggulangan Bencana.
- G. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - 1) Unsur Kepegawaian.
 - a) Program Kepegawaian Daerah.
 - 2) Unsur Sekretariat Daerah.
 - a) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - 3) Urusan Pemerintahan Umum.
 - a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 - b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
 - c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
 - e) Program Keningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
 - 4) Unsur Sekretariat DPRD.
 - a) Program Layanan dan Administrasi Keuangan.
 - b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
 - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
 - a) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
 - b) Program Aplikasi Informatika.
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
 - a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - b) Program Penanggulangan Bencana.



BAB VIII **PENUTUP**

Demikianlah perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 disajikan. Penyajian perubahan Kebijakan Umum APBD ini telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Perubahan Kebijakan Umum APBD ini diharapkan menjadi arah/ pedoman dalam penetapan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2021 diajukan bersama-sama dengan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 Ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Mudah-mudahan pada waktunya nanti, perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 dapat disepakati bersama-sama antara Eksekutif dan Legislatif sehingga proses penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat segera dilakukan.

Akhirnya, semoga dengan tersusun dan dibahasnya perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 dapat menjadi instrumen yang penting dalam proses perencanaan dan penganggaran yang sangat berguna dalam proses pembangunan di Belitung Timur. Terima Kasih.

PERUBAHAN PPAS

PERUBAHAN
PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA

PENDAPATAN DAERAH
BELANJA DAERAH
PEMBIAYAAN DAERAH
BELITUNG TIMUR 2021



2021

APBD



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : 03 Tahun 2021
TANGGAL : 7 September 2021

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. BURHANUDIN
Jabatan : Bupati Belitung Timur
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2. a. Nama : FEZZI UKTOLSEJA, SE, MM
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
- b. Nama : ROHALBA, S.Pt
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
- c. Nama : SULADI, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

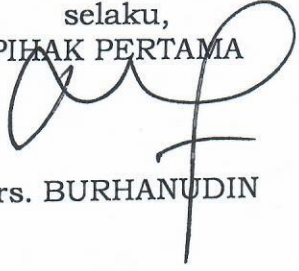
Manggar, 7 September 2021

PIMPINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

selaku,
PIHAK PERTAMA


Drs. BURHANUDIN

selaku,
PIHAK KEDUA


FEZZI UKTOLSEJA, SE, MM
KETUA

ROHALBA, S.Pt
WAKIL KETUA


SULADI, S.E
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang memuat berbagai perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mempedomani Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam penyusunan perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur yang telah diatur dalam peraturan perundangan tersebut dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD perubahan Tahun 2021. Dengan demikian diharapkan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang dihasilkan saling bersesuaian satu sama lain.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengamanatkan bahwa sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 161 Ayat (2) disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

Seiring waktu berjalan pada Tahun 2021 dilakukan penyesuaian (*refocusing*) anggaran pendapatan dan belanja untuk anggaran penanganan COVID-19 yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya. Sehingga perubahan tersebut harus dituangkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kementerian Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

APBD Kabupaten Belitung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam pelaksanaannya, selama tahun anggaran 2021, khususnya Semester I berjalan terjadi perubahan-perubahan terhadap realisasi dari asumsi yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk menampung perubahan-perubahan tersebut.

Oleh karena itu, diharapkan dengan disusunnya perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 ini dapat mengakomodir hal-hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, Pemerintah Daerah akan mempedomani perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

1.1. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;

2. Memberikan dasar hukum penggunaan Silpa untuk pendanaan kegiatan tahun 2021;
3. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru (Kegiatan tertentu sebagai proses adanya intervensi dari Pemerintah Pusat), perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2021 meliputi:

1. Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
2. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari:
 - a) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2021;
 - b) Perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2021; dan
 - c) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2021.
3. Perubahan matrik rencana program dan kegiatan tahun 2021 serta prakiraan maju tahun 2022 untuk semua Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.

1.2. Dasar penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2021, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 431);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 3).
37. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 35).

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta lebih teknis mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer yang Terdiri Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan analisis potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah pada perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 ditargetkan mencapai sebesar Rp.849.115.226.849 atau mengalami penurunan sebesar Rp.(6.947.045.582) atau (0,46)% dari APBD tahun anggaran 2021 yang sebesar Rp.853.103.072.431, rincian tersebut dapat dilihat pada :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp.114.456.992.053 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.1.201.801.783 atau 1,06% dari APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.113.255.190.270,00;
- b) Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp.711.767.265.440 atau mengalami penurunan sebesar Rp.(11.179.966.721) atau 1,55% dari APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.722.947.232.161; dan
- c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp.22.890.969.356 atau

mengalami peningkatan sebesar Rp.5.990.319.356 atau 35,44% dari APBD 2021 sebesar Rp16.900.650.000.

TABEL 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	113.255.190.270	114.456.992.053	1.201.801.783	
4.1.01	Pajak Daerah	65.358.744.794	66.020.698.070	661.953.276	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.946.107.500	4.657.807.500	(288.300.000)	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.361.467.234	3.918.728.951	557.261.717	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	39.588.870.742	39.859.757.532	270.886.790	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	722.947.232.161	711.767.265.440	(14.139.166.721)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	681.484.049.000	653.350.493.000	(8.133.556.000)	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.463.183.161	58.416.772.440	16.953.589.279	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.900.650.000	22.890.969.356	5.990.319.356	
4.3.01	Pendapatan Hibah	500.000	500.000	0	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.900.150.000	22.890.469.356	5.990.319.356	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		853.103.072.431	849.115.226.849	(3.987.845.582)	

Secara umum, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang signifikan, namun semenjak adanya pandemi COVID-19 terjadi perlambatan di semua sektor. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan mencapai sebesar Rp.114.456.992.053,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.1.201.801.783 atau 1,06% dari APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.113.255.190.270.

Komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dari komponen Pajak Daerah secara keseluruhan ditargetkan

mencapai sebesar Rp.66.020.698.070 mengalami peningkatan sebesar Rp.661.953.276 atau sebesar 1,01% dibandingkan target Pajak Daerah pada APBD TA. 2021 sebesar Rp.65.358.744.794. Peningkatan target Pajak Daerah tersebut bersumber dari semua komponen jenis penerimaan Pajak Daerah terutama Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diasumsi Kabupaten Belitung Timur masih terdampak pandemi COVID-19;

b. Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dari komponen Retribusi Daerah secara keseluruhan ditargetkan mencapai sebesar Rp.4.657.807.500 menurun sebesar Rp. (288.300.000) atau sebesar (5,83%) dibandingkan target Retribusi Daerah pada APBD TA. 2021 sebesar Rp.4.946.107.500. Penetapan target Retribusi Daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi Retribusi Daerah pada n-2 atau realisasi 2 (dua) tahun Anggaran sebelumnya dari Dinas/Instansi pengelola/pemungut sesuai dengan jenis pungutan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD/ Instansi pemungut;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Asli Daerah pada perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp. 3.918.728.951,00 atau mengalami Peningkatan sebesar Rp.557.261.717 atau 16,58% dibandingkan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD TA. 2021 sebesar Rp.3.361.467.234.

d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah pada perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dari komponen Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara keseluruhan ditargetkan mencapai sebesar Rp.39.859.757.532 meningkat sebesar Rp.270.886.790 atau sebesar 0,68% dibandingkan target Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada APBD TA. 2021 sebesar Rp. 39.588.870.742.

Pendapatan Transfer pada perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 ditargetkan mencapai Rp.711.767.265.440 mengalami penurunan sebesar Rp.(11.179.966.721) atau sebesar (1,55)% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer pada APBD TA. 2021 sebesar Rp.722.947.232.161.

Komponen Pendapatan Transfer tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer pada Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021

ditargetkan mencapai sebesar Rp.653.350.493.000 mengalami Penurunan sebesar Rp.(28.133.556.000) atau (4,13)% dari alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD TA. 2021 sebesar Rp.681.484.049.000. Perhitungan Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya. Sehingga perubahan tersebut harus dituangkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kementerian Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, serta kondisi ekonomi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi dan Nasional yang bersifat dinamis dengan memperhatikan dinamika perekonomian ekonomi global.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer pada Pendapatan Transfer Antar Daerah di perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 ditargetkan mencapai sebesar Rp.58.416.772.440 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.16.953.589.279 atau 40,89% dibandingkan Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD TA. 2021 yang sebesar Rp.41.463.183.163,00. Perhitungan Pendapatan Transfer Antar Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang besaran bagi hasil ke Kabupaten belitung Timur.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 ditargetkan mencapai Rp.22.890.969.356 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.5.990.319.356 atau sebesar 35,44% dibandingkan alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD TA. 2021 sebesar Rp.16.900.650.000,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut dengan Komponen Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan target Pendapatan Daerah tersebut yang mencapai sebesar Rp.849.115.226.849, dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah memberi kontribusi sebesar Rp.114.456.992.053 atau sebesar 13,53%, Pendapatan Transfer memberi kontribusi sebesar Rp.711.767.265.440 atau sebesar 83,82% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberi kontribusi sebesar Rp.22.890.969.356 atau sebesar 2,71%.

Berdasarkan target pendapatan daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka jumlah Dana Tersedia yang dapat dimanfaatkan guna pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur pada perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)



Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan dari Jumlah Pendapatan Daerah adalah
Rp.849.115.226.849

BAB III

PERUBAHAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang secara substansi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, dan secara penamaan urusan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Selain Urusan Pada Setiap OPD, Ada dua kelompok Urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh seluruh OPD se-Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Urusan desentralisasi tersebut meliputi:

**1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR, terdiri dari:**

- 1.1. Pendidikan
- 1.2. Kesehatan
- 1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- 1.6. Sosial

**2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR, terdiri dari:**

- 2.7. Tenaga Kerja
- 2.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.9. Pangan
- 2.10. Pertanahan
- 2.11. Lingkungan Hidup
- 2.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.15. Perhubungan
- 2.16. Komunikasi dan Informatika
- 2.17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 2.18. Penanaman Modal
- 2.19. Kepemudaan dan Olah Raga

- 2.20. Statistik
- 2.21. Persandian
- 2.22. Kebudayaan
- 2.23. Perpustakaan
- 2.24. Kearsipan

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN, terdiri dari:

- 3.25. Kelautan dan Perikanan
- 3.26. Pariwisata
- 3.27. Pertanian
- 3.30. Perdagangan
- 3.31. Perindustrian

4. UNSUR PENUNJANG, terdiri dari:

- 4.1. Sekretariat Daerah
- 4.2. Sekretariat DPRD

5. UNSUR PENDUKUNG, terdiri dari:

- 5.1. Perencanaan
- 5.2. Keuangan
- 5.3. Kepegawaian
- 5.4. Pendidikan dan Pelatihan
- 5.5. Penelitian dan Pengembangan

6. UNSUR PENGAWASAN, terdiri dari:

- 6.1. Insektorat

7. UNSUR KEWILAYAH, terdiri dari:

- 7.1. Kecamatan

8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM, terdiri dari:

- 8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

**TABEL 3.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	220.164.792.995	212.594.362.920	
1.01.4.01.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	220.164.792.995	212.594.362.920	
1.01.4.01.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	220.164.792.995	212.594.362.920	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	169.500.578.602	160.792.207.614	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.750	4.925.500	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.750	4.925.500	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	163.488.592.372	154.956.717.924	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91.651.564.946	153.280.750.424	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.837.027.426	1.675.967.500	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000	42.000.000	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.000.000	42.000.000	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33.000.000	0	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	778.591.900	700.736.650	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.999.500	19.453.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	202.418.500	180.233.250	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.600.000	154.641.500	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.824.900	61.324.900	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.749.000	285.084.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204.493.000	248.493.000	
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.200.000	21.200.000	
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	183.293.000	227.293.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.299.062.080	4.187.863.540	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.354.750.000	2.354.750.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.624.580	226.426.040	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	611.625.000	611.625.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	995.062.500	995.062.500	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.839.500	651.471.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.467.500	290.655.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	276.872.000	268.816.000	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.500.000	92.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	50.237.867.393	51.723.155.306	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26.658.926.182	26.857.689.732	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	804.000.000	804.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.252.880.000	1.152.880.000	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.815.376.452	5.610.021.042	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	561.790.980	517.632.063	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	95.092.800	95.092.800	
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	77.396.000	77.396.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	510.250.000	510.250.000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	98.199.000	299.910.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	13.877.400.000	14.525.785.050	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	139.397.500	135.157.500	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	5.000.000	5.000.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	477.424.750	280.506.250	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.635.925.000	2.298.465.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	291.194.500	262.730.500	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	17.599.200	33.349.200	
1.01.02.2.01.33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	0	249.514.327	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.838.343.911	13.948.670.024	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	443.750.000	0	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	132.940.000	132.940.000	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	38.160.000	0	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	203.280.000	203.280.000	
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	91.388.000	91.388.000	
1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	68.068.000	68.068.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	427.000.000	427.000.000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	960.630.350	920.630.350	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	302.246.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	727.054.000	665.054.000	
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	86.300.000	86.300.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	479.126.000	156.880.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	80.483.000	160.483.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	146.530.000	146.530.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	7.840.852.500	8.344.929.674	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.000.350.000	1.000.350.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	46.518.000	46.518.000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.000.000	5.000.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	574.575.561	39.160.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.285.802.500	1.025.252.500	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200.536.000	86.660.500	
1.01.02.2.02.46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	0	40.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.717.611.300	8.485.609.550	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	492.869.800	352.570.950	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	771.920.000	842.069.425	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	973.280.200	929.691.090	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	92.920.300	125.612.132	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.718.500.000	0	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	431.356.000	501.505.425	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	142.500.000	0	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	4.800.000	4.800.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.853.100.000	2.859.600.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	209.425.000	113.423.250	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	26.940.000	26.940.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	2.718.500.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.03.20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	0	10.897.278	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.022.986.000	2.431.186.000	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	185.200.000	185.200.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	56.538.500	56.538.500	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	158.400.000	1.566.600.000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30.747.500	30.747.500	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	592.100.000	592.100.000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	47.997.000	0	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	47.997.000	0	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	47.997.000	0	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	378.350.000	79.000.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	378.350.000	79.000.000	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	359.350.000	60.000.000	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.000.000	19.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	201.206.061.592	239.738.979.255	
1.02.2.14.0.00.03.00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	201.185.691.292	239.718.958.955	
1.02.2.14.0.00.03.00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.063.882.898	81.405.555.509	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.135.461.380	8.679.848.333	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.139.524.994	6.460.243.253	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.109.249.994	6.433.418.253	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.275.000	26.825.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	463.325.000	75.600.000	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	93.000.000	75.600.000	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	273.525.000	0	
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47.900.000	0	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.900.000	0	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	663.450.386	452.098.386	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.495.500	22.495.500	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.341.250	111.341.250	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.893.636	19.893.636	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.800.000	106.776.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.000.000	74.513.500	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.920.000	117.078.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	489.120.000	238.441.694	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	382.000.000	0	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.354.000	6.354.000	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.766.000	232.087.694	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	868.322.500	868.322.500	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.760.000	203.760.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	652.562.500	652.562.500	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.718.500	585.142.500	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.065.000	76.965.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.141.500	384.641.500	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.512.000	123.536.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42.771.507.218	69.624.322.326	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.675.122.813	11.513.404.849	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	783.174.473	0	
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.058.250.000	25.000.000	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	402.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.867.631.929	2.314.973.973	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.658.635.696	4.995.761.284	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.186.497.250	1.149.923.090	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.996.283.465	2.398.246.502	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	124.650.000	186.220.000	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	41.280.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.072.120.555	58.109.167.477	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	750.829.250	1.156.034.375	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	68.411.400	94.795.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99.474.950	112.539.850	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	57.499.950	132.994.500	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	169.503.950	248.886.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	28.977.500	28.977.500	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	78.839.500	178.551.600	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	37.771.500	30.159.500	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	45.897.000	40.897.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30.337.500	62.471.500	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	50.876.850	43.209.450	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	156.018.525	54.903.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	2.064.206.500	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	12.552.758.500	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	112.364.950	174.004.500	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	79.599.050	103.509.300	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.690.000	172.385.350	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	25.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	15.209.000	15.209.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	24.180.000	22.290.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	417.462.000	771.864.300	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.454.225.500	27.883.566.700	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	184.955.350	33.317.350	
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	582.088.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	11.547.845.180	7.290.567.052	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	2.619.547.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	521.934.650	521.934.650	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	115.217.000	0	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0	1.092.500.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	24.263.850	1.750.000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	14.263.850	0	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.000.000	1.750.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.769.827.250	2.452.934.750	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	1.714.752.500	1.981.335.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.665.585.000	1.981.335.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	49.167.500	0	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.074.750	471.599.750	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.074.750	471.599.750	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	93.988.100	1.605.500	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	51.662.300	0	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	51.662.300	0	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	42.325.800	1.605.500	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	42.325.800	1.605.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	293.098.950	646.844.600	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.521.550	71.231.300	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	127.521.550	71.231.300	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.677.400	426.580.800	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	105.677.400	426.580.800	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.900.000	149.032.500	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	59.900.000	149.032.500	
1.02.2.14.0.00.03.0001	UPT RSD Kab. Belitang Timur	97.338.602.545	111.673.959.062	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.274.614.999	32.891.334.899	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.611.299.999	28.194.373.899	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.599.999.999	28.189.183.899	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.300.000	5.190.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.989.000	74.858.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.989.000	74.858.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.796.000	217.597.000	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151.796.000	217.597.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.231.750.000	4.231.750.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.231.750.000	4.231.750.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.780.000	172.756.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.780.000	172.756.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60.626.975.046	71.249.011.663	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	37.576.952.500	27.969.829.104	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	0	10.663.744.682	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.131.638.300	0	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.314.089.120	311.339.120	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.053.744.682	5.200.205.500	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.077.480.398	11.794.539.802	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.050.022.546	43.279.182.559	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	13.707.847.300	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	23.050.022.546	29.571.335.259	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.437.012.500	7.533.612.500	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.437.012.500	7.533.612.500	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	7.437.012.500	7.533.612.500	
1.02.2.14.0.00.03.0002	UPT Puskesmas Manggar	8.368.107.052	6.871.100.254	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.110.716.793	5.948.909.895	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.042.803.917	4.790.092.400	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.042.803.917	4.790.092.400	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.287.000	22.287.000	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.287.000	22.287.000	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	0	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.148.854	284.398.354	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000	13.000.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.000.000	109.256.500	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.499.854	17.499.854	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.000.000	30.576.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	38.800.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.649.000	75.266.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.751.000	98.751.000	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	59.039.000	59.039.000	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.712.000	39.712.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.032.500	457.232.500	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.160.000	101.520.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	900.000	900.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.972.500	354.812.500	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.693.522	296.148.641	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.794.000	155.794.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.899.522	115.354.641	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	331.816.009	194.126.109	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	44.987.109	44.987.109	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	34.987.109	34.987.109	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.000.000	10.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	286.828.900	149.139.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.350.000	7.200.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	18.850.000	7.830.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	82.370.900	17.650.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	21.140.000	21.140.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	58.800.000	58.800.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	51.860.000	18.009.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	8.000.000	8.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	27.948.000	0	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10.510.000	10.510.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	769.062.500	674.097.500	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk IIKP	769.062.500	674.097.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	769.062.500	674.097.500	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	11.188.000	0	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	11.188.000	0	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	11.188.000	0	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	145.323.750	53.966.750	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.700.000	0	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17.700.000	0	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.810.000	16.366.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	70.810.000	16.366.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	56.813.750	37.600.750	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	56.813.750	37.600.750	
1.02.2.14.0.00.03.0003	UPT Puskesmas Mengkubang	6.895.012.046	6.588.830.366	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.957.230.856	5.841.545.026	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.915.000.000	4.915.000.000	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.915.000.000	4.915.000.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	0	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	0	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.158.500	215.526.500	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.999.000	7.999.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.473.500	78.085.500	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.025.000	10.625.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.038.000	38.500.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.500.000	53.850.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.123.000	26.467.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.223.830	67.390.000	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	13.638.000	13.638.000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.585.830	53.752.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.218.500	376.598.500	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.886.000	108.886.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	900.000	900.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.432.500	266.812.500	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.630.026	267.030.026	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.831.000	162.831.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.799.026	83.799.026	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000	20.400.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	368.701.440	178.205.590	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46.499.840	27.499.840	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27.499.840	27.499.840	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19.000.000	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	322.201.600	150.705.750	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.000.000	42.749.500	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	97.956.250	97.956.250	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	104.745.500	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	44.500.000	0	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10.000.000	10.000.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	14.999.850	0	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	301.875.000	301.875.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	301.875.000	301.875.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	301.875.000	301.875.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	4.999.450	4.999.450	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.999.450	4.999.450	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.999.450	4.999.450	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	262.205.300	262.205.300	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	262.205.300	262.205.300	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	262.205.300	262.205.300	
1.02.2.14.0.00.03.0004	UPT Puskesmas Gantung	8.563.879.827	8.293.023.043	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.833.186.827	7.614.527.543	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.673.704.000	6.377.861.000	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.673.704.000	6.377.861.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.040.000	46.060.000	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47.040.000	46.060.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	0	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.079.560	319.098.410	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.960.500	21.588.500	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	90.948.500	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.995.560	39.778.410	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.723.500	92.454.500	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.160.000	48.041.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.240.000	26.287.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.906.000	51.658.000	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.531.000	8.283.000	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.375.000	43.375.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.082.500	516.297.500	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.687.500	89.687.500	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.360.000	123.360.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.250.000	58.250.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.785.000	245.000.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.374.767	303.552.633	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.475.000	173.637.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.999.767	93.015.633	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.900.000	36.900.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	137.358.000	102.158.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	137.358.000	102.158.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.700.000	8.700.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.470.000	15.470.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.550.000	12.550.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27.150.000	32.150.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	42.000.000	0	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5.490.000	5.490.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13.200.000	15.000.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12.798.000	12.798.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	570.125.000	553.127.500	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	570.125.000	553.127.500	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	570.125.000	553.127.500	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	4.560.000	4.560.000	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.560.000	4.560.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.560.000	4.560.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.650.000	18.650.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.750.000	11.750.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	11.750.000	11.750.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.900.000	6.900.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6.900.000	6.900.000	
1.02.2.14.0.00.03.0005	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	8.601.182.588	8.291.199.942	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.832.605.088	7.725.146.942	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.299.999.968	6.298.111.072	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.299.999.968	6.298.111.072	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.778.250	34.778.250	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34.778.250	34.778.250	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	0	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.101.000	375.011.750	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.996.500	19.996.500	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.590.500	131.007.500	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.427.500	32.427.500	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.282.500	138.327.500	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.749.000	53.252.750	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.055.000	0	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.504.000	157.504.000	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	85.794.000	85.794.000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.305.000	5.305.000	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.405.000	66.405.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.937.500	524.457.500	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.400.000	104.400.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000	1.800.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.337.500	418.257.500	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.284.370	335.284.370	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	200.489.500	200.489.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Lapangan			
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.900.000	30.900.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.894.870	99.894.870	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	4.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	211.172.500	140.734.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.000.000	10.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	201.172.500	130.734.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.793.500	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.640.000	14.640.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60.765.000	38.680.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.094.500	11.093.500	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.957.500	11.957.500	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	54.582.500	31.548.500	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	33.799.500	18.274.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4.540.000	4.540.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	449.375.000	400.982.500	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	449.375.000	400.982.500	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	449.375.000	400.982.500	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	108.030.000	24.336.500	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.893.000	10.311.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	83.893.000	10.311.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.137.000	14.025.500	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.137.000	14.025.500	
1.02.2.14.0.00.03.0006	UPT Puskesmas Simpang Pesak	5.530.431.942	5.340.299.782	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.083.623.242	4.966.624.782	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.222.962.492	4.144.351.372	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.222.962.492	4.144.351.372	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.910.000	27.450.000	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.910.000	18.450.000	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.000.000	9.000.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.833.475	175.477.675	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.799.450	5.463.450	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.718.000	66.532.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.990.000	9.990.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.998.500	54.743.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.581.525	38.749.225	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.746.000	0	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.737.000	98.145.000	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	19.737.000	18.145.000	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	80.000.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.140.275	277.888.235	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.760.000	53.760.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.125.000	29.125.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.255.275	195.003.235	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.040.000	243.312.500	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.040.000	202.562.500	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.000.000	10.750.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.460.250	11.050.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.460.250	11.050.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.173.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	17.680.750	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.312.500	8.250.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.000.000	0	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.094.000	2.800.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.200.000	0	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	355.320.000	362.625.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	355.320.000	362.625.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	355.320.000	362.625.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.462.450	0	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.462.450	0	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.462.450	0	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.566.000	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.566.000	0	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.566.000	0	
1.02.2.14.0.00.03.0007	UPT Puskesmas Renggang	5.871.923.772	5.505.629.067	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.902.670.272	4.640.281.067	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.644.998.136	3.460.188.836	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.644.998.136	3.460.188.836	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.400.000	28.900.000	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.400.000	23.400.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000	5.500.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.916.605	228.751.700	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.974.380	18.042.500	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.998.300	101.280.100	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.098.500	35.426.500	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.798.500	25.341.500	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.989.925	48.661.100	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.057.000	0	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.334.510	65.334.510	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	19.095.000	19.095.000	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.239.510	46.239.510	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.092.500	619.177.500	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.480.000	124.800.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000	1.200.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.412.500	493.177.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.928.521	237.928.521	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.997.500	110.497.500	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.931.021	89.931.021	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.000.000	37.500.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	114.011.500	22.795.500	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	26.090.000	0	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.590.000	0	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24.500.000	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.921.500	22.795.500	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.498.000	7.508.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	21.993.000	10.239.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.991.000	0	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.998.500	98.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	29.997.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.950.000	4.950.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.500.000	0	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2.994.000	0	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	817.247.500	838.982.500	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	817.247.500	838.982.500	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	817.247.500	838.982.500	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	3.999.500	0	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3.999.500	0	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3.999.500	0	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	33.995.000	3.570.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.998.000	0	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	15.998.000	0	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.998.000	3.570.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	9.998.000	3.570.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.999.000	0	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.999.000	0	
1.02.2.14.0.00.03.0008	UPT Puskesmas Dendang	5.952.668.622	5.749.361.930	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.291.481.122	5.131.600.930	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.282.208.072	4.142.728.140	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.282.208.072	4.142.728.140	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.000.000	49.000.000	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.000.000	39.000.000	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.801.500	147.785.850	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.986.000	9.986.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.724.000	32.299.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.061.500	15.061.500	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.700.000	27.795.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.597.000	41.677.350	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.733.000	20.967.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.121.550	75.176.940	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.121.550	75.176.940	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.788.000	442.365.500	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	119.505.000	129.095.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	60.000.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.658.000	26.658.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.625.000	226.612.500	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.562.000	274.544.500	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.020.000	229.002.500	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.542.000	45.542.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	187.545.000	152.183.500	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.150.000	52.650.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	45.150.000	45.150.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.000.000	7.500.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.548.500	99.533.500	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.400.000	7.400.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.415.000	11.415.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.000.000	8.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.000.000	5.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	59.715.000	29.700.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27.610.000	27.610.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.912.500	1.912.500	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.496.000	2.496.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	6.000.000	6.000.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	2.846.500	0	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	2.846.500	0	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	437.575.000	449.375.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	437.575.000	449.375.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	437.575.000	449.375.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.067.500	16.202.500	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.202.500	16.202.500	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	16.202.500	16.202.500	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.865.000	0	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.865.000	0	
1.06.2.08.2.13.08.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.370.300	20.020.300	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.2.08.2.13.08.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.370.300	20.020.300	
1.02.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	20.370.300	20.020.300	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	20.370.300	20.020.300	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	20.370.300	20.020.300	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	73.906.455.019	66.750.747.758	
1.03.2.10.2.11.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73.906.455.019	66.750.747.758	
1.03.2.10.2.11.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73.906.455.019	66.750.747.758	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.401.447.721	7.573.266.581	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.300.520.676	4.423.077.586	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.300.520.676	4.423.077.586	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.090.000	23.140.000	
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46.295.000	0	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.795.000	23.140.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	645.722.645	359.981.095	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.560.000	12.977.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.400.000	90.503.500	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.371.645	1.254.595	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.276.000	85.530.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.305.000	27.030.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396.810.000	142.686.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187.843.400	45.585.400	
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.843.400	45.585.400	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.466.741.000	1.612.853.000	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	226.390.000	246.150.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	783.878.000	878.390.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.500.000	116.500.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.973.000	371.813.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.710.530.000	1.108.629.500	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	873.830.000	873.829.500	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	800.000.000	200.000.000	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.700.000	19.800.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	15.000.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11.940.404.634	10.332.220.923	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.136.608.579	6.704.814.688	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	233.450.001	233.450.001	
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	196.268.240	196.268.240	
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	3.503.124.236	3.071.330.345	
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	980.989.920	980.989.920	
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	998.708.922	998.708.922	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.198.297.260	1.198.297.260	
1.03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	25.770.000	25.770.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.803.796.055	3.627.406.235	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4.131.526.055	3.627.406.235	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	672.270.000	0	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.905.298.000	5.055.298.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.905.298.000	5.055.298.000	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	227.250.000	227.250.000	
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	936.088.000	436.088.000	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.857.150.000	3.057.150.000	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	809.500.000	459.500.000	
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	40.560.000	40.560.000	
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	634.750.000	634.750.000	
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	400.000.000	200.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.511.652.000	3.011.652.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.511.652.000	3.011.652.000	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.511.652.000	3.011.652.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.502.349.588	1.706.812.178	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.502.349.588	1.706.812.178	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	500.725.000	500.725.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.786.574.588	991.037.178	
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	215.050.000	215.050.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5.370.345.500	5.370.345.500	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5.370.345.500	5.370.345.500	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.396.737.500	1.396.737.500	
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	3.973.608.000	3.973.608.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	32.644.853.076	31.086.798.076	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	32.644.853.076	31.086.798.076	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	444.875.000	454.555.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	471.695.200	471.695.200	
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	7.359.500.000	5.784.500.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	4.223.060.000	4.223.060.000	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	2.698.500.000	2.698.500.000	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	13.730.283.800	13.730.283.800	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.716.939.076	3.724.204.076	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.630.104.500	2.614.354.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.282.257.000	1.266.507.000	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	709.457.000	709.457.000	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	572.800.000	557.050.000	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.347.847.500	1.347.847.500	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	229.800.000	229.800.000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.118.047.500	1.118.047.500	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.483.282.919	10.334.164.209	
1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.483.282.919	10.334.164.209	
1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.483.282.919	10.334.164.209	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.672.527.019	3.626.274.409	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.579.942.000	2.261.763.240	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.579.942.000	2.261.763.240	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.400.000	26.400.000	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.400.000	26.400.000	
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	20.000.000	0	
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	790.321.272	293.242.422	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.988.460	21.679.960	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	218.374.700	93.295.700	
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.161.262	15.161.262	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.253.000	77.403.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.063.850	35.963.500	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.480.000	49.739.000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.125.000	47.230.000	
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	95.125.000	47.230.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.858.247	511.158.247	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	138.040.000	138.040.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.404.000	82.704.000	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.875.000	58.875.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.539.247	231.539.247	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.880.500	486.480.500	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.512.000	89.812.000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	178.968.500	178.968.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Lapangan			
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	312.700.000	180.000.000	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.700.000	17.700.000	
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	576.334.000	576.334.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	557.585.000	557.585.000	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	557.585.000	557.585.000	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	18.749.000	18.749.000	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	18.749.000	18.749.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.766.612.350	1.689.332.550	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	222.258.350	136.878.550	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	174.861.150	90.943.850	
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	47.397.200	45.934.700	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.544.354.000	1.552.454.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.544.354.000	1.552.454.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.467.809.550	4.442.223.250	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.467.809.550	4.442.223.250	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	97.000.000	97.000.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.370.809.550	4.345.223.250	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.000.285.752	18.498.300.557	
1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja	11.011.976.180	10.922.253.093	
1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja	11.011.976.180	10.922.253.093	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.326.267.680	4.530.238.058	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.219.516.180	3.129.841.058	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.903.616.180	2.813.941.058	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	315.900.000	315.900.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.000.000	0	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.000.000	0	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.082.000	261.151.000	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.996.000	29.996.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.998.000	36.898.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.992.000	64.992.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.226.000	24.946.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.000.000	31.052.500	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.870.000	73.266.500	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	168.888.500	0	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.888.500	0	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.681.000	742.831.000	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	369.000.000	362.250.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.556.000	54.456.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326.125.000	326.125.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	628.100.000	396.415.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	596.100.000	389.765.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.000.000	6.650.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.685.708.500	6.392.015.035	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.585.796.000	6.392.015.035	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.530.321.000	4.027.831.035	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.364.184.000	2.364.184.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	224.247.000	0	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.044.000	0	
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	425.000.000	0	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	99.912.500	0	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	99.912.500	0	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.988.309.572	7.576.047.464	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.988.309.572	7.576.047.464	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.430.550.572	3.200.738.564	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.248.132.800	1.254.117.792	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.072.857.800	1.072.857.792	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	175.275.000	181.260.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.725.000	110.925.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110.925.000	110.925.000	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	0	
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	0	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.800.000	0	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.900.772	143.022.772	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000	18.000.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.999.750	36.802.250	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.999.772	24.612.272	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	19.985.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.999.250	14.149.250	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.902.000	29.474.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.435.441.000	218.187.000	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.358.800.000	148.800.000	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	50.426.000	50.672.000	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.215.000	18.715.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	941.707.500	1.090.087.500	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.600.000	19.800.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000	43.200.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	890.907.500	1.027.087.500	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.643.500	384.398.500	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.997.500	377.148.500	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.300.000	0	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.450.000	7.250.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.896.000	0	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.557.759.000	4.375.308.900	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	111.052.200	12.800.000	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	69.014.700	0	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	42.037.500	12.800.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	289.799.300	532.576.100	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	90.277.000	90.277.000	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	78.534.000	285.204.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	61.000.000	138.000.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	59.988.300	19.095.100	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.156.907.500	3.829.932.800	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.020.250.000	3.551.775.300	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	59.000.000	133.000.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	77.657.500	145.157.500	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.455.775.520	9.674.112.370	
1.06.2.08.2.13.08.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.455.775.520	9.674.112.370	
1.06.2.08.2.13.08.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.455.775.520	9.674.112.370	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.879.930.282	6.488.871.382	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.100.468.052	5.100.468.052	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.100.468.052	5.100.468.052	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.050.000	33.550.000	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.550.000	33.550.000	
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.500.000	0	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	541.265.900	297.315.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.496.500	28.496.500	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.125.000	57.675.000	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.887.500	1.887.500	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.722.500	128.392.500	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.653.400	26.910.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.381.000	53.954.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.848.000	91.448.000	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	27.586.000	25.386.000	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.262.000	66.062.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.411.000	525.051.000	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130.042.500	134.877.500	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.180.000	94.980.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.188.500	295.193.500	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.887.330	441.038.830	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.048.500	348.548.500	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.338.830	63.990.330	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	28.500.000	28.500.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Bangunan Lainnya			
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.111.966.200	1.107.125.000	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.971.000	0	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20.971.000	0	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.090.995.200	1.107.125.000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	59.586.700	50.326.500	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	103.217.000	89.250.000	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	59.204.000	57.204.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	761.022.000	841.122.000	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	107.965.500	69.222.500	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	28.499.500	0	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	28.499.500	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Asal			
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	28.499.500	0	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	697.680.400	622.361.100	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	444.937.800	403.364.800	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	64.178.000	64.178.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	49.623.000	49.623.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	63.542.300	63.542.300	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	104.691.500	63.118.500	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	41.527.000	41.527.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	121.376.000	121.376.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	252.742.600	218.996.300	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	27.280.500	27.280.500	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	59.925.500	59.925.500	
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9.042.300	0	
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	47.707.000	43.108.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	49.445.500	51.462.500	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	59.341.800	37.219.800	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	826.590.545	623.766.245	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	87.418.750	59.962.750	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	16.449.400	16.449.400	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	54.119.600	26.663.600	
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	16.849.750	16.849.750	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	739.171.795	563.803.495	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	384.636.495	282.047.695	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	354.535.300	281.755.800	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	870.520.450	791.400.500	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	173.395.500	101.917.000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	10.000.000	0	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.750.000	0	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	151.917.000	101.917.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	8.728.500	0	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	697.124.950	689.483.500	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	28.825.450	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	668.299.500	689.483.500	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	40.588.143	40.588.143	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.588.143	40.588.143	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.588.143	40.588.143	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.550.072.140	5.591.834.386	
2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.550.072.140	5.591.834.386	
2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.550.072.140	5.591.834.386	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.465.588.640	4.610.427.386	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.800.344.740	3.270.943.886	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.800.344.740	3.270.943.886	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.400.000	32.400.000	
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.400.000	32.400.000	
2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	0	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	459.862.000	203.183.500	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.997.000	8.196.000	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	37.610.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.700.000	16.280.000	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.000.000	46.304.000	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.995.000	16.947.500	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.170.000	77.846.000	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.498.000	103.935.000	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.563.000	0	
2.07.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	15.000.000	
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.935.000	88.935.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	735.778.400	738.722.000	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	338.712.500	334.062.500	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.399.000	97.668.000	
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.750.000	117.750.000	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.916.900	189.241.500	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.705.500	261.243.000	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.455.500	219.993.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.250.000	26.250.000	
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	15.000.000	15.000.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Bangunan Lainnya			
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	116.224.500	96.224.500	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	116.224.500	96.224.500	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	116.224.500	96.224.500	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	603.190.000	530.313.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	603.190.000	530.313.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	603.190.000	530.313.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	141.686.000	81.202.500	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	141.686.000	81.202.500	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	26.991.500	0	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	114.694.500	81.202.500	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	223.383.000	273.667.000	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.983.500	22.983.500	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10.588.000	10.588.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12.395.500	12.395.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	200.399.500	250.683.500	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.481.500	79.881.500	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	68.468.000	44.522.000	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	4.531.000	4.531.000	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	64.919.000	121.749.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.145.234.350	476.813.350	
1.06.2.08.2.13.08.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.145.234.350	476.813.350	
1.06.2.08.2.13.08.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.145.234.350	476.813.350	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	349.687.000	294.135.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	68.200.000	64.321.000	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	33.200.000	29.621.000	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	35.000.000	34.700.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	281.487.000	229.814.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	243.981.000	216.234.000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	37.506.000	13.580.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	112.189.950	87.835.950	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.695.000	25.095.000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.695.000	25.095.000	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.494.950	62.740.950	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	85.494.950	62.740.950	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	27.094.000	0	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.094.000	0	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27.094.000	0	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	285.000.000	0	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	285.000.000	0	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	285.000.000	0	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	325.299.400	77.510.400	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	325.299.400	77.510.400	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	325.299.400	77.510.400	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	45.964.000	17.332.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.225.000	0	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.225.000	0	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.739.000	17.332.000	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.739.000	17.332.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.040.862.916	1.516.735.016	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	2.040.862.916	1.516.735.016	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	2.040.862.916	1.516.735.016	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.062.897.916	830.596.516	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.000.000	63.000.000	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	63.000.000	63.000.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.133.416	142.209.016	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.208.500	17.208.500	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.999.600	43.997.200	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.999.316	41.999.316	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.926.000	39.004.000	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.607.000	108.972.000	
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.607.000	108.972.000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.700.000	8.700.000	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.700.000	8.700.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.457.500	507.715.500	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	390.699.500	365.957.500	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.758.000	96.758.000	
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	45.000.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	799.056.000	607.629.500	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	82.939.500	88.972.000	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	8.800.000	8.800.000	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	52.115.000	51.940.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	22.024.500	28.232.000	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	118.200.000	130.900.000	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	118.200.000	130.900.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	597.916.500	387.757.500	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	7.357.500	7.357.500	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	590.559.000	380.400.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	112.000.000	11.600.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	112.000.000	11.600.000	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	112.000.000	11.600.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	66.909.000	66.909.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	66.909.000	66.909.000	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	66.909.000	66.909.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	223.050.000	209.450.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.2.10.2.11.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	209.450.000	209.450.000	
1.03.2.10.2.11.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	209.450.000	209.450.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	209.450.000	209.450.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	209.450.000	209.450.000	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	209.450.000	209.450.000	
7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Dendang	13.600.000	0	
7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Dendang	13.600.000	0	
2.10.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.600.000	0	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.600.000	0	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	13.600.000	0	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14.755.654.739	14.416.287.150	
1.03.2.10.2.11.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	955.297.817	1.467.621.317	
1.03.2.10.2.11.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	955.297.817	1.467.621.317	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	955.297.817	1.467.621.317	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	955.297.817	1.467.621.317	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	955.297.817	1.467.621.317	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	13.800.356.922	12.948.665.833	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	13.800.356.922	12.948.665.833	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.082.225.122	5.632.919.493	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.221.650.000	3.631.808.500	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.221.650.000	3.631.808.500	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.100.000	78.100.000	
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.600.000	33.600.000	
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.500.000	44.500.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.216.288	570.425.659	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.033.000	3.840.000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.763.811	78.232.782	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.477	14.089.877	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.800.000	26.231.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.995.000	28.393.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.625.000	419.639.000	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.603.834	193.408.834	
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.500.000	48.500.000	
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.103.834	144.908.834	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.608.500	632.078.500	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.800.000	6.800.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.716.000	89.966.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	516.092.500	535.312.500	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.046.500	527.098.000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.996.500	226.544.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.900.000	271.404.000	
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.150.000	29.150.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	351.398.000	0	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	351.398.000	0	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	351.398.000	0	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	818.507.800	665.798.650	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	449.216.800	292.466.650	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,	254.969.800	198.993.650	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Air, Udara, dan Laut			
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	135.796.500	30.187.500	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	58.450.500	63.285.500	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	119.547.500	118.685.000	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	119.547.500	118.685.000	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	249.743.500	254.647.000	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	249.743.500	254.647.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	321.165.000	71.770.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	321.165.000	71.770.000	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	195.515.000	42.020.000	
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	125.650.000	29.750.000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	102.385.000	97.711.500	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	102.385.000	97.711.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	102.385.000	97.711.500	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	156.596.500	161.469.000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	156.596.500	161.469.000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	54.131.500	54.094.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.660.000	6.660.000	
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	95.805.000	100.715.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	49.697.000	0	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.697.000	0	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	49.697.000	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	248.770.000	0	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	248.770.000	0	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	248.770.000	0	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.669.612.500	6.318.997.190	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.669.612.500	6.318.997.190	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.619.187.500	6.318.997.190	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	50.425.000	0	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.824.439.110	7.022.784.427	
2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.824.439.110	7.022.784.427	
2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.824.439.110	7.022.784.427	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.828.469.286	5.027.997.165	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	20.056.000	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	20.056.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.119.298.856	3.016.858.485	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.113.963.856	3.013.958.485	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.335.000	2.900.000	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.400.000	100.282.000	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.400.000	59.400.000	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	40.882.000	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33.000.000	0	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.300.430	766.459.180	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.495.500	328.250.500	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.995.180	36.995.180	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.408.000	29.182.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.499.750	10.799.500	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.976.000	2.976.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.926.000	343.256.000	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.866.500	137.924.000	
2.12.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.500.000	70.500.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.366.500	67.424.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.298.500	529.581.500	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	243.223.500	249.306.500	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.200.000	133.400.000	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.250.000	58.250.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.625.000	88.625.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.305.000	456.836.000	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.598.000	54.129.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.907.000	251.907.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.900.000	120.900.000	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.900.000	29.900.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.587.327.000	1.078.317.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.587.327.000	1.078.317.000	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	23.840.000	23.840.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	487.789.500	487.789.500	
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	156.407.000	40.700.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	642.690.500	525.987.500	
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	276.600.000	0	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.000.645.870	585.709.870	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	374.424.370	335.724.370	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	219.940.000	200.590.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	154.484.370	135.134.370	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	549.460.000	207.462.000	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	488.522.000	207.462.000	
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	60.938.000	0	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	76.761.500	42.523.500	
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	76.761.500	42.523.500	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	326.644.454	252.262.892	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	251.798.954	188.114.892	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	211.798.954	188.114.892	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	40.000.000	0	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.000.000	29.302.500	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.000.000	29.302.500	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	34.845.500	34.845.500	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	34.845.500	34.845.500	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	81.352.500	78.497.500	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	81.352.500	78.497.500	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	45.880.000	45.880.000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	35.472.500	32.617.500	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.042.838.500	2.266.352.550	
1.06.2.08.2.13.08.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.518.738.500	1.854.984.050	
1.06.2.08.2.13.08.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.518.738.500	1.854.984.050	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	99.699.950	0	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	99.699.950	0	
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	45.100.000	0	
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	54.599.950	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	88.582.300	40.612.500	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	88.582.300	40.612.500	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	47.321.500	40.612.500	
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	41.260.800	0	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.476.871.650	1.255.650.150	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.476.871.650	1.255.650.150	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	690.276.000	659.981.000	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	44.711.000	0	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	160.010.750	128.652.750	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	213.610.750	168.470.750	
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	72.720.800	53.237.800	
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	46.409.650	46.409.650	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	172.560.500	152.294.500	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	42.105.800	29.203.800	
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	17.399.900	17.399.900	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	17.066.500	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	853.584.600	558.721.400	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	853.584.600	558.721.400	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	502.185.600	339.117.400	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	114.020.500	62.921.500	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	176.679.500	156.682.500	
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	60.699.000	0	
7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Kelapa Kampit	32.000.000	27.621.000	
7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Kelapa Kampit	32.000.000	27.621.000	
2.13.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32.000.000	27.621.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.000.000	27.621.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32.000.000	27.621.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Damar	11.600.000	11.600.000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Damar	11.600.000	11.600.000	
2.13.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.600.000	11.600.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.600.000	11.600.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.600.000	11.600.000	
7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Dendang	480.500.000	372.147.500	
7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Dendang	480.500.000	372.147.500	
2.13.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.100.000	58.606.500	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	78.100.000	58.606.500	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	78.100.000	58.606.500	
2.13.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	402.400.000	313.541.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	402.400.000	313.541.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28.100.000	23.500.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.600.000	17.600.000	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	356.700.000	272.441.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	3.701.512.044	3.553.370.344	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	BERENCANA			
1.02.2.14.0.00.03.00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.701.512.044	3.553.370.344	
1.02.2.14.0.00.03.00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.701.512.044	3.553.370.344	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	848.899.800	729.235.200	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	114.935.100	91.368.500	
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	19.986.500	17.479.000	
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	38.284.300	30.352.500	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	41.674.300	36.042.000	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	14.990.000	7.495.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	733.964.700	637.866.700	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi	29.644.000	29.644.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Program KKBPK di Sektor Lain			
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	75.000.000	0	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	389.623.000	368.525.000	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	239.697.700	239.697.700	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.637.081.494	2.670.262.394	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.329.337.494	889.317.400	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	35.156.500	0	
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	42.224.000	123.234.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	362.883.000	246.255.400	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	889.073.994	519.828.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	302.585.000	487.550.000	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	302.585.000	300.350.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	187.200.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	406.216.000	944.514.994	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	396.216.000	122.862.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	273.354.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	538.298.994	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10.000.000	10.000.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	598.943.000	348.880.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	0	348.880.000	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	598.943.000	0	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	215.530.750	153.872.750	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	92.427.000	31.211.500	
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	33.894.000	31.211.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	58.533.000	0	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	123.103.750	122.661.250	
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18.264.000	17.821.500	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	104.839.750	104.839.750	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.987.465.523	18.617.601.109	
2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	19.987.465.523	18.617.601.109	
2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	19.987.465.523	18.617.601.109	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.882.609.089	6.122.048.075	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.955.843.441	2.719.104.365	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.955.843.441	2.719.104.365	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000	0	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	0	
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	0	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	816.081.710	557.695.210	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	11.650.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	64.804.000	
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.983.810	36.097.310	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.995.500	8.002.500	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.325.400	37.345.400	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	579.777.000	399.796.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.292.392.500	1.308.883.500	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.195.234.500	1.195.234.500	
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.158.000	113.649.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.408.000	697.578.000	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.890.000	6.890.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.123.000	105.903.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	625.395.000	584.785.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.012.883.438	838.787.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	953.490.000	819.287.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.893.438	0	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.500.000	19.500.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.234.462.449	11.723.389.049	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.117.089.695	7.069.895.295	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.150.775.718	5.150.775.718	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.966.313.977	1.919.119.577	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	137.103.104	137.103.104	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	137.103.104	137.103.104	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	11.803.500	11.803.500	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	11.803.500	11.803.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.161.236.920	4.144.786.920	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.050.600.920	4.050.600.920	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	28.900.000	14.450.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	81.736.000	79.736.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	385.543.230	287.126.730	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	135.252.890	135.252.890	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	117.199.660	87.269.660	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	71.546.500	0	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	61.544.180	64.604.180	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.452.500	2.452.500	
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	2.452.500	2.452.500	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	133.096.000	0	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	74.898.000	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	58.198.000	0	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	216.212.500	70.221.000	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	91.221.000	70.221.000	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	124.991.500	0	
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	69.925.000	0	
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	69.925.000	0	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	870.393.985	772.163.985	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	49.115.000	0	
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	49.115.000	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	821.278.985	772.163.985	
2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	49.115.000	0	
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	772.163.985	772.163.985	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.490.182.554	11.645.309.570	
2.16.2.20.2.21.04.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.490.182.554	11.645.309.570	
2.16.2.20.2.21.04.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.490.182.554	11.645.309.570	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.246.683.054	5.633.443.745	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.399.133.070	4.199.133.062	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.399.133.070	4.199.133.062	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.400.000	42.000.000	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.400.000	42.000.000	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	0	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	0	
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	0	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	474.254.612	197.872.311	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.985.500	11.646.925	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	39.424.600	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.943.262	45.349.286	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.999.850	17.596.500	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.326.000	83.855.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.862.500	185.396.500	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	12.384.000	12.384.000	
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.478.500	173.012.500	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	660.032.872	548.741.872	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	193.616.500	192.516.500	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.300.000	154.780.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.116.372	201.445.372	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.000.000	460.300.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.350.000	187.050.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	218.650.000	248.250.000	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.000.000	21.000.000	
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	4.000.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.064.282.000	1.353.900.840	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.064.282.000	1.353.900.840	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	340.737.500	499.946.280	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	327.279.500	365.818.400	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	352.674.500	442.488.660	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	43.590.500	45.647.500	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	7.179.217.500	4.657.964.985	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.421.309.000	3.550.621.500	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.421.309.000	3.550.621.500	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.757.908.500	1.107.343.485	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	3.186.125.000	701.141.485	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	75.687.500	59.487.500	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	29.194.000	4.390.000	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	23.850.000	14.400.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	443.052.000	327.924.500	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.149.009.050	849.915.450	
2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.149.009.050	849.915.450	
2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.149.009.050	849.915.450	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	79.948.500	26.468.950	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	79.948.500	26.468.950	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	79.948.500	26.468.950	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	266.623.000	201.204.750	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	266.623.000	201.204.750	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	266.623.000	201.204.750	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	278.691.300	204.338.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan,	278.691.300	204.338.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	16.924.500	0	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	261.766.800	204.338.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	523.746.250	417.903.750	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	523.746.250	417.903.750	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	523.746.250	417.903.750	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.468.985.516	8.069.834.994	
2.18.3.30.3.31.13.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	8.468.985.516	8.069.834.994	
2.18.3.30.3.31.13.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	8.468.985.516	8.069.834.994	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.625.177.585	7.179.595.503	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.951.981.494	5.027.499.468	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.951.981.494	5.027.499.468	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.099.000	0	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.099.000	0	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	735.826.519	433.645.313	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.985.000	24.731.500	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.515.514	112.693.058	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.087.665	56.623.415	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.515.000	24.564.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108.682.340	108.682.340	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.380.000	7.380.000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.228.000	4.228.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	385.433.000	94.743.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181.721.722	94.253.722	
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.200.000	0	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	28.160.000	13.498.000	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.361.722	80.755.722	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.366.151.350	1.317.487.500	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	245.870.000	245.870.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.883.850	246.740.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	873.397.500	824.877.500	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.397.500	306.709.500	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	281.997.500	258.143.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Lapangan			
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.400.000	19.066.000	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	29.500.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	95.000.000	95.000.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	95.000.000	95.000.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	95.000.000	95.000.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	155.823.500	112.735.500	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	155.823.500	112.735.500	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	155.823.500	112.735.500	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	287.842.071	277.379.721	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	287.842.071	277.379.721	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	271.572.350	261.110.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	16.269.721	16.269.721	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	258.214.500	369.963.500	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	258.214.500	369.963.500	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	258.214.500	369.963.500	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	46.927.860	35.160.770	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.927.860	35.160.770	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	46.927.860	35.160.770	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.449.439.298	18.006.761.522	
2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	20.426.839.298	17.987.422.022	
2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	20.426.839.298	17.987.422.022	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.035.352.048	5.504.956.622	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.689.000	82.765.000	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.689.000	82.765.000	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.214.009.000	2.387.367.024	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.214.009.000	2.387.367.024	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.482.000	47.132.000	
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.482.000	47.132.000	
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.000.000	0	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.314.008	369.633.608	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.047.000	11.019.300	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.542.000	142.248.000	
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.393.508	19.393.508	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.479.500	47.399.500	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.869.000	20.670.800	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.946.000	23.720.500	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.037.000	105.182.000	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	484.205.000	61.066.000	
2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	438.714.000	18.300.000	
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	45.491.000	42.766.000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.173.483.500	2.065.463.500	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	720.062.500	720.062.500	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	486.910.000	329.960.000	
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.875.000	203.875.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	762.636.000	811.566.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.169.540	491.529.490	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.446.000	348.446.000	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.000.000	33.000.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.723.540	110.083.490	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.034.763.500	1.643.934.500	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.363.396.500	1.194.893.000	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	96.731.000	91.800.000	
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	174.033.000	164.033.000	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1.092.632.500	939.060.000	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	671.367.000	449.041.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	250.000.000	84.730.500	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	421.367.000	364.311.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.124.723.750	10.686.421.550	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.131.461.250	2.090.587.050	
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	111.394.500	127.769.000	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2.020.066.750	1.962.818.050	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	961.366.000	562.320.500	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	841.472.000	447.978.500	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	119.894.000	114.342.000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.186.396.500	803.299.000	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	517.024.500	293.717.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	49.835.000	0	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	547.537.000	509.582.000	
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	72.000.000	0	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	7.025.910.000	7.013.944.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6.967.490.000	6.967.490.000	
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	58.420.000	46.454.000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	819.590.000	216.271.000	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	386.290.000	38.568.000	
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	144.050.000	47.826.000	
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	289.250.000	129.877.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	232.000.000	152.109.350	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	232.000.000	152.109.350	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	232.000.000	152.109.350	
7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Dendang	22.600.000	19.339.500	
7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Dendang	22.600.000	19.339.500	
2.19.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.600.000	19.339.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	22.600.000	19.339.500	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	22.600.000	19.339.500	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	424.059.700	373.881.700	
2.16.2.20.2.21.04.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	424.059.700	373.881.700	
2.16.2.20.2.21.04.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	424.059.700	373.881.700	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	424.059.700	373.881.700	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	424.059.700	373.881.700	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	276.734.700	244.670.700	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	64.800.000	64.573.500	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	17.600.000	0	
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	64.925.000	64.637.500	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	311.174.350	244.632.050	
2.16.2.20.2.21.04.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	311.174.350	244.632.050	
2.16.2.20.2.21.04.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	311.174.350	244.632.050	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	311.174.350	244.632.050	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	272.866.500	206.324.200	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66.542.300	0	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	206.324.200	206.324.200	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	38.307.850	38.307.850	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.307.850	38.307.850	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.255.179.301	8.287.265.207	
2.22.3.26.0.00.03.00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.255.179.301	8.287.265.207	
2.22.3.26.0.00.03.00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.255.179.301	8.287.265.207	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.083.207.043	5.642.617.193	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.329.464.775	3.313.504.775	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.313.504.775	3.313.504.775	
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.960.000	0	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.926.000	0	
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.926.000	0	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	722.971.768	607.267.918	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	25.000.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.500.000	51.820.500	
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.500.000	38.500.000	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.835.908	59.037.408	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.499.860	31.476.010	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	498.636.000	401.434.000	
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	352.555.500	93.555.500	
2.22.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259.000.000	0	
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.555.500	93.555.500	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.062.712.500	1.062.712.500	
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.400.000	157.400.000	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	903.812.500	903.812.500	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.576.500	565.576.500	
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.694.500	88.694.500	
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.947.000	320.947.000	
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.840.000	59.840.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.095.000	96.095.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.841.747.000	2.319.923.750	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.094.755.000	1.566.435.750	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	677.446.250	846.453.500	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	417.308.750	719.982.250	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	746.992.000	753.488.000	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	672.413.000	753.488.000	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	74.579.000	0	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	122.633.650	122.633.650	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	122.633.650	122.633.650	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	122.633.650	122.633.650	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	207.591.608	202.090.614	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	207.591.608	202.090.614	
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	160.431.108	160.429.108	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	47.160.500	41.661.506	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.623.651.673	5.137.860.823	
2.23.2.24.0.00.02.00	Dinas Perpustakaan	5.623.651.673	5.137.860.823	
2.23.2.24.0.00.02.00	Dinas Perpustakaan	5.623.651.673	5.137.860.823	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.205.577.302	3.976.926.202	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.976.409.278	2.976.409.278	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.976.409.278	2.976.409.278	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.600.000	24.600.000	
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.600.000	24.600.000	
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	0	
2.23.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	0	
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	0	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.601.824	189.978.324	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.456.500	17.456.500	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.499.600	56.948.100	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.989.224	20.989.224	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.892.000	17.077.000	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.136.500	15.632.500	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.628.000	61.875.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.759.500	94.759.500	
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.759.500	94.759.500	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.852.700	501.186.100	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.748.000	3.545.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.567.200	101.103.600	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.537.500	396.537.500	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.354.000	189.993.000	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.473.500	42.417.000	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.083.500	105.779.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.100.000	9.100.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.197.000	23.197.000	
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.500.000	9.500.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.418.074.371	1.160.934.621	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.072.567.871	1.016.058.621	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0	159.100.000	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	661.787.550	461.886.300	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	268.210.000	182.538.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	142.570.321	212.534.321	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	345.506.500	144.876.000	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	97.635.000	43.214.500	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	247.871.500	101.661.500	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	366.718.339	280.005.539	
2.23.2.24.0.00.02.00	Dinas Perpustakaan	366.718.339	280.005.539	
2.23.2.24.0.00.02.00	Dinas Perpustakaan	366.718.339	280.005.539	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	338.988.839	280.005.539	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	42.348.000	40.739.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	42.348.000	40.739.000	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	108.900.500	88.608.500	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	108.900.500	88.608.500	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	187.740.339	150.658.039	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	92.818.039	73.057.039	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	94.922.300	77.601.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	27.729.500	0	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	27.729.500	0	
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	27.729.500	0	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.430.539.230	11.714.708.662	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	13.430.539.230	11.714.708.662	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	13.430.539.230	11.714.708.662	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.427.471.006	5.599.249.618	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.050.000	16.930.000	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.050.000	16.930.000	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.888.993.510	3.707.033.510	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.888.993.510	3.707.033.510	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.600.000	51.200.000	
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.400.000	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.200.000	51.200.000	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.092.850	394.376.367	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.265.500	98.553.250	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.446.500	133.675.217	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.145.000	52.427.050	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.966.850	38.627.850	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420.269.000	71.093.000	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.875.800	196.034.300	
3.25.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.880.000	0	
3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.995.800	196.034.300	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.590.186	589.656.781	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	319.747.100	315.989.420	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.800.000	48.000.000	
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.125.000	29.125.000	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.918.086	196.542.361	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.268.660	644.018.660	
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	291.996.000	293.746.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	298.772.660	298.772.660	
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.500.000	51.500.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.211.149.924	2.822.897.424	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.577.853.000	1.356.294.000	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	95.509.500	66.950.500	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	339.437.500	161.437.500	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.142.906.000	1.127.906.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	396.062.000	306.333.000	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	157.616.000	79.303.000	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	238.446.000	227.030.000	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.237.234.924	1.160.270.424	
3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	502.234.924	425.270.424	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	735.000.000	735.000.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.375.277.500	1.927.630.250	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	134.604.500	0	
3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	78.150.500	0	
3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	56.454.000	0	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	112.662.000	51.107.500	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	112.662.000	51.107.500	
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	84.903.500	39.835.000	
3.25.04.2.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.728.500	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.175.000	39.835.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.043.107.500	1.836.687.750	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.187.500	39.987.500	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	869.663.500	912.047.750	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	950.917.500	814.917.500	
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	182.339.000	69.735.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.416.640.800	1.364.931.370	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	90.058.000	86.435.500	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.058.000	86.435.500	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	445.265.000	216.752.000	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	445.265.000	216.752.000	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	881.317.800	1.061.743.870	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	516.378.000	498.124.070	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	364.939.800	563.619.800	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	9.813.155.250	7.746.307.870	
2.22.3.26.0.00.03.00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.813.155.250	7.746.307.870	
2.22.3.26.0.00.03.00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.813.155.250	7.746.307.870	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.611.958.950	5.356.631.720	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.611.958.950	5.356.631.720	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.034.944.750	3.000.179.540	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.518.217.750	2.291.494.230	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	58.796.450	64.957.950	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.802.703.950	1.342.851.500	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.802.703.950	1.342.851.500	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.124.660.000	650.620.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.479.340.950	493.528.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	198.703.000	198.703.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.398.492.350	1.046.824.650	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.398.492.350	1.046.824.650	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	278.947.450	726.780.350	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	72.567.600	188.044.650	
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	994.577.800	131.999.650	
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	52.399.500	0	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	15.843.599.794	15.458.046.031	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	15.843.599.794	15.458.046.031	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	15.843.599.794	15.458.046.031	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.907.295.472	8.979.579.709	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.099.999.972	8.184.844.309	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.099.999.972	8.184.844.309	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.000.000	15.500.000	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.500.000	4.500.000	
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000	11.000.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.133.000	69.996.900	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.133.000	34.997.000	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	34.999.900	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	2.000.000	
3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	2.000.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	708.162.500	707.238.500	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.576.000	84.576.000	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.250.000	58.250.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	565.336.500	564.412.500	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.694.267.500	2.688.623.500	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.324.516.000	2.336.756.000	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	34.182.500	34.182.500	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.290.333.500	2.302.573.500	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	113.860.500	95.976.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	113.860.500	95.976.500	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.791.000	56.791.000	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	56.791.000	56.791.000	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	199.100.000	199.100.000	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	199.100.000	199.100.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.163.875.000	3.127.917.500	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.163.875.000	3.127.917.500	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.140.000.000	1.140.000.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.626.287.500	1.610.330.000	
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	200.000.000	200.000.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	197.587.500	177.587.500	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	249.937.122	241.737.122	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	249.937.122	241.737.122	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	249.937.122	241.737.122	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	46.963.200	46.963.200	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	46.963.200	46.963.200	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	46.963.200	46.963.200	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	47.349.500	47.349.500	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.349.500	47.349.500	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	47.349.500	47.349.500	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	733.912.000	325.875.500	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	733.912.000	325.875.500	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	312.112.000	178.072.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	321.800.000	47.803.500	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100.000.000	100.000.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.130.551.619	2.701.125.893	
2.18.3.30.3.31.13.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	5.130.551.619	2.701.125.893	
2.18.3.30.3.31.13.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	5.130.551.619	2.701.125.893	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.682.895.612	1.386.517.836	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.511.683.412	1.221.451.836	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.511.683.412	1.221.451.836	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	171.212.200	165.066.000	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	171.212.200	165.066.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.030.099.950	1.012.521.450	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.030.099.950	1.012.521.450	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	33.799.950	27.088.950	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	996.300.000	985.432.500	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	104.414.450	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	104.414.450	0	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	18.249.500	0	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	86.164.950	0	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	313.141.607	302.086.607	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	313.141.607	302.086.607	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	285.641.857	283.058.357	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	27.499.750	19.028.250	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.368.806.760	757.072.170	
2.18.3.30.3.31.13.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	1.368.806.760	757.072.170	
2.18.3.30.3.31.13.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	1.368.806.760	757.072.170	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.311.609.760	712.208.170	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.311.609.760	712.208.170	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	340.298.170	169.169.670	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	38.202.500	12.750.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	891.867.590	489.847.000	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	41.241.500	40.441.500	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	57.197.000	44.864.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	57.197.000	44.864.000	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	57.197.000	44.864.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	45.620.448.257	42.460.018.930	
1.01.4.01.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.694.792.000	0	
1.01.4.01.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.694.792.000	0	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.694.792.000	0	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.694.792.000	0	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.694.792.000	0	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	43.925.656.257	42.460.018.930	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	10.547.400.795	10.997.400.795	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.547.400.795	10.997.400.795	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.890.060.795	10.340.060.795	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.890.060.795	10.340.060.795	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	657.340.000	657.340.000	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	237.340.000	237.340.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	420.000.000	420.000.000	
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bidang Pemerintahan dan Sosial	10.639.874.533	11.768.663.834	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.639.874.533	11.768.663.834	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	599.179.834	500.452.834	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	529.459.834	428.032.834	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	20.820.000	72.420.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	48.900.000	0	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.815.502.849	10.225.957.400	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.252.337.500	8.275.744.700	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	291.774.949	14.692.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	271.390.400	1.935.520.700	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.084.671.850	888.290.100	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	189.644.850	189.644.850	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	541.446.250	477.824.500	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	353.580.750	220.820.750	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.02.2.04	Fasilitas Kerjasama Daerah	140.520.000	153.963.500	
4.01.02.2.04.01	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	135.171.000	149.715.500	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5.349.000	4.248.000	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.998.405.739	1.896.311.011	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.998.405.739	1.896.311.011	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	440.635.125	299.272.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	126.200.000	51.171.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	219.153.125	204.402.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	95.282.000	43.699.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	201.613.400	195.294.697	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	71.986.900	75.356.400	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	129.626.500	119.938.297	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.066.971.814	1.298.533.914	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	549.666.264	414.293.914	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	517.626.500	400.390.500	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	999.679.050	483.849.500	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	289.185.400	103.210.400	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	289.185.400	103.210.400	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bidang Administrasi Umum	19.739.975.190	17.797.643.290	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.739.975.190	17.797.643.290	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.876.600	60.806.300	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.876.600	60.806.300	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.779.500	84.583.500	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.622.500	65.806.500	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.157.000	18.777.000	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	508.938.500	280.672.500	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	169.508.500	169.508.500	
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	147.475.000	24.000.000	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	191.955.000	87.164.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.844.196.340	4.853.810.490	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	160.000.000	198.776.500	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.241.995.390	1.063.062.990	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.054.257.500	2.554.257.500	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135.989.450	165.989.500	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.251.954.000	871.724.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.108.646.170	1.724.421.670	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	994.000.000	0	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	793.300.000	647.000.000	
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	568.100.000	303.220.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	753.246.170	774.201.670	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.079.427.080	4.855.541.580	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.112.187.500	1.156.377.500	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	507.948.000	699.190.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.459.291.580	2.999.974.080	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.484.296.500	4.708.719.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.967.097.500	2.966.100.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.000.000	165.000.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.129.499.000	1.314.619.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	278.700.000	263.000.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	137.795.000	194.195.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	117.795.000	184.195.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000	10.000.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	670.333.000	488.500.750	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	236.022.500	183.888.250	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	123.777.000	86.901.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	214.479.000	145.833.000	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	96.054.500	71.878.500	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	767.686.500	546.392.500	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	628.942.500	546.392.500	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	138.744.000	0	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	32.942.818.063	29.382.401.563	
4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	32.942.818.063	29.382.401.563	
4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	32.942.818.063	29.382.401.563	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.602.819.063	18.866.408.563	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.688.590.440	3.088.590.440	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.661.260.440	3.061.260.440	
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.330.000	27.330.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	305.584.000	81.133.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.600.000	45.600.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	259.984.000	35.533.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.362.273.000	1.022.127.000	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	48.308.000	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	287.312.000	287.312.000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	95.700.000	95.700.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.977.000	349.977.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	130.000.000	130.000.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.284.000	110.830.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295.981.500	131.200.000	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	49.020.000	0	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.961.500	131.200.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.522.199.000	1.522.199.000	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.199.000	380.199.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.127.000.000	1.127.000.000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	843.090.000	448.400.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.120.000	178.120.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.280.000	270.280.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	394.690.000	0	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12.211.601.123	12.199.259.123	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.583.117.123	11.683.117.123	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	229.900.000	129.900.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	398.584.000	386.242.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	373.500.000	373.500.000	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	193.500.000	193.500.000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100.000.000	100.000.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	80.000.000	80.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.339.999.000	10.515.993.000	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.628.668.500	1.121.817.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.513.444.000	1.056.842.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	50.249.500	0	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	64.975.000	64.975.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	54.754.000	54.727.000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	9.684.500	9.684.500	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	9.796.000	9.796.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	9.532.500	9.519.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	9.532.500	9.519.000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	6.412.500	6.412.500	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	9.796.000	9.796.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.041.640.500	50.133.500	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	149.116.500	5.691.500	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	149.116.500	5.691.500	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	149.116.500	5.691.500	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	149.116.500	5.691.500	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	149.116.500	5.691.500	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	149.337.000	6.610.000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	73.360.500	8.225.500	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	73.360.500	6.840.500	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.866.454.500	1.359.843.500	
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	888.717.000	382.106.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	167.000.000	167.000.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	402.000.000	402.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	216.000.000	216.000.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	192.737.500	192.737.500	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	733.208.500	414.199.000	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	48.798.500	0	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	197.047.000	8.730.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	487.363.000	405.469.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	8.015.273.000	7.515.273.000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.811.029.000	7.311.029.000	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	18.000.000	18.000.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	186.244.000	186.244.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN	10.824.757.050	8.694.386.990	
5.01.5.05.0.00.02.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.824.757.050	8.694.386.990	
5.01.5.05.0.00.02.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.824.757.050	8.694.386.990	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.122.528.250	5.937.789.740	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.604.999.600	3.704.909.600	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.604.999.600	3.704.909.600	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	184.938.500	153.138.500	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.600.000	31.800.000	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	5.000.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	0	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	116.338.500	116.338.500	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	800.222.900	511.261.390	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.238.500	17.238.500	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.665.000	93.394.250	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.059.500	30.653.500	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.977.000	28.553.500	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.351.900	29.324.640	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	558.931.000	312.097.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	403.979.750	441.022.750	
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	18.485.000	18.485.000	
5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	201.100.000	201.100.000	
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.394.750	221.437.750	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.917.500	868.307.500	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.230.000	8.230.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.650.000	111.040.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	749.037.500	749.037.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.470.000	259.150.000	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.540.000	41.220.000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.330.000	136.330.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.600.000	61.600.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.252.439.000	973.480.000	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	915.388.000	729.530.500	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	22.878.500	5.895.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	103.884.000	23.164.500	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	9.696.500	630.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	778.929.000	699.841.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	337.051.000	243.949.500	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	337.051.000	243.949.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.449.789.800	1.783.117.250	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	735.695.300	529.427.750	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	371.947.550	294.980.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	363.747.750	234.447.750	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.452.660.000	640.781.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.183.751.000	563.960.000	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	268.909.000	76.821.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.261.434.500	612.908.500	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	783.312.000	412.719.000	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	478.122.500	200.189.500	
5.02	KEUANGAN	121.830.394.071	120.206.273.397	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	121.830.394.071	120.206.273.397	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	121.830.394.071	120.206.273.397	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.213.882.522	12.228.132.260	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.798.896.241	10.348.854.893	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.798.896.241	10.348.854.893	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.020.000	34.030.000	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.520.000	34.030.000	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.500.000	0	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.500.000	0	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.500.000	0	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.925.115	387.800.110	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.999.500	13.972.000	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.999.115	70.502.610	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	15.000.000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.999.500	28.749.500	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.927.000	239.576.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	313.487.003	293.620.594	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	31.416.000	31.416.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.491.003	189.374.594	
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.580.000	72.830.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.969.000	572.034.000	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.510.000	70.510.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.974.000	218.474.000	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.795.000	29.125.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.690.000	253.925.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	646.585.163	591.792.663	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.750.000	103.750.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265.489.500	210.697.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.405.000	187.405.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.990.663	39.990.663	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.950.000	49.950.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	108.654.699.999	106.303.058.887	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	919.514.100	794.465.950	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	131.028.500	118.319.500	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	89.519.500	78.869.500	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	183.348.400	162.150.200	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	172.565.450	224.596.750	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	18.854.700	9.259.000	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	18.804.750	10.059.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	58.290.300	54.206.850	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	73.290.500	62.911.150	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	173.812.000	74.094.000	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	673.575.250	648.381.250	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	321.290.000	314.021.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31.686.250	37.829.750	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	194.023.000	164.806.500	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	97.535.000	97.185.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	29.041.000	34.539.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	295.715.500	301.580.000	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	25.489.000	25.489.000	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	33.695.500	28.970.500	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	123.722.000	112.558.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	60.445.500	48.414.000	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	17.995.000	68.074.000	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	16.294.000	0	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	18.074.500	18.074.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	106.765.895.149	104.558.631.687	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	96.261.343.663	94.575.508.500	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.475.616.257	946.960.362	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.028.935.229	9.036.162.825	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	781.671.700	675.587.650	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	781.671.700	675.587.650	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	67.749.900	62.748.900	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	40.599.500	22.441.400	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	47.599.900	50.970.400	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	223.479.500	228.477.500	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	207.930.000	237.040.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	47.594.000	47.594.000	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	49.150.450	0	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	97.568.450	26.315.450	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.180.139.850	999.494.600	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.180.139.850	999.494.600	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	55.950.000	26.482.700	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	180.000.000	130.066.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	51.372.750	38.808.000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	339.426.000	279.744.900	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	43.674.850	29.267.050	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	509.716.250	495.125.950	
5.03	KEPEGAWAIAN	9.447.361.994	7.894.116.088	
5.03.5.04.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.447.361.994	7.894.116.088	
5.03.5.04.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.447.361.994	7.894.116.088	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.425.872.729	5.493.989.873	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.199.972.651	2.893.208.495	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.199.972.651	2.893.208.495	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.850.000	30.450.000	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.450.000	30.450.000	
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72.400.000	0	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	812.364.972	478.296.772	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.998.000	20.434.500	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.799.522	51.109.272	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.750.000	62.760.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.399.950	19.950.000	
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.547.500	6.265.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	599.870.000	317.778.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	901.622.606	879.482.606	
5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	589.379.406	589.379.406	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.243.200	290.103.200	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.124.000	736.124.000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	251.480.000	251.480.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.016.000	166.016.000	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.715.000	82.715.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.913.000	235.913.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	647.938.500	476.428.000	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.115.000	75.686.000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.831.500	269.750.000	
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	0	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.492.000	65.492.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.500.000	65.500.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.021.489.265	2.400.126.215	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.050.485.100	1.158.017.250	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	83.562.350	75.029.000	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	549.293.250	866.428.750	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	78.315.500	80.485.500	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	151.152.500	0	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	188.161.500	136.074.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	622.149.165	435.223.665	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	20.738.000	37.054.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	179.849.665	196.554.665	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	421.561.500	201.615.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.080.390.500	705.154.800	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	83.754.500	67.173.500	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	199.036.000	0	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	797.600.000	637.981.300	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	268.464.500	101.730.500	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	168.072.500	68.098.500	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	53.173.000	0	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	47.219.000	33.632.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.857.397.200	2.134.440.100	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.5.04.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.857.397.200	2.134.440.100	
5.03.5.04.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.857.397.200	2.134.440.100	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.857.397.200	2.134.440.100	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	426.715.900	135.302.600	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	426.715.900	135.302.600	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.430.681.300	1.999.137.500	
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.428.238.500	960.646.500	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.002.442.800	1.038.491.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.061.039.350	2.160.465.500	
5.01.5.05.0.00.02.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.061.039.350	2.160.465.500	
5.01.5.05.0.00.02.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.061.039.350	2.160.465.500	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.061.039.350	2.160.465.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	95.276.300	122.245.500	
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	95.276.300	122.245.500	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.115.859.000	1.385.362.000	
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	675.302.000	493.909.500	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	338.568.000	311.928.000	
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	431.940.000	5.400.500	
5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	336.455.000	280.480.500	
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	333.594.000	293.643.500	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	849.904.050	652.858.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	190.784.600	283.230.500	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	659.119.450	369.627.500	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	9.614.517.132	8.437.409.698	
6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat	9.614.517.132	8.437.409.698	
6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat	9.614.517.132	8.437.409.698	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.586.448.432	6.493.111.498	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.814.051.560	4.312.493.576	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.806.071.560	4.304.513.576	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.980.000	7.980.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	485.982.000	85.159.050	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	485.982.000	85.159.050	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	765.908.200	609.995.200	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	25.000.000	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.999.200	158.747.200	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.730.000	51.730.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.179.000	374.518.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	415.934.000	415.934.000	
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	269.541.000	269.541.000	
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.393.000	146.393.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.929.850	444.159.850	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	153.150.000	165.050.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.255.000	128.255.000	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.545.000	88.875.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.979.850	61.979.850	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	674.642.822	625.369.822	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	378.362.500	329.089.500	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.930.322	196.930.322	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.350.000	99.350.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.394.058.200	1.492.258.200	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.132.893.200	1.189.693.200	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	68.945.200	128.695.200	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	270.238.000	270.238.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	115.500.000	115.500.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	221.100.000	218.150.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	247.250.000	247.250.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	209.860.000	209.860.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	261.165.000	302.565.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	97.365.000	97.365.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	163.800.000	205.200.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	634.010.500	452.040.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	634.010.500	452.040.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	455.212.000	419.740.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	178.798.500	32.300.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN	25.838.785.515	25.962.199.065	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Manggar	4.024.069.093	4.175.256.043	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Manggar	4.024.069.093	4.175.256.043	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.386.907.112	3.206.479.112	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.152.487.704	2.169.587.704	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.152.487.704	2.169.587.704	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.000.000	0	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	0	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	0	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	429.228.408	246.227.908	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.997.000	30.072.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	35.979.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.999.908	31.449.908	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.899.500	69.475.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	30.980.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.332.000	48.272.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.913.500	496.129.500	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225.179.000	225.395.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.400.000	80.400.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.125.000	29.125.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.209.500	161.209.500	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.277.500	294.534.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.745.000	179.738.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.532.500	89.896.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	24.900.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.259.750	49.756.450	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.759.750	18.759.750	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.759.750	18.759.750	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	53.500.000	30.996.700	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	53.500.000	30.996.700	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.048.000	517.940.000	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.048.000	517.940.000	
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.048.000	517.940.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	540.854.231	401.080.481	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	540.854.231	401.080.481	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	71.599.750	71.599.750	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.986.000	11.088.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.999.800	7.999.800	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	451.268.681	310.392.931	
7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Gantung	4.353.344.829	4.389.010.819	
7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Gantung	4.353.344.829	4.389.010.819	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.834.373.529	3.669.296.294	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.183.999.997	2.183.998.997	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.183.999.997	2.183.998.997	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000	0	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	0	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	0	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.921.282	166.593.882	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.076.982	53.999.982	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.999.000	5.999.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.000.000	51.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.998.300	10.999.900	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.847.000	24.595.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	375.023.250	408.377.415	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.000.000	65.400.000	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.750.000	194.750.000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.273.250	148.227.415	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	538.843.000	525.943.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	281.000.000	281.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	47.100.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.125.000	29.125.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.718.000	168.718.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.586.000	384.383.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.742.000	198.187.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.944.000	161.296.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.900.000	24.900.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	104.578.000	104.578.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.250.000	6.250.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.250.000	6.250.000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	98.328.000	98.328.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	98.328.000	98.328.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.043.500	368.526.525	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.043.500	3.043.500	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.043.500	3.043.500	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.000.000	365.483.025	
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.000.000	365.483.025	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	408.349.800	246.610.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	408.349.800	246.610.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48.600.000	48.600.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.500.000	12.500.000	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	347.249.800	185.510.000	
7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Kelapa Kampit	3.874.655.854	3.878.219.344	
7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Kelapa Kampit	3.874.655.854	3.878.219.344	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.304.661.054	3.163.743.544	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.109.229.996	2.109.229.996	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.109.229.996	2.109.229.996	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.800.000	19.800.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.800.000	19.800.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	0	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	0	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.580.558	149.203.058	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	25.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	26.997.500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.558	9.999.558	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	33.920.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	15.850.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.960.000	9.960.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.621.000	27.476.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	50.000.000	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.625.000	560.625.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	301.875.000	301.875.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	66.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.125.000	29.125.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.625.000	163.625.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.425.500	274.885.490	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.441.500	170.438.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.984.000	79.447.490	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000	20.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20.000.000	20.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	20.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.999.000	9.999.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.999.000	9.999.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.999.000	9.999.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.000.000	461.925.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.000.000	461.925.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000	0	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30.000.000	461.925.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.000.000	0	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.000.000	0	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	469.995.800	222.551.800	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	469.995.800	222.551.800	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.000.000	30.000.000	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	29.998.800	23.108.800	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	409.997.000	169.443.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Masyarakat Desa			
7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Simpang Pesak	3.231.803.894	3.094.121.986	
7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Simpang Pesak	3.231.803.894	3.094.121.986	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.764.364.194	2.638.477.786	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.895.824.794	1.895.824.786	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.895.824.794	1.895.824.786	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.900.000	14.400.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.400.000	14.400.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	0	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000	0	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.038.500	127.816.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.499.500	7.499.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.011.600	41.328.600	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.499.000	5.499.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.187.500	27.462.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.399.900	11.519.400	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.798.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.641.000	29.709.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.649.900	56.394.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.200.000	0	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.449.900	56.394.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.312.500	434.062.500	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	16.500.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	415.562.500	415.562.500	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.638.500	109.980.500	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.138.500	99.480.500	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	10.500.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	82.891.500	7.228.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.996.000	7.228.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.996.000	7.228.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.095.500	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.095.500	0	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	68.800.000	0	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	68.800.000	0	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.999.000	297.544.500	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	297.544.500	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	297.544.500	
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	2.999.000	0	
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.999.000	0	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	381.549.200	150.871.700	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	381.549.200	150.871.700	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27.499.750	27.499.750	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.999.500	5.999.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	69.600.000	0	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	278.449.950	117.372.450	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Damar	3.486.293.500	3.492.497.650	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Damar	3.486.293.500	3.492.497.650	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.068.093.850	2.938.380.700	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.915.290.826	1.948.457.754	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.915.290.826	1.948.457.754	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.192.250	31.592.250	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.592.250	31.592.250	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.600.000	0	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.626.024	134.592.946	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.599.500	14.599.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.199.524	62.371.596	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	26.695.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	19.999.850	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.827.000	10.927.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244.049.250	147.866.250	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.200.000	63.200.000	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.878.000	52.380.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.971.250	32.286.250	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.967.000	521.907.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	15.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.332.000	56.952.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.635.000	449.955.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.968.500	153.964.500	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.128.500	124.124.500	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.850.000	15.850.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.990.000	13.990.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000	4.664.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	10.000.000	4.664.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	4.664.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.800.000	8.800.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.800.000	8.800.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.800.000	8.800.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.599.700	262.665.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.799.850	0	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.799.850	0	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.799.850	262.665.000	
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.799.850	262.665.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	389.799.950	277.987.950	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	389.799.950	277.987.950	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.799.950	19.799.950	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	370.000.000	258.188.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Simpang Renggang	3.597.373.660	3.547.129.888	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Simpang Renggang	3.597.373.660	3.547.129.888	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.209.591.310	3.006.083.588	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.985.340.442	1.903.947.442	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.985.340.442	1.903.947.442	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.000.000	26.700.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.200.000	15.000.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	0	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	0	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.800.000	11.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.945.100	278.858.400	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.750	9.992.750	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.999.500	41.079.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72.731.500	72.731.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.998.000	39.518.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.700	12.587.500	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.406.650	6.406.650	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.817.000	96.543.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.769.500	90.038.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	12.730.000	0	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.039.500	90.038.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.845.000	363.215.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.540.000	62.540.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.800.000	34.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.505.000	265.875.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.691.268	343.324.246	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.344.500	37.346.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000	96.650.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.896.768	191.878.246	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.450.000	17.450.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.909.500	19.909.500	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.194.500	9.194.500	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.194.500	9.194.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	10.715.000	10.715.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.715.000	10.715.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.996.000	313.343.450	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	289.393.450	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	289.393.450	
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	32.996.000	23.950.000	
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	32.996.000	23.950.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	334.876.850	207.793.350	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	334.876.850	207.793.350	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28.496.500	24.533.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.075.000	8.051.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.795.000	5.256.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.800.500	6.800.500	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	279.709.850	163.152.850	
7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Dendang	3.271.244.685	3.385.963.335	
7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Dendang	3.271.244.685	3.385.963.335	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.241.444.685	3.160.928.335	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.137.956.520	2.137.956.520	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.137.956.520	2.137.956.520	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.500.000	5.500.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000	5.500.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.616.000	257.982.150	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	12.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.650.000	85.270.150	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.250.000	45.270.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.888.000	9.888.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.828.000	85.554.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.757.165	47.757.165	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.831.500	18.831.500	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.925.665	28.925.665	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.395.000	445.470.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	254.200.000	253.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000	33.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.195.000	158.970.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.220.000	266.262.500	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.820.000	220.785.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.600.000	21.677.500	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.800.000	23.800.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.800.000	29.800.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.800.000	13.800.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.800.000	13.800.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	16.000.000	16.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.000.000	16.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	195.235.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	195.235.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	195.235.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.711.920.664	4.449.845.743	
1.06.2.08.2.13.08.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	322.934.000	497.491.929	
1.06.2.08.2.13.08.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	322.934.000	497.491.929	
8.01.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	322.934.000	497.491.929	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	322.934.000	497.491.929	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	322.934.000	497.491.929	
8.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.388.986.664	3.952.353.814	
8.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.388.986.664	3.952.353.814	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.331.692.269	2.395.847.219	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.032.452.600	1.525.900.300	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.032.452.600	1.525.900.300	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000	15.000.000	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	15.000.000	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	0	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.963.500	181.594.750	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.970.000	19.970.000	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.245.000	44.290.500	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.119.000	22.119.000	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.344.500	42.774.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.940.000	19.951.250	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.345.000	32.490.000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.075.000	67.075.000	
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.075.000	67.075.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.313.169	442.313.169	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	155.749.000	155.749.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.360.000	48.360.000	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.287.500	70.287.500	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.916.669	167.916.669	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.888.000	163.964.000	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.088.000	124.164.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.800.000	39.800.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	791.224.800	242.145.500	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	791.224.800	242.145.500	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	123.726.300	81.100.500	
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	162.845.000	161.045.000	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	457.601.000	0	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	47.052.500	0	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	641.045.000	626.891.000	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	641.045.000	626.891.000	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	548.634.200	548.634.200	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	44.068.800	29.914.800	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	48.342.000	48.342.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	74.172.800	0	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	74.172.800	0	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	74.172.800	0	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	248.929.795	153.895.795	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	248.929.795	153.895.795	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	158.879.795	93.745.795	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90.050.000	60.150.000	



Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	301.922.000	533.574.300	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	301.922.000	533.574.300	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	224.121.000	455.773.300	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	77.801.000	77.801.000	



TABEL 3.2 Rincian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												169,500,578,602	160,792,207,614	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												9,999,750	4,925,500	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Tersusunnya perencanaan pendidikan	1 kegiatan	1 kegiatan	tersusunnya perencanaan pendidikan	0	1 kegiatan		9,999,750	4,925,500		
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												163,488,592,372	154,956,717,924	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Jumlah Pegawai	1333 Orang	1333 Orang	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		14 bulan		91,651,564,946	153,280,750,424		
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Jumlah Pegawai	1333 Orang	1333 Orang	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		14 bulan		71,837,027,426	1,675,967,500		
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												75,000,000	42,000,000	
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	70 orang	70 orang	Tersedianya pakaian dinas kantor	0	70 stel		42,000,000	42,000,000		
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi /Kursus/Diklat	6 orang	6 orang	Tersedianya pakaian dinas kantor	0	70 stel		33,000,000	0		
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												778,591,900	700,736,650	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik	1 tahun	1 tahun	-tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	1 tahun		18,999,500	19,453,000		
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan Tersedianya Peralatan/Perlengkapan Kantor	1 Tahun 1 tahun	1 Tahun 1 tahun	-tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	1 tahun		202,418,500	180,233,250		



Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Tersediaan peralatan/perlengkapan rumah tangga kantor	12 bulan	12 bulan	-tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	1 tahun		0	0	
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	-tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	1 tahun		97,600,000	154,641,500	
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan	1 Tahun	1 Tahun	-tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	1 tahun		59,824,900	61,324,900	
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Tersedianya Dana Perjalanan Dinas	1 tahun	1 tahun	-tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	1 tahun		399,749,000	285,084,000	
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											204,493,000	248,493,000	
1 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	tersedianya gedung kantor	1 Paket	1 Paket	-tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	1 tahun	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,200,000	21,200,000	
1 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	1 paket	2 paket	-tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	1 tahun		183,293,000	227,293,000	
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											4,299,062,080	4,187,863,540	
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	terlaksananya ajasa administrasi kantor	0	1 tahun		2,354,750,000	2,354,750,000	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	persentase pemenuhan administrasi		90 persen	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	terlaksananya ajasa administrasi	0	1 tahun		337,624,580	226,426,040	



Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	terlaksananya ajasa administrasi kantor	0	1 tahun		611,625,000	611,625,000	
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	terlaksananya ajasa administrasi kantor	0	1 tahun		995,062,500	995,062,500	
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											644,839,500	651,471,000	
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Terpeliharanya KendaraanDinas/Operasional /Jabatan Kantor Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	-terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor		1 tahun		299,467,500	290,655,000	
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Dindik tersedianya gedung kantor	2 Paket 1 tahun 1 Paket	2 Paket 1 tahun 1 Paket	-terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor		1 tahun		276,872,000	268,816,000	
1 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan administrasi kantor		90 persen	Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor Dindik	1 tahun	1 tahun	-terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor		1 tahun		68,500,000	92,000,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											50,237,867,393	51,723,155,306	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											26,658,926,182	26,857,689,732	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terselenggaranya Pembangunan Sarpras di Sekolah	1 Tahun	1 Tahun	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		804,000,000	804,000,000	
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang	meningkatnya mutu		95 persen	Terpenuhinya	1 tahun	1 tahun	meningkatnya mutu	0	100 persen		0	0	



Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Sekolah/TU													
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Tersedianya Bangunan Untuk Ibadah Disekolah Tersedianya Jaringan Instalasi Listrik Disekolah Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi	3 Sekolah 1 Kegiatan 4 Sekolah	3 Sekolah 1 Kegiatan 4 Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		1,252,880,000	1,152,880,000	
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpeliharanya Ruang Kegiatan Belajar Disekolah terpenuhinya sarpras sd	24 Sekolah 1 Tahun	24 Sekolah 1 Tahun	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		5,815,376,452	5,610,021,042	
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpenuhinya sarpras SD	1 tahun	1 tahun	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		0	0	
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpeliharanya ruang perpustakaan di sekolah Terpenuhinya sarpras SD	24 sekolah 1 tahun	24 sekolah 1 tahun	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		561,790,980	517,632,063	
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpeliharanya sarana air bersih dan sanitasi sekolah	0	18 Paket	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,092,800	95,092,800	
1 01 02 2.01 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpeliharanya Rumah Dinas Di sekolah	0	0	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		77,396,000	77,396,000	



Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpenuhinya Meubelair disekolah	3 Sekolah	3 Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		510,250,000	510,250,000	
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Tersedianya raport SD/MI	0	0	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		98,199,000	299,910,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Meningkatnya mutu sekolah	1 Tahun	1 Tahun	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		13,877,400,000	14,525,785,050	
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa	1 Tahun	1 Tahun	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		0	0	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlaksananya UAN dan UAS sekolah	0	0	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		139,397,500	135,157,500	
1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlaksananya Penilaian Sekolah	1 Tahun	1 Tahun	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		5,000,000	5,000,000	
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlaksananya lomba lomba siswa Terlaksananya Lomba-lomba Tentang Geopark	0 0	0 0	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		477,424,750	280,506,250	
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Jumlah Guru Yang Mengikuti Peatihan	301 Orang	301 Orang	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		2,635,925,000	2,298,465,000	
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Banyaknya Guru Yang Mengikuti Seleksi Calon Pendidik	0 2 Kegiatan	114 Orang 100 Orang	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		291,194,500	262,730,500	



Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pendidikan Sekolah Dasar				Banyaknya guru yang naik pangkat									
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Jumlah Monitoring Kegiatan BOS	1 Tahun	1 Tahun	meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		17,599,200	33,349,200	
1 01 02 2.01 33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen				meningkatnya mutu pendidikan SD-	0	100 persen		0	249,514,327	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											14,838,343,911	13,948,670,024	
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terselenggaranya Pembangunan sarpras Disekolah	0	0	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		443,750,000	0	
1 01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terselenggaranya Pembangunan sarpras Disekolah	1 kegiatan	1 kegiatan	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		132,940,000	132,940,000	
1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terselenggaranya Pembangunan sarpras Disekolah	1 kegiatan	1 kegiatan	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		38,160,000	0	
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpenuhinya Sarpras SMP Tersedianya Pembangunan Laboratium IPA	1 Tahun 1 Paket	1 Tahun 1 Paket	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		203,280,000	203,280,000	
1 01 02 2.02 09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	terpeliharanya rumah dinas sekolah	1 Unit	1 Unit	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		91,388,000	91,388,000	
1 01 02 2.02 10	Pembangunan Fasilitas Parkir	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terselenggaranya Pembangunan sarpras Disekolah	1 kegiatan	1 kegiatan	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		68,068,000	68,068,000	



Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpenuhinya Sarpras SMP Tersedianya Jaringan Istalasi Listrik Tersedianya Ruangan Ibadah disekolah Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi di sekolah	1 Tahun 0 null 0 null 0 null	1 Tahun 0 null 0 null 0 null	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		427,000,000	427,000,000	
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpeliharanya bangunan/sarpras di sekolah Terpenuhinya Sarpras SMP	12 Kegiatan 1 Tahun	12 Kegiatan 1 Tahun	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		960,630,350	920,630,350	
1 01 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen				-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		0	302,246,000	
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpeliharanya bangunan sarpras di sekolah Terpenuhinya Sarpras SMP	12 kegiatan 1 tahun	12 kegiatan 1 tahun	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		727,054,000	665,054,000	
1 01 02 2.02 21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpeliharanya rumah dinas sekolah	0	0	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		86,300,000	86,300,000	
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpeliharanya bangunan/sarpras di sekolah Terpenuhinya Sarpras SMP	12 Kegiatan 1 Tahun	12 Kegiatan 1 Tahun	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		479,126,000	156,880,000	



Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpenuhinya Meubelair Disekolah	0	3 ruang	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		80,483,000	160,483,000	
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Tersedianya raport sekolah SMP/MTs	0	0	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		146,530,000	146,530,000	
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Meningkatnya mutu sekolah (tahun) Tersedianya BOS pendidikan SMP/MTs	1 Tahun 5800 Siswa	1 Tahun 5800 Siswa	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		7,840,852,500	8,344,929,674	
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terpenuhinya sarpras SMP Tersedianya Alat Praktek Komputer	1 Tahun 3 Sekolah	1 Tahun 3 Sekolah	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		1,000,350,000	1,000,350,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlaksananya UAN dan UAS sekolah	0	0	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		46,518,000	46,518,000	
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlaksananya penilaian sekolah	1 Tahun	1 Tahun	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		5,000,000	5,000,000	
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlaksananya lomba lomba siswa Terlaksananya Lomba-lomba Tentang Geopark	0 0	0 0	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		574,575,561	39,160,000	
	Penyediaan	meningkatnya			Jumlah Pendidik	191 Orang	190 Orang	-meningkatnya						



Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	pendidikan			Kependidikan Yang Mendapat Bantuan Insentif/Tambahar Penghasilan Tersedianya Guru di Satuan Sekolah Menengah Pertama (Tenaga Kontrak) Tersedianya Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Tenega Kontrak) (Guru PTT SMP)	1 Orang	6 Orang	pendidikan smp/APM						
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Banyaknya Guru Yang Mengikuti Seleksi Calon Kepala Sekolah Banyaknya guru yang naik pangkat	191 Orang 3 Kegiatan	18 Orang 40 Orang	-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		200,536,000	86,660,500	
1 01 02 2.02 46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen				-meningkatnya mutu pendidikan smp/APM	0	88 persen		0	40,000,000	
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											7,717,611,300	8,485,609,550	
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlaksananya Pembangunan Sekolah PAUD tersedianya sarpras disekolah	1 Tahun 21 Sekolah	1 Tahun 21 Sekolah	-APK PAUD	0	78 persen		492,869,800	352,570,950	



Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Tersedianya sarpras disekolah	21 Sekolah	21 Sekolah	-APK PAUD	0	78 persen		771,920,000	842,069,425	
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlaksananya Pembangunan Sekolah PAUD Terpeliharanya Bangunan Sekolah	1 Tahun 1 Kegiatan	1 Tahun 1 Kegiatan	-APK PAUD	0	78 persen		973,280,200	929,691,090	
1 01 02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlaksananya Pembangunan Sekolah PAUD	1 Tahun	1 Tahun	-APK PAUD	0	78 persen		0	0	
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Tersedianya meubelair sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-APK PAUD	0	78 persen		92,920,300	125,612,132	
1 01 02 2.03 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlaksananya Pembangunan Sekolah PAUD	1 Tahun	1 Tahun	-APK PAUD	0	78 persen		0	0	
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Tersedianya bantuan operasional sekolah TK	0	0	-APK PAUD	0	78 persen		2,718,500,000	0	
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlaksananya Pembangunan Sekolah PAUD Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	1 Tahun	1 Tahun 5 Kegiatan	-APK PAUD	0	78 persen		431,356,000	501,505,425	
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terselenggaranya kegiatan Anak usia Dini	0	0	-APK PAUD	0	78 persen		142,500,000	0	
1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Termonitornya dana BOP PAUD	0	0	-APK PAUD	0	78 persen		4,800,000	4,800,000	



Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapat Bantuan Insentif/Tambahan Penghasilan	1568 orang	360 orang	-APK PAUD	0	78 persen		1,853,100,000	2,859,600,000	
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Banyaknya Guru Yang Mengikuti Seleksi Calon Kepala Sekolah banyaknya guru yang naik pangkat Terselenggaranya lomba-lomba tenaga pendidik PAUD	1 Kegiatan 1 Kegiatan 0	14 Orang 30 Orang 1 Kegiatan	-APK PAUD	0	78 persen		209,425,000	113,423,250	
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Tersedianya dana kegiatan akreditasi sekolah PAUD	0	0	-APK PAUD	0	78 persen		26,940,000	26,940,000	
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Jumlah Siswa Penerima BOP PAUD		3623 Siswa	-APK PAUD	0	78 persen		0	2,718,500,000	
1 01 02 2.03 20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen				-APK PAUD	0	78 persen		0	10,897,278	
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											1,022,986,000	2,431,186,000	
1 01 02 2.04 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Bertambahnya sarana prasarana pendidikan non formal	0	1 Kegiatan	banyaknya masyarakat yg mengikuti PNF-	0	100 orang	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	185,200,000	185,200,000	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlaksananya Paket B Terselenggaraan	0 0	0 0	banyaknya masyarakat yg mengikuti PNF-	0	100 orang		56,538,500	56,538,500	



Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 02 2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Banyaknya guru yang mengikuti pelatihan	24 Orang	24 Orang	banyaknya masyarakat yg mengikuti PNF-	0	100 orang		158,400,000	1,566,600,000	
1 01 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlatihnya tenaga pendidik non formal	0	0	banyaknya masyarakat yg mengikuti PNF-	0	100 orang		0	0	
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	Terlaksananya pelatihan tenaga kursus dan kelembagaan Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Masyarakat dan Kursus Terselenggaranya lomba tenaga pendidikan non formal	0 0 0	0 0 0	banyaknya masyarakat yg mengikuti PNF-	0	100 orang		30,747,500	30,747,500	
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya mutu pendidikan		95 persen	tersedianya dana BOP Pendidikan Kesetaraan	1 Tahun	1 Tahun	banyaknya masyarakat yg mengikuti PNF-	0	100 orang	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	592,100,000	592,100,000	
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM											47,997,000	0	
1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar											47,997,000	0	
1 01 03 2.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	meningkatnya mutu		95 persen	Tercapainya Pemahaman Tentang	0	0	-tersedianya kurikulum	0	1 buah		47,997,000	0	



Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.4.01.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Dasar				Guru SD dan SMP Tersedianya kurikulum muatan lokal ttg Geopark									
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											378,350,000	79,000,000	
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											378,350,000	79,000,000	
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya mutu PTK		95 persen	Banyaknya Guru Yang Mengikuti Diklat Pendidikan Guru Dalam Jabatan (PPG)	0	8 Orang	guru yg mengikuti PPG	0	1 tahun		359,350,000	60,000,000	
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya mutu PTK		95 persen	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Ditata	0	10 Sekolah	guru yg mengikuti PPG	0	1 tahun		19,000,000	19,000,000	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											1,694,792,000	0	
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat											1,694,792,000	0	
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				Banyaknya siswa yang mendapatkan beasiswa	0	0	-	0	0		1,694,792,000	0	
TOTAL												221,859,584,995	212,594,362,920	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											9,135,461,380	8,679,848,333	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6,139,524,994	6,460,243,253	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	60 orang	58 orang	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan		81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	6,109,249,994	6,433,418,253	
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah Dokumen yang diverifikasi	100 %	900 dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan		81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	30,275,000	26,825,000	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											463,325,000	75,600,000	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 persen 100 persen	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	0	126 stel	-Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	93,000,000	75,600,000	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 persen 100 persen	Jumlah pegawai yang ikut bimtek/pelatihan Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih	15 pegawai 0	0 pegawai 0	-Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	273,525,000	0	
1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang		100 persen 100 persen	Jumlah pegawai yang ikut bimtek/pelatihan	5 pegawai	0 pegawai	-Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	47,900,000	0	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		tambahan sertifikat keahlian												
1 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 persen 100 persen	Jumlah pegawai yang ikut Bimtek/Pelatihan	5 pegawai	0 pegawai	-Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	48,900,000	0	
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											663,450,386	452,098,386	
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	9 Jenis	-Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	22,495,500	22,495,500	
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Persentase tersedianya alat tulis kantor	100 %	100 %	-Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	111,341,250	111,341,250	
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	100 %	4 jenis	-Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	19,893,636	19,893,636	
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	100 %	5 Jenis	-Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	64,800,000	106,776,500	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %	3 Jenis	-Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	95,000,000	74,513,500	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	0	70 kali	-Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	349,920,000	117,078,000	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											489,120,000	238,441,694	
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 persen	Jumlah kendaraan dinas operasional arau lapangan yang tersedia	2 paket	1 unit	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	382,000,000	0	
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 persen	Jumlah Mebel	70 %	5 unit	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	6,354,000	6,354,000	
1 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70 %	36 unit	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	100,766,000	232,087,694	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											868,322,500	868,322,500	
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani	100 %	1 Jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	12,000,000	12,000,000	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi		100 Persen	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan lainnya yang	100 %	5 Jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar,	203,760,000	203,760,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	100 %	10 Jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	21 Orang	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	652,562,500	652,562,500	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											511,718,500	585,142,500		
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 persen	Jumlah Kendaraan dinas jabatan laik jalan	1 kendaraan	1 unit	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	54,065,000	76,965,000	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan	41 kendaraan	41 unit	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	359,141,500	384,641,500	
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 persen	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	70 %	4 unit	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	98,512,000	123,536,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											42,771,507,218	69,624,322,326		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											13,675,122,813	11,513,404,849		



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		100 Persen	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan	1 unit	0 unit	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	783,174,473	0	
1 02 02 2.01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		100 Persen	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan	2 unit	2 unit	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	1,058,250,000	25,000,000	
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		100 Persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Direhabilitasi		1 unit	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	402,000,000	
1 02 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		100 Persen	Jumlah Rumah Dinas Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang direhab	0	0	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen		0	0	
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		100 Persen	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya yang dilengkapi Sarana dan Prasana Persentase terpenuhinya sarana prasarana laboratorium kesehatan lingkungan	7 puskesmas 80 %	7 puskesmas 80 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,867,631,929	2,314,973,973	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		100 Persen	Jumlah puskesmas yang dilengkapi peralatan	1 paket	7 Puskesmas	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan,	4,658,635,696	4,995,761,284	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
											Kelurahan			
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		100 Persen	Jumlah jenis obat yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan	90 %	140 Jenis	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,186,497,250	1,149,923,090	
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		100 Persen	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan	90 %	106 Jenis	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,996,283,465	2,398,246,502	
1 02 02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		100 Persen	Jumlah BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang dilaksanakan rehab	0	0	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen		0	0	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		100 Persen	Jumlah Alat Kesehatan yang Terpelihara Jumlah Tim RMC dan kalibrasi dalam melaksanakan pemeliharaan Alat Kesehatan / Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	0	5 jenis 4 Orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,650,000	186,220,000	
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		100 Persen	Frekwensi Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas		84 Kali	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	41,280,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kesehatan Lainnya				Lainnya									
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											29,072,120,555	58,109,167,477	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah ibu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94 %	2339 orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750,829,250	1,156,034,375	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94 %	2232 Orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,411,400	94,795,000	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	99 %	2126 bayi	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,474,950	112,539,850	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	0	10765 balita	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,499,950	132,994,500	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	0	19399 Orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,503,950	248,886,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	84231 orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,977,500	28,977,500	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah usia > 60 tahun yang mendapat skrining sesuai standar	0	13326 Orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,839,500	178,551,600	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	37818 orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,771,500	30,159,500	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah penderita diabetes melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	2371 orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,897,000	40,897,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah ODGJ mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	305 orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,337,500	62,471,500	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1503 Orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,876,850	43,209,450	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	3712 Orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156,018,525	54,903,000	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Potensi KLB		12 kali	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	2,064,206,500	
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat		7 unit	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	12,552,758,500	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah Puskesmas mampu tata laksana gizi masyarakat	0	7 unit	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,364,950	174,004,500	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah kegiatan kesehatan kerja	0	15 Kali	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,599,050	103,509,300	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standar			jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja						Kecamatan, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah fasilitasi dan pembinaan pelayanan kesehatan lingkungan	0	7 kali	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,690,000	172,385,350	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon		7 Unit	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	25,000,000	
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,209,000	15,209,000	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,180,000	22,290,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai		90 Persen	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan layanan penyakit menular dan	100 %	7 unit	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	417,462,000	771,864,300	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
											Kelurahan			
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah masyarakat miskin yang mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan (peserta Jamkesda yang terintegrasi dengan JKN)	0	57000 Orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,454,225,500	27,883,566,700	
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	jumlah fasilitasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kabupaten kota sehat	0	2 tatanan	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184,955,350	33,317,350	
1 02 02 2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Telemedicine		2 Puskesmas	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	582,088,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional Jumlah Puskesmas yang menerima Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0 0	7 Puskesmas 7 Puskesmas	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,547,845,180	7,290,567,052	
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan	Cakupan		90 Persen	Persentase		100 %	Angka Usia	0	71.68	Kab.	0	2,210,517,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kesehatan Lainnya	pelayanan sesuai standar			vaksinasi						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi utama	0	3 unit	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	521,934,650	521,934,650	
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase kasus kusta, Persentase kasus filaria mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	100 persen	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,217,000	0	
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		5 Jenis	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1,092,500,000	
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi											24,263,850	1,750,000	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	1 tahun	0 tahun	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,263,850	0	
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 tahun	7 Unit	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	1,750,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Tersedianya alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	1 paket	1 paket	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen		0	0	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											1,769,827,250	2,452,934,750	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											1,714,752,500	1,981,335,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		100 Persen	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 null	51 orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,665,585,000	1,981,335,000	
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		100 Persen	Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan	0	23 kategori	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,167,500	0	
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											55,074,750	471,599,750	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		100 Persen	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	1 kali	45 orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,074,750	471,599,750	
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											93,988,100	1,605,500	
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											51,662,300	0	
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan	Persentase Tempat Pengolah Makanan (TPM) sesuai standar		60 Persen	Fasilitasi sampel makanan diperiksa pada TPM	0	300 sampel	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,662,300	0	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga											42,325,800	1,605,500	
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat sesuai standar		60 Persen	Fasilitasi sampel makanan diperiksa pada Industri Rumah Tangga	0	50 sampel	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,325,800	1,605,500	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											293,098,950	646,844,600	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											127,521,550	71,231,300	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif		100 Persen	Fasilitasi advokasi dan pembinaan desa dalam optimalisasi sumber daya untuk kesehatan masyarakat Fasilitasi pertemuan advokasi bina suasana lintas program/ lintas sektor Fasilitasi pertemuan dan pembinaan kemitraan dalam rangka promosi	0	39 desa 2 kali 5 mitra	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,521,550	71,231,300	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					masyarakat (ormas, SBH, media penyiaran, LSM)									
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											105,677,400	426,580,800	
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Desa Siaga Aktif		100 Persen	Fasilitasi koordinasi dan pembinaan forum komunikasi GERMAS (Germas, Genstar/ Sijares/ KTR)	0	8 kali	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,677,400	426,580,800	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											59,900,000	149,032,500	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Desa Siaga Aktif		100 Persen	Jumlah bimbingan teknis dan supervisi UKBM beserta kadernya	0	8 kali	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,900,000	149,032,500	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											848,899,800	729,235,200	
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											114,935,100	91,368,500	
2 14 02 2.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Persentase Kegiatan Pengendalian Penduduk		75 Persen	Jumlah kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	0	1 kali	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	19,986,500	17,479,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 14 02 2.01 03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Persentase Kegiatan Pengendalian Penduduk		75 Persen	Jumlah desa yang dilakukan survei indeks pembangunan kependudukan dan peningkatan kampung KB	0	3 desa	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	38,284,300	30,352,500	
2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Persentase Kegiatan Pengendalian Penduduk		75 Persen	Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Peningkatan Status Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna	0	3 sekolah	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	41,674,300	36,042,000	
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Persentase Kegiatan Pengendalian Penduduk		75 Persen	Jumlah rapat pengendalian program KKBPK	0 %	2 kali	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	14,990,000	7,495,000	
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											733,964,700	637,866,700	
2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Persentase Kegiatan Pengendalian Penduduk		75 Persen	Jumlah Rumah data kependudukan di kampung KB	0 %	1 Rumah Data	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	29,644,000	29,644,000	
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase Kegiatan Pengendalian Penduduk		75 Persen	Jumlah Dokumen dan data kependudukan dan Keluarga Berencana di kecamatan	0 %	0 %	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	75,000,000	0	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase Kegiatan Pengendalian Penduduk		75 Persen	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan transportasi operasional program	0 %	230 orang	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	389,623,000	368,525,000	
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Persentase Kegiatan Pengendalian Penduduk		75 Persen	Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapatkan pemeliharaan sarana prasarana Jumlah balai penyuluhan KB yang terpenuhi alat tulis kantor	0 %	7 balai 7 Balai	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	239,697,700	239,697,700	
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											2,637,081,494	2,670,262,394	
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal											1,329,337,494	889,317,400	
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun		50 Persen	Jumlah Peserta KB Baru	0	0	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	35,156,500	0	
2 14 03 2.01 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun		50 Persen	Jumlah Sarana KIE Luar Ruang, Cetak dan Elektronik serta media sosial	0	7 paket	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	42,224,000	123,234,000	
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun		50 Persen	Jumlah Peserta Keg Forum GenRe Jumlah Peserta Keg Refreshing Kader Tribina Jumlah peserta partisipasi lomba Harganas	70 Peserta	20 orang 15 Orang 70 Peserta	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	362,883,000	246,255,400	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun		50 Persen	Terpenuhinya operasional penyuluhan di balai penyuluhan KB	0	7 Balai	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	889,073,994	519,828,000	
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)											302,585,000	487,550,000	
2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun		50 Persen	Jumlah Refresing Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang dilaksanakan	0	0 Kali	Laju Pertumbuhan Penduduk		2 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	302,585,000	300,350,000	
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun		50 Persen	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan KIE dan pengolahan data oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD		39 desa	Laju Pertumbuhan Penduduk		2 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	187,200,000	
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota											406,216,000	944,514,994	
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun		50 Persen	Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia alat kontrasepsi	0	8 faskes	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	396,216,000	122,862,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun		50 Persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang tersedia alat kontrasepsi		8 faskes	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	273,354,000	
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun		50 Persen	Jumlah balai penyuluhan KB yang terpenuhi sarana prasarana		7 Balai	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	538,298,994	
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun		50 Persen	Jumlah desa yang dilakukan pemutaran film	0	15 desa	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											598,943,000	348,880,000	
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun		50 Persen	Jumlah pembinaan pokja dan rumah data di kampung KB		2 kali	Laju Pertumbuhan Penduduk		2 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	348,880,000	
2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun		50 Persen		0	0	Laju Pertumbuhan Penduduk		2 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	598,943,000	0	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											215,530,750	153,872,750	
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											92,427,000	31,211,500	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 14 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase Tribina (Bina Kelompok Balita, Bina Kelompok Remaja, Bina Kelompok Lansia)		80 Persen	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKS yang di bentuk	0	9 kelompok	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,894,000	31,211,500	
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Tribina (Bina Kelompok Balita, Bina Kelompok Remaja, Bina Kelompok Lansia)		80 Persen	Jumlah kader Tribina (BKB, BKL,BKR) Pik R dan UPPKS yang dilatih	0	90 orang	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,533,000	0	
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											123,103,750	122,661,250	
2 14 04 2.02 01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi	Persentase Tribina (Bina Kelompok Balita, Bina Kelompok Remaja, Bina Kelompok Lansia)		80 Persen	Jumlah Peserta Keg Sosialisasi Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan	0	65 Orang	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	18,264,000	17,821,500	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
2 14 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Tribina (Bina Kelompok Balita, Bina Kelompok Remaja, Bina Kelompok Lansia)		80 Persen	Terpilihnya Duta GenRe Tk Kabupaten Belitung Timur sebanyak 3 pasang dan 3 Kategori	0	9 orang	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	2 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	104,839,750	104,839,750	
TOTAL												57,765,394,942	84,958,925,853	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT RSD Kab. Belitung Timur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												29,274,614,999	32,891,334,899	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												24,611,299,999	28,194,373,899	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah PNS	213 Orang	216 Orang	Indeks Kepuasan Bidang Kesehatan		81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	24,599,999,999	28,189,183,899	
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	100 %	Indeks Kepuasan Bidang Kesehatan		81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	11,300,000	5,190,000	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												106,989,000	74,858,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	29 kali	15 kali	Indeks Kepuasan Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	106,989,000	74,858,000	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												151,796,000	217,597,000	
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen	jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang terbeli	35 Unit	93 Unit	Indeks Kepuasan Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	151,796,000	217,597,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												4,231,750,000	4,231,750,000	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Persentase Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %	Indeks Kepuasan Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai		0	0	
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	Indeks Kepuasan Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai		0	0	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT RSD Kab. Belitung Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Persentase tersedianya jasa administrasi keuangan Persentase tersedianya jasa kebersihan kantor	100 % 100 %	100 % 100 %	Indeks Kepuasan Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	4,231,750,000	4,231,750,000	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											172,780,000	172,756,000		
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen	Persentase Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	100 %	Indeks Kepuasan Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	0	0	
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Direhabilitasi	7 unit	8 unit	Indeks Kepuasan Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	172,780,000	172,756,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											60,626,975,046	71,249,011,663		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											37,576,952,500	27,969,829,104		
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase kepuasan pelanggan		83.35 Persen	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terbangun		1 Paket	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68	Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	0	10,663,744,682	
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase kepuasan pelanggan		83.35 Persen	Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit yang terbangun beserta jasa konsultansi	2 Paket	2 Paket	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68	Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	2,131,638,300	0	
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase kepuasan pelanggan		83.35 Persen	Jumlah Mebeleur dan Perlengkapan	1 unit	93 Unit	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68	Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	3,314,089,120	311,339,120	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT RSD Kab. Belitung Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
					Jumlah Perlengkapan Rumah Sakit yang Terbeli						Padang			
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase kepuasan pelanggan		83.35 Persen	Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit yang terbangun berserta jasa konsultasi	4 Paket	5 Paket	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	11,053,744,682	5,200,205,500	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase kepuasan pelanggan		83.35 Persen	Jenis Alat Kesehatan Rumah Sakit yang Terbeli	4 Paket	4 Paket	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	21,077,480,398	11,794,539,802	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											23,050,022,546	43,279,182,559	
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase kepuasan pelanggan		83.35 Persen	Tersedianya sarana prasarana dan operasional penanganan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana		5 Paket	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	0	13,707,847,300	
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase kepuasan pelanggan		83.35 Persen	Persentase Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase Tersedianya SDM, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Bagi Operasional	12 bulan	100 Persen 100 Persen	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	23,050,022,546	29,571,335,259	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT RSD Kab. Belitung Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											7,437,012,500	7,533,612,500	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											7,437,012,500	7,533,612,500	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Pesentase Rumah Sakit dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		100 Persen	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	Angka Usia Harapan Hidup		71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	7,437,012,500	7,533,612,500	
TOTAL												97,338,602,545	111,673,959,062	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT Puskesmas Manggar

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											7,110,716,793	5,948,909,895	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6,042,803,917	4,790,092,400	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	46 Orang	46 Orang	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan		81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	6,042,803,917	4,790,092,400	
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan		81.25 nilai		0	0	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											57,287,000	22,287,000	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 persen 100 persen	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	90 Stel	85 Stel	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	22,287,000	22,287,000	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 persen 100 persen	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10)rang	0 orang	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	35,000,000	0	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											283,148,854	284,398,354	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT Puskesmas Manggar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	4 jenis	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	13,000,000	13,000,000	
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100 %	7 jenis	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	112,000,000	109,256,500	
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	100 %	3 jenis	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	17,499,854	17,499,854	
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor yang tersedia	100 %	4 jenis	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	36,000,000	30,576,000	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %	2 jenis	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	40,000,000	38,800,000	
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	11 Orang	14 kali	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	64,649,000	75,266,000	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											98,751,000	98,751,000	
	Pengadaan	Persentase						Indeks			Kab.			



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT Puskesmas Manggar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		sarana dan prasarana kantor yang layak pakai						masyarakat bidang kesehatan			Timur, Manggar, Kurnia Jaya			
1 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 persen	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	3 paket	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	39,712,000	39,712,000	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											398,032,500	457,232,500	
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase Tersedianya Jasa Administrasi Kantor	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai		0	0	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	5 jenis	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	73,160,000	101,520,000	
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	1 unit	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	900,000	900,000	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor	100 %	12 orang	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	323,972,500	354,812,500	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											230,693,522	296,148,641	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, ..	Persentase pemenuhan		100 persen	Jumlah kendaraan dinas	17 Unit	17 Unit	Indeks kepuasan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung	155.794.000	155.794.000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT Puskesmas Manggar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	prasarana kantor yang layak pakai			laik jalan			bidang kesehatan			Manggar, Kurnia Jaya			
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 persen	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	1 Bangunan	1 unit	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	49,899,522	115,354,641	
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 persen	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	100 %	30 unit	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	25,000,000	25,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											331,816,009	194,126,109	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											44,987,109	44,987,109	
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 persen	Jumlah kegiatan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	7 Kegiatan	7 unit	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	34,987,109	34,987,109	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 persen	Jumlah alat kesehatan yang terpelihara	0	15 jenis	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	10,000,000	10,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											286,828,900	149,139,000	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai		90 persen	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	100 %	1382 orang	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua	7,350,000	7,200,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT Puskesmas Manggar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 persen	Jumlah kegiatan orientasi kelas ibu balita	80 %	3 kali	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	18,850,000	7,830,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 persen	Jumlah anak usia sekolah yang mendapatkan skrining kesehatan Jumlah kader kesehatan Sekolah (kader kesehatan remaja dan dokcil) Jumlah penyuluhan kesehatan pada anak usia sekolah	100 %	6292 orang 61 orang 1 kali	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	82,370,900	17,650,000	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 persen	Jumlah wanita usia subur (WUS) yang mendapatkan skrining IVA/IMS,kanker payudara dan kanker leher rahim sesuai standar	70 %	2883 orang	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	21,140,000	21,140,000	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 persen	Jumlah kegiatan lomba lansia Jumlah usia ≥60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	65 %	1 kali 4236 orang	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	58,800,000	58,800,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT Puskesmas Manggar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 persen	Jumlah ibu hamil KEK (kekurangan energi kronis) yang mendapatkan PMT Jumlah puskesmas mampu tata laksana gizi masyarakat	75 %	20 orang 1 unit	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	51,860,000	18,009,000	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 persen	Jumlah Kunjungan Rumah Pasien Jiwa	84 Kunjungan	84 Kunjungan	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	8,000,000	8,000,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 persen	Jumlah Siswa/Siswi Mendapatkan Pelayanan Imunisasi Di Sekolah	100 %	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	27,948,000	0	
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 persen	Jumlah desa ODF Jumlah desa STBM	65 %	2 desa 3 desa	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	10,510,000	10,510,000	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											769,062,500	674,097,500	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											769,062,500	674,097,500	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		100 persen	Jumlah pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	24 orang	Angka usia harapan hidup		71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	769,062,500	674,097,500	
1 02 04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											11,100,000	0	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT Puskesmas Manggar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											11,188,000	0	
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang di inspeksi sanitasi		60 persen	Fasilitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) yang mendapatkan pembinaan sesuai standar	75 %	30 sarana	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	11,188,000	0	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											145,323,750	53,966,750	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											17,700,000	0	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif		100 persen	Persentase Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif (75%), Persentase Balita Gizi Kurang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (75%)	75 %	75 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	17,700,000	0	
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											70,810,000	16,366,000	
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan desa siaga aktif		100 persen	Fasilitasi koordinasi dan pembinaan forum komunikasi GERMAS (germas,genstar/sjares/KTR)	75 %	1 kali	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	70,810,000	16,366,000	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											56,813,750	37,600,750	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan	Cakupan desa siaga aktif		100 persen	Jumlah bimbingan teknis dan supervisi UKBM	100 %	4 kali	Angka usia harapan hidup	0	71.68 persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	56,813,750	37,600,750	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT Puskesmas Manggar

Sub Unit Organisasi : 4021214030000002 01 Paskesmas Mangga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				kadernya						Kelurahan			
TOTAL												8,368,107,052	6,871,100,254	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT Puskesmas Mengkubang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												5,957,230,856	5,841,545,026	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,915,000,000	4,915,000,000	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan		100 Persen	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	52 orang	52 orang	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan		81.25 Nilai	Kab. Belitang Timur, Damar, Mengkubang	4,915,000,000	4,915,000,000		
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan		100 Persen	Presentase tersedianya Administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan		81.25 Nilai		0	0		
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												30,000,000	0	
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 Persen	persentase Pegawai yang ikut Bimtek / Pelatihan	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		30,000,000	0		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												284,158,500	215,526,500	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Persentase tersedianya instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		7,999,000	7,999,000		
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan Presentase tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Presentase tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		80,473,500	78,085,500		



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT Puskesmas Mengkubang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor									
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Persentase tersedianya peralatan / perlengkapan kantor dan rumah tangga	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		12,025,000	10,625,000	
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Presentase tersedianya Makanan dan Minuman	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		69,038,000	38,500,000	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Presentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		60,500,000	53,850,000	
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah Perjalanan dinas yang dilaksanakan	15 Orang	15 Orang	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		54,123,000	26,467,000	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											79,223,830	67,390,000	
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Presentase tersedianya Pengadaan Mebeleur	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		13,638,000	13,638,000	
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Persentase pengadaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		65,585,830	53,752,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT Puskesmas Mengkubang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi perkantoran		100 Persen	Persentase tersedianya jasa Adminitrsasi Perkantoran	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		0	0	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi perkantoran		100 Persen	Presentase tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		108,886,000	108,886,000	
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi perkantoran		100 Persen	Presentase Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		900,000	900,000	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi perkantoran		100 Persen	Presentase tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Presentase tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 % 100 % 2 Orang 2 Orang	100 % 100 % 2 Orang 2 Orang	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		264,432,500	266,812,500	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											274,630,026	267,030,026	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah Kendaraan dalam Kondisi Baik	13 Unit	13 Unit	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		162,831,000	162,831,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT Puskesmas Mengkubang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Persentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25	Nilai		83,799,026	83,799,026	
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Persentase Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25	Nilai		28,000,000	20,400,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												368,701,440	178,205,590	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												46,499,840	27,499,840	
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	persentase Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasana Puskesmas dan jaringannya	100 %	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68	Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Mengkubang	27,499,840	27,499,840	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Alat-Alat Kesehatan Terpelihara	100 %	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68	Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Mengkubang	19,000,000	0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												322,201,600	150,705,750	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Balita Sehat, Persentase Ibu Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kelas Ibu Balita	100 %	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68	Persen		50,000,000	42,749,500	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT Puskesmas Mengkubang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Kader Remaja Terlatih, Persentase Siswa / Siswi yang Mendapatkan Penyuluhan KesehatanGigi dan Mulut dan CTPS, Persentase Screening Kesehatan Kelas 1 7 dan 10 Sesuai Standar, Persentase Dokcil Terlatih UKS, Persentase siswa / siswi yang mendapatkan Penyuluhan PKPR, Persentase Sekolah yang menyelenggarakan UKS sesuai Standar	100 %	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		97,956,250	97,956,250	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase desa yang melaksanakan HUT Lansia, Persentase pemberian PMT pada Lansia	100 %	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		104,745,500	0	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Balita Gizi kurang yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan, Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	100 %	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		44,500,000	0	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT Puskesmas Mengkubang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	persentase siswa / siswi mendapatkan Pelayanan Imunisasi di Sekolah	100 %	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		10,000,000	10,000,000	
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Desa STB, Persentase Desa ODF	100 %	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		14,999,850	0	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											301,875,000	301,875,000	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											301,875,000	301,875,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		100 Persen	Jumlah Tenaga Kesehatan	10 Orang	10 Orang	Angka usia harapan hidup		71.68 Persen		301,875,000	301,875,000	
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											4,999,450	4,999,450	
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											4,999,450	4,999,450	
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang mendapatkan pembinaan sesuai standar		100 Persen	Persentase Pemilik TPM Yang Mengikuti Pelatihan Hygine Sanitasi Pangan	100 %	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		4,999,450	4,999,450	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											262,205,300	262,205,300	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											262,205,300	262,205,300	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT Puskesmas Mengkubang

Sas Unit Organisasi : 102114030500



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT Puskesmas Gantung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											7,833,186,827	7,614,527,543	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6,673,704,000	6,377,861,000	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah Pegawai	51 orang	57 orang	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan		81.25 nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	6,673,704,000	6,377,861,000	
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan		81.25 nilai		0	0	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											62,040,000	46,060,000	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 Persen 100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas	59 stel	94 stel	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	47,040,000	46,060,000	
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 Persen 100 Persen	Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi	5 orang	3 orang	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	15,000,000	0	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											285,079,560	319,098,410	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT Puskesmas Gantung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	12 Jenis	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	17,960,500	21,588,500	
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	100 %	4 Jenis	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	70,000,000	90,948,500	
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	100 %	3 Jenis	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	29,995,560	39,778,410	
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	100 %	3 Jenis	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	81,723,500	92,454,500	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %	11 Jenis	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	36,160,000	48,041,500	
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Diselenggarakan	100 %	6 Orang	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	49,240,000	26,287,000	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											49,906,000	51,658,000	
1 02 01 2.07 05	Pengadaan	Persentase pemenuhan		100 Persen	Jumlah jenis	100 %	2 Jenis	Indeks kepuasaan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung	6.531.000	8.283.000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT Puskesmas Gantung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		prasarana kantor yang layak pakai						bidang kesehatan			Gantung, Semua Kelurahan				
1 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	9 Unit	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	43,375,000	43,375,000	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											513,082,500	516,297,500		
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 %	12 Bulan	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	89,687,500	89,687,500	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan lainnya yang terpenuhi	100 %	3 Jenis	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	123,360,000	123,360,000	
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan/Satpam dan Penjaga Malam Kantor	100 %	12 Bulan	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	58,250,000	58,250,000	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	jumlah ketersediaan pelayanan administrasi kantor	100 %	12 Bulan	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	241,785,000	245,000,000	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											249,374,767	303,552,633		
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, ...	Persentase pemenuhan		100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas	100 %	16 Unit	Indeks kepuasan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung	158,475,000	173,637,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT Puskesmas Gantung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	prasarana kantor yang layak pakai			Lapangan Laik Jalan			bidang kesehatan			Gantung, Semua Kelurahan				
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	100 %	2 Gedung	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	59,999,767	93,015,633	
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	100 %	41 Unit	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	30,900,000	36,900,000	
1 02 02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											137,358,000	102,158,000	
1 02 02 2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											137,358,000	102,158,000	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kelas Ibu Hamil	94 %	94 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68	Persen	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	8,700,000	8,700,000	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah Kegiatan Lomba Balita Sehat Persentase bayi mendapatkan ASI eksklusif	93 % 70 %	1 Kali 70 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68	Persen	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	15,470,000	15,470,000	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase orang usia 15-59 yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 %	60 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68	Persen	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	12,550,000	12,550,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT Puskesmas Gantung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Usia >60 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Sesuai Standar	100 %	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	27,150,000	32,150,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah Balita BGM yang mendapatkan Makanan Tambahan Jumlah ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) yang mendapatkan PMT	357 orang	20 Orang 14 orang	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	42,000,000	0	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah Kunjungan Rumah Pasien Jiwa	100 %	45 Kunjungan	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	5,490,000	5,490,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah Siswa/Siswi Mendapatkan Pelayanan Imunisasi Di Sekolah	12 Bulan	2800 Siswa	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	13,200,000	15,000,000	
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Desa ODF	12 Bulan	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	12,798,000	12,798,000	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											570,125,000	553,127,500	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											570,125,000	553,127,500	
1 02 03 2.02 01	Pemenuhan Kebutuhan	Persentase		100 %	Jumlah	100 %	100 %	Angka usia		71.68	Kab.	570,125,000	553,127,500	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT Puskesmas Gantung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Manusia Kesehatan sesuai Standar	tenaga kesehatan sesuai standar			Sumber Daya Manusia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Gantung, Semua Kelurahan			
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											4,560,000	4,560,000	
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											4,560,000	4,560,000	
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang di inspeksi sanitasi		60 Persen	Fasilitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan pembinaan sesuai standar	12 Bulan	100 Sarana	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	4,560,000	4,560,000	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											18,650,000	18,650,000	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											11,750,000	11,750,000	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif		100 Persen	Fasilitasi advokasi dan pembinaan desa dalam optimalisasi sumber daya untuk kesehatan masyarakat	100 %	7 Desa	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	11,750,000	11,750,000	
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											6,900,000	6,900,000	
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan Kesehatan		70 Persen	Persentase Siswa/Siswi Yang Mendapatkan Penyuluhan Kesgimul dan CTPS	80 %	70 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	6,900,000	6,900,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT Puskesmas Kelapa Kampit

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											7,832,605,088	7,725,146,942	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6,299,999,968	6,298,111,072	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	jumlah pegawai	60 orang	60 orang	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	6,299,999,968	6,298,111,072	
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	tersedianya administrasi pelaksanaan tugas	100 persen	100 persen	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	100 %		0	0	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											44,778,250	34,778,250	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	Jumlah pakaian dinas	90 stel	90 stel	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	34,778,250	34,778,250	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	Jumlah pegawai yang pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0	0	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	10,000,000	0	
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	Jumlah pegawai yang ikut Bimtek/pelatihan	0	0	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	100 %		0	0	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											443,101,000	375,011,750	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen	Tersedianya Penunjang		100 %	Persentase tersedianya	0	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi	0	100 %		10.000.000	10.000.000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT Puskesmas Kelapa Kampit

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota			Listrik/Penerangan bangunan kantor			Perangkat Daerah						
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	133,590,500	131,007,500	
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	32,427,500	32,427,500	
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	144,282,500	138,327,500	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	tersedianya alat tulis kantor, cetak dan penggandaan	100 persen	100 persen	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	59,749,000	53,252,750	
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	0	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	53,055,000	0	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											157,504,000	157,504,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT Puskesmas Kelapa Kampit

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	tersedianya mebel	100 persen	100 persen	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	85,794,000	85,794,000	
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	terpeliharanya peralatan/perengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	5,305,000	5,305,000	
1 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	persentase perlengkapan/ peralatan gedung kantor dalam kondisi baik tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	100 %		0	0	
1 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100 persen	100 persen	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	66,405,000	66,405,000	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											551,937,500	524,457,500	
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	Persentase tersedianya administrasi kantor	100 persen	100 persen	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	100 %		0	0	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT Puskesmas Kelapa Kampit

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	100 persen	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	134,400,000	104,400,000	
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	1,200,000	1,800,000	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 persen	100 persen	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	416,337,500	418,257,500	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											335,284,370	335,284,370	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	terpeliharanya kendaraan dinas dengan kondisi baik	100 persen	100 persen	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	200,489,500	200,489,500	
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100 persen	100 persen	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	30,900,000	30,900,000	
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	terpeliharanya gedung kantor dan bangunan	1 tahun	1 tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten/kota	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	99,894,870	99,894,870	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT Puskesmas Kelapa Kampit

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Lainnya	Daerah Kabupaten/kota						Urusan Pemerintahan Daerah			Kampit, Semua Kelurahan			
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 %	terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor	1 tahun	1 tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	4,000,000	4,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											211,172,500	140,734,000	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											10,000,000	10,000,000	
1 02 02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100 %	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	100 persen	100 persen	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	100 %		0	0	
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100 %	terpeliharanya pra sarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	100 persen	100 persen	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100 %	Persentase Alat Kesehatan terpelihara	0	1 Tahun	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											201,172,500	130,734,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT Puskesmas Kelapa Kampit

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100 %	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kelas ibu hamil	0	1 Kegiatan	Terlaksananya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	9,793,500	0	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100 %	Terlaksananya Kegiatan Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI) Kecamatan dan Tingkat Kabupaten	0	2 Kegiatan	Terlaksananya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	14,640,000	14,640,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100 %	Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Guru UKS, Lomba Sekolah sehat, Pelatihan Dokter Kecil, Pelatihan Kader Kesehatan remaja, Lomba Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja, Screening Penjaringan Kesehatan dan sikat Gigi Bersama, Kampanye CTPS	0	8 Kegiatan	Terlaksananya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	60,765,000	38,680,000	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100 %	Persentase usia >60 Tahun yang mendapatkan skrining sesuai standar	0	1 Kegiatan	Terlaksananya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	11,094,500	11,093,500	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT Puskesmas Kelapa Kampit

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100 %	Terlaksananya Kegiatan Home Visite Pasien Jiwa	100 persen	1 Kegiatan	Terlaksananya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	11,957,500	11,957,500	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100 %	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan untuk Bumil KEK dan Balita BGM, Penyegaran Kader Posyandu, Lomba Posyandu dan Kader Posyandu teladan, Lomba Ibu ASI dan Lomba Kreasi Menu Isi Piringku	357 Orang	7 Kegiatan	Terlaksananya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	54,582,500	31,548,500	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100 %	persentase air minum yg diperiksa kualitas airnya, persentase penduduk yang mengakses air minum yang memenuhi syarat, persentase penduduk yang mengakses air minum memenuhi syarat	0	0	Terlaksananya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	100 %		0	0	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit	Pemenuhan Upaya Kesehatan		100 %	Terlaksananya Kegiatan BIAS, Pelaksanaan KB	6 desa	4 Kegiatan	Terlaksananya Layanan Kesehatan	0	100 %	Kab. Belitung Timur,	33,799,500	18,274,500	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT Puskesmas Kelapa Kampit

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Kesehatan Masyarakat			Payudara dan Kanker Servix, Pertemuan RDK dan AMP, dan Pelaksanaan Test IVA			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100 %	terselenggaranya kabupaten kota/sehat	100 persen	1 Kegiatan	Terlaksananya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	4,540,000	4,540,000	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											449,375,000	400,982,500	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											449,375,000	400,982,500	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		100 %	Tersedianya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	13 orang	12 Bulan	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	449,375,000	400,982,500	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											108,030,000	24,336,500	
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											83,893,000	10,311,000	
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		100 %	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Kesehatan di sekolah dan di Desa, Kampanye CTPS di TK/PAUD, Penyuluhan Gigi Sehat dan Sikat Gigi Bersama, Pemeriksaan Kebugaran dan senam, Kegiatan Dalam Rangka Memperingati	5 jenis	8 Kegiatan	Tercapainya Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	83,893,000	10,311,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT Puskesmas Kelapa Kampit

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Nasional dan Hari Kesehatan Jiwa									
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											24,137,000	14,025,500	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		100 %	Terlaksananya Kegiatan Lomba Pemanfaatan Toga, Peningkatan Kapasitas Kader Desa Siaga, dan Pertemuan Pokjanal Desa Siaga	0	3 Kegiatan	Tercapainya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kelurahan	24,137,000	14,025,500	
TOTAL												8,601,182,588	8,291,199,942	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT Puskesmas Simpang Pesak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,083,623,242	4,966,624,782	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,222,962,492	4,144,351,372	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 Persen	Jumlah Pegawai	43 orang	43 orang	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan		81.25 Nilai		4,222,962,492	4,144,351,372	
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 Persen	tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan		81.25 Nilai		0	0	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											29,910,000	27,450,000	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 Persen 100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas	80 Buah	80 Buah	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		20,910,000	18,450,000	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 Persen 100 Persen	Jumlah Pegawai yang Ikut Bimtek/Pelatihan	3 Orang	3 Orang	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		9,000,000	9,000,000	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											228,833,475	175,477,675	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 Persen	Persentase Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		8,799,450	5,463,450	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT Puskesmas Simpang Pesak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 Persen	Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak tersedianya jasa administrasi perkantoran Tersedianya peralatan/perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		70,718,000	66,532,000	
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 Persen	Persentase tersedianya Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		9,990,000	9,990,000	
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 Persen	tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		64,998,500	54,743,000	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 Persen	Tersedianya Alat Tulis Kantor, cetak dan penggandaan	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		48,581,525	38,749,225	
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 Persen	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		25,746,000	0	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											99,737,000	98,145,000	
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		19,737,000	18,145,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT Puskesmas Simpang Pesak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	12 Bulan	12 Bulan	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		80,000,000	80,000,000	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											257,140,275	277,888,235	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 Persen	tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		53,760,000	53,760,000	
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 Persen	tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		29,125,000	29,125,000	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 Persen	Persentase Tersedianya Jasa Administrasi Kantor Tersedianya peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga	100 % 100 %	100 % 100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		174,255,275	195,003,235	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											245,040,000	243,312,500	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah Kendaraan dalam Kondisi Baik (Kendaraan) tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 % 100 %	100 % 100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		199,040,000	202,562,500	
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Persentase pemenuhan sarana prasarana		100 Persen	Jumlah Bangunan Kantor dalam	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		30,000,000	30,000,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT Puskesmas Simpang Pesak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		layak pakai												
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Persentase Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		16,000,000	10,750,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											78,460,250	11,050,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											78,460,250	11,050,000	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		80 Persen	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kelas Ibu Hamil	12 Bulan	12 Bulan	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		3,173,000	0	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		80 Persen	Persentase Ibu Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kelas Ibu Balita, Persentase Balita Sehat, Persentase Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	12 Bulan	12 Bulan	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		17,680,750	0	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		80 Persen	Persentase sekolah yang ber PHBS 100%, Persentase Dokcil Terlatih UKS 100%, Persentase Kader Remaja Terlatih 100%, Presentase sreening Kesehatan kelas 1, 7, dan 10 100%, Persentase siswa/siswi yang	12 Bulan	12 Bulan	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		30,312,500	8,250,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT Puskesmas Simpang Pesak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					kesgimul									
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		80 Persen	Persentase Wanita yang Dilakukan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	12 Bulan	12 Bulan	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		8,000,000	0	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		80 Persen	Persentase usia > 60 Tahun yang Mendapatkan Sreening Sesuai Standar	12 Bulan	12 Bulan	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		18,094,000	2,800,000	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		80 Persen	Jumlah Kunjungan Pasien Jiwa	12 Bulan	12 Bulan	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		0	0	
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		80 Persen	Persentase Desa STBM 100%, Persentase Desa ODF	12 Bulan	12 Bulan	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		1,200,000	0	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											355,320,000	362,625,000	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											355,320,000	362,625,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		100 Persen	Penyediaan Belanja Pegawai (PTT) Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang belum terpenuhi	100 %	100 %	Angka usia harapan hidup		71.68 Persen		355,320,000	362,625,000	
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											1,462,450	0	
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											1,462,450	0	
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Persentase tempat pengolahan		60 Persen	Persentase Pemilik TPM yang Telah	12 Bulan	12 Bulan	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Nilai		1,462,450	0	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT Puskesmas Simpang Pesak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	sanitasi			Sanitasi Tangan									
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											11,566,000	0	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	0	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				Persentase Siswa/Siswi Yang Mendapatkan Penyuluhan PKPR	12 Bulan	12 Bulan	-	0	0		0	0	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											11,566,000	0	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan desa siaga aktif		100 Persen	Persentase Posyandu Aktif	12 Bulan	12 Bulan	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen		11,566,000	0	
TOTAL												5,530,431,942	5,340,299,782	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 UPT Puskesmas Renggiang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													4,902,670,272	4,640,281,067	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3,644,998,136	3,460,188,836	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 %	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	35 orang	35 orang	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan		81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	3,644,998,136	3,460,188,836			
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 %	Tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan		81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	0	0			
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													45,400,000	28,900,000	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 Persen 100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia	0	78 stel	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	23,400,000	23,400,000			
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 Persen 100 Persen	Jumlah SDM Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	0	1 orang	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	22,000,000	5,500,000			
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													319,916,605	228,751,700	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan		100 Persen	jumlah komponen instalasi	100 %	10 Jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur,	32,974,380	18,042,500			



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 UPT Puskesmas Renggiang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
	Kantor	Kantor			bangunan kantor						Renggiang, Renggiang				
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	100 %	5 Jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	96,998,300	101,280,100	
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	100 %	4 Jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	49,098,500	35,426,500	
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah penyediaan logistik kantor yang tersedia	100 %	4 Jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	27,798,500	25,341,500	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan	100 %	1 Jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	64,989,925	48,661,100	
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	100 %	2 orang	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	48,057,000	0	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											65,334,510	65,334,510		
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang		100 Persen	Jumlah mebel	100 %	2 Jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang,	19,095,000	19,095,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 UPT Puskesmas Renggiang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	5 Jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	46,239,510	46,239,510	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											575,092,500	619,177,500		
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Tersedianya Jasa Administrasi Surat Menyurat, registrasi surat masuk dan surat keluar dan kebutuhan untuk surat adminstrasi perkantoran	100 %	1 bulan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	1,000,000	0	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang terpenuhi	100 %	4 Jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	129,480,000	124,800,000	
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	jumlah Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	100 %	1 Unit	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	1,200,000	1,200,000	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor	100 %	17 orang	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	443,412,500	493,177,500	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											251,928,521	237,928,521		
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Persentase pemenuhan sarana dan		100 Persen	Jumlah kendaraan dinas Operasional/lapangan	0	13 Unit	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur,	117,997,500	110,497,500	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 UPT Puskesmas Renggiang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kantor yang layak pakai									Renggiang, Renggiang			
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah Bangunan Dalam Kondisi Baik	0	1 Bangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	89,931,021	89,931,021	
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	0	5 Jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	44,000,000	37,500,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											114,011,500	22,795,500	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											26,090,000	0	
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	1 Jenis	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	1,590,000	0	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah alat-alat kesehatan terpelihara	1 tahun	2 Jenis	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	24,500,000	0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											87,921,500	22,795,500	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kelas Ibu Hamil	94 %	94 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	8,498,000	7,508,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 UPT Puskesmas Renggiang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase balita sehat persentase ibu balita yang mendapatkan pelayanan kelas ibu balit	93 %	75 % 93 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	21,993,000	10,239,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	persentase dokcil terlatih UKS Persentase kader remaja terlatih Persentase screening kesehatan kelas 1,7 dan 10 sesuai standar persentase sekolah yang menyelenggarakan UKS sesuai standar persentase siswa/siswi yang mendapatkan penyuluhan kesgimul dan CTPS persentase siswa/siswi yang mendapatkan penyuluhan PKPR	100 %	100 % 100 % 85 % 80 % 75 % 100 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	10,991,000	0	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Wanita Yang Di Skrining IVA/IMS, Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	100 %	100 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	5,998,500	98,500	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada			90 Persen	Persentase Usia > 60 Tahun Yang	100 %	100 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur,	29,997,000	0	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 UPT Puskesmas Renggiang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar			Standar						Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Bumil KEK Mendapatkan PMT	100 %	100 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	4,950,000	4,950,000	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah Kunjungan Rumah Pasien Jiwa	19 orang	19 orang	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	2,500,000	0	
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase desa ODF Persentase Desa STBM	100 %	100 % 100 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	2,994,000	0	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											817,247,500	838,982,500	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											817,247,500	838,982,500	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		100 Persen	Penyediaan belanja pegawai bagi tenaga kesehatan di Puskesmas yang belum terpenuhi	25 orang	25 Orang	Angka Usia Harapan Hidup		71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	817,247,500	838,982,500	
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											3,999,500	0	
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											3,999,500	0	
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	Persentase tempat pengolahan		60 Persen	Persentase Pemilik TPM Yang Mengikuti	80 %	80 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur,	3,999,500	0	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 UPT Puskesmas Renggiang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	yang di inspeksi sanitasi			Hygiene Sanitasi Pangan						Renggiang, Semua Kelurahan			
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											33,995,000	3,570,000	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											15,998,000	0	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif		100 Persen	Persentase balita gizi kurang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi mendapatkan ASI eksklusif	76 %	75 % 76 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	15,998,000	0	
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											9,998,000	3,570,000	
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan desa siaga aktif		100 Persen	jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan kesehatan Persentase desa yang mendapatkan penyuluhan penyakit menular dan tidak menular persentase siswa/siswi yang mendapatkan penyuluhan kesgimul dan CTPS persentase	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	9,998,000	3,570,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 UPT Puskesmas Renggiang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
					penyuluhan PTM persentase wanita yang mendapatkan penyuluhan IVA/IMS,kanker payudara dan kanker leher rahim									
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											7,999,000	0	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan desa siaga aktif		100 Persen	persentase kader yang mendapatkan refreshing Persentase posyandu aktif	100 %	100 %	Angka Usia Harapan Hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	7,999,000	0	
TOTAL												5,871,923,772	5,505,629,067	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 UPT Puskesmas Dendang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,291,481,122	5,131,600,930	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,282,208,072	4,142,728,140	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah Pegawai	33 Orang	33 Orang	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan		81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	4,282,208,072	4,142,728,140	
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan		81.25 Nilai		0	0	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											49,000,000	49,000,000	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 Persen 100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas	0	65 Stel	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	39,000,000	39,000,000	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 Persen 100 Persen	Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi	5 Orang	2 Orang	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											167,801,500	147,785,850	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 UPT Puskesmas Dendang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 %	Persentase Tersedianya Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	9,986,000	9,986,000	
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 %	Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak	100 %	100 %	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	28,724,000	32,299,000	
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 %	Perentase Tersedianya Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	100 %	100 %	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	15,061,500	15,061,500	
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 %	Persentase tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 %	100 %	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	32,700,000	27,795,000	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 %	Persentase tersedianya alat tulis kantor, cetak dan penggandaan	100 %	100 %	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	39,597,000	41,677,350	
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 %	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	0	4 Orang	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	41,733,000	20,967,000	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											79,121,550	75,176,940	
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Persentase terpeliharanya perlengkapan/peralatan gedung kantor	100 %	100 %	Indeks kepuasaan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai		0	0	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 UPT Puskesmas Dendang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	3 Paket	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	79,121,550	75,176,940	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											432,788,000	442,365,500	
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	119,505,000	129,095,000	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	60,000,000	60,000,000	
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	26,658,000	26,658,000	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 %	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	226,625,000	226,612,500	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											280,562,000	274,544,500	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah Kendaraan Dalam Kondisi Baik	0	10 Unit	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	235,020,000	229,002,500	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 UPT Puskesmas Dendang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah Bangunan Kantor Dalam Kondisi Baik	0	4 Bangunan	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	0	81.25	Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	45,542,000	45,542,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											187,545,000	152,183,500		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											55,150,000	52,650,000		
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		100 Persen	Jumlah kegiatan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	12 Bulan	7 Kegiatan	Angka usia harapan hidup	0	71.68	Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	45,150,000	45,150,000	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		100 Persen	Persentase Alat Kesehatan terpelihara	0	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68	Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	10,000,000	7,500,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											129,548,500	99,533,500		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kelas Ibu Hamil	12 Bulan	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68	Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	7,400,000	7,400,000	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Balita Sehat (75%), Persentase Ibu Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kelas Ibu Balita (65%)	12 Bulan	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68	Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	11,415,000	11,415,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 UPT Puskesmas Dendang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase siswa/siswi mendapatkan penyuluhan Kesgimul dan CTPS (100%), Persentase sekolah yang menyelenggarakan UKS sesuai Standar (100%), Persentase Guru/ Pengelola terlatih UKS (100%), Persentase Dokcil Terlatih UKS (100%), Persentase Kader Remaja Terlatih (100%), Persentase Screeaning Kesehatan Kelas 1,7 dan 10 sesuai standar (100%)	12 Bulan	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	8,000,000	8,000,000	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Wanita yang dilakukan deteksi dini Kanker payu dara dan kanker leher rahim	12 Bulan	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Usia > 60 tahun yang mendapatkan skrining sesuai standar	12 Bulan	65 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	59,715,000	29,700,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Balita Gizi Kurang Mendapatkan PMT	12 Bulan	100 % 100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	27,610,000	27,610,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 UPT Puskesmas Dendang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Persentase Bumil KEK mendapatkan PMT									
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Jumlah Kunjungan Rumah Pasien Jiwa	0	9 Kunjungan	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	1,912,500	1,912,500	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase siswa/siswi yang mendapatkan Pelayanan Imunisasi di Sekolah	0	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	2,496,000	2,496,000	
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		90 Persen	Persentase Desa STBM (60%), Persentase Desa ODF (60%)	0	60 Persen	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	6,000,000	6,000,000	
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											2,846,500	0	
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				Persentase Pemilik TPM yang telah mengikuti pelatihan hygiene Sanitasi Pangan	0	0	-	0	0		2,846,500	0	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											437,575,000	449,375,000	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											437,575,000	449,375,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga		100 Persen	Persentase penyediaan belanja pegawai tidak tetap (PTT)	12 Bulan	100 %	Indeks kepuasan masyarakat bidang		81.25 Nilai	Kab. Belitung Timur, Dendang	437,575,000	449,375,000	



Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 UPT Puskesmas Dendang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standar			kesehatan di puakesmas yang belum terpenuhi									
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											36,067,500	16,202,500	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											16,202,500	16,202,500	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif		4 Desa	Persentase bayi mendapatkan ASI Eksklusif	12 Bulan	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	16,202,500	16,202,500	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											19,865,000	0	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan desa siaga aktif		100 Persen	Persentase kader yang mendapatkan refresing (100%), Persentase Posyandu Aktif 100%, Persentase desa yang memiliki forum masyarakat desa aktif (100%)	0	100 %	Angka usia harapan hidup	0	71.68 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	19,865,000	0	
TOTAL												5,952,668,622	5,749,361,930	



Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												8,401,447,721	7,573,266,581	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,300,520,676	4,423,077,586	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah Pegawai	40 Orang	40 Orang	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen		4,300,520,676	4,423,077,586		
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Persen	100 Persen	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen		0	0		
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												90,090,000	23,140,000	
1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 Persen	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	5 Orang	Persentase pegawai yang mendapat sertifikat keahlian	0	68.97 Persen		46,295,000	0		
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian		100 Persen	Jumlah Pegawai Yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	5 Orang	Persentase pegawai yang mendapat sertifikat keahlian	0	68.97 Persen		43,795,000	23,140,000		
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												645,722,645	359,981,095	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang laik pakai	0	100 Persen		17,560,000	12,977,000		



Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang laik pakai	0	100 Persen		99,400,000	90,503,500	
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang laik pakai	0	100 Persen		2,371,645	1,254,595	
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Pengadaan Alat-Alat dan bahan Laboratorium Kebinamargaan Tersedianya Makanan dan Minuman	0 12 Bulan	0 12 Bulan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang laik pakai	0	100 Persen		101,276,000	85,530,000	
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang laik pakai	0	100 Persen		28,305,000	27,030,000	
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang di terpenuhi	0 null	0 null	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang laik pakai	0	100 Persen		396,810,000	142,686,000	
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											187,843,400	45,585,400	
1 03 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		95 Persen	Jumlah Jenis Barang Jumlah Jenis Barang	1 Jenis 4 Jenis	1 Jenis 4 Jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	0	100 Persen		187,843,400	45,585,400	



Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	0	100 Persen		226,390,000	246,150,000	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	0	100 Persen		783,878,000	878,390,000	
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	0	100 Persen		116,500,000	116,500,000	
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	0	100 Persen		339,973,000	371,813,000	
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,710,530,000	1,108,629,500	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen 95 Persen	Jumlah alat berat dalam kondisi baik Jumlah Kendaraan Dalam Kondisi Baik Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit 29 Unit 12 Bulan	4 Unit 29 Unit 12 Bulan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	0	100 Persen		873,830,000	873,829,500	
	Pemeliharaan/Re	Persentase		100 Persen	Jumlah	0 null	0 null	Persentase						



Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dan Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana kantor yang layak pakai Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai			Kantor Dalam Kondisi Baik Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum da Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur			sarana dan prasarana kantor yang layak pakai						
1 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen 95 Persen	Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	0	100 Persen		29,700,000	19,800,000	
1 03 01 2.09 11	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen 95 Persen	Pelengkapan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	0	100 Persen		7,000,000	15,000,000	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											11,940,404,634	10,332,220,923	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											7,136,608,579	6,704,814,688	
1 03 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	Persentase desa yang memiliki akses embung /penampung air		99.99 Persen 100 Persen 100 Persen	Pendataan Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan	0	100 Persen		233,450,001	233,450,001	



Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase kawasan banjir yang ditangani Persentase turap/talud /bronjong dengan kondisi baik						daya rusak air						
1 03 02 2.01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase desa yang memiliki akses embung /penampung air Persentase kawasan banjir yang ditangani Persentase turap/talud /bronjong dengan kondisi baik		99.99 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	Persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan pengendalian daya rusak air	0	100 Persen		196,268,240	196,268,240	
1 03 02 2.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase desa yang memiliki akses embung /penampung air Persentase kawasan banjir yang ditangani Persentase turap/talud /bronjong dengan kondisi baik		99.99 Persen 100 Persen 100 Persen	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun	3.35 m	1402 m	Persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan pengendalian daya rusak air	0	100 Persen		3,503,124,236	3,071,330,345	
1 03 02 2.01 18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase desa yang memiliki akses embung /penampung air Persentase kawasan banjir yang ditangani		99.99 Persen 100 Persen 100 Persen	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0	288 meter	Persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan pengendalian daya rusak air	0	100 Persen		980,989,920	980,989,920	



Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase turap/talud /bronjong dengan kondisi baik												
1 03 02 2.01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Persentase desa yang memiliki akses embung /penampung air Persentase kawasan banjir yang ditangani Persentase turap/talud /bronjong dengan kondisi baik		99.99 Persen 100 Persen 100 Persen	Tanggul yang direhabilitasi	7 Kecamatan	7 Kecamatan	Persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan pengendalian daya rusak air	0	100 Persen		998,708,922	998,708,922	
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase desa yang memiliki akses embung /penampung air Persentase kawasan banjir yang ditangani Persentase turap/talud /bronjong dengan kondisi baik		99.99 Persen 100 Persen 100 Persen	Panjang normalisasi saluran air	0 null	7273 meter	Persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan pengendalian daya rusak air	0	100 Persen		1,198,297,260	1,198,297,260	
1 03 02 2.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa yang memiliki akses embung /penampung air Persentase kawasan banjir yang ditangani Persentase turap/talud /bronjong dengan kondisi		99.99 Persen 100 Persen 100 Persen	Hasil pengujian mutu air	10 Laporan	30 Laporan	Persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan pengendalian daya rusak air	0	100 Persen		25,770,000	25,770,000	



Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											4,803,796,055	3,627,406,235	
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas irigasi yang dapat dialiri air irigasi		70 Persen	Jaringan Irigasi yang dibangun	1.7 m	2327 m	Rasio jaringan irigasi	0	50 Persen		4,131,526,055	3,627,406,235	
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas irigasi yang dapat dialiri air irigasi		70 Persen	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Rasio jaringan irigasi	0	50 Persen		672,270,000	0	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											5,905,298,000	5,055,298,000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota											5,905,298,000	5,055,298,000	
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase rumah tangga pengguna air bersih		100 Persen	Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis SPAM	3 Dokumen	3 Dokumen	Akses air bersih masyarakat	0	100 Persen		227,250,000	227,250,000	
1 03 03 2.01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase rumah tangga pengguna air bersih		100 Persen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan Air Minum SPAM IKK	4 SPAM IKK	4 SPAM IKK	Akses air bersih masyarakat	0	100 Persen		936,088,000	436,088,000	
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase rumah tangga pengguna air bersih		100 Persen	Tersedianya Pamsimas dan Spam Pedesaan	6 Desa	6 Desa	Akses air bersih masyarakat	0	100 Persen		2,857,150,000	3,057,150,000	
1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase rumah tangga pengguna air bersih		100 Persen	Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM IKK	4 SPAM IKK	4 SPAM IKK	Akses air bersih masyarakat	0	100 Persen		809,500,000	459,500,000	
1 03 03 2.01 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok	Persentase rumah tangga pengguna air bersih		100 Persen	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	Akses air bersih masyarakat	0	100 Persen		40,560,000	40,560,000	



Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 03 03 2.01 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Persentase rumah tangga pengguna air bersih		100 Persen	Sarana dan Prasarana Air Minum SPAM IKK dalam Kondisi Baik	12 Bulan	12 Bulan	Akses air bersih masyarakat	0	100 Persen		634,750,000	634,750,000	
1 03 03 2.01 16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Persentase rumah tangga pengguna air bersih		100 Persen	rehabilitasi/pemeliharaan SPAM Pedesaan	12 Bulan	12 Bulan	Akses air bersih masyarakat	0	100 Persen		400,000,000	200,000,000	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											4,511,652,000	3,011,652,000	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota											4,511,652,000	3,011,652,000	
1 03 05 2.01 05	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Persentase rumah tangga bersanitasi		100 Persen	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Limbah	12 Bulan	12 Bulan	Akses sanitasi masyarakat	0	100 Persen		0	0	
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Persentase rumah tangga bersanitasi		100 Persen	Tersedianya sarana dan prasarana Pengolahan Air limbah Individual, Individual Terbatas dan komunal	2 Jenis	2 Jenis	Akses sanitasi masyarakat	0	100 Persen		4,511,652,000	3,011,652,000	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE											2,502,349,588	1,706,812,178	
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota											2,502,349,588	1,706,812,178	
1 03 06 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik		100 Persen	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Akses sanitasi masyarakat	0	100 Persen		500,725,000	500,725,000	
1 03 06 2.01 02	Pembangunan Saluran Drainase	Persentase rumah tangga bersanitasi		100 Persen	Saluran Drainase	1500	1077	Akses sanitasi	0	100 Persen		1,706,812,178	881,037,178	



Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik			dibangun									
1 03 06 2.01 14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik		100 Persen	Saluran Drainase/Gorong-gorong yang direhabilitasi/dipelihara	3 Kecamatan	3 Kecamatan	Akses sanitasi masyarakat	0	100 Persen		215,050,000	215,050,000	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											5,370,345,500	5,370,345,500	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											5,370,345,500	5,370,345,500	
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase bangunan yang sesuai standar		88 Persen	Terselenggaranya Peraturan Daerah Mengenai Bangunan Gedung	2 Paket	2 Paket	Persentase jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan	0	9 Persen		0	0	
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan yang sesuai standar		88 Persen	Pembangunan, Rehabilitasi Gedung Daerah	4 Unit	4 Unit	Persentase jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan	0	9 Persen		1,396,737,500	1,396,737,500	
1 03 08 2.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan yang sesuai standar		88 Persen	Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten	2 Unit	1 Unit	Persentase jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan	0	9 Persen		3,973,608,000	3,973,608,000	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											32,644,853,076	31,086,798,076	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											32,644,853,076	31,086,798,076	
	Penyusunan	Panjang jalan		33 km				Persentase jalan						



Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	ditingkatkan dan dipelihara Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik			Jumlah Dokumen Perencanaan			baik						
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan kabupaten yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik		33 km 80 Persen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendataan dan Survey	9 Dokumen	5 Dokumen	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	0	87 Persen		471,695,200	471,695,200	
1 03 10 2.01 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan kabupaten yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik		33 km 80 Persen	Panjang Pelebaran Jalan Kabupaten	4 km	4 km	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	0	87 Persen		7,359,500,000	5,784,500,000	
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan kabupaten yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik		33 km 80 Persen	Panjang Rekonstruksi Jalan Kabupaten	3 km	3 km	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	0	87 Persen		4,223,060,000	4,223,060,000	
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kabupaten yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara		33 km 80 Persen	Panjang Rehabilitasi Jalan kabupaten	1.52 km	1.52 km	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	0	87 Persen		2,698,500,000	2,698,500,000	



Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik												
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan kabupaten yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik		33 km 80 Persen	Panjang Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	13 km	8 km	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	0	87 Persen		13,730,283,800	13,730,283,800	
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kabupaten yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik		33 km 80 Persen	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	0	87 Persen		3,716,939,076	3,724,204,076	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG											2,630,104,500	2,614,354,500	
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota											1,282,257,000	1,266,507,000	
1 03 12 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya perencanaan tata ruang kab.Belitung Timur		100 Persen	Tersedianya Dokumen RDTR Kawasan	2 Dokumen	1 Dokumen	Ketaatan tata ruang	0	100 Persen		709,457,000	709,457,000	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya perencanaan tata ruang kab.Belitung Timur		100 Persen	Tersedianya dokumen Masterplan kawasan Tertentu	2 Dokumen	4 Dokumen	Ketaatan tata ruang	0	100 Persen		572,800,000	557,050,000	
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota											1,347,847,500	1,347,847,500	
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi	Persentase pelaksanaan kegiatan		100 Persen	pelaksanaan kegiatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	Ketaatan tata	0	100 Persen		229,800,000	229,800,000	



Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Hukum Bidang Penataan Ruang				pemanfaatan ruang										
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase pengawasan tata ruang		100 Persen	Tersedianya dokumen monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	3 Dokumen	2 Dokumen	Ketaatan tata ruang	0	100 Persen		1,118,047,500	1,118,047,500		
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH												209,450,000	209,450,000	
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota												209,450,000	209,450,000	
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase penyelesaian, tertib administrasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		100 Persen	Tersedianya Informasi/Database Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Penyelesaian kasus tanah negara	0	100 Persen		209,450,000	209,450,000		
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												955,297,817	1,467,621,317	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota												955,297,817	1,467,621,317	
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase penataan kawasan ruang terbuka hijau(RTH)		100 Persen	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase tersedianya luasan RTH Publik	0	20 Persen		0	0		
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase penataan kawasan ruang terbuka hijau(RTH)		100 Persen	Pengadaan, Rehabilitasi dan Pemasangan sarana Ruang Terbuka Hijau	6 Jenis kegiatan	5 Jenis kegiatan	Persentase tersedianya luasan RTH Publik	0	20 Persen		955,297,817	1,467,621,317		
TOTAL													75,071,202,836	68,427,819,075	



Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,672,527,019	3,626,274,409	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,579,942,000	2,261,763,240	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Jumlah ASN	18 orang	18 orang	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor		100 persen		2,579,942,000	2,261,763,240	
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											76,400,000	26,400,000	
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Jumlah pakaian dinas	36 stel	36 stel	Jumlah pakaian dinas	0	40 stel		26,400,000	26,400,000	
1	04	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Jumlah pegawai yang ikut bimtek/pelatihan	5 orang/kali	5 orang/kali	Jumlah pakaian dinas	0	40 stel		20,000,000	0	
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Jumlah pegawai yang ikut Bimtek/Pelatihan	8 orang/kali	8 orang/kali	Jumlah pakaian dinas	0	40 stel		30,000,000	0	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											790,321,272	293,242,422	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Persentase tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	0	100 persen		24,988,460	21,679,960	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Jumlah jenis barang Jumlah jenis barang Persentase tersedianya alat tulis kantor dan cetakan	5 unit/paket 5 Unit/paket 12 bulan	5 unit/paket 5 Unit/paket 12 bulan	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	0	100 persen		218,374,700	93,295,700	



Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 04 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Persentase tersedianya peralatan/perengkapan kantor dan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	0	100 persen		15,161,262	15,161,262	
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor Persentase tersedianya peralatan/perengkapan kantor dan rumah tangga	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	0	100 persen		91,253,000	77,403,000	
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan	12 bulan	12 bulan	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	0	100 persen		45,063,850	35,963,500	
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	50 kali	50 kali	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	0	100 persen		395,480,000	49,739,000	
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											95,125,000	47,230,000	
1 04 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Jumlah jenis barang	7 unit/paket	7 unit/paket	Persentase tersedianya peralatan/perengkapan kantor dan rumah tangga	0	100 persen		95,125,000	47,230,000	
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											510,858,247	511,158,247	
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	12 bulan	12 bulan	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	0	100 persen		138,040,000	138,040,000	
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	12 bulan	12 bulan	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	0	100 persen		138,040,000	138,040,000	



Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dan Listrik	Administrasi Kantor			kantor			kantor						
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	12 bulan	12 bulan	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	0	100 persen		58,875,000	58,875,000	
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor Persentase tersedianya peralatan/ perlengkapan kantor dan rumah tangga	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	0	100 persen		231,539,247	231,539,247	
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											619,880,500	486,480,500	
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	2 unit	2 unit	Jumlah bangunan kantor dalam kondisi baik	0	4 unit		90,512,000	89,812,000	
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	16 unit 12 bulan	16 unit 12 bulan	Jumlah bangunan kantor dalam kondisi baik	0	4 unit		178,968,500	178,968,500	
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi		100 persen	Jumlah bangunan kantor dalam	4 gedung	4 gedung	Jumlah bangunan kantor dalam	0	4 unit		312,700,000	180,000,000	



Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Persentase perlengkapan/peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	12 bulan	12 bulan	Jumlah bangunan kantor dalam kondisi baik	0	4 unit		17,700,000	17,700,000	
1 04 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 persen	Persentase perlengkapan/peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	12 bulan	12 bulan	Jumlah bangunan kantor dalam kondisi baik	0	4 unit		20,000,000	20,000,000	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											576,334,000	576,334,000	
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											557,585,000	557,585,000	
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau Rasio rumah terkena bencana alam/sosial yang dibantu		96 persen 100 persen	Rasio rumah yang diberikan fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	1 dokumen	1 dokumen	Rasio rumah yang diberikan fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	0	100 persen		557,585,000	557,585,000	
1 04 02 2.01 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau Rasio rumah terkena bencana alam/sosial yang dibantu		96 persen 100 persen	Rasio rumah yang diberikan fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	1 dokumen	1 dokumen	Rasio rumah yang diberikan fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	0	100 persen		0	0	
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan											18,749,000	18,749,000	
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau Rasio rumah terkena bencana alam/sosial yang dibantu		96 persen 100 persen	Jumlah koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha Jumlah NSPK dan NSPM yang dilaksanakan	39 desa 1 NSPK 39 desa	39 desa 1 NSPK 39 desa	Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah Bidang Perumahan	0	39 desa		18,749,000	18,749,000	



Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah Bidang Perumahan									
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											1,766,612,350	1,689,332,550	
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											222,258,350	136,878,550	
1 04 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		100 persen	Profil kawasan permukiman kabupaten	1 NSPM	1 NSPM	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		100 persen		174,861,150	90,943,850	
1 04 03 2.02 04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		100 persen	Jumlah desa yang dilaksanakan sosialisasi Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	4 desa	4 desa	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		100 persen		47,397,200	45,934,700	
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											1,544,354,000	1,552,454,000	
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		100 persen	Jumlah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	40 unit	40 unit	Jumlah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	0	70 unit		1,544,354,000	1,552,454,000	
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											5,467,809,550	4,442,223,250	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan											5,467,809,550	4,442,223,250	
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rasio cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU		51 persen	NSPK/NSPM tentang pemakaman	1 NSPM	1 NSPM	Jumlah sarana dan prasarana permukiman terbangun	0	3 jumlah/jenis /paket		97,000,000	97,000,000	



Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rasio cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU		51 persen	Jumlah dan jenis PSU permukiman terbangun Jumlah perumahan dengan PSU terbangun Jumlah perumahan dengan PSU yang ditingkatkan Jumlah sarana dan prasarana permukiman terbangun	1 Unit/kawasan/Desa 3 Unit/kawasan/Desa 1 Unit/Kawasan/Desa 1 Unit/kawasan/Desa	1 Unit/kawasan/Desa 3 Unit/kawasan/Desa 1 Unit/Kawasan/Desa 1 Unit/kawasan/Desa	Jumlah sarana dan prasarana permukiman terbangun	0	3 jumlah/jenis /paket		5,370,809,550	4,345,223,250	
TOTAL												12,483,282,919	10,334,164,209	



Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,326,267,680	4,530,238,058	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,219,516,180	3,129,841,058	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				jumlah pegawai	28 orang	28 orang					2,903,616,180	2,813,941,058	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Persentase Tersedianya Jasa Administrasi Kantor	98 persen	98 persen					315,900,000	315,900,000	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											48,000,000	0	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keikutsertaan Pegawai dalam Diklat/Bimtek Peraturan Perundang-undangan		100 persen	Pakaian Dinas Lapangan Hari-Hari Tertentu	390 stel	390 stel	Persentase Keikutsertaan Pegawai dalam Diklat/Bimtek Peraturan Perundang-undangan	0	100 persen		0	0	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keikutsertaan Pegawai dalam Diklat/Bimtek Peraturan Perundang-undangan		100 persen	Jumlah pegawai yang ikut bimtek/pelatihan	10 orang	10 orang	Persentase Keikutsertaan Pegawai dalam Diklat/Bimtek Peraturan Perundang-undangan	0	100 persen		48,000,000	0	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											512,082,000	261,151,000	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		100 persen	Persentase Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98 persen	98 persen	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	0	100 persen		29,996,000	29,996,000	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		100 persen	Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak	98 persen	98 persen	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	0	100 persen		40,998,000	36,898,000	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah	Tingkat Ketersediaan Layanan		100 persen	Persentase Tersedianya Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah	98 persen	98 persen	Tingkat Ketersediaan Layanan	0	100 persen		64,992,000	64,992,000	



Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perkantoran						Perkantoran						
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		100 persen	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	98 persen	98 persen	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	0	100 persen		35,226,000	24,946,000	
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		100 persen	Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan	98 persen	98 persen	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	0	100 persen		44,000,000	31,052,500	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		100 persen	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	85 kali	85 kali	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	0	100 persen		296,870,000	73,266,500	
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											168,888,500	0	
1 05 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 persen	Jumlah jenis barang	1 kegiatan	1 kegiatan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	100 persen		168,888,500	0	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											749,681,000	742,831,000	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		100 persen	Persentase Tersedianya Jasa Administrasi Kantor	98 persen	98 persen	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	0	12 bulan		369,000,000	362,250,000	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		100 persen	Persentase Tersedianya Jasa Administrasi Kantor	98 persen	98 persen	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	0	12 bulan		54,556,000	54,456,000	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		100 persen	Persentase Tersedianya Jasa Administrasi Kantor	98 persen	98 persen	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	0	12 bulan		326,125,000	326,125,000	



Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											628,100,000	396,415,000	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 persen	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik Persentase Tersedianya Jasa Administrasi Kantor	32 unit 98 persen	32 unit 98 persen	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	100 persen		596,100,000	389,765,000	
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 persen	jumlah bangunan kantor dalam kondisi baik	50 unit	50 unit	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	100 persen		32,000,000	6,650,000	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											5,685,708,500	6,392,015,035	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											5,585,796,000	6,392,015,035	
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/kota		100 persen	jumlah anggota dalam tim pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran perda jumlah kegiatan peserta penyuluhan keamanan lingkungan yang dilaksanakan jumlah penertiban dan penindakan terhadap penyakit masyarakat (PEKAT) Jumlah Peserta Penyuluhan persentase penindakan terhadap pelanggaran perda	50 orang 150 orang 10 kali 250 orang 98 persen	50 orang 150 orang 10 kali 250 orang 98 persen	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/kota	0	100 persen		2,530,321,000	4,027,831,035	



Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					pada unit pengaduan masyarakat									
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/kota		100 persen	Jumlah Tenaga Keamanan Lingkungan	390 orang	390 orang	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/kota	0	100 persen		2,364,184,000	2,364,184,000	
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/kota		100 persen	Jumlah Anggota SATPOLPP yang mengikuti Kegiatan Upacara HUT SATPOL PP Jumlah Aparatur SatPOLPP dan PPNS Daerah yang mengikuti Pelatihan/Workshop Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar Satpol PP Jumlah peserta Kegiatan Diklat LINMAS yang dilaksanakan	40 orang 7 orang 5 orang 80 orang	40 orang 7 orang 5 orang 80 orang	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/kota	0	100 persen		224,247,000	0	
1 05 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/kota		100 persen	Jumlah Anggota Tim Pengawasan dan Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan izin Usaha	98 orang	98 orang	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/kota	0	100 persen		42,044,000	0	
1 05 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan	Persentase Penanganan		100 persen	Jumlah Pengadaan	2 unit	2 unit	Persentase Penanganan	0	100 persen		425.000.000	0	



Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/kota			Patroli Terpadu			Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/kota						
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota											99,912,500	0	
1 05 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-		- -	jumlah Anggota Satlinmas dan Anggota Sat PolPP yang melakukan Pengamanan Pil Kades (Orang)	300 orang	300 orang	-	0	0		99,912,500	0	
TOTAL												11,011,976,180	10,922,253,093	



Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,430,550,572	3,200,738,564	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,248,132,800	1,254,117,792	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Pegawai	9 Orang	9 Orang	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,072,857,800	1,072,857,792	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,275,000	181,260,000	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											185,725,000	110,925,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Persentase tersedianya pakaian dinas/lapangan /hari-hari tertentu	0	45 stel	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,925,000	110,925,000	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Persentase meningkatnya Sumber daya Aparatur BPBD	100 %	100 %	-	0	0		25,000,000	0	
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Persentase meningkatnya Sumber daya Aparatur BPBD	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	0	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi				Persentase meningkatnya Sumber daya Aparatur BPBD	100 %	100 %	-	0	0		24,800,000	0	



Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Perundang- Undangan													
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											243,900,772	143,022,772	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor				Persentase tersediannya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	100 Persen	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,000,000	18,000,000	
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				PersentaseTerpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,999,750	36,802,250	
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,999,772	24,612,272	
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Persentase bahan logistik kantor yang tersedia Persentase tersedianya Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah tangga	100 % 100 %	100 % 100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	19,985,000	
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Persentase terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,999,250	14,149,250	



Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Persentase Terlaksanannya Perjalanan dinas, Konsultasi serta koordinasi dalam dan luar daerah dalam menunjang kinerja	0	100 Persen	-	0	0		149,902,000	29,474,000	
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,435,441,000	218,187,000	
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				jumlah Kendaraan Dinas/Operasional /Jabatan	8 unit	6 unit	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,358,800,000	148,800,000	
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel				Persentase Pengadaan Mebel	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,426,000	50,672,000	
1 05 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentase Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,215,000	18,715,000	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											941,707,500	1,090,087,500	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,600,000	19,800,000	



Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,200,000	43,200,000	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	890,907,500	1,027,087,500	
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											375,643,500	384,398,500	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	7 unit	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	349,997,500	377,148,500	
1 05 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel				Persentase Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	100 %	100 %	-	0	0		3,300,000	0	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,450,000	7,250,000	
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				Persentase Gedung Kantor yang terpelihara	0	0	-	0	0		14,896,000	0	



Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											1,557,759,000	4,375,308,900	
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota											111,052,200	12,800,000	
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				Jumlah Peta dan Dokumen Kajian Resiko yang di susun Persentase Terlaksananya Penyusunan Kajian Resiko Bencana Daerah	0	1 Dokumen 0	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,014,700	0	
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				Jumlah sosialisasi dan KIE yang terlaksana Persentase terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alamkebakaran	100 %	4 kali 100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,037,500	12,800,000	
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											289,799,300	532,576,100	
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				Jumlah pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang terlaksana Persentase terlaksananya Mitigasi Penanggulangan Bencana Alam	0	4 kali 0	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,277,000	90,277,000	
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap				Persentase penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,534,000	285,204,000	



Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana yang di beli Persentase tersedianya peralatan di kawasan tanggap darurat bencana alam/kebakaran	100 %	2 Jenis 100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,000,000	138,000,000	
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				Persentase tersediannya pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk korban bencana alam/kebakaran persentase Tersedianya bahan pendukung penanganan pasca bencana	100 %	100 % 100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,988,300	19,095,100	
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											1,156,907,500	3,829,932,800	
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				Persentase terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,020,250,000	3,551,775,300	
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				Persentase tersedianya bahan pendukung Pencarian,	100 %	100 %	-	0	0		59,000,000	133,000,000	



Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dib. Unit Organisasi : 1.05.03.03.2.03.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Evakuasi Korban Bencana									
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				Persentase tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,657,500	145,157,500	
TOTAL												5,988,309,572	7,576,047,464	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											20,370,300	20,020,300	
1	02	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											20,370,300	20,020,300	
1	02	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	40 peserta	100 PMKS	-	0	0		20,370,300	20,020,300	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,879,930,282	6,488,871,382	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	15 laporan 0 Siswa magang dan UEP	15 laporan 0 Siswa magang dan UEP	-	0	0		0	0	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,100,468,052	5,100,468,052	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Pegawai	38 Orang	38 Orang					5,100,468,052	5,100,468,052	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											79,050,000	33,550,000	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Tersedianya Pakaian Dinas	12 bulan	12 bulan	-	0	0		33,550,000	33,550,000	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 06 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				Tersedianya Sumber Daya aparatur yang berdaya guna	12 bulan	12 bulan	-	0	0		45,500,000	0	
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											541,265,900	297,315,500	
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor				Tersedianya komponen instalasi / penerangan gedung kantor untuk 1 tahun	12 bulan	12 bulan	-	0	0		28,496,500	28,496,500	
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya alat tulis kantor dan barang cetak untuk 1 tahun	12 bulan	12 bulan	-	0	0		64,125,000	57,675,000	
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor dan rumah tangga untuk 1 tahun	12 bulan	12 bulan	-	0	0		1,887,500	1,887,500	
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Tersedianya jasa administrasi perkantoran Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor dan rumah tangga untuk	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	-	0	0		132,722,500	128,392,500	
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				tersedianya alat tulis kantor dan barang cetak	12 bulan	12 bulan	-	0	0		33,653,400	26,910,000	
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				terselenggaranya Perjalanan Dinas dalam daerah, luar daerah	12 bulan	12 bulan	-	0	0		280,381,000	53,954,000	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											95,848,000	91,448,000		
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel				Tersedianya perlengkapan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	-	0	0		27,586,000	25,386,000		
1 06 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Tersedianya perlengkapan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	-	0	0		68,262,000	66,062,000		
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											543,411,000	525,051,000		
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	-	0	0		130,042,500	134,877,500		
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	0	0		99,180,000	94,980,000		
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya jasa administrasi perkantoran tersedianya peralatan/ perlengkapan kantor dan rumah tangga	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	-	0	0		314,188,500	295,193,500		
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											519,887,330	441,038,830		
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	-	0	0		354,048,500	348,548,500		
1 06 01 2.09 03	Pemeliharaan/Rehabilitasi				Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	0	0		127,338,830	62,000,330		



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dan Bangunan Lainnya				Terpeliharanya perlengkapan / peralatan gedung kantor selama 1 tahun Terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor Tersedianya Gedung Kantor	12 bulan 1 Gedung	12 bulan 1 Gedung							
1 06 01 2.09 10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Tersedianya perlengkapan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	-	0	0		28,500,000	28,500,000	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											1,111,966,200	1,107,125,000	
1 06 02 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota											20,971,000	0	
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				Terselenggaranya sosialisasi PUB bagi masyarakat	50 peserta	50 peserta	-	0	0		20,971,000	0	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											1,090,995,200	1,107,125,000	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				jumlah kelompok yang dilakukan pembinaan	76 peserta	76 peserta	-	0	0		59,586,700	50,326,500	
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan				Jumlah peserta penguatan kapasitas dan pendamping sosial	12 bulan	12 bulan	-	0	0		103,217,000	89,250,000	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				Tersalurkannya bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	39 desa	39 desa	-	0	0		59,204,000	57,204,000	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				Terlaksananya upaya-upaya peningkatan kalitas SDM PSM baru ,WKSBM dan Karang Taruna Tersedianya PSM dan TKSK yang terampil di Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam menjaring permasalahan sosial di masyakat	1 kegiatan 39 psm	1 kegiatan 39 psm	-	0	0		761,022,000	841,122,000	
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				Jumlah antisipasi dan penanganan permasalahan/kasus psikososial keluarga Terlaksananya upaya-upaya penyebaran informasi dan edukasi tentang penguatan Kesejahteraan Keluarga	30 orang 1 kegiatan	30 orang 1 kegiatan	-	0	0		107,965,500	69,222,500	
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN											28,499,500	0	
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal											28,499,500	0	
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban				Terlaksananya pelayanan terpadu kepada	100 %	100 %	-	0	0		28,499,500	0	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal													
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											697,680,400	622,361,100	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											444,937,800	403,364,800	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan				Terpenuhinya Kebutuhan permakanan bagi lanjut usia dan anak terlantar	100 %	100 %	-	0	0		64,178,000	64,178,000	
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang				Terpenuhinya Kebutuhan sandang bagi lanjut usia dan anak terlantar Terpenuhinya Kebutuhan sandang bagi lanjut usia dan anak terlantar	957 lansia	50 Anak 50 lansia	-	0	0		49,623,000	49,623,000	
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu				Terpenuhinya Kebutuhan alat bantu bagi lanjut usia disabilitas dan penyandang disabilitas	100 %	25 Lansia	-	0	0		63,542,300	63,542,300	
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				Terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	957 lansia	4 UEP	-	0	0		104,691,500	63,118,500	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti	0	1 Kegiatan	-	0	0		41,527,000	41,527,000	
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				jumlah anak/siswa penerima PMTAS	100 %	350 Siswa	-	0	0		121,376,000	121,376,000	
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											252,742,600	218,996,300	
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan				Terpenuhinya Kebutuhan permakanan bagi Penyandang Disabilitas Mental	100 %	70 Paket	-	0	0		27,280,500	27,280,500	
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				Terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial berupa Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas	1 kegiatan	1 kegiatan	-	0	0		59,925,500	59,925,500	
1 06 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				Terlaksananya Pelayanan terpadu kepada masyarakat	100 orang	100 orang	-	0	0		9,042,300	0	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				Terlaksananya Penyuluhan Kader Posyandu	100 orang	134 Posyandu	-	0	0		47,707,000	43,108,000	
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				Terlaksananya Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100 %	100 %	-	0	0		49,445,500	51,462,500	
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan				Terlaksananya Layanan Rujukan	100 orang	100 %	-	0	0		59,341,800	37,219,800	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											826,590,545	623,766,245	
1 06 05 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar											87,418,750	59,962,750	
1 06 05 2.01 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				Terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan anak nakal	100 %	100 %	-	0	0		16,449,400	16,449,400	
1 06 05 2.01 02	Rujukan Anak-Anak Terlantar				Terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan anak nakal	100 %	100 %	-	0	0		54,119,600	26,663,600	
1 06 05 2.01 03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				Terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak terlantar, anak yang membutuhkan	100 %	100 %	-	0	0		16,849,750	16,849,750	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
					khusus dan anak nakal									
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											739,171,795	563,803,495	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah penerima PKH untuk mengikuti Sosialisasi dan penyuluhan, Jumlah Keluarga Sasaran Yang Memperoleh Penguatan Kapasitas Dan Pendamping Meningkatnya aparatur penyedia layanan program penanggulangan kemiskinan	1 kegiatan 12 bulan	1 kegiatan 12 bulan	-	0	0		384,636,495	282,047,695	
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Keluarga Sasaran Yang Memperoleh Penguatan Kapasitas Dan Pendamping Meningkatnya aparatur penyedia layanan program penanggulangan kemiskinan Termutakhirannya Basis Data Terpadu (BDT) KAB. Belitung Timur	100 % 100 % 12 bulan	100 % 100 % 12 bulan	-	0	0		354,535,300	281,755,800	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA											870,520,450	791,400,500	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											173,395,500	101,917,000	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan				Persentase	100 %	100 %		0	0		10.000.000		



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap darurat bencana daerah kabupaten									
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %	100 %	-	0	0		2,750,000	0	
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				Jumlah anggota KUBE yang mendapatkan pelatihan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap darurat bencana daerah kabupaten Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat	100 orang 100 % 15 peserta	100 orang 100 % 15 peserta	-	0	0		151,917,000	101,917,000	
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	100 %	100 %	-	0	0		8,728,500	0	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					saat dan tanggap darurat bencana daerah kabupaten									
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											697,124,950	689,483,500	
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				Jumlah Pengurus Kampung Siaga Bencana (KSB)	0	0	-	0	0		28,825,450	0	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				Angka Kejadian Bencana Sosial yang telah terjadi dan potensi yang akan datang Jumlah kesiapsiagaan team satgas Jumlah personil tagana yang akan dilatih & diberdayakan Jumlah Sarana prasarana yang memada Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman bencana	0 70 orang 76 orang 100 % 12 bulan	0 70 orang 76 orang 100 % 12 bulan	-	0	0		668,299,500	689,483,500	
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN											40,588,143	40,588,143	
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											40,588,143	40,588,143	
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional				terpeliharanya sarana prasarana taman makam	12 bulan	12 bulan					40,588,143	40,588,143	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											349,687,000	294,135,000	
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											68,200,000	64,321,000	
2 08 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				terlaksananya koordinasinya dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	3 rakor	1 Rakor	-	0	0		33,200,000	29,621,000	
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan gender	50 peserta	50 peserta	-	0	0		35,000,000	34,700,000	
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											281,487,000	229,814,000	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				Jumlah kegiatan hari besar perempuan jumlah organisasi Perempuan yang di bina	1 desa 3 Organisasi	2 Kegiatan 7 Organisasi	-	0	0		243,981,000	216,234,000	
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				Jumlah Peserta Pelatihan	50 peserta	50 peserta	-	0	0		37,506,000	13,580,000	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											112,189,950	87,835,950	
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											26,695,000	25,095,000	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan				Jumlah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	100 %	100 %	-	0	0		26,695,000	25,095,000	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											85,494,950	62,740,950	
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan; Jumlah Tenaga terlatih untuk korban pendampingan KDRT	100 % 12 orang	100 % 12 orang					85,494,950	62,740,950	
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA											27,094,000	0	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											27,094,000	0	
2 08 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah peserta sosialisasi	50 peserta	50 peserta	-	0	0		27,094,000	0	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK											285,000,000	0	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											285,000,000	0	
2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				Tersedianya Dokumen Indeks Ketahanan Keluarga	0 Siswa magang dan UEP	1 Dokumen	-	0	0		285,000,000	0	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											325,299,400	77,510,400	
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											325,299,400	77,510,400	
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak				Jumlah Kecamatan/Desa Layak Anak	39 desa 1 kepengurusan	39 desa kepengurusan	-	0	0		325,299,400	77,510,400	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											45,964,000	17,332,000	
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											24,225,000	0	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;	100 %	100 %					24,225,000	0	
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											21,739,000	17,332,000	
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				jumlah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	100 %	100 %					21,739,000	17,332,000	
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA											99,699,950	0	
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa											99,699,950	0	
2 13 02 2.01 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa				Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Desa yang Terkoordinasi	39 desa	39 desa	-	0	0		45,100,000	0	
	Fasilitasi				Terlaksananya									



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Desa				Penyelenggaraan Desa yang Terkoordinasi									
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA											88,582,300	40,612,500	
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa											88,582,300	40,612,500	
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Desa yang Terkoordinasi	39 desa	39 desa					47,321,500	40,612,500	
2 13 03 2.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Desa yang Terkoordinasi	39 desa	39 desa					41,260,800	0	
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											1,476,871,650	1,255,650,150	
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa											1,476,871,650	1,255,650,150	
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				JUmlah Pemenang Lomba Desa Tk. Kabupaten Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Desa yang Terkoordinasi	1 desa 39 desa	1 desa 39 desa	-	0	0		690,276,000	659,981,000	
2 13 04 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				Jumlah Desa yang mendapatkan pelatihan tentang hukum desa	39 desa	39 desa	-	0	0		44,711,000	0	
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				Jumlah Desa yang mendapatkan pelatihan keuangan desa	39 desa	39 desa	-	0	0		160,010,750	128,652,750	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				Jumlah peserta pelatihan dari desa	39 desa	39 desa	-	0	0		213,610,750	168,470,750	
2 13 04 2.01 06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Desa	117 peserta	117 peserta	-	0	0		72,720,800	53,237,800	
2 13 04 2.01 07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				Jumlah Desa yang mendapatkan pelatihan tentang hukum desa	39 desa	39 desa	-	0	0		46,409,650	46,409,650	
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa				Jumlah BUMDes yang mengikuti pelatihan	0 Siswa magang dan UEP	41 BUMDes	-	0	0		172,560,500	152,294,500	
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	22 desa	22 desa	-	0	0		42,105,800	29,203,800	
2 13 04 2.01 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				jumlah desa yang melaksanakan pilkades	22 desa	22 desa	-	0	0		17,399,900	17,399,900	
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				Cakupan Desa yang terlayani	39 desa	39 desa	-	0	0		17,066,500	0	
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											853,584,600	558,721,400	
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota											853,584,600	558,721,400	
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga				Jumlah Kegiatan PKK	2 kegiatan 156 peserta	47 PKK 156 peserta	-	0	0		502,185,600	339,117,400	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan									
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				Jumlah Desa terfasilitasi dalam pengembangan usaha ekonomi Masyarakat	39 desa	39 Desa	-	0	0		114,020,500	62,921,500	
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				Jumlah alat yang tercipta melalui TTG guna pembangunan Desa Jumlah Desa Yang di Bina	22 alat 7 desa	22 Alat 39 Desa	-	0	0		176,679,500	156,682,500	
2 13 05 2.01 08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan BBRGM tingkat Kabupaten	39 desa	39 desa	-	0	0		60,699,000	0	
8 01 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											322,934,000	497,491,929	
8 01 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											322,934,000	497,491,929	
8 01 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				Jumlah Bansos untuk veteran/Janda, pejuang 45/ janda warakawuri Jumlah seremonial	23 orang 3 seremonial	23 orang 3 seremonial	-	0	0		322,934,000	497,491,929	



Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.13.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Besar Nasional									
TOTAL												14,463,052,670	12,523,421,999	



Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													4,465,588,640	4,610,427,386	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													2,800,344,740	3,270,943,886	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran		70 %	Jumlah ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor		95 %		2,800,344,740	3,270,943,886			
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran		70 %	Jumlah ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor		95 %		0	0			
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													55,400,000	32,400,000	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian		95 %	Tersedianya pakaian dinas Pegawai	1 Paket	1 Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		35,400,000	32,400,000			
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian		95 %	Jumlah bimtek yang diikuti	5 Kali	1 Kali	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		20,000,000	0			
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													459,862,000	203,183,500	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran		70 %	Jumlah ketersediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		14,997,000	8,196,000			
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran		70 %	Jumlah kebutuhan ATK dan barang cetakan yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		45,000,000	37,610,000			
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi		70 %	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	95 %		15,700,000	16,280,000			



Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran		70 %	Jumlah ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		56,000,000	46,304,000	
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran		70 %	Jumlah kebutuhan ATK dan barang cetakan yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		41,995,000	16,947,500	
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran		70 %	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		286,170,000	77,846,000	
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											133,498,000	103,935,000	
2 07 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		68 %	Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	1 Unit	1 Unit	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		0	0	
2 07 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		68 %	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan/Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		4,563,000	0	
2 07 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		68 %	jumlah gedung kantor yang dibangun	2 Paket	2 Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		40,000,000	15,000,000	
2 07 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		68 %	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan/Perlengkapan Gedung Kantor	2 Paket	2 Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		88,935,000	88,935,000	
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											735,778,400	738,722,000	



Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran		70 %	Jumlah ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran	0	70 %		338,712,500	334,062,500	
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran		70 %	Jumlah ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran	0	70 %		90,399,000	97,668,000	
2 07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran		70 %	Jumlah ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran	0	70 %		117,750,000	117,750,000	
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran		70 %	Jumlah ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran	0	70 %		188,916,900	189,241,500	
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											280,705,500	261,243,000	
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		68 %	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		239,455,500	219,993,000	
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		68 %	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Paket	1 Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		26,250,000	26,250,000	
2 07 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana		68 %	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	95 %		15,000,000	15,000,000	



Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA											116,224,500	96,224,500	
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)											116,224,500	96,224,500	
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Peserta pelatihan yang terserap dunia kerj		80 %	Jumlah Dokumen Data Ketenagakerjaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tingkat partisipasi angkatan kerja	0	72.2 %		116,224,500	96,224,500	
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											603,190,000	530,313,000	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi											603,190,000	530,313,000	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Peserta pelatihan yang terserap dunia kerja		80 %	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan kewirausahaan Jumlah pencari kerja yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jumlah peserta pelatihan Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan	40 Orang 96 Orang 80 Orang 26 Orang	40 Orang 96 Orang 40 Orang 20 Orang	Tingkat partisipasi angkatan kerja	0	72.2 %		603,190,000	530,313,000	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											141,686,000	81,202,500	
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja											141,686,000	81,202,500	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		60 %	Jumlah lowongan kerja yang tersedia	100 Lowongan	100 Lowongan	Tingkat partisipasi angkatan kerja	0	72.2 %		26,991,500	0	
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		60 %	Jumlah perusahaan yang mengikuti job fair	12 Perusahaan	12 Perusahaan	Tingkat partisipasi angkatan kerja	0	72.2 %		114,694,500	81,202,500	



Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											22,983,500	22,983,500		
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama		67 %	Jumlah Perwakilan Perusahaan yang mengikuti sosialisasi	40 Orang	40 Orang	Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun	0	11 %		10,588,000	10,588,000		
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama		67 %	Jumlah Pekerja dan perwakilan perusahaan yang mengikuti sosialisasi	40 Orang	40 Orang	Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun	0	11 %		12,395,500	12,395,500		
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota											200,399,500	250,683,500		
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama		67 %	Jumlah Bimbingan Industrial yang dilaksanakan Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan Jumlah Perwakilan Perusahaan yang mengikuti Bimbingan Teknis Jumlah Usulan UMP	1 Kali 10 Perusahaan 40 Orang 1 Usulan	1 Kali 10 Perusahaan 0 Orang 1 Usulan	Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun	0	11 %		62,481,500	79,881,500		
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan		67 %	Jumlah kasus yang diselesaikan	16 Kasus	16 Kasus	Angka sengketa pengusaha – pekerja per	0	11 %		68,468,000	44,522,000		



Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bersama												
2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama		67 %	Jumlah perusahaan yang membentuk Serikat pekerja/serikat buruh	6 SP/SB	6 SP/SB	Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun	0	11 %		4,531,000	4,531,000	
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama		67 %	Hasil Forum LKS Tripartit yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun	0	11 %		64,919,000	121,749,000	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											79,948,500	26,468,950	
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota											79,948,500	26,468,950	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang tertib pertanggungjawaban dan pelaporan		33,5 %	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	65 Koperasi	40 Koperasi	Persentase koperasi sehat	0	19.05 %		79,948,500	26,468,950	
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											266,623,000	201,204,750	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											266,623,000	201,204,750	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Persentase koperasi yang tertib pertanggungjawaban		33.5 %	Jumlah kelompok koperasi yang mendapatkan pembinaan	10 Koperasi 115 Pengurus Koperasi	10 Koperasi 70 Pengurus Koperasi	Persentase koperasi sehat	0	19.05 %		266,623,000	201,204,750	



Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dan Kompetensi SDM Koperasi				Jumlah pengurus/anggota koperasi yang mengikuti pelatihan jumlah sarana informasi yang di sebar ke masyarakat									
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)											278,691,300	204,338,000	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan											278,691,300	204,338,000	
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase Usaha mikro yang berkembang setelah mendapat pelatihan kewirausahaan		1.35 %	Jumlah UKM yang mendapatkan pola kemitraan usaha kecil dan menengah	40 UKM	0 UKM	Persentase usaha mikro yang mempunyai ijin usaha	0	11 %		16,924,500	0	
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha mikro yang berkembang setelah mendapat pelatihan kewirausahaan		1.35 %	Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapat pengetahuan perpajakan Jumlah usaha mikro yang menjadi peserta pelatihan	60 Orang 130 UKM	0 Orang 130 UKM	Persentase usaha mikro yang mempunyai ijin usaha	0	11 %		261,766,800	204,338,000	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM											523,746,250	417,903,750	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil											523,746,250	417,903,750	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta	Persentase Usaha mikro yang memperoleh akses permodalan		2.1 %	Jumlah KUKM yang mendapat bantuan pinjaman permodalan Jumlah pameran yang diikuti Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	2700 KUKM 4 Kali 40 UKM	2700 KUKM 3 Kali 40 UKM	Persentase usaha mikro yang mempunyai ijin usaha	0	0.11 %		523,746,250	417,903,750	



Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

SUB UNIT Organisasi : LK012170303030000 Dinas Tenaga Kerja, Kepertasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Mutu kemasan Produk UKM									
TOTAL												6,699,081,190	6,441,749,836	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,062,897,916	830,596,516	
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											63,000,000	63,000,000	
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase Pegawai yang mendapatkan tambahan sertifikat keahlian Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	210 Stel	210 Stel	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,000,000	63,000,000	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											361,133,416	142,209,016	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen 100 Persen	persentase penyediaan alat listrik/penerangan bangunan kantor	100 Persen	100 Persen	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,208,500	17,208,500	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi		100 Persen 100 Persen	persentase tersedianya atk dan barang cetakan	100 Persen	100 Persen	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,999,600	43,997,200	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen 100 Persen	persentase penyediaan peralatan/perlengkapan rumah tangga	100 Persen	100 Persen	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,999,316	41,999,316	
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen 100 Persen	Persentase terlaksananya perjalanan dinas	100 Persen	100 Persen	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	256,926,000	39,004,000	
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											97,607,000	108,972,000	
2 09 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen 100 Persen	jumlah peralatan/perlengkapan kantor	16 Jenis	16 Jenis	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,607,000	108,972,000	
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											8,700,000	8,700,000	
2 09 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan		100 Persen 100 Persen	persentase tersedianya jasa surat menyurat	100 Persen	100 Persen	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua	8,700,000	8,700,000	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor									Kelurahan			
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											532,457,500	507,715,500	
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen 100 Persen	Jasa tenaga sopir jumlah kendaraan dinas/operasional /jabatan yang terpelihara Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Tahun 55 unit 100 Persen	12 Bulan 55 unit 100 Persen	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	390,699,500	365,957,500	
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen 100 Persen	jumlah bangunan kantor yang terpelihara jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi	4 Jenis 1 unit	2 Unit 1 unit	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,758,000	96,758,000	
2 09 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor yang		100 Persen 100 Persen	jumlah peralatan/perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	6 jenis	4 jenis	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	45,000,000	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											799,056,000	607,629,500	
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan											82,939,500	88,972,000	
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Ketersediaan Energi dan Protein		145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Jumlah laporan analisis NBM	1 Laporan	1 Laporan	Pemenuhan Ketersediaan Pangan Kabupaten yang Aman, Merata dan Terjangkau	0	145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,800,000	8,800,000	
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein		145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Jasa tenaga teknis Jumlah informasi harga pangan	1 Tahun 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Pemenuhan Ketersediaan Pangan Kabupaten yang Aman, Merata dan Terjangkau	0	145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,115,000	51,940,000	
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Ketersediaan Energi dan Protein		145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Jumlah pendampingan usaha pangan	5 Usaha	5 Usaha	Pemenuhan Ketersediaan Pangan Kabupaten yang Aman, Merata dan Terjangkau	0	145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,024,500	28,232,000	
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota											118,200,000	130,900,000	
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Energi dan Protein		145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Jumlah cadangan pangan daerah	10 Ton	10 Ton	Pemenuhan Ketersediaan Pangan Kabupaten yang Aman, Merata dan Terjangkau		145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118,200,000	130,900,000	
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											597,916,500	387,757,500	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Ketersediaan Energi dan Protein		145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Jumlah laporan RPH	1 Laporan	1 Laporan	Pemenuhan Ketersediaan Pangan Kabupaten yang Aman, Merata dan Terjangkau	0	145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Kab. Belitong Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,357,500	7,357,500	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan Energi dan Protein		145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Jumlah menu B2SA yang tercipta Jumlah peserta penyuluhan Jumlah rumah pangan lestari	7 Menu 25 Orang 6 Kelompok	7 Menu 25 Orang 5 Kelompok	Pemenuhan Ketersediaan Pangan Kabupaten yang Aman, Merata dan Terjangkau	0	145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	590,559,000	380,400,000	
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											112,000,000	11,600,000	
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota											112,000,000	11,600,000	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Ketersediaan Energi dan Protein		145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	jumlah kebijakan pangan yang ditetapkan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	Pemenuhan Ketersediaan Pangan Kabupaten yang Aman, Merata dan Terjangkau	0	145904 Kg/Tahun /1000Penduduk		0	0	
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Energi dan Protein		145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Jumlah Laporan SKPG	7 Kecamatan	12 Laporan	Pemenuhan Ketersediaan Pangan Kabupaten yang Aman, Merata dan Terjangkau	0	145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,000,000	11,600,000	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											66,909,000	66,909,000	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota											66,909,000	66,909,000	
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Energi dan Protein Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan		145904 Kg/Tahun /1000Penduduk 100 Persen	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi	70 Sampel	70 Sampel	Pemenuhan Ketersediaan Pangan Kabupaten yang Aman, Merata dan Terjangkau	0	145904 Kg/Tahun /1000Penduduk	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,909,000	66,909,000	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											8,907,295,472	8,979,579,709	
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											8,099,999,972	8,184,844,309	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen 100 Persen	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 Persen	100 Persen	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,099,999,972	8,184,844,309	
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen 100 Persen	penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 Persen	100 Persen	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai		100 Persen		0	0	
3 27 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											29,000,000	15,500,000	
3 27 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase Pegawai yang mendapatkan tambahan sertifikat keahlian Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen 100 Persen 100 Persen	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 pegawai	1 pegawai	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,500,000	0	
3 27 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan	Persentase pegawai yang mengikuti		100 Persen	jumlah pegawai yang mengikuti	2 pegawai	2 pegawai	Terpenuhinya Kebutuhan	0	100 Persen	Kab. Belitung	13,500,000	4,500,000	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Undangan	berpakaian Persentase Pegawai yang mendapatkan tambahan sertifikat keahlian Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen				Pegawai			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 27 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian Persentase Pegawai yang mendapatkan tambahan sertifikat keahlian Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen 100 Persen 100 Persen	jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK	8 pegawai	2 pegawai	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,000,000	11,000,000	
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											70,133,000	69,996,900	
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen 100 Persen	Persentase tersedianya makanan dan minuman tamu, makanan dan minuman rapat	100 Persen	100 Persen	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,133,000	34,997,000	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen 100 Persen	persentase tersedianya atk dan barang cetakan	100 Persen	100 Persen	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	34,999,900	
3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	2,000,000	
3 27 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen 100 Persen	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	2,000,000	
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											708,162,500	707,238,500	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen 100 Persen	Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 Persen	100 Persen	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,576,000	84,576,000	
3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan		100 Persen 100 Persen	Jasa tenaga keamanan/satpam /penjaga kantor	100 Persen	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua	58,250,000	58,250,000	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor									Kelurahan			
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen 100 Persen	Jasa tenaga administrasi kantor Jasa tenaga kebersihan Jasa tenaga keuangan persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 Persen	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 Persen	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor dan Pegawai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	565,336,500	564,412,500	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											2,694,267,500	2,688,623,500	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											2,324,516,000	2,336,756,000	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian		100 Persen 100 Persen 100 Persen	Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Penerbitan STDB	5 Desa	5 Desa	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Pternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,182,500	34,182,500	
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian		100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jasa tenaga teknis jumlah alat mesin pertanian jumlah benih unggul yang dibagikan jumlah promosi pertanian/perkebunan yang diikuti jumlah pupuk dan obat-obatan pertanian	1 Tahun 4 Jenis 2 Jenis 2 Kali 3 Jenis 4 Jenis	12 Bulan 4 Jenis 2 Jenis 1 Kali 3 Jenis 1 Jenis	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Pternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,290,333,500	2,302,573,500	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					jumlah sarana prasarana produksi pertanian									
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota											113,860,500	95,976,500	
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase Penerapan Teknologi Peternakan dalam Budidaya Ternak Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian		100 Persen 100 Persen	Jumlah sarana prasarana produksi peternakan	4 Jenis	4 Jenis	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Peternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,860,500	95,976,500	
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota											56,791,000	56,791,000	
3 27 02 2.03 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Persentase Penerapan Teknologi Peternakan dalam Budidaya Ternak Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian		100 Persen 100 Persen	Jumlah sarana prasarana produksi peternakan	2 Jenis	2 Jenis	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Peternakan		17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,791,000	56,791,000	
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain											199,100,000	199,100,000	
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Rata-Rata Peningkatan Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian		100 Persen 100 Persen	Jumlah bibit ternak yang dibagikan	1 Jenis	1 Jenis	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Peternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,100,000	199,100,000	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											3,163,875,000	3,127,917,500	
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian											3,163,875,000	3,127,917,500	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan		100 Persen 100 Persen	Jumlah sarana pengairan	1 unit	4 unit	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Pternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung Kab. Belitung Timur, Gantung, Selingsing	1,140,000,000	1,140,000,000	
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan		100 Persen 100 Persen	Jasa tenaga teknis Jumlah jalan pertanian Jumlah Jalan Pertanian	1 Tahun 2 unit	6 Bulan 2 Paket 6 Km	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Pternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung Kab. Belitung Timur, Gantung, Selingsing Kab. Belitung Timur, Gantung, Lilangan Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Cendil Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simoana	1,626,287,500	1,610,330,000	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
											Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Tanjung Kelumpang			
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan		100 Persen 100 Persen	Renovasi Ruang Data dan Informasi	2 Unit	2 Unit	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Pternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	200,000,000	
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan		100 Persen 100 Persen	Jasa tenaga teknis Jumlah alat pasca panen jumlah sarana prasarana produksi peternakan	1 Tahun 2 Jenis 1 Jenis	12 Bulan 2 Jenis 1 Jenis	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Pternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	197,587,500	177,587,500	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											249,937,122	241,737,122	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota											249,937,122	241,737,122	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Ternak		100 Persen	Jasa Tenaga Kesehatan Hewan Jasa tenaga teknis Jumlah dan jenis pengendalian	1 Tahun 4 jenis penanganan	12 Bulan 12 Bulan 4 jenis penanganan	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Pternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249,937,122	241,737,122	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											46,963,200	46,963,200	
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulanagan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota											46,963,200	46,963,200	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan		100 Persen	jumlah penanganan OPT tanaman perkebunan	2 Kelompok	2 Kelompok	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,963,200	46,963,200	
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN											47,349,500	47,349,500	
3 27 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota											47,349,500	47,349,500	
3 27 06 2.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan Persentase Terklasifikasinya Kelas Kebun Perusahaan		100 Persen 100 Persen	Jasa tenaga teknis Terlaksananya Penilaian Usaha Perkebunan untuk Perusahaan Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional	1 Tahun 10 Perusahaan	12 Bulan 10 Perusahaan	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Peternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,349,500	47,349,500	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											733,912,000	325,875,500	
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian											733,912,000	325,875,500	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian Persentase penyuluh pertanian/perkebunan yang terlatih dan terampil Persentase Petani yang mendapat pendidikan, pelatihan dan pembinaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan		100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jasa tenaga teknis jumlah penyuluh pertanian di setiap desa jumlah penyuluh terlatih	1 tahun 39 desa 43 penyuluh pertanian	12 Bulan 39 desa 43 penyuluh pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Peternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	312,112,000	178,072,000	



Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian Persentase penyuluh pertanian/perkebunan yang terlatih dan terampil Persentase Petani yang mendapat pendidikan, pelatihan dan pembinaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan		100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah petani perkebunan terlatih jumlah petani yang mengikuti kegiatan pertanian	145 Orang 7 Orang	145 Orang 10 Orang	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Pternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	321,800,000	47,803,500	
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian Persentase penyuluh pertanian/perkebunan yang terlatih dan terampil Persentase Petani yang mendapat pendidikan, pelatihan dan pembinaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan		100 Persen 100 Persen 100 Persen	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP	2 Unit	2 Unit	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan /Pternakan	0	17.65 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	100,000,000	
TOTAL												17,884,462,710	16,974,781,047	



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,082,225,122	5,632,919,493	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,221,650,000	3,631,808,500	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Nilai AKIP Perangkat Daerah		78 Nilai		4,221,650,000	3,631,808,500		
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan	100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Ketersediaan Honorarium ASN	12 Bulan	12 Bulan	Nilai AKIP Perangkat Daerah		78 Nilai	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja												
2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											78,100,000	78,100,000	
2 11 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Jumlah Pakaian dinas	65 Stel	65 Stel	-Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	78 Nilai		33,600,000	33,600,000	



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 11 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Jumlah Sosialisasi yang diikuti	10 Diklat	10 Diklat	-Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	78 Nilai		44,500,000	44,500,000	
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											520,216,288	570,425,659	
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	78 Nilai		4,033,000	3,840,000	



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja												
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Ketersediaan Alat Tulis Kantor Ketersediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	-Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	78 Nilai		75,763,811	78,232,782	
2 11 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah	Cakupan layanan penunjang yang		100 % 100 %	Ketersediaan Peralatan	12 Bulan	12 Bulan	-Nilai AKIP Perangkat	0	78 Nilai		9,999,477	14,089,877	



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		3 Nilai 100 %										
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Peranokat		100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Ketersediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	-Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	78 Nilai		30,800,000	26,231,000	



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja												
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Ketersediaan Barang Cetak	12 Bulan	12 Bulan	-Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	78 Nilai		19,995,000	28,393,000	
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50 Perjalanan	60 Perjalanan	-Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	78 Nilai		379,625,000	419,639,000	



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja												
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											179,603,834	193,408,834	
2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		1 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Kendaraan Dinas Roda Dua	2 Unit	2 Unit	-Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	50 Nilai		48,500,000	48,500,000	



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja												
2 11 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		1 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	10 Unit 4 Unit	15 Unit 6 Unit	-Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	50 Nilai		131,103,834	144,908,834	
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											614,608,500	632,078,500	
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai	Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	-Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	50 Nilai		6,800,000	6,800,000	



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
												Sebelum	Sesudah	
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja												
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan		100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	50 Nilai		91,716,000	89,966,000	



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja													
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Ketersediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor Ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Ketersediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	-Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	50 Nilai		516,092,500	535,312,500		
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												468,046,500	527,098,000	
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana		100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	26 Unit	26 Unit	-Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	50 Nilai		216,996,500	226,544,000		



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja												
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Jasa Konsultasi DED Rehabilitasi/Renovasi Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang direhab Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara Terpliharanya Gedung Kantor	1 Dokumen 2 Paket 1 Gedung 12 Bulan	1 Dokumen 2 Paket 1 Gedung 12 Bulan	-Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	50 Nilai		221,900,000	271,404,000	



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja													
2 11 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 % 100 % 3 Nilai 3 Nilai 100 %	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	30 Unit 30 Unit	30 Unit 30 Unit	-Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	50 Nilai		29,150,000	29,150,000		
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												351,398,000	0	
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota												351,398,000	0	
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	0 Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan		0 0 0 %	Dokumen KLHS	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0	0 0		351,398,000	0		



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											818,507,800	665,798,650	
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											449,216,800	292,466,650	
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Udara		49 Indeks 61 Indeks 98 Indeks	Laporan Berkala Kondisi Kualitas Air Sungai,Air baku (PDAM,kolong,sumur dan air lainnya),laporan pemantauan kualitas udara emisi sumber tidak bergerak ,laporan pemantauan udara emisi sumber bergerak,laporan udara ambien	6 Laporan	5 Laporan	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indek Kualitas Lahan	0	499861 Indeks		254,969,800	198,993,650	
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Udara		49 Indeks 61 Indeks 98 Indeks	Kajian Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	2 Paket	1 Dokumen	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indek Kualitas Lahan	0	499861 Indeks		135,796,500	30,187,500	
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Udara		49 Indeks 61 Indeks 98 Indeks	- Ketersediaan Pengelolaan Laboratorium	2 Unit 12 Bulan	0 - 12 Bulan	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indek Kualitas Lahan	0	499861 Indeks	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,450,500	63,285,500	
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											119,547,500	118,685,000	
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Udara		49 Indeks 61 Indeks 98 Indeks	Dokumen Data dan Informasi Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indek Kualitas Lahan	0	499861 Indeks		119,547,500	118,685,000	



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Udara		49 Indeks 61 Indeks 98 Indeks	Luasan wilayah lahan kritis yang direvegetasi	50 Peserta 12 Ha	0 12 Ha	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indek Kualitas Lahan	0	499861 Indeks		249,743,500	254,647,000	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											321,165,000	71,770,000	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											321,165,000	71,770,000	
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		0 %	Dokumen Penyusunan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	1 Dokumen	-Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	100 %		195,515,000	42,020,000	
2 11 04 2.01 05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		0 %	Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	100 %		125,650,000	29,750,000	
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											102,385,000	97,711,500	
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3											102,385,000	97,711,500	
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Ketaatan Perusahaan dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 Persentase Ketaatan Perusahaan dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3		70 % 90 %	Jumlah Berita Acara Verifikasi lapangan pengelolaan limbah B3	5 Berita Acara	5 Berita Acara	Persentase Penanganan Persampahan	0	65 %		102,385,000	97,711,500	



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											156,596,500	161,469,000	
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											156,596,500	161,469,000	
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		90 %	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang difasilitasi	5 Perusahaan/Kegiatan	5 Perusahaan/Kegiatan	-Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha Terhadap Aturan Lingkungan Hidup	0	90 %		54,131,500	54,094,000	
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		90 %	50 Berita Acara Laporan	50 Berita Acara 1 Laporan	50 Berita Acara 1 Laporan	-Persentase Ketaatan Penanggung awab Usaha Terhadap Aturan Lingkungan Hidup	0	90 %		6,660,000	6,660,000	
2 11 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		90 %	Jumlah BA Pengaduan Jumlah Kasus yang ditindaklanjuti	100 Pengaduan 1 Kasus	100 Pengaduan 1 Kasus	-Persentase Ketaatan Penanggung awab Usaha Terhadap Aturan Lingkungan Hidup	0	90 %		95,805,000	100,715,000	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											49,697,000	0	
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											49,697,000	0	
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk	0		0 0	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 Peserta	35 Peserta	-	0	0 0		49,697,000	0	



Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kemasyarakatan											Sebelum	Sesudah	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											248,770,000	0	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											248,770,000	0	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0		0 0	Penghargaan Kalpataru Penghargaan Sekolah Adiwiyata Perkemahan Saka Kalpataru	2 Penghargaan 4 Sekolah 1 Kegiatan	2 Penghargaan 4 Sekolah 1 Kegiatan	-	0	0 0		248,770,000	0	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											5,669,612,500	6,318,997,190	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah											5,669,612,500	6,318,997,190	
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sampah		70 %	Bak Container Sampah Mobil Pengangkut Sampah Operasional dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana persampahan	4 Unit 1 Unit 12 Bulan	2 Unit 1 Unit 12 Bulan	Persentase Penanganan Persampahan	0	65 %		5,619,187,500	6,318,997,190	
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah		70 %	Motor Roda 3 Pembangunan Bank Sampah Sosialisasi Pengelolaan Persampahan	3 Unit 2 Unit 2 Kegiatan	3 Unit 2 Unit 2 Kegiatan	Persentase Penanganan Persampahan	0	65 %		50,425,000	0	
TOTAL												13,800,356,922	12,948,665,833	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,828,469,286	5,027,997,165	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	20,056,000	
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai aspek pelaporankinerja dalam AKIP perangkat daerah Nilai aspek perencanaan Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	3 Nilai 3 Nilai 3 Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	20,056,000				
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,119,298,856	3,016,858,485	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	3 Nilai 3 Nilai 3 Nilai	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,113,963,856	3,013,958,485			



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2 12 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		3 Nilai 3 Nilai 3 Nilai	persentase jumlah kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor		100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,335,000	2,900,000	
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											92,400,000	100,282,000	
2 12 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pegawai yang disiplin berpakaian		100 Persen 100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas/Lapangan /hari-hari tertentu	57 stel	99 stel	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,400,000	59,400,000	
2 12 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pegawai yang disiplin berpakaian		100 Persen 100 Persen	jumlah sosialisasi		1 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	40,882,000	
2 12 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pegawai yang disiplin berpakaian		100 Persen 100 Persen	Aparatur Mengikuti Bimtek	6 orang	0 orang	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,000,000	0	
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											563,300,430	766,459,180	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Persentase tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,495,500	328,250,500	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Kinerja												
2 12 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga untuk 1 tahun	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,995,180	36,995,180	
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor Persentase Pemenuhan Pelayanan		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga untuk 1 tahun	100 Persen	100 Persen	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,408,000	29,182,000	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Akuntabilitas Kinerja												
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 Persen	100 Persen	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,499,750	10,799,500	
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor Persentase Pemenuhan		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen	3 Jenis	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,976,000	2,976,000	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja												
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah OPD yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	55 Kali	34 PKS 77 Kali	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	349,926,000	343,256,000	
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											134,866,500	137,924,000	
2 12 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan		100 Persentase 100 Persen 100 Persen 100 Persentase	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	1 Unit	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,500,000	70,500,000	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai												
2 12 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persentase 100 Persen 100 Persen 100 Persentase	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Paket	30 Unit	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,366,500	67,424,000	
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											469,298,500	529,581,500	
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi		100 Persentase 100 Persentase 100 Persen	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani tersedianya jasa administrasi perkantoran	8 orang 100 persen	4 Jenis 12 Bulan	persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	243,223,500	249,306,500	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja												
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persentase 100 Persentase 100 Persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 persen	100 persen	persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,200,000	133,400,000	
2 12 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi		100 Persentase 100 Persentase 100 Persen	Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan/Satpam dan Penjaga Malam Kantor	2 orang	12 Bulan	persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,250,000	58,250,000	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Akuntabilitas Kinerja												
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persentase 100 Persentase 100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	3 Orang	persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,625,000	88,625,000	
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											449,305,000	456,836,000	
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja Persentase pemenuhan		100 Persentase 100 Persen 100 Persen 100 Persentase	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Laik Jalan	2 unit	2 unit	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,598,000	54,129,000	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kantor yang layak pakai												
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persentase 100 Persen 100 Persen 100 Persentase	Tersedianya Jasa Supir, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	251,907,000	251,907,000	
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persentase 100 Persen 100 Persen 100 Persentase	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/di Rehab Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	1 paket 100 persen	2 Bangunan 100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,900,000	120,900,000	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai												
2 12 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persentase 100 Persen 100 Persen 100 Persentase	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	100 persen	35 Unit	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,900,000	29,900,000	
2 12 02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										1,587,327,000	1,078,317,000	
2 12 02 2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk										1,587,327,000	1,078,317,000	
2 12 02 2.01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP		9.714 Persen 9.714 Persen 72.18 Persen 9.714 Persen	Jumlah laporan rekapitulasi penduduk non permanen	2 laporan	2 laporan	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,840,000	23,840,000	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk ber-KTP												
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk ber-KTP		9.714 Persen 9.714 Persen 72.18 Persen 9.714 Persen	fumigasi Jumlah arsip dokumen yang terkelola jumlah operator SIAK	2 kali 5000 berkas 15 orang	2 kali 5000 berkas 15 orang	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	487,789,500	487,789,500	
2 12 02 2.01 03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk ber-KTP		9.714 Persen 9.714 Persen 72.18 Persen 9.714 Persen	Jumlah Seragam Petugas Adminduk Desa	1 Desa dan Kecamatan	407 Baju	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156,407,000	40,700,000	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk ber-KTP		9.714 Persen 9.714 Persen 72.18 Persen 9.714 Persen	Jenis inovasi pelayanan Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan Jumlah KTP-el yang diterbitkan jumlah petugas pelayanan adminduk desa	5 inovasi 39234 lembar 96555 lembar 39 orang	5 inovasi 39234 lembar 96555 lembar 39 orang	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	642,690,500	525,987,500	
2 12 02 2.01 07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk ber-KTP		9.714 Persen 9.714 Persen 72.18 Persen 9.714 Persen	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100 persen	100 persen	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276,600,000	0	
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL											1,000,645,870	585,709,870	
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil											374,424,370	335,724,370	
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil		94.41 persen 94.41 persen 98,96 persen	Jumlah arsip yang dikelola Jumlah kecamatan	5000 berkas 7 kecamatan 4 orang	5000 berkas 7 kecamatan 4 orang	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	0	97 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua	219,940,000	200,590,000	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Penerbitan akta kelahiran perjumlah kelahiran Persentase kepemilak akta kelahiran usia 0 - 18 Tahun Rasio pasangan berakta nikah Rasio perbitan akta kematian		0,95 angka	penyisiran jumlah operator SIAK Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim						Kelurahan			
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil Penerbitan akta kelahiran perjumlah kelahiran Persentase kepemilak akta kelahiran usia 0 - 18 Tahun Rasio pasangan berakta nikah Rasio perbitan akta kematian		94.41 persen 94.41 persen 98,96 persen 89 angka 0,95 angka	Dialog Interaktif Jenis Inovasi Pelayanan Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan Persentase ketepatan waktu pencatatan peristiwa penting	1 kali 4 inovasi 1 kegiatan 100 persen	1 kali 4 inovasi 1 kegiatan 100 persen	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	0	97 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154,484,370	135,134,370	
2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil											549,460,000	207,462,000	
2 12 03 2.02 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun		94.41 persen 94.41 persen 98.96 peerse 89 angka 0.95 angka	Persentase Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100 persen	100 persen	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	0	97 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	488,522,000	207,462,000	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Rasio pasangan berakte nikah Rasio penerbitan akta kematian												
2 12 03 2.02 08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun Rasio pasangan berakte nikah Rasio penerbitan akta kematian		94.41 persen 94.41 persen 98.96 peerse 89 angka 0.95 angka	Persentase Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100 persen	100 persen	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	0	97 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,938,000	0	
2 12 03 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil											76,761,500	42,523,500	
2 12 03 2.03 04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil penerbitan akta kelahiran Per jumlah kelahiran Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun Rasio pasangan berakta nikah Rasio penerbitan akta kematian		94.41 persen 94.41 persen 98.96 Persen 89 angka 0.95 angka	Jumlah operator SIAP/petugas register yang mengikuti bimbingan teknis	60 orang	60 orang	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	0	97 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,761,500	42,523,500	
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											326,644,454	252,262,892	
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan											251,798,954	188,114,892	
	Pengolahan dan	Persentase		100 Persen	jumlah operator	2 orang	2 orang	Persentase			Kab.			



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		prasaran yang mutakhir Persentase ketersediaan tata kelola administrasi kependudukan Persentase Pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani		100 Persen 100 Persen	Persentase maintenance sistem administrasi kependudukan			Stakeholders			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 12 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase ketersediaan sarana dan prasaran yang mutakhir Persentase ketersediaan tata kelola administrasi kependudukan Persentase Pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah OPD yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama	34 Pks	34 Pks	Persentase Pemanfaatan Data Oleh Stakeholders	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	0	
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											40.000.000	20.302.500	



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan sarana dan prasaran yang mutakhir Persentase pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani		100 Persen 100 Persen 100 Persen	Persentase Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100 persen	100 persen	Persentase Pemanfaatan Data Oleh Stakeholders		100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	29,302,500	
2 12 04 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											34,845,500	34,845,500	
2 12 04 2.04 03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase ketersediaan sarana dan prasaran yang mutakhir Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani		100 Persen 100 Persen	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek SELINA	100 persen	45 Orang	Persentase Pemanfaatan Data Oleh Stakeholders		100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,845,500	34,845,500	
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN											81,352,500	78,497,500	
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan											81,352,500	78,497,500	
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten		100 Persen	Persentase tersedianya data kependudukan	100 persen	100 persen	Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten		100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,880,000	45,880,000	
	Penyusunan	Persentase			Jumlah buku			Persentase			Kab.			



Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SUB UNIT ORGANISASI : L.12101001000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten			perkembangan kependudukan skala kabupaten			Penyajian Data kependudukan Skala Kabupaten			Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
TOTAL												7,824,439,110	7,022,784,427	



Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,882,609,089	6,122,048,075	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,955,843,441	2,719,104,365	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	2,955,843,441	2,719,104,365		
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											65,000,000	0	
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	100 Persen	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	4 Orang	4 Orang	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	0	100 Persen		40,000,000	0		
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	100 Persen	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	5 Orang	5 Orang	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	0	100 Persen		25,000,000	0		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											816,081,710	557,695,210	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	100 Persen	Jumlah penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	12 Bulan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	11,650,000		
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	100 Persen	Jumlah penyediaan peralatan/perlengkapan kantor	100 %	12 Bulan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	60,000,000	64,804,000		



Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 15 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah penyediaan peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga	100 %	12 Bulan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	44,983,810	36,097,310	
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	100 %	12 Bulan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	8,995,500	8,002,500	
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	12 Bulan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	112,325,400	37,345,400	
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi, pendidikan dan pelatihan dan Bimbingan Teknis Luar Daerah dan pelaksanaan monitoring dan pemeliharaan perlengkapan jalan	100 Kali	640 Kali	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	579,777,000	399,796,000	
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,292,392,500	1,308,883,500	
2 15 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah pengadaan mobil operasional penerangan jalan umum	1 Unit	1 Unit	-	0	0		1,195,234,500	1,195,234,500	



Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 15 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	6 Jenis	8 Jenis	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	97,158,000	113,649,000	
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											740,408,000	697,578,000	
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah Penyediaan Materai	100 %	689 Buah	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	6,890,000	6,890,000	
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	12 Bulan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	108,123,000	105,903,000	
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah penyediaan Tenaga Administrasi Kantor	100 %	12 Bulan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	625,395,000	584,785,000	
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,012,883,438	838,787,000	
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah kendaraan dinas operasional/jabatan dalam kondisi baik	29 Unit	23 Unit	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	953,490,000	819,287,000	
	Pemeliharaan/Reparasi	Persentase			Jumlah gedung			Cakupan			Kab.			



Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dan Bangunan Lainnya	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja			dipelihara			penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan			Timur, Manggar, Padang			
2 15 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah peralatan/perengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	29 Unit	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	19,500,000	19,500,000	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											12,234,462,449	11,723,389,049	
2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											0	0	
2 15 02 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen penyelenggaraan dan pelayanan transportasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0	0		0	0	
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											7,117,089,695	7,069,895,295	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		100 Persen	Jumlah jenis penyediaan Perlengkapan Jalan (Jenis)	1 Unit	10 Jenis	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	0	10 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,775,718	5,150,775,718	
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		100 Persen	Jumlah jenis fasilitas keselamatan jalan yang berfungsi dengan baik	20 Unit	3 Jenis	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	0	10 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,966,313,977	1,919,119,577	
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C											137,103,104	137,103,104	
2 15 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana			10 Persen	Jumlah fasilitas terminal	1 Unit	1 Unit	Persentase Layanan Angkutan Darat	0	19 Persen		0	0	



Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)												
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah fasilitas terminal yang berfungsi baik	2 Unit	2 Unit	Persentase Layanan Angkutan Darat	0	19 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	137,103,104	137,103,104	
2 15 02 2.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah SDM Perhubungan yang Diberikan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	Persentase Layanan Angkutan Darat	0	19 Persen		0	0	
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir											11,803,500	11,803,500	
2 15 02 2.04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah Juru Parkir pada Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan	85000 Kendaraan	20 Orang	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas		10 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	11,803,500	11,803,500	
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											4,161,236,920	4,144,786,920	
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		10 Persen	Jumlah pengadaan unit pengujian kendaraan	2 Unit	2 Unit	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0	15 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	4,050,600,920	4,050,600,920	



Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah SDM Perhubungan yang Diberikan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0	15 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,900,000	14,450,000	
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah Pemeliharaan Alat Uji dalam kondisi baik dan terpelihara	12 Unit	12 Unit	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0	15 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	81,736,000	79,736,000	
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											385,543,230	287,126,730	
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah dokumen manajemen rekayasa lalu lintas (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	0	10 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	135,252,890	135,252,890	
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka MRLL	44 Kali	2 Jenis	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	0	10 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117,199,660	87,269,660	
2 15 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten	350 Orang	1 Kali	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	0	10 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	71,546,500	0	
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah pengawasan dan pengendalian	44 Kali	50 Kali	Persentase ruas jalan yang	0	10 Persen	Kab. Belitung	61,544,180	64,604,180	



Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			manajemen rekayasa lalu lintas (kali)			standar keselamatan berlalu lintas			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota											2,452,500	2,452,500	
2 15 02 2.07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah rapat sosialisasi rekomendasi analisis dampak lalu lintas	1 Dokumen	2 Kali	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	0	10 Persen		2,452,500	2,452,500	
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan											133,096,000	0	
2 15 02 2.08 01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah SDM Perhubungan yang Diberikan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0	15 Persen		0	0	
2 15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah peserta pemilihan AKUT	20 Orang	30 Orang	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0	15 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	74,898,000	0	
2 15 02 2.08 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah pemeriksaan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	38 Kali	38 Kali	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0	15 Persen		58,198,000	0	
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											216,212,500	70,221,000	
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan	Persentase Pemenuhan		10 Persen	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase peningkatan jumlah		20 Persen	Kab. Belitung	21,221,000	70,221,000	



Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			pelayanan angkutan			angkutan darat, laut/penyeberangan			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah hari pelaksanaan dan penjagaan angkutan lebaran jumlah penumpang umum yang terlayani pada arus mudik dan balik angkutan lebaran (orang)	14 Hari 170 Orang	14 Hari 170 Orang	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan darat, laut/penyeberangan		20 Persen		124,991,500	0	
2 15 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											69,925,000	0	
2 15 02 2.14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		10 Persen	Jumlah koordinasi penyelenggaraan angkutan	10 Kali	6 Kali	Persentase Layanan Angkutan Darat	0	1 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	69,925,000	0	
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											870,393,985	772,163,985	
2 15 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal											49,115,000	0	
2 15 03 2.12 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran		15 Persen	Jumlah Dokumen persyaratan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	Rasio konektivitas antar wilayah	0	45 Persen		49,115,000	0	
2 15 03 2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau											821,278,985	772,163,985	



Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2 15 03 2.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran		15 Persen	Jumlah Dokumen persyaratan pembangunan pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	1 Dokumen	Rasio konektivitas antar wilayah		45 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,115,000		0
2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran		15 Persen	Jumlah sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kondisi baik	3 Unit	3 Unit	Rasio konektivitas antar wilayah		45 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	772,163,985	772,163,985	
TOTAL												19,987,465,523	18,617,601,109	



Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														6,246,683,054	5,633,443,745	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														4,399,133,070	4,199,133,062	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan		100 persen		4,399,133,070	4,199,133,062				
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														104,400,000	42,000,000	
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah pakaian dinas	140 stel	70 stel	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		44,400,000	42,000,000				
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah pegawai yang ikut bimtek/pelatihan	3 Orang	1 Orang	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		15,000,000	0				
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah pegawai yang ikut bimtek/pelatihan	2 Orang	1 Orang	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		5,000,000	0				
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah pegawai yang ikut bimtek/pelatihan	10 Orang	8 Orang	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		40,000,000	0				
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														474,254,612	197,872,311	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		9,985,500	11,646,925				
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Persentase pemenuhan		100 persen	Persentase tersediannya	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan	0	100 persen		45,000,000	39,424,600				



Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kantor			cetakan									
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor Persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		50,943,262	45,349,286	
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersediannya alat tulis kantor dan barang cetakan	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		21,999,850	17,596,500	
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	150 kali	35 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		346,326,000	83,855,000	
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											126,862,500	185,396,500	
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah jenis barang	3 jenis	2 jenis	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		12,384,000	12,384,000	
2 16 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah jenis barang	3 jenis	3 jenis	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		114,478,500	173,012,500	
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											660,032,872	548,741,872	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		193,616,500	192,516,500	



Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		255,300,000	154,780,000	
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor Persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		211,116,372	201,445,372	
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											482,000,000	460,300,000	
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	9 unit	8 unit	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		238,350,000	187,050,000	
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah bangunan kantor dalam kondisi baik Jumlah bangunan yang direhab	3 unit 2 unit	2 unit 2 unit	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		218,650,000	248,250,000	
2 16 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase perlengkapan/peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		17,000,000	21,000,000	
2 16 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase perlengkapan/peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen		8,000,000	4,000,000	



Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											1,064,282,000	1,353,900,840	
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi		85 persen	Jumlah media	2 Media	2 Media	IKM terhadap pelayanan informasi publik	0	80 persen		340,737,500	499,946,280	
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi		85 persen	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan Jumlah jenis media penyebaran informasi	28 % 8 Jenis Media	28 % 8 Jenis Media	IKM terhadap pelayanan informasi publik	0	80 persen		327,279,500	365,818,400	
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase diseminasi informasi		85 persen	Jumlah bimtek/sosialisasi penguatan PPID Jumlah foto kegiatan pemerintah Daerah Jumlah video kegiatan pemerintah daerah Persentase pelayanan yang ditindaklanjuti	1 kali 200 foto 100 video 100 %	1 kali 200 foto 100 video 100 %	IKM terhadap pelayanan informasi publik	0	80 persen		352,674,500	442,488,660	
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase diseminasi informasi		85 persen	Jumlah pelaksanaan audiensi	2 kali	8 kali	IKM terhadap pelayanan informasi publik	0	80 persen		43,590,500	45,647,500	
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA											7,179,217,500	4,657,964,985	
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											3,421,309,000	3,550,621,500	



Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase infrastruktur TIK yang terintegrasi Persentase sistem informasi untuk layanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dikembangkan		100 persen 30 persen	Jumlah lokasi infrastruktur TIK	13 Titik lokasi	13 Titik lokasi	Indeks SPBE	0	2.6 Nilai		3,421,309,000	3,550,621,500	
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											3,757,908,500	1,107,343,485	
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase infrastruktur TIK yang terintegrasi Persentase sistem informasi untuk layanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dikembangkan		100 persen 30 persen	Gedung pusat operasional jaringan dan data (lanjutan) Jumlah lokasi infrastruktur TIK	1 paket 1 Titik lokasi	1 paket 1 Titik lokasi	Indeks SPBE	0	2.6 Nilai		3,186,125,000	701,141,485	
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase infrastruktur TIK yang terintegrasi Persentase sistem informasi untuk layanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dikembangkan		100 persen 30 persen	Jumlah sistem informasi yang dikaji/dikembangkan	1 sistem	1 sistem	Indeks SPBE	0	2.6 Nilai		75,687,500	59,487,500	
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase infrastruktur TIK yang terintegrasi Persentase sistem informasi untuk layanan pemerintahan dan pelayanan publik yang		100 persen 30 persen	Jumlah sistem informasi yang terhubung	2 sistem	2 sistem	Indeks SPBE	0	2.6 Nilai		29,194,000	4,390,000	



Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase infrastruktur TIK yang terintegrasi Persentase sistem informasi untuk layanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dikembangkan		100 persen 30 persen	Jumlah sistem layanan publik	1 sistem	1 sistem	Indeks SPBE	0	2.6 Nilai		23,850,000	14,400,000	
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase infrastruktur TIK yang terintegrasi Persentase sistem informasi untuk layanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dikembangkan		100 persen 30 persen	Jumlah pelatihan Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK	6 kali 12 kali	6 kali 12 kali	Indeks SPBE	0	2.6 Nilai		443,052,000	327,924,500	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											424,059,700	373,881,700	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											424,059,700	373,881,700	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral daerah yang dimuktahirkan		100 persen	Dokumen Data Dasar	1 dokumen	1 dokumen	Persentase ketersediaan data	0	85 persen		276,734,700	244,670,700	
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral daerah yang dimuktahirkan		100 persen	Jumlah Rapat Koordinasi	3 kali	3 kali	Persentase ketersediaan data	0	85 persen		64,800,000	64,573,500	
2 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral daerah yang dimuktahirkan		100 persen	Jumlah Rapat Koordinasi	3 kali	0 kali	Persentase ketersediaan data	0	85 persen		17,600,000	0	
2 20 02 2.01 05	Pengembangan Infrastruktur Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral daerah yang dimuktahirkan		100 persen	Jumlah Rapat Koordinasi	3 kali	3 kali	Persentase ketersediaan data	0	85 persen		64,925,000	64,637,500	



Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											311,174,350	244,632,050	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											272,866,500	206,324,200	
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keamanan informasi		100 persen	Jumlah peralatan peraga kesadaran keamanan informasi Jumlah sosialisasi	0 Unit 0 kali	2 Unit 2 kali	Indeks kematangan keamanan informasi	0	540 Nilai		66,542,300	0	
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase tingkat keamanan informasi		100 persen	Jumlah assesment Jumlah Lokasi yang di Deteksi Keamanan Informasinya	2 kali 3 lokasi	2 kali 3 lokasi	Indeks kematangan keamanan informasi	0	540 Nilai		206,324,200	206,324,200	
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota											38,307,850	38,307,850	
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keamanan informasi		100 persen	Jumlah OPD yang Terhubung Jaring Komunikasi Sandi	10 OPD	10 OPD	Indeks kematangan keamanan informasi	0	540 Nilai		38,307,850	38,307,850	
TOTAL												15,225,416,604	12,263,823,320	



Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,625,177,585	7,179,595,503	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,951,981,494	5,027,499,468	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	15 persen 80 persen 90 persen	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	44 Orang	41 Orang	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	84 skor		4,951,981,494	5,027,499,468		
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										36,099,000	0	
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	15 persen 80 persen 90 persen	Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK	7 Orang	2 Orang	terpenuhinya kebutuhan kantor dan pegawai	0	88 persen	36,099,000	0		
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										735,826,519	433,645,313	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen	persentase pemenuhan	80 persen	jumlah komponen	12 Bulan	11 jenis	indeks kepuasan masyarakat	0	84 skor	24,985,000	24,731,500		



Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	an Bangunan Kantor	administrasi kantor			listrik/penerangan bangunan kantor			PTSP						
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		80 persen	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	12 Bulan	44 Jenis	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		111,515,514	112,693,058	
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		80 persen	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 Bulan	33 Jenis	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		45,087,665	56,623,415	
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		80 persen	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	12 Bulan	9 Jenis	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		48,515,000	24,564,000	
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		80 persen	Tjumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 Bulan	9 Jenis	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		108,682,340	108,682,340	
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		80 persen	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	2 Jenis	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		7,380,000	7,380,000	
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		80 persen	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,228,000	4,228,000	
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi		80 persen	Jumlah Penyelenggaraan Perjalanan Dinas, Rapat-Rapat Koordinasi dan	110 kali	25 kali	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		385,433,000	94,743,000	



Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Luar Daerah yang dilaksanakan									
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											181,721,722	94,253,722	
2 18 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		80 persen	Kendaraan dinas operasional lapangan, kantor (unit)	4 unit	0 unit	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		58,200,000	0	
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		80 persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Meubelair	1 Paket	6 unit	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		28,160,000	13,498,000	
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		80 persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	1 Paket	11 Unit	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		95,361,722	80,755,722	
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,366,151,350	1,317,487,500	
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		80 persen	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani	12 Bulan	4 jenis	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		245,870,000	245,870,000	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		80 persen	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	5 jenis	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		246,883,850	246,740,000	
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		80 persen	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	29 Orang	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		873,397,500	824,877,500	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											353,397,500	306,709,500	



Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		80 persen 90 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan	12 Bulan	20 Unit	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		281,997,500	258,143,500	
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		80 persen 90 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	12 Bulan	1 Unit	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		46,400,000	19,066,000	
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		80 persen 90 persen	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	40 Unit	indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan PTSP	0	84 skor		25,000,000	29,500,000	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											95,000,000	95,000,000	
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											95,000,000	95,000,000	
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	peningkatan investor baru yang berinvestasi (PMDN/PMA)		1 investor	Jumlah dokumen informasi potensi atau peluang usaha	1 Jenis	1 dokumen	meningkatnya investor yang berinvestasi	0	6.15 persen		95,000,000	95,000,000	



Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												155,823,500	112,735,500	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan investor baru yang berinvestasi (PMDN/PMA)		1 investor	Promosi peluang penanaman modal/investasi	2 kali	1 kali	persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	0	6.15 persen		155,823,500	112,735,500		
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												287,842,071	277,379,721	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota												287,842,071	277,379,721	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan tepat waktu persentase penyelesaian perizinan tepat waktu		100 persen 82 persen	Jumlah permohonan perizinan yang diverifikasi lapangantepat waktu Laporan Pelayanan Perizinan	4 Orang	250 izin 12 laporan	meningkatnya investor yang berinvestasi	0	4 hari	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	271,572,350	261,110,000		
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan tepat waktu persentase penyelesaian perizinan tepat waktu		100 persen 82 persen	Jumlah pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 kali	2 kali	meningkatnya investor yang berinvestasi	0	4 hari		16,269,721	16,269,721		
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												258,214,500	369,963,500	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												258,214,500	369,963,500	
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian		55 persen	Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman	12 kali	169 kali	meningkatnya investor yang berinvestasi	0	6.15 persen		258,214,500	369,963,500		



Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah		
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												46,927,860	35,160,770	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												46,927,860	35,160,770	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM		55 persen	Jumlah sosialisasi peraturan perizinan Laporan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang telah diolah	1 kali 3 Jenis	1 kali 12 laporan	meningkatnya investor yang berinvestasi	0	6.15 persen		46,927,860	35,160,770		
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												3,682,895,612	1,386,517,836	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												3,511,683,412	1,221,451,836	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET)		10 persen	infrastruktur, sarana prasarana, perlengkapan pasar dan UPT pengelola pasar dalam kondisi baik Jumlah pengembangan infrastruktur pasar	4 Jenis	4 pasar 2 Jenis	Terjangkaunya harga bahan pokok strategis dan kelayakan alat ukur serta kesesuaian produk yang beredar dengan standar yang berlaku	0	64.64 persen		3,511,683,412	1,221,451,836		
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya												171,212,200	165,066,000	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	persentase penurunan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan tertib ukur dan tertib niaga		10 persen	Jumlah laporan pengelola sarana distribusi perdagangan	35 Orang	12 Laporan	Terjangkaunya harga bahan pokok strategis dan kelayakan alat ukur serta kesesuaian produk yang beredar dengan standar yang berlaku	0	64.64 persen		171,212,200	165,066,000		
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEHUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING												1.030.000.000	1.012.521.450	



Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET)		10 persen	Jumlah laporan informasi harga barang kebutuhan pokok strategis	12 Laporan	12 Laporan	Terjangkaunya harga bahan pokok strategis dan kelayakan alat ukur serta kesesuaian produk yang beredar dengan standar yang berlaku	0	64.64 persen		33,799,950	27,088,950	
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET)		10 persen	Operasi Pasar Murah Bersubsidi	10000 KK	1 kali	Terjangkaunya harga bahan pokok strategis dan kelayakan alat ukur serta kesesuaian produk yang beredar dengan standar yang berlaku	0	64.64 persen		996,300,000	985,432,500	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR											104,414,450	0	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											104,414,450	0	
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	industri kecil menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan		66 persen	Jumlah KUB produk unggulan yang ditingkatkan pengembangan produknya	1 KUB	0 KUB	Terjangkaunya harga bahan pokok strategis dan kelayakan alat ukur serta kesesuaian produk yang beredar dengan standar yang berlaku	0	64.64 persen		18,249,500	0	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	industri kecil menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat		66 persen	Jumlah promosi produk Industri Kecil Menengah	3 kali	0 kali	Terjangkaunya harga bahan pokok strategis dan kelayakan alat ukur serta kesesuaian produk yang	0	64.64 persen		86,164,950	0	



Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		pendampingan						standar yang berlaku							
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												313,141,607	302,086,607	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan												313,141,607	302,086,607	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	persentase penurunan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan tertib ukur dan tertib niaga		10 persen	Jumlah Sidang Tera yang dilaksanakan Pengadaan peralatan kemetrolgiaan	5 Jenis	7 kali 1 paket	Terjangkaunya harga bahan pokok strategis dan kelayakan alat ukur serta kesesuaian produk yang beredar dengan standar yang berlaku	0	64.64 persen		285,641,857	283,058,357		
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	persentase penurunan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan tertib ukur dan tertib niaga		10 persen	Jumlah pengawasan Metrologi legal yang dilaksanakan	7 kali	7 kali	Terjangkaunya harga bahan pokok strategis dan kelayakan alat ukur serta kesesuaian produk yang beredar dengan standar yang berlaku	0	64.64 persen		27,499,750	19,028,250		
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												1,311,609,760	712,208,170	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota												1,311,609,760	712,208,170	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	industri kecil dan menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan pengembangan sentra IKM persentase IKM yang praduksinya		66 persen 5 sentra 35 persen	Jumlah IKM yang disertifikasi Jumlah SDM IKM yang terlatih	50 IKM	40 IKM 35 IKM	pertumbuhan industri kecil dan menengah	0	1.32 persen		340,298,170	169,169,670		



Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		mendapat pelatihan dan pendampingan												
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	industri kecil dan menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan pengembangan sentra IKM persentase IKM yang praduksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan		66 persen 5 sentra 35 persen	Jumah Kelompok IKM yang terfasilitasi sarana prasarana industri	4 Jenis	3 Kelompok	pertumbuhan industri kecil dan menengah	0	1.32 persen		38,202,500	12,750,000	
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	industri kecil dan menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan pengembangan sentra IKM persentase IKM yang praduksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan		66 persen 5 sentra 35 persen	Jumlah IKM Kerajinan yang terfasilitasi pembina kerajinan	10 IKM	10 IKM	pertumbuhan industri kecil dan menengah	0	1.32 persen		891,867,590	489,847,000	



Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.30.3.31.13.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 31 02 2.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	industri kecil dan menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan pengembangan sentra IKM persentase IKM yang praduksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan		66 persen 5 sentra 35 persen	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan IKM	1 Laporan	12 Laporan	pertumbuhan industri kecil dan menengah	0	1.32 persen		41,241,500	40,441,500	
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL											57,197,000	44,864,000	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota											57,197,000	44,864,000	
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	industri kecil menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan		66 persen	Jumlah buku informasi Industri Kecil dan Menengah	10 Buku	10 Buku	pertumbuhan industri kecil dan menengah	0	1.32 persen		57,197,000	44,864,000	
TOTAL												14,968,343,895	11,528,033,057	



Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,035,352,048	5,504,956,622	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										93,689,000	82,765,000	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan	100 Persen	Jumlah dokumen pengendalian dan perencanaan SKPD yang disusun	0 dok	2 dok	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,689,000	82,765,000		
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,214,009,000	2,387,367,024	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan	100 persen 100 Persen	Jumlah pegawai	16 orang	16 orang	Persentase pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan yang terselesaikan	0	100 persen	2,214,009,000	2,387,367,024		
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan	100 persen 100 Persen	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Persentase pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan yang terselesaikan	0	100 persen	0	0		



Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 19 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 persen	Jumlah pakaian dinas	0	0	Persentase aparatur berkinerja baik	0	100 persen		39,482,000	47,132,000	
2 19 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 persen	Jumlah pegawai yang ikut Bimtek/pelatihan	0	0	Persentase aparatur berkinerja baik	0	100 persen		22,000,000	0	
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											532,314,008	369,633,608	
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan		100 persen 100 Persen	Jumlah bulan penyediaan alat listrik dan elektronik	0	0	Persentase pelayanan administrasi yang dilaksanakan	0	100 persen		11,047,000	11,019,300	
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan		100 persen 100 Persen	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan ATK dan belanja fotocopy Jumlah jenis barang	0 0 unit	0 0 unit	Persentase pelayanan administrasi yang dilaksanakan	0	100 persen		133,542,000	142,248,000	



Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		perkantoran yang dilaksanakan												
2 19 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan		100 persen 100 Persen	Jumlah bulan penyediaan perlatan kantor dan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	12 bulan	Persentase pelayanan administrasi yang dilaksanakan	0	100 persen		19,393,508	19,393,508	
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan		100 persen 100 Persen	Jumlah bulan penyediaan perlatan kantor dan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	12 bulan	Persentase pelayanan administrasi yang dilaksanakan	0	100 persen		57,479,500	47,399,500	
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase		100 persen 100 Persen	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan ATK dan belanja fotocopy	12 bulan	12 bulan	Persentase pelayanan administrasi yang dilaksanakan	0	100 persen		8,869,000	20,670,800	



Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan												
2 19 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan		100 persen 100 Persen	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Persentase pelayanan administrasi yang dilaksanakan	0	100 persen		14,946,000	23,720,500	
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan		100 persen 100 Persen	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	0	12 Kali	Persentase pelayanan administrasi yang dilaksanakan	0	100 persen		287,037,000	105,182,000	
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											484,205,000	61,066,000	
2 19 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan		100 persen 100 Persen	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	0	1 unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang	0	90 persen		438,714,000	18,300,000	



Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan												
2 19 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan		100 persen 100 Persen	Jumlah jenis barang	0 unit	8 jenis	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang baik	0	90 persen		45,491,000	42,766,000	
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,173,483,500	2,065,463,500	
2 19 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan		100 persen 100 Persen	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	Persetase jasa penunjang urusan yang terselesaikan	0	90 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	720,062,500	720,062,500	



Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan		100 persen 100 Persen	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Persetase jasa penunjang urusan yang terselesaikan	0	90 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	486,910,000	329,960,000	
2 19 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan		100 persen 100 Persen	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Persetase jasa penunjang urusan yang terselesaikan	0	90 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203,875,000	203,875,000	
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana		100 persen 100 Persen	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Persetase jasa penunjang urusan yang terselesaikan	0	90 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	762,636,000	811,566,000	



Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang dilaksanakan												
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											476,169,540	491,529,490	
2 19 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan		100 Persen	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	12 bulan 0	12 bulan 0	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang baik dan layak	0	95 persen		348,446,000	348,446,000	
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan		100 Persen	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	12 bulan 0	12 bulan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang baik dan layak	0	95 persen		33,000,000	33,000,000	
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan		100 Persen	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor	0	12 bulan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang baik dan layak	0	95 persen		94,723,540	110,083,490	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											2,034,763,500	1,643,934,500	
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											1,363,396,500	1,194,893,000	
2 19 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa	Persentase pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat		100 Persen	Jumlah peserta pembinaan mental spiritual pemuda	0	1500 Orang	Frekuensi pembinaan mental spiritual ppemuda dan ppenyaluran kreatifitas kreasi pemuda	0	100 persen		96,731,000	91,800,000	



Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan													
2 19 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Persentase pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat		100 Persen	Jumlah festival/lomba /invitasi kepemudaan yang diselenggarakan	0	7 kategori	Frekuensi pembinaan mental spiritual ppemuda dan ppenyaluran kreatifitas kreasi pemuda	0	100 persen		174,033,000	164,033,000	
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat		100 Persen	Jumlah peserta pelatihan dasar kepeloporan pemuda	0	100 Orang	Frekuensi pembinaan mental spiritual ppemuda dan ppenyaluran kreatifitas kreasi pemuda	0	100 persen		1,092,632,500	939,060,000	
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											671,367,000	449,041,500	
2 19 02 2.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Persentase pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat		100 Persen	Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan bakat dan keterampilan	0 orang	100 orang	Persentase peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	0	100 persen		250,000,000	84,730,500	
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial		100 Persen	Jumlah dokumen potensi dan kelembagaan kepemudaan yang disusun	0 dok	2 dok	Persentase peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	0	100 persen		421,367,000	364,311,000	



Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											12,124,723,750	10,686,421,550	
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											2,131,461,250	2,090,587,050	
2 19 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang memadai		100 persen	Jumlah atlet yang mendapat prioritas ke pemusatan latihan terpadu olahraga prestasi (Training Centre)	0 orang	25 orang	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kawasan, Sarana Prasarana Olahraga	0	12 bulan		111,394,500	127,769,000	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang memadai		100 persen	Jumlah bulan pemeliharaan kawasan, sarana dan prasarana olahraga Jumlah peralatan / perlengkapan olahraga yang diadakan (Unit/Set/Buah) Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	0 0 0	12 bulan 8 Jenis 13 pekerjaan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kawasan, Sarana Prasarana Olahraga	0	12 bulan		2,020,066,750	1,962,818,050	
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											961,366,000	562,320,500	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Atlet yang berprestasi		50 persen	Jumlah turnamen cabang olahraga	0 cabor	3 cabor	-	0	0		841,472,000	447,978,500	



Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase Atlet yang berprestasi		50 persen	Jumlah Turnamen cabang olahraga	0 cabor	4 cabor	-	0	0		119,894,000	114,342,000	
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi											1,186,396,500	803,299,000	
2 19 03 2.03 01	Seleksi Atlet Daerah	Persentase pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		100 persen	Jumlah pengiriman prestasi atlet cabang olahraga mengikuti kejuaraa n ke TK Provinsi dan Nasional	0 cabor	15 cabor	Jumlah pelatih yang mengikuti Diklat peningkatan mutu dan kompetensi pelatih	0	30 orang		517,024,500	293,717,000	
2 19 03 2.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Persentase pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		100 persen	Jumlah orang dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi usia dini hingga ke tingkat usia lanjutan	0 cabor	0 cabor	Jumlah pelatih yang mengikuti Diklat peningkatan mutu dan kompetensi pelatih	0	30 orang		49,835,000	0	
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		100 persen	Jumlah cabor dalam pemusatan latihan olahraga prestasi di tingkat pelajar	0 cabor	10 cabor	Jumlah pelatih yang mengikuti Diklat peningkatan mutu dan kompetensi pelatih	0	30 orang		547,537,000	509,582,000	
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		100 persen	Jumlah cabor dalam pemusatan latihan olahraga prestasi di tingkat pelajar	0 orang	0 orang	Jumlah pelatih yang mengikuti Diklat peningkatan mutu dan kompetensi pelatih	0	30 orang		72,000,000	0	
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga											7,025,910,000	7,013,944,000	
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi	Persentase peningkatan dan pengembangan		75 persen	Operasional pelaksanaan dana hibah	1 tahun	1 tahun	-	0	0	Semua Kab/Kota, Semua	6,967,490,000	6,967,490,000	



Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		manajemen olahraga			Organisasi Olahraga						Semua Kelurahan			
2 19 03 2.04 03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Persentase peningkatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga		75 persen	Jumlah perintisan dan pengembangan klub olahraga di kecamatan/kabupaten	0	1 Kali	-	0	0		58,420,000	46,454,000	
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi											819,590,000	216,271,000	
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan , Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase pembinaan dan pengembangan kesegaranan jasmani dan olahraga rekreasi		100 persen	Jumlah event kegiatan senam SKJ dan lomba aerobik	0 event	6 event	Jumlah event kegiatan senam SKJ dan lomba aerobik	0	3 event		386,290,000	38,568,000	
2 19 03 2.05 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Persentase pembinaan dan pengembangan kesegaranan jasmani dan olahraga rekreasi		100 persen	Jumlah lomba pada pembinaan olahraga rekreasi	0 cabor	6 cabor	Jumlah event kegiatan senam SKJ dan lomba aerobik	0	3 event		144,050,000	47,826,000	
2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Persentase pembinaan dan pengembangan kesegaranan jasmani dan olahraga rekreasi		100 persen	Jumlah cabang olahraga tradisional dan kemasyarakatan yang dikembangkan	0	3 Cabor	Jumlah event kegiatan senam SKJ dan lomba aerobik	0	3 event		289,250,000	129,877,000	
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											232,000,000	152,109,350	
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											232,000,000	152,109,350	
2 19 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Cakupan pembinaan kepramukaan		100 Persen	Frekuensi penyelenggaraan kegiatan kepramukaan	0 keg	4 keg	Persentase penyelenggaraan aktivitas kepramukaan ditingkt kabupaten, provinsi dan		100 persen		232,000,000	152,109,350	



Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : L1750000000 Dinas Kependudukan dan Catatan Kependudukan														
Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
TOTAL											20,426,839,298	17,987,422,022		



Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah			
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													6,083,207,043	5,642,617,193	
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3,329,464,775	3,313,504,775	
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	21 orang	21 orang	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar		100 persen		3,313,504,775	3,313,504,775			
2	22	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	persentase kersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 tahun	100 persen	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar		100 persen		15,960,000	0			
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													49,926,000	0	
2	22	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				jumlah Pegawai yang ikut Bimtek/ Pelatihan	6 orang	6 orang	-	0	0		49,926,000	0			
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													722,971,768	607,267,918	
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	Persentase tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 persen	100 persen	-Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 persen		25,000,000	25,000,000			
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	-Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 persen		57,500,000	51,820,500			
2	22	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan penunjang urusan		100 persen	persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga untuk 1 tahun	100 persen	100 persen	-Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja	0	100 persen		38,500,000	38,500,000			



Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								Daerah						
2 22 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga untuk 1 tahun	100 persen	100 persen	-Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 persen		65,835,908	59,037,408	
2 22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	Persentase ketersediaan bahan cetakan dan penggandaan	100 persen	100 persen	-Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 persen		37,499,860	31,476,010	
2 22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	65 kali	65 kali	-Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 persen		498,636,000	401,434,000	
2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											352,555,500	93,555,500	
2 22 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat)	1 unit	1 unit	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 persen		259,000,000	0	
2 22 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	Jumlah perlengkapan atau peralatan gedung kantor yang dibeli	4 jenis barang	25 unit	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 persen		93,555,500	93,555,500	
2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1 062 712 500	1 062 712 500	



Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 22 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	Persentase tersedianya jasa surat menyurat	100 persen	100 persen	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	0	100 persen		1,500,000	1,500,000	
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	Persentase kersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	100 persen	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	0	100 persen		157,400,000	157,400,000	
2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	persentase kersediaan jasa pelayanan umum kantor	100 persen	100 persen	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	0	100 persen		903,812,500	903,812,500	
2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											565,576,500	565,576,500	
2 22 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Laik Jalan	4 unit	4 unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	0	100 persen		88,694,500	88,694,500	
2 22 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan	11 unit	11 unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	0	100 persen		320,947,000	320,947,000	
2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	Jumlah bangunan kantor dalam kondisi baik	5 unit	5 unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	0	100 persen		59,840,000	59,840,000	



Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 22 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan		100 persen	Persentase perlengkapan/ peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	0	100 persen		96,095,000	96,095,000	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											1,841,747,000	2,319,923,750	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											1,094,755,000	1,566,435,750	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan		60 persen	Aktualisasi objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya takbenda yang tercatat Terlaksananya aktualisasi objek pemajuan kebudayaan	10 karya budaya 4 adat budaya	10 karya budaya 4 adat budaya	-Aktualisasi objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya takbenda yang tercatat	0	10 karya budaya		677,446,250	846,453,500	
2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan		60 persen	Meningkatnya kreatifitas sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan, pembinaan dan pelatihan sanggar/komunitas seni Peserta seleksi yang terpilih yang mewakili kabupaten Beltim ke Tk. Provinsi	5 sanggar 8 orang	5 sanggar 8 orang	-Aktualisasi objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya takbenda yang tercatat	0	10 karya budaya		417,308,750	719,982,250	
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											746,992,000	753,488,000	
2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	persentase pengembangan kebudayaan		60 persen	Partisipasi sanggar dalam festival musik dan tari ke Tk. propinsi dan nasional	1 tim 5 sanggar 50 kali	1 tim 5 sanggar 50 kali	Partisipasi sanggar seni dan komunitas budaya dalam pertunjukan seni	0	5 sanggar		672,413,000	753,488,000	



Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Partisipasi sanggar seni dan komunitas budaya dalam pertunjukan seni dan budaya Terlaksananya penampilan seni dan budaya									
2 22 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	persentase pengembangan kebudayaan		60 persen	Jumlah penerima penghargaan bidang kebudayaan	2 orang/kelompok	2 orang/kelompok	Partisipasi sanggar seni dan komunitas budaya dalam pertunjukan seni dan budaya	0	5 sanggar		74,579,000	0	
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH											0	0	
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											0	0	
2 22 04 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				jumlah kajian Sejarah Lokal di Belitung Timur	2 naskah kajian	2 naskah kajian	-	0	0		0	0	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA											122,633,650	122,633,650	
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota											122,633,650	122,633,650	
2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	jumlah cagar budaya yang ditetapkan		55 persen	jumlah Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	2 situs situs/kawasan	2 situs situs/kawasan	-Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	2 situs/kawasan		122,633,650	122,633,650	
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN											207,591,608	202,090,614	
2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota											207,591,608	202,090,614	
2 22 06 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan	persentase pengelolaan		60 persen	jumlah Koleksi Museum yang	45 buah	45 buah	Jumlah koleksi museum yang	0	45 buah		160,431,108	160,429,108	



Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Terpadu													
2 22 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	persentase pengelolaan museum		60 persen	waktu terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan	12 bulan	12 bulan	Jumlah koleksi museum yang tertata	0	45 buah		47,160,500	41,661,506	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											5,611,958,950	5,356,631,720	
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											5,611,958,950	5,356,631,720	
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur		200000 wisatawan	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	7 destinasi wisata	7 destinasi wisata	Jumlah destinasi yang dikembangkan	0	7 lokasi		3,034,944,750	3,000,179,540	
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur		200000 wisatawan	jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang terpelihara waktu terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperbaiki	3 paket 12 bulan	3 paket 12 bulan	Jumlah destinasi yang dikembangkan	0	7 lokasi		2,518,217,750	2,291,494,230	
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur		200000 wisatawan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	Jumlah destinasi yang dikembangkan	0	7 lokasi		58,796,450	64,957,950	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											2,802,703,950	1,342,851,500	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											2,802,703,950	1,342,851,500	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD Daerah		2 persen	Jumlah media promosi pariwisata (peta wisata) Jumlah oplah	3000 eksemplar 1 majalah	200 buah 1 majalah	Jumlah Kerjasama dan kemitraan Promosi Pariwisata	0	1 kerjasama/kemitraan		1,124,660,000	650,620,000	



Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
					tersedianya media promosi pariwisata Media promosi pariwisata tingkat nasional dan regional										
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD Daerah		2 persen	Jumlah event yang dilaksanakan Terlaksanananya kegiatan pemasaran wisata di luar daerah Terlaksanananya kegiatan pemateri/pemilihan Bujang dayang Belitung Timur sebagai Duta wisata Daerah TerpilihDuta Wisata Kabupaten Belitung Timur	2 event 3 kali pameran 4 pasang	2 event 3 kali pameran 4 pasang	Jumlah Kerjasama dan kemitraan Promosi Pariwisata	0	1 kerjasama/kemitraan		1,479,340,950	493,528,500		
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD Daerah		2 persen	kerjasama promosi pariwisata Belitung Timur	1 kerjasama	1 kerjasama	Jumlah Kerjasama dan kemitraan Promosi Pariwisata	0	1 kerjasama/kemitraan		198,703,000	198,703,000		
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												1,398,492,350	1,046,824,650	
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar												1,398,492,350	1,046,824,650	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		25 persen	Jumlah desa wisata yang dibina Jumlah Pengelola homestay yang dibina	7 desa wisata 55 homestay	7 desa wisata 55 homestay	jumlah SDM kepariwisataan yang terlatih	0	80 orang		278,947,450	726,780,350		



Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		25 persen	jumlah sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona	18 kali	18 kali	jumlah SDM kepariwisataan yang terlatih	0	80 orang		72,567,600	188,044,650	
3 26 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		25 persen	Terlaksananya pelatihan SDM kepariwisataan	4 kali	4 kali	jumlah SDM kepariwisataan yang terlatih	0	80 orang		994,577,800	131,999,650	
3 26 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		25 persen	Jumlah pelaku jasa pariwisata yang dibina jumlah Pelaku jasa pariwisata yang diusulkan untuk disertifikasi	90 orang 10 orang	90 orang 10 orang	jumlah SDM kepariwisataan yang terlatih	0	80 orang		52,399,500	0	
TOTAL												18,068,334,551	16,033,573,077	



Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,205,577,302	3,976,926,202	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,976,409,278	2,976,409,278	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah pegawai	23 orang	23 orang	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,976,409,278	2,976,409,278	
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											76,600,000	24,600,000	
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah pakaian dinas	45 stel	41 stel	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,600,000	24,600,000	
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah pegawai yang ikut Bimtek/pelatihan	2 orang	0 orang	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen		30,000,000	0	
2	23	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah pegawai yang ikut Bimtek/pelatihan	4 orang	0 orang	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen		9,000,000	0	
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi		100 persen	Jumlah pegawai yang ikut Bimtek/pelatihan	4 orang	0 orang	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen		10,000,000	0	



Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											319,601,824	189,978,324	
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,456,500	17,456,500	
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,499,600	56,948,100	
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,989,224	20,989,224	
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,892,000	17,077,000	
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya ATK dan barang cetakan	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,136,500	15,632,500	
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi		100 persen	Jumlah perjalanan dinas yang	39 kali	10 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua	180,628,000	61,875,000	



Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
											Semua Kelurahan			
2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											94,759,500	94,759,500	
2 23 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah jenis barang	5 jenis	5 jenis	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,759,500	94,759,500	
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											516,852,700	501,186,100	
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,748,000	3,545,000	
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,567,200	101,103,600	
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	396,537,500	396,537,500	
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											221,354,000	189,993,000	
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,473,500	42,417,000	



Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kendaraan Dinas Jabatan													
2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik Jumlah kendaraan yang di rehab	10 unit 1 unit	10 unit 1 unit	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,083,500	105,779,000	
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Persentase perlengkapan/ peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 % 100 %	100 % 100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,100,000	9,100,000	
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah bangunan kantor dalam kondisi baik	6 unit	6 unit	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,197,000	23,197,000	
2 23 01 2.09 10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	persentase perlengkapan/ peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,500,000	9,500,000	
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN											1,418,074,371	1,160,934,621	
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											1,072,567,871	1,016,058,621	
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan	Tingkat minat dan budaya baca serta kebutuhan		90 persen	Jumlah perabot TIK		1 paket	Persentase pengunjung perpustakaan	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	159,100,000	



Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Elektronik										Semua Kelurahan			
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat minat dan budaya baca serta keberadaan perpustakaan		90 persen	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti Bimtek Jumlah perabot layanan Jumlah perpustakaan yang mendapat pembinaan Jumlah peserta lomba perpustakaan	0 1 paket 50 perpustakaan 40 perpustakaan	0 1 paket 35 perpustakaan 40 perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	661,787,550	461,886,300	
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat minat dan budaya baca serta keberadaan perpustakaan		90 persen	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimtek Jumlah peserta workshop/seminar	40 orang 50 orang	40 orang 50 orang	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	268,210,000	182,538,000	
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Tingkat minat dan budaya baca serta keberadaan perpustakaan		90 persen	Jumlah koleksi bahan pustaka Jumlah koleksi bahan pustaka (DAK)	175 judul 1 paket	175 judul 1 paket	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	0	100 persen		142,570,321	212,534,321	
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											345,506,500	144,876,000	
2 23 02 2.02 01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Tingkat minat dan budaya baca serta keberadaan perpustakaan		90 persen	Jumlah jenis publikasi/promosi perpustakaan	6 jenis	6 jenis	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,635,000	43,214,500	
2 23 02 2.02 02	Pembangunan dan	Tingkat minat dan budaya		90 persen	Jumlah fasilitas	2 unit	2 unit	Persentase	0	100 persen		0	0	



Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	keberadaan perpustakaan						per tahun						
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Tingkat minat dan budaya baca serta keberadaan perpustakaan		90 persen	Jumlah pelajar yang mengikuti lomba bercerita Jumlah peserta lomba menulis	75 orang 40 peserta	40 orang 20 peserta	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	247,871,500	101,661,500	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP											338,988,839	280,005,539	
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota											42,348,000	40,739,000	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase pengelolaan arsip secara elektronik		100 persen	Jumlah arsip dinamis dan arsip statis yang terpelihara Jumlah OPD yang mendapat pembenahan arsip jumlah retensi arsip	3010 PD 3 OPD 3 OPD	3010 dokumen 3 OPD 3 JRA	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,348,000	40,739,000	
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota											108,900,500	88,608,500	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase pengelolaan arsip secara elektronik		100 persen	Jumlah arsip statis yang diakuisisi Jumlah buku citra daerah Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang melaksanakan tata kelola arsip yang baik	5 boks 10 buku 13 PD 3 unit	5 boks 10 buku 13 PD 3 unit	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,900,500	88,608,500	



Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip									
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota											187,740,339	150,658,039	
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Persentase pengelolaan arsip secara elektronik		100 persen	Jumlah pameran kearsipan yang diikuti Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sistem aplikasi arsip	2 kali 10 OPD	1 kali 10 OPD	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,818,039	73,057,039	
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan arsip secara elektronik		100 persen	jumlah desa yang mendapat monitoring dan evaluasi kearsipan pemerintahan desa Jumlah instansi yang mendapat pembinaan pengelolaan arsip Jumlah PD yang dilakukan pengawasan kearsipan Jumlah peserta lomba pengelolaan arsip Jumlah peserta rakor pengawasan kearsipan jumlah tenaga pengelola arsip yang mengikuti	14 desa 13 instansi 32 PD 13 peserta 50 peserta 100 orang	14 desa 13 instansi 32 PD 13 peserta 50 peserta 195 orang	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,922,300	77,601,000	



Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP											27,729,500	0	
2 24 03 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan											27,729,500	0	
2 24 03 2.03 02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen/arsip yang diselamatkan dan dilestarikan		90 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penyelamatan arsip	1 PD	0 PD	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,729,500	0	
TOTAL												5,990,370,012	5,417,866,362	



Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,427,471,006	5,599,249,618	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										20,050,000	16,930,000	
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	100 persen	Persentase capaian kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Nilai AKIP Perangkat Daerah	74 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,050,000	16,930,000		
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,888,993,510	3,707,033,510	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	100 persen	Jumlah pegawai	28 Orang	28 Orang	Nilai AKIP Perangkat Daerah	74 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,888,993,510	3,707,033,510		
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	100 persen	Persentase tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 Persen	100 Persen	Nilai AKIP Perangkat Daerah	74 Skor		0	0		
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										105,600,000	51,200,000	
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	100 persen	Persentase terlaksananya pengadaan pakaian dinas	100 Persen	100 Persen	Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,400,000	0		
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	100 persen	Jumlah pegawai yang ikut bimtek/pelatihan	0 Unit	8 Unit	Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,200,000	51,200,000		
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										678,092,850	394,376,367	



Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		100 persen	Persentase tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Persentase tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	74 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,265,500	98,553,250	
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		100 persen	Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan Persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	74 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,446,500	133,675,217	
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	74 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,145,000	52,427,050	
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		100 persen	Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan	100 Persen	100 Persen	Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	74 Skor		35,966,850	38,627,850	
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		100 persen	Persentase perjalanan dinas yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	74 Skor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	420,269,000	71,093,000	
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											504,875,800	196,034,300	
3 25 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan		100 persen	Tersedianya kendaraan roda 2 guna	2 Unit 1 Unit	2 Unit 1 Unit	Indeks Kepuasan Layanan	0	83 Skor	Kab. Belitung Timur,	325,880,000	0	



Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		12 bulan			mobilitas pegawai Tersedianya kendaraan roda 4 guna memperlancar aktivitas dan mobilitas pegawai						Semua Kelurahan			
3 25 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		100 persen	Persentase pengadaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	100 Persen	100 Persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	83 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	178,995,800	196,034,300	
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											587,590,186	589,656,781	
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		100 persen	Persentase Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	83 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	319,747,100	315,989,420	
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	83 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,800,000	48,000,000	
3 25 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		100 persen	Persentase tersedianya jas peralatan/ perlengkapan kantor dan rumah tangga	100 Persen	100 Persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	83 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,125,000	29,125,000	
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Terpenuhinya kebutuhan		100 persen	Persentase tersedianya jasa	100 Persen	100 Persen	Indeks Kepuasan Layanan	0	83 Skor	Kab. Belitung	191.918.086	196.542.361	



Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		perlengkapan kantor selama 12 bulan			perkantoran Persentase tersedianya jasa kebersihan kantor						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											642,268,660	644,018,660	
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		100 persen	Jumlah kendaraan roda 2 dalam kondisi baik Jumlah kendaraan roda 4 dalam kondisi baik Persentase tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14 Unit 8 Unit 100 Persen	14 Unit 8 Unit 100 Persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	83 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	291,996,000	293,746,000	
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		100 persen	Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terbangunnya gedung kantor Terehabnya gedung kantor	100 Persen 1 Unit 1 Unit	100 Persen 1 Unit 1 Unit	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	83 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	298,772,660	298,772,660	
3 25 01 2.09 10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		100 persen	Persentase perlengkapan/peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	83 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	51,500,000	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP											3,211,149,924	2,822,897,424	
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota											1,577,853,000	1,356,294,000	



Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap		44622 Ton 45527 Ton	Dokumen statistik budidaya, tangkap, pengolahan	4 Dokumen	4 Dokumen	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	0	45527 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,509,500	66,950,500	
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap		44622 Ton 45527 Ton	Jumlah Nelayan yang dibina Persentase pemanfaatan sumber daya	2000 Orang 0.45 Persen	2000 Orang 0.45 Persen	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	0	45527 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	339,437,500	161,437,500	
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap		44622 Ton 45527 Ton	Persentase sarana dan prasarana yang dibangun	80 Persen	80 Persen	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	0	45527 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,142,906,000	1,127,906,000	
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota											396,062,000	306,333,000	
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap		44622 Ton 45527 Ton	Jumlah Nelayan yang disosialisasi Jumlah Nelayan yang terampil	100 Orang 40 Orang	100 Orang 40 Orang	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	0	45527 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157,616,000	79,303,000	
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap		44622 Ton 45527 Ton	Jumlah Nelayan yang dibina	2000 Orang	2000 Orang	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	0	45527 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	238,446,000	227,030,000	
3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)											1,237,234,924	1,160,270,424	
3 25 03 2.03 01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan	Produksi Perikanan Tangkap		44622 Ton	Persentase sarana dan prasarana TPI	90 Persen	90 Persen	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	0	45527 Ton	Kab. Belitung Timur	502,234,924	425,270,424	



Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi Perikanan Tangkap									Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap		44622 Ton 45527 Ton	Persentase sarana dan prasarana TPI yang dibangun	90 Persen	90 Persen	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	0	45527 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	735,000,000	735,000,000	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											2,375,277,500	1,927,630,250	
3 25 04 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											134,604,500	0	
3 25 04 2.01 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Produksi Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya		127,71 Ton 127.71 Ton	Jumlah pembudidaya yang disosialisasi	30 Orang	30 Orang	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	0	127.71 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,150,500	0	
3 25 04 2.01 02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya		127,71 Ton 127.71 Ton	Jumlah pembudidaya	30 Orang	30 Orang	Meningkatnya Produksi Perikanan	0	127.71 Ton	Kab. Belitung Timur,	56,454,000	0	



Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Produksi Perikanan Budidaya									Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil											112,662,000	51,107,500	
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Produksi Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya		127,71 Ton 127.71 Ton	Jumlah Pembudidaya yang terampil	120 Orang	120 Orang	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	0	127.71 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,662,000	51,107,500	
3 25 04 2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											84,903,500	39,835,000	
3 25 04 2.03 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya		127,71 Ton 127.71 Ton	Jumlah Pembudidaya yang disosialisasi	30 Orang	30 Orang	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		127.71 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,728,500	0	



Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 25 04 2.03 02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya-an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya		127,71 Ton 127.71 Ton	Jumlah Pembudidaya yang disosialisasi	30 Orang	30 Orang	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		127.71 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,175,000	39,835,000	
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan											2,043,107,500	1,836,687,750	
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya		127.71 Ton	Dokumen statistik budidaya, tangkap, pengolah	4 Dokumen	4 Dokumen	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	0	127.71 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,187,500	39,987,500	
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya		127.71 Ton	Jumlah Pembudidaya yang dibina Jumlah Produksi Benih Ikan	218 Orang 501 Ekor	160 Orang 501000 Ekor	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	0	127.71 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	869,663,500	912,047,750	
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya		127.71 Ton	Dokumen statistik budidaya, tangkap, pengolah Jenis ikan lokal yang dikembangkan Jumlah Produksi Benih Ikan	4 Dokumen 1 Paket 501 Ekor	4 Dokumen 1 Paket 501 Ekor	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	0	127.71 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950,917,500	814,917,500	
3 25 04 2.04 07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Produksi Perikanan Budidaya		127.71 Ton	Kajian dan Pengembangan Perikanan Budidaya Lokal	2 Kajian/Paket	1 Kajian/Paket	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	0	127.71 Ton	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182,339,000	69,735,000	



Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											1,416,640,800	1,364,931,370	
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil											90,058,000	86,435,500	
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Konsumsi Ikan		49 kg/kapita /tahun	Dokumen statistik budidaya, tangkap, pengolah	4 Dokumen	4 Dokumen	Meningkatnya jumlah dan produksi hasil olahan hasil perikanan		49 kg/kapita /tahun	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,058,000	86,435,500	
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil											445,265,000	216,752,000	
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Konsumsi Ikan		49 kg/kapita /tahun	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang terampil Jumlah Unit Pengolah Pertahun Persentase Unit Pengolahan Hasil Perikanan yang Dibina	60 Orang 315 UPI 32.5 Persen	25 Orang 315 UPI 32.5 Persen	Meningkatnya jumlah dan produksi hasil olahan hasil perikanan	0	49 Kg/kapita /tahun	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	445,265,000	216,752,000	
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota											881,317,800	1,061,743,870	
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Konsumsi Ikan		49 kg/kapita /tahun	Jumlah Konsumsi Ikan Jumlah Produksi Pengolahan Ikan Jumlah Produksi UPTD	49 Kg/Kapita /Tahun 21500 Ton 125 Kg/Tahun	49 Kg/Kapita /Tahun 21500 Ton 125 Kg/Tahun	Meningkatnya jumlah dan produksi hasil olahan hasil perikanan	0	49 Kg/kapita /tahun	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	516,378,000	498,124,070	
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Konsumsi Ikan		49 kg/kapita /tahun	UPI/Poklahsar yang dibantu	12 Kali	30 UPI	Meningkatnya jumlah dan produksi hasil olahan hasil perikanan	0	49 Kg/kapita /tahun	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	364,939,800	563,619,800	
TOTAL												13.430.539.230	11.714.708.662	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											10,547,400,795	10,997,400,795	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,890,060,795	10,340,060,795	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	75 Orang	14 Bulan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang		80 Nilai		9,890,060,795	10,340,060,795	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											657,340,000	657,340,000	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kualitas Pelayanan Pimpinan aparatur Perangkat Daerah		Baik Kategori	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	12 Bulan	14 Bulan	Persentase kebijakan pelayanan pimpinan dan aparatur yg lebih efektif		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	237,340,000	237,340,000	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kualitas Pelayanan Pimpinan aparatur Perangkat Daerah		Baik Kategori	Terpenuhinya Dana Operasional Penunjang KDH dan WKDH	12 Bulan	12 Bulan	Persentase kebijakan pelayanan pimpinan dan aparatur yg lebih efektif		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	420,000,000	420,000,000	
TOTAL																10,547,400,795	10,997,400,795	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bidang Pemerintahan dan Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										10,639,874,533	11,768,663,834	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan										599,179,834	500,452,834	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase kebijakan kewilayahan yang difasilitasi Persentase pelaksanaan koordinasi yang difasilitasi Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Dokumen Data Rencana Aksi Peduli Hak Asasi Manusia dan Dokumen Data Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Jumlah Dokumen LPPD Jumlah Dokumen P3D Jumlah Laporan Akhir Masa Jabatan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan dan Diikuti (Kali)	 2 Dokumen 15 Buku 1 Dokumen 10 Buku 1 Tahun	 2 Dokumen 15 Buku 1 Dokumen 10 Buku 1 Tahun	 Persentase Kebijakan Administrasi Pemerintahan Yang Difasilitasi	 0	 100 Persen	 529,459,834	 428,032,834		
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase kebijakan kewilayahan yang difasilitasi Persentase pelaksanaan koordinasi yang difasilitasi Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Penyelesaian Tapal Batas Desa Antar Kecamatan	 1 Dokumen	 1 Dokumen	 Persentase Kebijakan Administrasi Pemerintahan Yang Difasilitasi	 0	 100 Persen	 20,820,000	 72,420,000		
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase kebijakan kewilayahan yang difasilitasi Persentase pelaksanaan koordinasi yang difasilitasi	 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Rapat Koordinasi	 7 Kecamatan	 7 Kecamatan	 Persentase Kebijakan Administrasi Pemerintahan Yang Difasilitasi	 0	 100 Persen	 48,900,000	 0		



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bidang Pemerintahan dan Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah												
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat											8,815,502,849	10,225,957,400	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Hibah dan Bantuan Sosial yang disalurkan Persentase Jenis Pembinaan Kesejahteraan Yang Dilaksanakan Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi Persentase Kegiatan Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat Kab Beltim yang dilaksanakan		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Guru TPA yang mengikuti Bimtek ; Jumlah Guru TPA menerima Insentif Jumlah Kegiatan dan Cabang Lomba Bernuansa Islami Jumlah Kunjungan Safari Ramadhan dalam Wilayah Kab. Belitung Timur Jumlah marbot masjid/surau yang mendapat pembinaan dan insentif, dan Jumlah fardu kifayah yang mendapat pembinaan dan insentif Jumlah Pembinaan Keagamaan; Jumlah Qori dan Qoriah perwakilan Kab. Belitung Timur ke Tingkat Provinsi dan Nasional	580 Orang 20 Cabang Lomba 10 Kunjungan 308 Orang 14 Pembinaan 10 Qori/ah 100 Persen 9 Proposal	580 Orang 20 Cabang Lomba 10 Kunjungan 308 Orang 14 Pembinaan 10 Qori/ah 100 Persen 9 Proposal	Persentase Kebijakan Di Bidang Sosial Kesejahteraan Sosial Yang Difasilitasi; Persentase Pembinaan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Difasilitasi; Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi	0	100 Persen	8,252,337,500	8,275,744,700		



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bidang Pemerintahan dan Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Persentase Jamaah Haji Yang di fasilitasi Tersedianya Dana untuk Bantuan Pemeliharaan dan Operasional Mesjid, MUI dan Baznas									
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Hibah dan Bantuan Sosial yang disalurkan Persentase Jenis Pembinaan Kesejahteraan Yang Dilaksanakan Persentase kegiatan keagamaan yang difalilitasi Persentase Kegiatan Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat Kab Beltim yang dilaksanakan		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Tersedianya Anggaran Bantuan Sosial untuk Pelayanan Kesehatan Pasien Rujukan Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial	30 Proposal 1 Laporan	30 Proposal 1 Laporan	Persentase Kebijakan Di Bidang Sosial Kesejahteraan Sosial Yang Difasilitasi; Persentase Pembinaan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Difasilitasi; Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi	0	100 Persen		291,774,949	14,692,000	
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Hibah dan Bantuan Sosial yang disalurkan Persentase Jenis Pembinaan Kesejahteraan Yang Dilaksanakan Persentase		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Kegiatan dan Jumlah Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS Jumlah UKS Perwakilan Kab.	40 Kegiatan 1 Kali 4 UKS	40 Kegiatan 1 Kali 4 UKS	Persentase Kebijakan Di Bidang Sosial Kesejahteraan Sosial Yang Difasilitasi; Persentase Pembinaan Di Bidang Kesejahteraan Rakvat Yang	0	100 Persen		271,390,400	1,935,520,700	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bidang Pemerintahan dan Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang difasilitasi Persentase Kegiatan Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat Kab Beltim yang dilaksanakan			UKS Tingkat Provinsi dan Nasional			Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi						
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											1,084,671,850	888,290,100	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase pemenuhan data dan informasi Persentase Penanganan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Persentase Penataan Pembentukan Produk Hukum Daerah Persentase penyelesaian kasus gugatan terhadap Pemerintah Daerah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui website JDIH		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Dokuman Keputusan Bupati Dokumen Peraturan Bupati Dokumen Peraturan Daerah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	800 Keputusan Bupati 60 Peraturan Bupati 12 Peraturan Daerah 1 Dokumen propemperda	800 Keputusan Bupati 60 Peraturan Bupati 12 Peraturan Daerah 1 Dokumen propemperda	Persentase Penataan Hukum; Persentase realisasi penetapan peraturan perundang- undangan	0	100 Persen		189,644,850	189,644,850	
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase pemenuhan data dan informasi Persentase Penanganan		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Dokumen Data Rencana Aksi Peduli Hak Asasi Manusia dan Dokumen Data Kabupaten	2 Dokumen 2 Perkara 5 kali 1 Kali	2 Dokumen 2 Perkara 5 kali 1 Kali	Persentase Penataan Hukum; Persentase realisasi penetapan	0	100 Persen		541,446,250	477,824,500	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bidang Pemerintahan dan Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Bagi Masyarakat Miskin Persentase Penataan Pembentukan Produk Hukum Daerah Persentase penyelesaian kasus gugatan terhadap Pemerintah Daerah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui website JDIH			Jumlah Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin secara litigasi Jumlah Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin secara non-litigasi Pelaksanaan, Pembinaan dan Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Penyelesaian gugatan kepada dan/atau terhadap Pemerintah Daerah			undangan						
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase pemenuhan data dan informasi Persentase Penanganan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Persentase Penataan Pembentukan Produk Hukum Daerah Persentase penyelesaian kasus gugatan terhadap Pemerintah Daerah		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Suplemen Produk Hukum Daerah Melalui Media Cetak dan Cetak Himpunan Lembaran Daerah dan Himpunan Berita Daerah Penyebaran informasi hukum melalui website JDIH Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Paket 75 Produk Hukum 7 Kali	2 Paket 75 Produk Hukum 7 Kali	Persentase Penataan Hukum; Persentase realisasi penetapan peraturan perundang-undangan	0	100 Persen		353,580,750	220,820,750	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bidang Pemerintahan dan Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui website JDIH												
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah											140,520,000	153,963,500	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Aktif		100 Persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Kebijakan Administrasi Pemerintahan Yang Difasilitasi	0	100 Persen		135,171,000	149,715,500	
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Aktif		100 Persen	Jumlah Evaluasi Kerja Sama	1 Buku	1 Buku	Persentase Kebijakan Administrasi Pemerintahan Yang Difasilitasi	0	100 Persen		5,349,000	4,248,000	
TOTAL												10,639,874,533	11,768,663,834	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											2,998,405,739	1,896,311,011	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											440,635,125	299,272,000	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase jenis monitoring perekonomian dan Pembangunan daerah Persentase kebijakan ekonomi yang di implementasikan		100 Persen 100 Persen	Jumlah BUMD yang dimonitoring	3 BUMD dan BLUD	3 BUMD dan BLUD	Persentase kebijakan perekonomian yang difasilitasi; Persentase kegiatan pembangunan yang difasilitasi	0	100 Persen		126,200,000	51,171,000	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase jenis monitoring perekonomian dan Pembangunan daerah Persentase kebijakan ekonomi yang di implementasikan		100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan pengendalian inflasi daerah	2 Laporan	2 Laporan	Persentase kebijakan perekonomian yang difasilitasi; Persentase kegiatan pembangunan yang difasilitasi	0	100 Persen		219,153,125	204,402,000	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase jenis monitoring perekonomian dan Pembangunan daerah Persentase kebijakan ekonomi yang di implementasikan		100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Monitoring dan Kegiatan Usaha Ekonomi Kreatif di Kabupaten Belitung Timur	1 Laporan	1 Laporan	Persentase kebijakan perekonomian yang difasilitasi; Persentase kegiatan pembangunan yang difasilitasi	0	100 Persen		95,282,000	43,699,000	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan											201,613,400	195,294,697	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase jenis monitoring perekonomian dan Pembangunan daerah		100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Belitung Timur	2 Laporan	2 Laporan	Persentase kegiatan pembangunan yang difasilitasi	0	100 Persen		71,986,900	75,356,400	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase jenis monitoring perekonomian dan Pembangunan daerah		100 Persen	Jumlah Laporan Monitoring dan Informasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran OPD	2 Laporan	2 Laporan	Persentase kegiatan pembangunan yang difasilitasi	0	100 Persen		129,626,500	119,938,297	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											2,066,971,814	1,298,533,914	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang difasilitasi Persentase Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dibina Persentase Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dipenuhi		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Pelaksanaan Fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Jumlah Layanan Pengadaan ; Persentase SDM yang berkualitas dan profesional dibidang PBJ	0	100 Persen		549,666,264	414,293,914	
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Paket Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang difasilitasi Persentase Pelaku		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan	2 Laporan	Persentase Jumlah Layanan Pengadaan ; Persentase SDM yang berkualitas dan profesional dibidang PBJ	0	100 Persen		517,626,500	400,390,500	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Barang/Jasa yang dibina Persentase Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dipenuhi												
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang difasilitasi Persentase Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dibina Persentase Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dipenuhi		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Pembinaan dan Advokasi yang dilakukan	3 Kali	3 Kali	Persentase Jumlah Layanan Pengadaan ; Persentase SDM yang berkualitas dan profesional dibidang PBJ	0	100 Persen		999,679,050	483,849,500	
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam											289,185,400	103,210,400	
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase jenis monitoring perekonomian dan Pembangunan daerah		100 Persen	Jumlah Laporan Pendampingan Pengawasan Penyaluran Dana CSR Perusahaan Jumlah Sosialisasi Kelembagaan Keuangan Mikro dan Pelatihan Bagi Pengembangan	1 Laporan 2 Kali 2 Laporan	1 Laporan 2 Kali 2 Laporan	Persentase kegiatan pembangunan yang difasilitasi	0	100 Persen		289,185,400	103,210,400	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Unit Organisasi : 40.10.00.0000.10002 Bidang Ekonomi dan Pembangunan														
Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Laporan Pendampingan Pengawasan Terhadap Pendistribusian LPG 3 Kg									
TOTAL												2,998,405,739	1,896,311,011	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bidang Administrasi Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										19,739,975,190	17,797,643,290	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										70,876,600	60,806,300	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan dan Perencanaan	100 Persen	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen	3 Dokumen 10 Dokumen	3 Dokumen 10 Dokumen	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan dan Perencanaan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	70,876,600	60,806,300	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										67,779,500	84,583,500	
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan dan Perencanaan	100 Persen	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan dan Perencanaan		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	45,622,500	65,806,500	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan dan Perencanaan	100 Persen	Jumlah Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan dan Perencanaan		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	22,157,000	18,777,000	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										508,938,500	280,672,500	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian Persentase Pegawai Yang Mendapat Tambahan Sertifikat Keahlian	100 Persen 100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas PDH Hitam Putih Jumlah pakaian dinas PDH Kuning Khaki Jumlah Pakaian Dinas Sekda beserta Ibu	200 Stel 9 Stel	122 Stel 78 Stel 9 Stel	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	169,508,500	169,508,500	
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian Persentase Pegawai Yang Mendapat	100 Persen 100 Persen	Persentase keikutsertaan dalam pelatihan formal	4 Pegawai	3 Pegawai	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	147,475,000	24,000,000	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bidang Administrasi Umum

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Sertifikat Keahlian												
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian Persentase Pegawai Yang Mendapat Tambahan Sertifikat Keahlian		100 Persen 100 Persen	Persentase keikutsertaan dalam Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan perundang-undangan	16 Pegawai	5 Pegawai	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	191,955,000	87,164,000	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											5,844,196,340	4,853,810,490	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	160,000,000	198,776,500	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan Terpenuhinya pemakaian materai, hadiah, cinderamata, surat khabar Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kebersihan Rumah Dinas Pimpinan Daerah	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	1,241,995,390	1,063,062,990	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bidang Administrasi Umum

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Terpenuhinya makan dan minum tamu, kegiatan, dan Pimpinan Daerah	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	2,054,257,500	2,554,257,500	
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	135,989,450	165,989,500	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah perjalanan dinas pegawai keluar daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi, undangan. Jumlah perjalanan dinas Pimpinan Daerah, Staf Ahli, dan Asisten	230 Kali 200 Kali	130 Kali 100 Kali	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,251,954,000	871,724,000	
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											3,108,646,170	1,724,421,670	
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	0 Unit	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	994,000,000	0	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	3 Unit	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	793,300,000	647,000,000	
4 01 01 2.07 03	Pengadaan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan		100 Persen	Jumlah bangunan di	1 Gedung	1 Gedung	Persentase pemenuhan	0	100 Persen	Kab. Belitung	568,100,000	202,220,000	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bidang Administrasi Umum

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Lainnya	prasarana kantor yang layak pakai			dinas/jabatan yang dibangun			kantor			Manggar, Semua Kelurahan			
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah Jenis Barang Perengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	20 Unit	20 Unit	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	753,246,170	774,201,670	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											4,079,427,080	4,855,541,580	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	1,112,187,500	1,156,377,500	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Terpenuhinya sewa perlengkapan dan peralatan kantor	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	507,948,000	699,190,000	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Terpenuhinya gaji PTT, Honorarium PPK dan Lembur Terpenuhinya jasa kebersihan kantor Terpenuhinya pelayanan kerumah tanggaan pimpinan dan sekretariat daerah Terpenuhinya pembayaran tagihan telpon,	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	2,459,291,580	2,999,974,080	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bidang Administrasi Umum

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kebersihan Rumah Dinas Pimpinan Daerah									
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											4,484,296,500	4,708,719,000	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	30 Unit 100 %	30 Unit 100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	2,967,097,500	2,966,100,000	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Persentase perlengkapan/ peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	109,000,000	165,000,000	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah bangunan Gedung Kantor yang di rehab Jumlah Bangunan Kantor dalam Kondisi Baik Jumlah bangunan rumah dinas/jabatan dalam kondisi baik Jumlah bangunan	3 Paket 4 Gedung 10 Unit 3 Rumah Dinas	3 Paket 5 Gedung 10 Unit 3 Rumah Dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	1,129,499,000	1,314,619,000	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bidang Administrasi Umum

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Dinas/Jabatan yang di rehab									
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Persentase perlengkapan/ peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	278,700,000	263,000,000	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											137,795,000	194,195,000	
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian		100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati Beserta Ibu	200 Stel	40 Stel	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	117,795,000	184,195,000	
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian		100 Persen	Jumlah Medical Check Up yang dilaksanakan	2 Kali	4 Kali	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	10,000,000	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi											670,333,000	488,500,750	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase OPD yang efektif dan efisien Persentase unit layanan yang memiliki kelengkapan instrumen pelayanan publik		100 Persen 100 Persen	Jumlah Informasi Jabatan dan Kebutuhan Jabatan Yang Ditetapkan Jumlah Kelas Jabatan Yang Ditetapkan Jumlah OPD dan UPT yang Dievaluasi	600 Jabatan 200 Jabatan 13 OPD dan UPT	600 Jabatan 200 Jabatan 13 OPD dan UPT	Persentase OPD yang tepat ukuran dan kaya fungsi; Persentase OPD Tata Laksana Yang Optimal; Persentase OPD dengan IKM Baik	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	236,022,500	183,888,250	
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase OPD yang efektif dan efisien		100 Persen 100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki	10 OPD	10 OPD	Persentase OPD yang tepat ukuran dan kaya fungsi;	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	123,777,000	86,901,000	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bidang Administrasi Umum

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase unit layanan yang memiliki kelengkapan instrumen pelayanan publik			Instrumen Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan			Tata Laksana Yang Optimal; Persentase OPD dengan IKM Baik			Kelurahan			
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang efektif dan efesien Persentase unit layanan yang memiliki kelengkapan instrumen pelayanan publik		100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen LKJ Jumlah Laporan Evaluasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase OPD yang tepat ukuran dan kaya fungsi; Persentase OPD Tata Laksana Yang Optimal; Persentase OPD dengan IKM Baik	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	214,479,000	145,833,000	
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase OPD yang efektif dan efesien Persentase unit layanan yang memiliki kelengkapan instrumen pelayanan publik		100 Persen 100 Persen	Jumlah Kelengkapan Instrumen Penyelenggaraan Pelayanan Publik	10 OPD	10 OPD	Persentase OPD yang tepat ukuran dan kaya fungsi; Persentase OPD Tata Laksana Yang Optimal; Persentase OPD dengan IKM Baik	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	96,054,500	71,878,500	
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											767,686,500	546,392,500	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Keikutsertaan Bimtek Pimpinan Daerah Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian		100 Persen 100 Persen	Persentase Peningkatan Pelayanan Pimpinan Daerah	100 %	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	628,942,500	546,392,500	
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Keikutsertaan Bimtek Pimpinan Daerah Persentase		100 Persen 100 Persen	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	5 Kali	3 Kali	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua	138,744,000	0	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bidang Administrasi Umum

Sub Unit Organisasi : 40100													



Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												19,602,819,063	18,866,408,563	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,688,590,440	3,088,590,440	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76,61 - 88,30 : B Nilai	Jumlah Pegawai	22 orang	22 orang	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang		77 Nilai	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,661,260,440	3,061,260,440		
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76,61 - 88,30 : B Nilai	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 persen	100 persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang		77 Nilai	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,330,000	27,330,000		
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												305,584,000	81,133,000	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		B > 60-70 Predikat	Jumlah pakaian	100 stel	100 stel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	65 Predikat	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	45,600,000	45,600,000		
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		B > 60-70 Predikat	Jumlah pegawai yang ikut Bimtek/pelatihan	15 orang	15 orang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	65 Predikat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	259,984,000	35,533,000		
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												1,362,273,000	1,022,127,000	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76,61 - 88,30 : B Nilai	Persentase tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	100 persen	100 persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Nilai	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	48,308,000		
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Meningkatnya Pelayanan		76,61 - 88,30 :	Persentase tersedianya alat tulis kantor	100 persen	100 persen	Indeks Kepuasan Layanan	0	77 Nilai	Kab. Belitung	287,212,000	287,212,000		



Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kantor	Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja			Persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76,61 - 88,30 : B Nilai	Persentase tersedianya peralatan/perlengkapan rumah tangga	100 persen	100 persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Nilai	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,700,000	95,700,000	
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76,61 - 88,30 : B Nilai	Persentase tersedianya bahan logistik kantor	100 persen	100 persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Nilai	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	349,977,000	349,977,000	
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76,61 - 88,30 : B Nilai	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 persen	100 persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Nilai	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,000,000	130,000,000	
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76,61 - 88,30 : B Nilai	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	500 kali	500 kali	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	449,284,000	110,830,000	
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											295,981,500	131,200,000	
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		B > 60-70 Nilai	Jumlah Jenis barang	2 Jenis	2 Jenis	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	65 Predikat	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	49,020,000	0	
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		B	Jumlah jenis barang	9 jenis	9 jenis	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	65 Predikat	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	246,961,500	131,200,000	



Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja			persentase perlengkapan/peralatan gedung kantor dalam kondisi baik			Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah			Manggar, Padang			
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,522,199,000	1,522,199,000	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76,61 - 88,30 : B Nilai	Persentase tersedianya jasa surat menyurat	100 persen	100 persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	15,000,000	15,000,000	
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76,61 - 88,30 : B Nilai	Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	100 persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	380,199,000	380,199,000	
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76,61 - 88,30 : B Nilai	Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 persen	100 persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	1,127,000,000	1,127,000,000	
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											843,090,000	448,400,000	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		B >60-70 Predikat	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	4 kendaraan	4 kendaraan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	65 Predikat	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	178,120,000	178,120,000	
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		B >60-70 Predikat	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	13 kendaraan	13 kendaraan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	65 Predikat	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	270,280,000	270,280,000	



Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Lapangan													
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		B > 60-70 Predikat	Jumlah bangunan kantor dalam kondisi baik Jumlah bangunan yang di rehab	2 bangunan 2 bangunan	2 bangunan 2 bangunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	65 Predikat	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	394,690,000	0	
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											12,211,601,123	12,199,259,123	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76,61 - 88,30 : B Nilai	Jumlah Anggota DPRD	25 orang	25 orang	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Nilai	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,583,117,123	11,683,117,123	
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76,61 - 88,30 : B Nilai	Jumlah Pakaian	100 stel	100 stel	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	229,900,000	129,900,000	
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76,61 - 88,30 : B Nilai	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Medical Check-Up	25 orang	25 orang	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	398,584,000	386,242,000	
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD											373,500,000	373,500,000	
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		80 Persen	Persentase fasilitasi fraksi DPRD	100 persen	100 persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Nilai	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	193,500,000	193,500,000	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi		80 Persen	Jumlah Rapat	100 kali	100 kali	Indeks Kepuasan Layanan	0	77 Nilai	Kab. Belitung Timur,	100,000,000	100,000,000	



Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Akuntabilitas Kinerja									Padang			
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		80 Persen	Persentase kebutuhan rumah tangga DPRD	100 persen	100 persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Nilai	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	80,000,000	80,000,000	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											13,339,999,000	10,515,993,000	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD											1,628,668,500	1,121,817,000	
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Jumlah Pembahasan Raperda yang difasilitasi	13 raperda	13 raperda	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,513,444,000	1,056,842,000	
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Persentase penyelenggaraan kajian perundang-undangan	100 persen	100 persen	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,249,500	0	
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Persentase fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan atau naskah akademik	100 persen	100 persen	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,975,000	64,975,000	
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran											54,754,000	54,727,000	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Jumlah KUA dan PPAS yang dibahas	1 KUA/PPAS	1 KUA/PPAS	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,684,500	9,684,500	



Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Jumlah KUPA/PPAS Perubahan yang dibahas	1 KUPA/PPAS	1 KUPA/PPAS	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,796,000	9,796,000	
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Jumlah APBD yang dibahas	1 APBD	1 APBD	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,532,500	9,519,000	
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Jumlah APBD Perubahan yang dibahas	1 APBD-P	1 APBD-P	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,532,500	9,519,000	
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Jumlah Laporan Semester yang dibahas	2 laporan	2 laporan	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,412,500	6,412,500	
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjaw aban APBD	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Jumlah pertanggungjawaban APBD yang dibahas	1 APBD	1 APBD	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,796,000	9,796,000	
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan											1,041,640,500	50,133,500	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam		60 Persen	Persentase pengawasan per urusan	100 persen	100 persen	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua	149,116,500	5,691,500	



Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pembangunan daerah									Semua Kelurahan			
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Persentase pengawasan per urusan	100 persen	100 persen	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,116,500	5,691,500	
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Persentase pengawasan per urusan	100 persen	100 persen	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,116,500	5,691,500	
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Persentase pengawasan per urusan	100 persen	100 persen	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,116,500	5,691,500	
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Persentase pengawasan per urusan	100 persen	100 persen	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,116,500	5,691,500	
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Persentase pengawasan tindak lanjut LHP BPK	100 persen	100 persen	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,337,000	6,610,000	
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan	Meningkatnya peran tugas dan		60 Persen	Persentase pengawasan	100 persen	100 persen	Persentase jumlah regulasi	0	60 Persen	Kab. Belitung	73,360,500	8,225,500	



Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		penyelenggaraan pembangunan daerah						Raperda			Kecamatan, Semua Kelurahan			
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	persentase pembahasan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	100 persen	100 persen	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	73,360,500	6,840,500	
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD											1,866,454,500	1,359,843,500	
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Jumlah Bimtek/Diklat	4 kali	4 kali	Indeks kepuasan DPRD terhadap Dukungan dan Pelayanan Sekretariat DPRD	0	80 Skor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	888,717,000	382,106,000	
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Persentase Kegiatan DPRD yang diliput dan didokumentasikan	100 persen	100 persen	Indeks kepuasan DPRD terhadap Dukungan dan Pelayanan Sekretariat DPRD	0	80 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	167,000,000	167,000,000	
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Persentase tersedianya kelompok pakar dan tim ahli	100 persen	100 persen	Indeks kepuasan DPRD terhadap Dukungan dan Pelayanan Sekretariat DPRD	0	80 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	402,000,000	402,000,000	
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Persentase tersedianya tenaga ahli fraksi	100 persen	100 persen	Indeks kepuasan DPRD terhadap Dukungan dan Pelayanan Sekretariat DPRD	0	80 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	216,000,000	216,000,000	



Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Persentase penyelenggaraan humas	100 persen	100 persen	Indeks kepuasan DPRD terhadap Dukungan dan Pelayanan Sekretariat DPRD	0	80 Skor	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	192,737,500	192,737,500	
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat											733,208,500	414,199,000	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	7 kali/kec	7 kali/kec	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,798,500	0	
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Jumlah Hearing/Dialog	7 kali	7 kali	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	197,047,000	8,730,000	
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Jumlah Reses	3 kali	3 kali	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	487,363,000	405,469,000	
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD											8,015,273,000	7,515,273,000	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	1500 kali	1500 kali	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,811,029,000	7,311,029,000	
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		60 Persen	Persentase pelaksanaan	100 persen	100 persen	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	0	60 Persen	Kab. Belitung Timur	18,000,000	18,000,000	



Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD

SUB UNIT ORGANISASI : 4021000.000



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,122,528,250	5,937,789,740	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,604,999,600	3,704,909,600	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)		100 %	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar		100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,604,999,600	3,704,909,600	
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat		100 %	Persentase tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 %	100 %	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar		100 %		0	0	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)												
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											184,938,500	153,138,500	
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2.Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)		1. 100 % 2. 37.53 % 3. 13.04 % 4. 100 % 5. 100 %	Jumlah pakaian dinas	56 stell	56 stell	-1. Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,600,000	31,800,000	
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas		1. 100 % 2. 37.53 % 3. 13.04 % 4. 100 % 5. 100 %	Jumlah pegawai yang ikut bimtek/pelatihan	10 pegawai	5 pegawai	-1. Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	5,000,000	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)												
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2.Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana		1. 100 2. 37.53 3. 13.04 4. 100 5. 100 %	Jumlah pegawai yang ikut bimtek/pelatihan	9 pegawai	3 pegawai	-1. Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	0	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)		1. 100 % 2. 37.53 % 3. 13.04 % 4. 100 % 5. 100 %	Jumlah Karya Tulis Ilmiah Jumlah pegawai yang ikut Bimtek/pelatihan	4 karya tulis 9 pegawai	4 karya tulis 4 pegawai	-1. Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116,338,500	116,338,500	
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											800,222,900	511,261,390	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 % 1. 100 %	Persentase tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,238,500	17,238,500	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan	1. Persentase		100 %	Persentase tersedianya	100 %	100 %				Kab.			



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kantor	Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja			Persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 % 1. 100 %	Persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga	100 %	100 %	-	0	0		32,059,500	30,653,500	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 % 1. 100 %	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,977,000	28,553,500	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 %	Persentase tersedianya alat administrasi	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur	38,351,900	29,324,640	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja									Kecamatan, Semua Kelurahan			
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 % 1. 100 %	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	250 kali	250 kali	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	558,931,000	312,097,000	
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											403,979,750	441,022,750	
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2.Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan		1. 100 2. 37.53 3. 13.04 4. 100 5. 100 %	jumlah jenis barang	2 jenis barang	2 jenis barang	-1. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,485,000	18,485,000	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)												
5 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2.Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)		1. 100 2. 37.53 3. 13.04 4. 100 5. 100 %	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	1 bangunan	1 bangunan	-1. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	201,100,000	201,100,000	
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2.Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam		1. 100 2. 37.53 3. 13.04 4. 100 5. 100 %	jumlah jenis barang	8 jenis barang	8 jenis barang	-1. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 %		184,394,750	221,437,750	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)												
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											867,917,500	868,307,500	
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2.Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)		1. 100 2. 37.53 3. 13.04 4. 100 5. 100 %	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	-Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,230,000	8,230,000	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	1. Persentase Pemenuhan		1. 100 2. 37.53 3.	Persentase tersedianya jasa	100 %	100 %	-Persentase penyediaan Jasa	0	100 %	Kab. Belitung	110 650 000	111 040 000	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2.Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)		100 5. 100 %	kantor			Kantor			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2.Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan		1. 100 2. 37.53 3. 13.04 4. 100 5. 100 %	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	-Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	0	100 %		0	0	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)												
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2.Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)		1. 100 2. 37.53 3. 13.04 4. 100 5. 100 %	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	-Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	0	100 %		749,037,500	749,037,500	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											260,470,000	259,150,000	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2.Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan		1. 100 2. 37.53 3. 13.04 4. 100 5. 100 %	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	-Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	0	100 %		42,540,000	41,220,000	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)												
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2.Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)		1. 100 2. 37.53 3. 13.04 4. 100 5. 100 %	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	0 unit	0 unit 10 Unit	-Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	136,330,000	136,330,000	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)		1. 100 2. 37.53 3. 13.04 4. 100 5. 100 %	Jumlah bangunan kantor dalam kondisi baik	1 gedung kantor	1 gedung kantor	-Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan		1. 100 2. 37.53 3. 13.04 4. 100 5. 100 %	persentase perlengkapan/ peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	-Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,600,000	61,600,000	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)												
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											1,252,439,000	973,480,000	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											915,388,000	729,530,500	
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	"Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu		100 % 100 %	Jumlah Dokumen RKPD Tahun n+1, RKPD-P Tahun n dan Ranwal n+2 okumen RPJMD Kab.Belitung Timur 2022-2027	3 Dokumen 1 Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen	-Ketepatan waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	0	1 waktu	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,878,500	5,895,000	
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	"Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu		100 % 100 %	Jumlah Dokumen RKPD Tahun n+1, RKPD-P Tahun n dan Ranwal n+2 okumen RPJMD Kab.Belitung Timur 2022-2027	3 Dokumen 1 Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen	-Ketepatan waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	0	1 waktu		103,884,000	23,164,500	
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang	"Persentase dokumen perencanaan pembangunan		100 % 100 %	Jumlah Dokumen RKPD Tahun n+1, RKPD-P Tahun n	3 Dokumen 1 Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen	-Ketepatan waktu Penyusunan Dokumen	0	1 waktu		9,696,500	630,000	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		tersusun tepat waktu Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu			okumen RPJMD Kab.Belitung Timur 2022-2027									
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu		100 % 100 %	Dokumen RPJMD Kab. Belitung Timur 2022-2027 Jumlah Dokumen RKPD Tahun n+1, RKPD-P Tahun n dan Ranwal n+2 Laporan kegiatan melalui DAK	1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	-Ketepatan waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	0	1 waktu		778,929,000	699,841,000	
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											337,051,000	243,949,500	
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	"Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu		100 % 100 %	Dokumen LKPJ Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil RKPD setiap triwulan Laporan kegiatan melalui DAK	1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	-Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi yang tepat waktu	0	8 Dokumen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	337,051,000	243,949,500	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											3,449,789,800	1,783,117,250	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											735,695,300	529,427,750	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu		100 % 100 %	Dokumen Laporan pelaksanaan penyusunan strategi Kebijakan PUG Jumlah Dokumen Mekanisme Perencanaan dan Pelaporan Pencapaian SPM Daerah Jumlah Dokumen perencanaan (Rancangan RKPd Tahun n+1, RKPd-P Tahun n dan Ranwal n+2) Monev Pembangunan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	-Persentase PD yang Memiliki Konsistensi Dokumen Perencanaan Bernilai Baik PD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD, RENSTA, RKPd, RENJA), dan Persentase Capaian Kinerja Tinggi terhadap Evaluasi Hasil RKPd PD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	371,947,550	294,980,000	
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu		100 % 100 %	Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jumlah Dokumen perencanaan (Rancangan RKPd Tahun n+1, RKPd-P Tahun n dan Ranwal n+2) Monev	1 Dokumen 3 Dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen 1 dokumen	-Persentase PD yang Memiliki Konsistensi Dokumen Perencanaan Bernilai Baik PD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD, RENSTA, RKPd, RENJA), dan Persentase Capaian Kinerja	0	100 %		363,747,750	234,447,750	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					dan Pengembangan SDM			Evaluasi Hasil RKPD PD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)											1,452,660,000	640,781,000	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD		94,28 % 96,24 %	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Tahun n+1, RKPD-P Tahun n dan Ranwal n+2 Laporan penyelenggaraan kesekretariatan Geopark	6 Dokumen 1 Dokumen	6 Dokumen 1 Dokumen	-Persentase PD yang Memiliki Konsistensi Dokumen Perencanaan Bernilai Baik PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (RPJMD, RENSTA, RKPD, RENJA), dan Persentase Capaian Kinerja Tinggi terhadap Evaluasi Hasil RKPD PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,183,751,000	563,960,000	
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD		94,28 % 96,24 %	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Tahun n+1, RKPD-P Tahun n dan Ranwal n+2	4 Dokumen	4 Dokumen	-Persentase PD yang Memiliki Konsistensi Dokumen Perencanaan Bernilai Baik PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (RPJMD, RENSTA, RKPD, RENJA), dan Persentase Capaian Kinerja Tinggi terhadap	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	268,909,000	76,821,000	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								RKPD PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA						
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											1,261,434,500	612,908,500	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD		94,28 % 96,24 %	Dokumen Laporan Kegiatan Pamsimas III Kab. Belitung Timur Dokumen laporan program KOTAKU Kab. Belitung Timur Dokumen Laporan Program PPSP Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Tahun n+1, RKPD-P Tahun n dan Ranwal n+2	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 dokumen	Persentase PD yang Memiliki Konsistensi Dokumen Perencanaan Bernilai Baik PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD, RENSTA, RKPD, RENJA), dan Persentase Capaian Kinerja Tinggi terhadap Evaluasi Hasil RKPD PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	783,312,000	412,719,000	
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD		94,28 % 96,24 %	Jumlah dokumen Rancangan RKPD Tahun n+1, RKPD-P Tahun n dan Ranwal n+2	4 dokumen	4 dokumen	Persentase PD yang Memiliki Konsistensi Dokumen Perencanaan Bernilai Baik PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD, RENSTA, RKPD, RENJA), dan Persentase Capaian Kinerja Tinggi terhadap Evaluasi Hasil RKPD PD Mitra	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	478,122,500	200,189,500	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
								Infrastruktur dan Kewilayahan							
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												3,061,039,350	2,160,465,500	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan												95,276,300	122,245,500	
5 05 02 2.01 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase implemetasi rencana kelitbangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		0 % 100 % 100 %	laporan pelaksanaan Pengendalian dan Penguatan Kapasitas Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	-Persentase Pelaksanaan IKKD , - Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Kajian	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,276,300	122,245,500		
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan												2,115,859,000	1,385,362,000	
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase implemetasi rencana kelitbangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		100 % 100 % 100 %	Dokumen Kajian Analisis Strategi Penguatan UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	-Persentase dokumen penelitian dan kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	675,302,000	493,909,500		
5 05 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase implemetasi rencana kelitbangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase		100 % 100 % 100 %	Penyusunan Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	-Persentase dokumen penelitian dan kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	338,568,000	311,928,000		



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah												
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase implemetasi rencana kelitbangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		100 % 100 % 100 %	Dokumen Kajian Analisis Usaha Tani Lada	1 Dokumen	1 Dokumen	-Persentase dokumen penelitian dan kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	431,940,000	5,400,500	
5 05 02 2.03 05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase implemetasi rencana kelitbangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		100 % 100 % 100 %	Dokumen Kajian Pemanfaatan hasil Perikanan Untuk Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	-Persentase dokumen penelitian dan kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	336,455,000	280,480,500	
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase implemetasi rencana kelitbangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam		100 % 100 % 100 %	Penyusunan Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	-Persentase dokumen penelitian dan kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	333,594,000	293,643,500	



Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi											849,904,050	652,858,000	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase implemetasi rencana kelitbangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		0 % 100 % 10 %	Jumlah Kategori Lomba Inovasi Daerah	3 kategori	3 kategori	-Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi , Persentase Keterisian Data, dan Persentase Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190,784,600	283,230,500	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase implemetasi rencana kelitbangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		0 % 100 % 10 %	Buletin Kelitbangan Persentase keterisian data SIPD Persentase Publikasi data dan informasi Publikasi Data dan Informasi Kelitbangan	1 buletin 100 % 100 % 100 %	1 buletin 100 % 100 % 100 %	-Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi , Persentase Keterisian Data, dan Persentase Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	659,119,450	369,627,500	
TOTAL												13,885,796,400	10,854,852,490	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											11,213,882,522	12,228,132,260	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											8,798,896,241	10,348,854,893	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor		100 Persen	gaji dan tunjangan PNS	12 bulan	14 bulan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	0	14 Bulan	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,798,896,241	10,348,854,893	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											81,020,000	34,030,000	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat sertifikat keahlian		87 Setel 100 Persen	Jumlah pakaian dinas	85 setel	82 setel	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian, Persentase pegawai yang mendapat sertifikat keahlian	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,520,000	34,030,000	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat sertifikat keahlian		87 Setel 100 Persen	Jumlah pegawai yang ikut bimtek/pelatihan	7 orang	7 orang	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian, Persentase pegawai yang mendapat sertifikat keahlian	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,500,000	0	
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang disiplin berpakaian Persentase pegawai yang mendapat sertifikat keahlian		87 Setel 100 Persen	Jumlah pegawai yang ikut bimtek/pelatihan	5 orang	3 orang	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian, Persentase pegawai yang mendapat sertifikat keahlian	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,500,000	0	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah pegawai yang disiplin berpakaian		87 Setel 100 Persen	Jumlah pegawai yang ikut	3 orang	3 orang	Persentase pegawai yang disiplin	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur,	9,500,000	0	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Undangan	Persentase pegawai yang mendapat sertifikat keahlian						Persentase pegawai yang mendapat sertifikat keahlian			Kecamatan, Semua Kelurahan			
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											782,925,115	387,800,110	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 persen	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,999,500	13,972,000	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	tersedianya peralatan/perlengkapan kantor	100 persen	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,999,115	70,502,610	
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	tersedianya peralatan rumah tangga	100 persen	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Tersedianya Bahan Logistik Kantor, Makanan dan Minuman Harian Pegawai, rapat, makan minum tamu dan makan minum lainnya	100 persen	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,999,500	28,749,500	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan, presentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 persen	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	130 kali	90 kali	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,927,000	239,576,000	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											313,487,003	293,620,594	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah jenis barang	2 Jenis	2 Jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,416,000	31,416,000	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah jenis barang	7 Jenis	8 Jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190,491,003	189,374,594	
5 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Land Clearing	1 paket	1 paket	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,580,000	72,830,000	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											590,969,000	572,034,000	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa	Persentase pemenuhan		100 Persen	Persentase tersedianya jasa	100 persen	100 persen	Persentase tersedianya jasa	0	100 Persen	Kab. Belitung	74,510,000	70,510,000	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		administrasi kantor			kantor			kantor			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Presentase tersedianya jasa administrasi kantor, presentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240,974,000	218,474,000	
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Presentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 persen	100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,795,000	29,125,000	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Presentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 persen	100 persen	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	248,690,000	253,925,000	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											646,585,163	591,792,663	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah kendaraan dinas (Mobil & Motor) dalam kondisi baik	18 unit	18 unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,750,000	103,750,000	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Persentase pemenuhan sarana dan		100 Persen	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi	100 persen	18 unit	Persentase pemenuhan sarana dan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur	265,489,500	210,697,000	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kantor yang layak pakai						kantor yang layak pakai			Kecamatan, Semua Kelurahan			
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah bangunan yang direhab	2 paket	2 paket	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	187,405,000	187,405,000	
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Jumlah bangunan kantor dalam kondisi baik	1 paket	1 paket	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,990,663	39,990,663	
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		100 Persen	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,950,000	49,950,000	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											108,654,699,999	106,303,058,887	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											919,514,100	794,465,950	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel		100 persen	Dokumen KUA Tahun 2022 Dokumen PPAS Tahun 2022	1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131,028,500	118,319,500	
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel		100 persen	Dokumen KUPA Tahun 2021 Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2021	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua	89,519,500	78,869,500	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel		100 persen	Jumlah DPA OPD Tahun 2022	42 Dokumen	43 Dokumen	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	183,348,400	162,150,200	
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel		100 persen	Jumlah RKA Perubahan OPD	42 Dokumen	43 Dokumen	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	172,565,450	224,596,750	
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel		100 persen	Jumlah DPA SKPD	42 Dokumen	43 Dokumen	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,854,700	9,259,000	
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel		100 persen	Jumlah DPA Perubahan OPD	42 Dokumen	43 Dokumen	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,804,750	10,059,000	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel		100 persen	Jumlah Perbup tentang penjabaran APBD Jumlah Perda tentang APBD	1 dokumen	1 Perbup 1 Perda	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,290,300	54,206,850	
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu		100 persen	Jumlah perbup tentang penjabaran perubahanAPBD	1 raperbup 1 dokumen	3 Perbup 1 Perda	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua	73,290,500	62,911,150	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				Jumlah Perda tentang Perubahan APBD						Semua Kelurahan			
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel		100 persen	Dokumen Analisis dan Pengendalian Anggaran Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah	12 dokumen 1 Buku	4 dokumen 1 Buku	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	173,812,000	74,094,000	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah											673,575,250	648,381,250	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu		85 persen 90 persen	jumlah penerbitan SP2D belanja langsung jumlah penerbitan SP2D belanja tidak langsung laporan posisi kas daerah laporan rekonsiliasi kas daerah pelaporan belanja langsung dan belanja tidak langsung penataan dokumen arsip SPM dan penerbitan SP2D	3500 SP2D LS 1500 SP2D BTL 12 laporan 12 laporan 4 jenis 5000 dokumen	3500 SP2D LS 1500 SP2D BTL 12 laporan 12 laporan 4 jenis 5000 dokumen	Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan, Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	0	85 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	321,290,000	314,021,000	
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai		85 persen 90 persen	jumlah penerbitan SPD	450 SPD	450 SPD	Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai	0	85 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan,	31,686,250	37,829,750	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu						Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu			Kelurahan			
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu		85 persen 90 persen	laporan realisasi Dana Transfer	20 laporan	20 laporan	Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan, Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	0	85 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	194,023,000	164,806,500	
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu		85 persen 90 persen	jumlah daftar gaji terpusat jumlah laporan realisasi potongan pihak ketiga (PFK) atas gaji PNSD jumlah laporan rekapitulasi realisasi gaji PNS se kab. belitung timur jumlah Penerbitan SKPP	500 gaji terpusat 25 Laporan 20 laporan 50 SKPP	500 gaji terpusat 25 Laporan 20 laporan 50 SKPP	Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan, Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	0	85 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,535,000	97,185,000	
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu		85 persen 90 persen	laporan DTH dan RTH	12 Laporan	12 Laporan	Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan, Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	0	85 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,041,000	34,539,000	
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											295,715,500	301,580,000	
	Koordinasi	Persentase OPD		100 persen	Jumlah Sistem			Jumlah Laporan			Kab.			



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	menyampaikan LK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Persentase OPD yang menyampaikan LK Tepat Waktu			Keuangan Daerah yang dikelola			Unauditted dan Auditted, Realisasi Bulanan dan semesteran Pemda, Laporan LKT dan LRT, Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dikelola, Jumlah Raperda dan Perbup pertanggungjawaban APBD			Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase OPD yang menyampaikan LK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Persentase OPD yang menyampaikan LK Tepat Waktu		100 persen 100 Persen	jumlah laporan LKT dan LRT jumlah laporan realisasi bulanan jumlah laporan semesteran jumlah laporan triwulan	9 laporan 60 laporan 1 buku 4 laporan	9 laporan 60 laporan 1 buku 4 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Unauditted dan Auditted, Realisasi Bulanan dan semesteran Pemda, Laporan LKT dan LRT, Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dikelola, Jumlah Raperda dan Perbup pertanggungjawaban APBD		8 Jenis	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,695,500	28,970,500	
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan LK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Persentase OPD yang menyampaikan		100 persen 100 Persen	jumlah laporan Keuangan unauditted dan auditted	2 buku	2 buku	Jumlah Laporan Keuangan Unauditted dan Auditted, Realisasi Bulanan dan semesteran Pemda, Laporan LKT dan LRT, Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, Jumlah Sistem	0	8 Jenis	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,722,000	112,558,000	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								dikelola, Jumlah Raperda dan Perbup pertanggungjawaban APBD						
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyampaikan LK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Persentase OPD yang menyampaikan LK Tepat Waktu		100 persen 100 Persen	jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD jumlah raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perbup tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Raperbup tentang penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	4 kali 1 Raperda 1 perbup 1 perda 1 Raperbup	4 kali 1 Raperda 1 perbup 1 perda 1 Raperbup	Jumlah Laporan Keuangan Unauditted dan Auditted, Realisasi Bulanan dan semesteran Pemda, Laporan LKT dan LRT, Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dikelola, Jumlah Raperda dan Perbup pertanggungjawaban APBD		8 Jenis	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,445,500	48,414,000	
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan LK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Persentase OPD yang menyampaikan LK Tepat Waktu		100 persen 100 Persen	tersusunnya kebijakan dan panduan teknis operasional peyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	1 buku	1 buku	Jumlah Laporan Keuangan Unauditted dan Auditted, Realisasi Bulanan dan semesteran Pemda, Laporan LKT dan LRT, Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dikelola, Jumlah Raperda dan Perbup pertanggungjawaban APBD		8 Jenis	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,995,000	68,074,000	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan LK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Persentase OPD yang menyampaikan LK Tepat Waktu		100 persen 100 Persen	tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	1 buku	1 buku	Jumlah Laporan Keuangan Unauditted dan Auditted, Realisasi Bulanan dan semesteran Pemda, Laporan LKT dan LRT, Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dikelola, Jumlah Raperda dan Perbup pertanggungjawaban APBD		8 Jenis		16,294,000	0		
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyampaikan LK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Persentase OPD yang menyampaikan LK Tepat Waktu		100 persen 100 Persen	terlaksananya pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah daerah	4 kali	4 kali	Jumlah Laporan Keuangan Unauditted dan Auditted, Realisasi Bulanan dan semesteran Pemda, Laporan LKT dan LRT, Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dikelola, Jumlah Raperda dan Perbup pertanggungjawaban APBD		8 Jenis	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,074,500	18,074,500		
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												106,765,895,149	104,558,631,687	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan		85 Persen	tersedianya anggaran bantuan keuangan	1 tahun	1 tahun	Persentase Belanja urusan Pemerintahan Umum		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,261,343,663	94,575,508,500		



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan		85 Persen	tersedianya dana darurat dan mendesak	1 tahun	1 tahun	Persentase Belanja urusan Pemerintahan Umum		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,475,616,257	946,960,362	
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan		85 Persen	tersedianya anggaran bagi hasil	1 tahun	1 tahun	Persentase Belanja urusan Pemerintahan Umum		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,028,935,229	9,036,162,825	
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											781,671,700	675,587,650	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah											781,671,700	675,587,650	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Persentase Aset Tetap Tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Persentase Asset Tanah Pemda yang bersertifikat		93 Persen 75 Persen	jumlah dokumen SSH berdasarkan jenis dan tipe barang	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah pengelolaan BMD, penatausahaan BMD, pengelolaan perencanaan BMD dan pemanfaatan BMD dan Jumlah Perbup	0	4 jenis	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,749,900	62,748,900	
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Tetap Tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Persentase Asset Tanah Pemda yang bersertifikat		93 Persen 75 Persen	jumlah dokumen RKBMD	2 Buku	2 Buku	Jumlah pengelolaan BMD, penatausahaan BMD, pengelolaan perencanaan BMD dan pemanfaatan BMD dan Jumlah Perbup	0	4 jenis	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,599,500	22,441,400	
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik	Persentase Aset Tetap Tanah dan bangunan yang digunakan		93 Persen 75 Persen	jumlah perbup penjabaran perda tentang	3 Perbup	3 Perbup	Jumlah pengelolaan BMD, penatausahaan	0	4 jenis	Kab. Belitung Timur, Semua	47,599,900	50,970,400	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dimanfaatkan Persentase Asset Tanah Pemda yang bersertifikat						perencanaan BMD dan pemanfaatan BMD dan Jumlah Perbup			Semua Kelurahan			
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Tetap Tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Persentase Asset Tanah Pemda yang bersertifikat		93 Persen 75 Persen	dokumen verifikasi BMD dan dokumen laporan BMD penatausahaan BMD jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Sinkronisasi BMD tersedianya sistem informasi BMD yang aplikatif	1 dokumen 1 Dokumen 2 aplikasi	1 dokumen 1 Dokumen 2 aplikasi	Jumlah pengelolaan BMD, penatausahaan BMD,pengelolaan perencanaan BMD dan pemanfaatan BMD dan Jumlah Perbup	0	4 jenis	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	223,479,500	228,477,500	
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Aset Tetap Tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Persentase Asset Tanah Pemda yang bersertifikat		93 Persen 75 Persen	dokumen inventarisasi BMD Jumlah dokumen penilaian BMD	1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	Jumlah pengelolaan BMD, penatausahaan BMD,pengelolaan perencanaan BMD dan pemanfaatan BMD dan Jumlah Perbup	0	4 jenis	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207,930,000	237,040,000	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Tetap Tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Persentase Asset Tanah Pemda yang bersertifikat		93 Persen 75 Persen	dokumen sertifikasi tanah	20 sertifikat	20 sertifikat	Jumlah pengelolaan BMD, penatausahaan BMD,pengelolaan perencanaan BMD dan pemanfaatan BMD dan Jumlah Perbup	0	4 jenis	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,594,000	47,594,000	
	Pengawasan dan	Persentase Aset		93 Persen	Sosialisasi,			Jumlah			Kab.			



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Barang Milik Daerah	bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Persentase Asset Tanah Pemda yang bersertifikat			Peningkatan kemampuan dalam penyusunan laporan BMD, jumlah sosialisasi, bimtek pada pengguna barang, pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang			BMD, penatausahaan BMD, pengelolaan perencanaan BMD dan pemanfaatan BMD dan Jumlah Perbup			Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Tetap Tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Persentase Asset Tanah Pemda yang bersertifikat		93 Persen 75 Persen	dokumen status kegunaan dan dokumen pemusnahan dan penghapusan BMD Jumlah dokumen NPHD BMD	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	Jumlah pengelolaan BMD, penatausahaan BMD, pengelolaan perencanaan BMD dan pemanfaatan BMD dan Jumlah Perbup	0	4 jenis	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,568,450	26,315,450	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											1,180,139,850	999,494,600	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah											1,180,139,850	999,494,600	
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah Pertumbuhan Sumber PAD Pertumbuhan Wajib Pajak Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah		100 Persen 67 Persen 51 Persen 14 Persen	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 orang	50 orang	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah dan PAD terhadap komponen pendapatan daerah	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,950,000	26,482,700	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah Pertumbuhan Sumber PAD Pertumbuhan Wajib Pajak Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah		100 Persen 67 Persen 51 Persen 14 Persen	Jumlah data wajib pajak yang diakurasi	70 %	70 persen	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah dan PAD terhadap komponen pendapatan daerah	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,000,000	130,066,000	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah Pertumbuhan Sumber PAD Pertumbuhan Wajib Pajak Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah		100 Persen 67 Persen 51 Persen 14 Persen	Jumlah Sistem informasi pajak daerah	3 aplikasi	3 aplikasi	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah dan PAD terhadap komponen pendapatan daerah	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,372,750	38,808,000	
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah Pertumbuhan Sumber PAD Pertumbuhan Wajib Pajak Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah		100 Persen 67 Persen 51 Persen 14 Persen	Jumlah Sumber Potensi PAD	5 sumber	5 sumber	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah dan PAD terhadap komponen pendapatan daerah	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	339,426,000	279,744,900	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah Pertumbuhan Sumber PAD Pertumbuhan Wajib Pajak Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah		100 Persen 67 Persen 51 Persen 14 Persen	Jumlah evaluasi pendapatan daerah ke OPD pengelola PAD Jumlah Laporan Bulanan PAD Jumlah rekonsialiasi Bagi hasil pajak retribusi daerah rekonsiliasi dana bagi hasil pajak provinsi, piutang pajak daerah rekonsiliasi dan berita acara pajak-pajak pusat	4 laporan 12 Laporan 4 laporan 2 Berita Acara 12 laporan	4 laporan 12 Laporan 4 laporan 2 Berita Acara 12 laporan	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah dan PAD terhadap komponen pendapatan daerah	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,674,850	29,267,050	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah Pertumbuhan Sumber PAD Pertumbuhan Wajib Pajak Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah		100 Persen 67 Persen 51 Persen 14 Persen	jumlah penagihan pemungutan, penanganan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah	11 Jenis	11 Jenis	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah dan PAD terhadap komponen pendapatan daerah	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	509,716,250	495,125,950	
TOTAL												121,830,394,071	120,206,273,397	



Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,425,872,729	5,493,989,873	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,199,972,651	2,893,208,495	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,199,972,651	2,893,208,495		
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											102,850,000	30,450,000	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	100 Persen	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dan Pakaian Kerja Lapangan.	230 stel	60 stel	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,450,000	30,450,000		
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	100 Persen	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	15 orang	9 Orang	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,400,000	0		
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											812,364,972	478,296,772	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	100 Persen	Persentase Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,998,000	20,434,500		
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	100 Persen	Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,799,522	51,109,272		



Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Makanan dan Minuman Harian Pegawai, rapat, makan minum tamu dan makan minum lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,750,000	62,760,000	
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,399,950	19,950,000	
5 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah Bahan/Material dan Bahan/Material Pendukung Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,547,500	6,265,000	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah"	110 Kali	60 Kali	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	599,870,000	317,778,000	
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											901,622,606	879,482,606	
5 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	0 Unit	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	



Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 03 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Yang Dibangun	4 Bangunan	4 Bangunan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	589,379,406	589,379,406	
5 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 Jenis	11 Jenis	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	312,243,200	290,103,200	
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											761,124,000	736,124,000	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat, registrasi surat masuk dan surat keluar dan kebutuhan untuk surat adminstrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	251,480,000	251,480,000	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 Bulan	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191,016,000	166,016,000	
5 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan/Satpam dan Penjaga Malam Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,715,000	82,715,000	



Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor		100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Pejabat, Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan, Asset, Uang Lembur Pegawai, Jasa Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih	12 Bulan	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235,913,000	235,913,000	
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											647,938,500	476,428,000	
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Supir, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,115,000	75,686,000	
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Supir, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,831,500	269,750,000	
5 03 01 2.09 05	Pemeliharaan	Presentase Pemenuhan		100 Persen	Jumlah Penveduaan	12 Bulan	12 Bulan	Presentase Pemenuhan	0	100 Persen	Kab. Belitung	10.000.000	0	



Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Prasarana Kantor yang Layak Pakai			Mebel gedung kantor			Kantor			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,492,000	65,492,000	
5 03 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Rehab	1 Kendaraan	0 Kendaraan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai		100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Rehab	3 Bangunan	2 Bangunan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	189,500,000	65,500,000	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											3,021,489,265	2,400,126,215	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											1,050,485,100	1,158,017,250	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Data Pegawai ASN yang Akurat dan Terkini Berdasarkan Data Dasar Kepegawaian ASN dan Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran ASN		100 Persen	Jumlah Data Kebutuhan ASN Berdasarkan Peta Jabatan dan Anjab ABK	48 OPD	48 OPD	Presentase Aparatur yang Terpenuhi Pelayanan Administrasi Kepegawaian	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,562,350	75,029,000	



Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Data Pegawai ASN yang Akurat dan Terkini Berdasarkan Data Dasar Kepegawaian ASN dan Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran ASN		100 Persen	Jumlah Formasi yang terisi sesuai dengan Formasi yang ditetapkan	312 orang	411 orang	Presentase Aparatur yang Terpenuhi Pelayanan Administrasi Kepegawaian	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	549,293,250	866,428,750	
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Data Pegawai ASN yang Akurat dan Terkini Berdasarkan Data Dasar Kepegawaian ASN dan Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran ASN		100 Persen	Jumlah ASN yang Terpenuhi Layanan Pemberhentiannya/80 ASN Jumlah ASN yang Behenti	780 ASN	100 ASN	Presentase Aparatur yang Terpenuhi Pelayanan Administrasi Kepegawaian	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,315,500	80,485,500	
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Data Pegawai ASN yang Akurat dan Terkini Berdasarkan Data Dasar Kepegawaian ASN dan Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran ASN		100 Persen	Jumlah Pertandingan dan Olah raga	2 Kegiatan	0 Kegiatan	Presentase Aparatur yang Terpenuhi Pelayanan Administrasi Kepegawaian	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151,152,500	0	
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi	Persentase Data Pegawai ASN yang Akurat dan		100 Persen	Jumlah Data ASN Kabupaten	4500 Pegawai	2785 ASN	Presentase Aparatur yang Terpenuhi	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur,	188,161,500	136,074,000	



Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Data Dasar Kepegawaian ASN dan Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran ASN						Kepegawaian			Semua Kelurahan			
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN											622,149,165	435,223,665	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Presentase Aparatur yang Mendapatkan Pembinaan Karir dan Pengembangan Apatur		100 Persen	Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional.	600 Orang	500 Orang	Presentase PNS yang Telah Memenuhi Persyaratan Diklat Dalam Jabatannya	0	100 Persen		20,738,000	37,054,000	
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Presentase Aparatur yang Mendapatkan Pembinaan Karir dan Pengembangan Apatur		100 Persen	Peningkatan Pelayanan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala	2100 SK	1600 SK	Presentase PNS yang Telah Memenuhi Persyaratan Diklat Dalam Jabatannya	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	179,849,665	196,554,665	
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Presentase Aparatur yang Mendapatkan Pembinaan Karir dan Pengembangan Apatur		100 Persen	Jumlah pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT)	8 Job Fit	15 Job Fit	Presentase PNS yang Telah Memenuhi Persyaratan Diklat Dalam Jabatannya	0	100 Persen		421,561,500	201,615,000	
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN											1,080,390,500	705,154,800	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Presentase Aparatur yang Mendapatkan Pembinaan Karir dan Pengembangan Apatur		100 Persen	Jumlah Pegawai yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian penyesuaian ijazah	70 orang	58 orang	Presentase PNS yang Telah Memenuhi Persyaratan Diklat Dalam Jabatannya	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,754,500	67,173,500	



Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Presentase Aparatur yang Mendapatkan Pembinaan Karir dan Pengembangan Apatur		100 Persen	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Assessment Center	47 pegawai ASN	40 pegawai ASN	Presentase PNS yang Telah Memenuhi Persyaratan Diklat Dalam Jabatannya	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,036,000	0	
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Presentase Aparatur yang Mendapatkan Pembinaan Karir dan Pengembangan Apatur		100 Persen	Jumlah ASN yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	15 Orang	12 Orang	Presentase PNS yang Telah Memenuhi Persyaratan Diklat Dalam Jabatannya	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	797,600,000	637,981,300	
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											268,464,500	101,730,500	
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Data Pegawai ASN yang Akurat dan Terkini Berdasarkan Data Dasar Kepegawaian ASN dan Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran ASN		100 Persen	Terlaksananya sistem penilaian kineja ASN	2 Kegiatan	1 Kegiatan	Presentase Aparatur yang Terpenuhi Pelayanan Administrasi Kepegawaian	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168,072,500	68,098,500	
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Data Pegawai ASN yang Akurat dan Terkini Berdasarkan Data Dasar Kepegawaian ASN dan Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran ASN		100 Persen	Peningkatan Pengetahuan ASN Mengenai Korupsi	80 pegawai ASN	80 pegawai ASN	Presentase Aparatur yang Terpenuhi Pelayanan Administrasi Kepegawaian	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,173,000	0	



Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Data Pegawai ASN yang Akurat dan Terkini Berdasarkan Data Dasar Kepegawaian ASN dan Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran ASN		100 Persen	Meningkatnya Pengetahuan Disiplin ASN	80 Pegawai ASN	80 Pegawai ASN	Presentase Aparatur yang Terpenuhi Pelayanan Administrasi Kepegawaian	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,219,000	33,632,000	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											3,857,397,200	2,134,440,100	
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis											426,715,900	135,302,600	
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan		100 Persen	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Teknis tugas dan fungsi dan pegawai yang mendapatkan pembinaan	210 orang	210 orang	Presentase PNS yang Menduduki Jabatan Struktural yang Memenuhi Syarat Kompetensi Jabatan		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	426,715,900	135,302,600	
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional											3,430,681,300	1,999,137,500	
5 04 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan		100 Persen	Jumlah Calon/Pejabat Struktural yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	25 Orang	28 Orang	Presentase PNS yang Menduduki Jabatan Struktural yang Memenuhi Syarat Kompetensi Jabatan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,428,238,500	960,646,500	



Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sas Unit Organisasi: 50510402020700 Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan		100 Persen	Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar	160 orang	121 orang	Presentase PNS yang Menduduki Jabatan Struktural yang Memenuhi Syarat Kompetensi Jabatan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,002,442,800	1,038,491,000	
TOTAL												13,304,759,194	10,028,556,188	



Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											7,586,448,432	6,493,111,498	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,814,051,560	4,312,493,576	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	Level Kapabilitas APIP		3 Level		4,806,071,560	4,304,513,576	
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	persentase tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 %	100 %	Level Kapabilitas APIP		3 Level		7,980,000	7,980,000	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											485,982,000	85,159,050	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah tenaga APIP yang terlatih	33 Orang	10 Orang	Kapabilitas APIP	0	3 Level	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	485,982,000	85,159,050	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah pegawai yang ikut Bimtek/Pelatihan	50 Orang	50 Orang	Kapabilitas APIP	0	3 Level	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											765,908,200	609,995,200	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Persentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	Kapabilitas APIP	0	3 Level		25,000,000	25,000,000	



Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan	0	0	Kapabilitas APIP	0	3 Level	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	196,999,200	158,747,200	
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Persentase tersedianya peralatan/perlengkapan rumah tangga	0	100 %	Kapabilitas APIP	0	3 Level	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	persentase tersedianya bahan logistik kantor	100 %	100 %	Kapabilitas APIP	0	3 Level		51,730,000	51,730,000	
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan	50 kali	30 kali	Kapabilitas APIP	0	3 Level		492,179,000	374,518,000	
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											415,934,000	415,934,000	
6 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah bangunan/mushola yang dibangun Penambahan daya listrik mushola	1 bangunan 1 paket	1 bangunan 1 paket	Kapabilitas APIP	0	3 Level	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	269,541,000	269,541,000	
6 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi		100 Persen	Jumlah/jenis barang	10 barang	10 barang	Kapabilitas APIP	0	3 Level		146,393,000	146,393,000	



Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Lainnya	Akuntabilitas Kinerja												
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											429,929,850	444,159,850	
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	persentase tersedianya jasa surat menyurat	100 %	100 %	Kapabilitas APIP	0	3 Level		153,150,000	165,050,000	
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %	Kapabilitas APIP	0	3 Level		128,255,000	128,255,000	
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	Kapabilitas APIP	0	3 Level		86,545,000	88,875,000	
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	Kapabilitas APIP	0	3 Level		61,979,850	61,979,850	
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											674,642,822	625,369,822	
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik Jumlah kendaraan yang direhab persentase	13 unit 2 unit 100 %	13 unit 2 unit 100 %	Kapabilitas APIP	0	3 Level		378,362,500	329,089,500	



Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional lapangan									
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Jumlah Bangunan Kantor Dalam Kondisi Baik Jumlah bangunan kantor yang dibangun	0 0	0 0	Kapabilitas APIP	0	3 Level		196,930,322	196,930,322	
6 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	Persentase perlengkapan/peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	0	0	Kapabilitas APIP	0	3 Level		99,350,000	99,350,000	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											1,394,058,200	1,492,258,200	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											1,132,893,200	1,189,693,200	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat		87 Persen 73 Persen	Jumlah laporan hasil pengawasan	8 laporan	8 laporan	Maturitas SPIP	0	3 Level		68,945,200	128,695,200	
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah			87 Persen 73 Persen	Jumlah laporan hasil pengawasan	20 laporan	20 laporan	Maturitas SPIP	0	3 Level		270,238,000	270,238,000	



Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat												
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat		87 Persen 73 Persen	Jumlah laporan hasil reviu	33 Laporan	33 Laporan	Maturitas SPIP	0	3 Level	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,500,000	115,500,000	
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat		87 Persen 73 Persen	Jumlah laporan hasil reviu	32 laporan	32 laporan	Maturitas SPIP	0	3 Level		221,100,000	218,150,000	
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan		87 Persen 73 Persen	Jumlah laporan hasil pengawasan	39 Laporan	39 Laporan	Maturitas SPIP	0	3 Level	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	247,250,000	247,250,000	



Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat												
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat		87 Persen 73 Persen	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Persentase pematkhiran data hasil pengawasan	20 Laporan 100 %	20 Laporan 100 %	Maturitas SPIP	0	3 Level		209,860,000	209,860,000	
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											261,165,000	302,565,000	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat		87 Persen 73 Persen	Persentase penyelesaian kerugian daerah	100 %	100 %	Kapabilitas APIP	0	3 Level		97,365,000	97,365,000	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi		87 Persen 73 Persen	Jumlah kasus pengaduan yang tertangani Jumlah laporan hasil pengawasan	100 % 7 Laporan	100 % 7 Laporan	Kapabilitas APIP	0	3 Level		163,800,000	205,200,000	



Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Inspektorat												
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											634,010,500	452,040,000	
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan											0	0	
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti		100 Persen	Jumlah laporan survey penilaian integritas	1 laporan	1 laporan	Indeks Reformasi Birokrasi		55 Nilai		0	0	
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi											634,010,500	452,040,000	
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti		100 Persen	Jumlah OPD yang dibina menjadi unit WBK WBBM Persentase objek pemeriksaan yang bebas dari pungutan liar Persentase pengendalian gratifikasi Persentase tindak lanjut whistle blowing system	2 opd 100 % 100 % 100 %	2 opd 100 % 100 % 100 %	Indeks Reformasi Birokrasi	0	55 Nilai		455,212,000	419,740,000	
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti		100 Persen	Persentase jumlah wajib lapor yang melaporka LHKPN dan LHKASN	100 %	100 %	Indeks Reformasi Birokrasi	0	55 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	178,798,500	32,300,000	
TOTAL												9,614,517,132	8,437,409,698	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manggar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manggar

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,386,907,112	3,206,479,112	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,152,487,704	2,169,587,704	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	16 Orang	18 Orang	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	2,152,487,704	2,169,587,704		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												19,000,000	0	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah Pegawai yang ikut Bimtek/Pelatihan	2 Orang	2 Orang	Persentase Aparatur yang berkinerja baik	0	100 Persen		10,000,000	0		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah Pegawai yang ikut Bimtek/Pelatihan	3 Orang	3 Orang	Persentase Aparatur yang berkinerja baik	0	100 Persen		9,000,000	0		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												429,228,408	246,227,908	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 Persen	10 Jenis	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	29,997,000	30,072,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	100 Persen	20 Jenis	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	40,000,000	35,979,000		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah peralatan rumah tangga yang	100 Persen	20 Jenis	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	29,999,908	31,449,908		



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manggar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manggar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
												Sebelum	Sesudah	
								Perangkat Daerah			Kelurahan			
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	100 Persen	20 Jenis	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	50,899,500	69,475,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	100 Persen	4 Jenis	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	40,000,000	30,980,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	30 Kali	16 Kali	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	238,332,000	48,272,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah bangunan Kantor yang dibangun	1 Unit	1 Unit	-	0	0		0	0	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Jenis barang	50 Unit	50 Unit	-	0	0		0	0	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manggar

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manggar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Jenis Barang	5 Unit	5 Unit	-	0	0		0	0	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											495,913,500	496,129,500	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani	100 Persen	4 Jenis	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	225,179,000	225,395,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah Layanan jasa Komunikasi, Sumber daya air, Listrik dan lainnya yang terpenuhi	100 Persen	5 Jenis	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	80,400,000	80,400,000	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Tersedianya Jasa tenaga Keamanan/Satpam dan Penjaga Malam Kantor	100 Persen	12 Bulan	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	29,125,000	29,125,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen	5 Orang	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	161,209,500	161,209,500	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											290,277,500	294,534,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan	100 Persen	9 Unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	179,745,000	179,738,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manggar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manggar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	4 Unit	4 Unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	90,532,500	89,896,000	
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		100 Persen	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	100 Persen	30 Unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	20,000,000	24,900,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											72,259,750	49,756,450	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											18,759,750	18,759,750	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indeks Kepuasan Masyarakat		81,32 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan (Prioritas Kecamatan sinkronisasi perencanaan antara Kabupaten dan Desa)	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Keterwakilan Unsur pada Musrenbang Tingkat Kecamatan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	18,759,750	18,759,750	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											53,500,000	30,996,700	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		81,32 Persen	Jumlah Dokumen yang dilaporkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh di Kecamatan	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	53,500,000	30,996,700	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											24,048,000	517,940,000	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											24,048,000	517,940,000	
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Persentase tingkat		100 Persen	Jumlah Aparatur Pemerintah	50 Orang	20 Orang	Persentase kehadiran unsur	0	100 Persen	Kab. Belitung	24,048,000	517,940,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manggar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manggar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Tokoh Masyarakat	umum			Desa, Vertikal dan Lintas Sektor Lainnya yang hadir dalam Rapat_rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan			penertiban dan penyelesaian ketentraman dan ketertiban umum			Semua Kelurahan			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											540,854,231	401,080,481	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											540,854,231	401,080,481	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan KDH di tingkat Desa		100 Persen	Jumlah desa yang dibina dan dievaluasi	9 Desa	9 Desa	Cakupan pelaksanaan tugas atributif Camat	0	9 Desa	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	71,599,750	71,599,750	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan KDH di tingkat Desa		100 Persen	Jumlah Desa yang difasilitasi	9 Desa	9 Desa	Cakupan pelaksanaan tugas atributif Camat	0	9 Desa	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	9,986,000	11,088,000	
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan KDH di tingkat Desa		100 Persen	Jumlah Lahan yang di fasilitasi dan diverifikasi secara faktual sesuai permohonan Masyarakat	100 SKT	100 Lahan	Cakupan pelaksanaan tugas atributif Camat	0	9 Desa	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	7,999,800	7,999,800	
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan KDH di tingkat Desa		100 Persen	Jumlah Paket Kegiatan Yang dilaksanakan	8 Kegiatan	6 Paket	Cakupan pelaksanaan tugas atributif Camat	0	9 Desa	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	451,268,681	310,392,931	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manggar

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manggar

Sub Unit Organisasi : 16.10.00.000.1000 Kecamatan Manggarai														
Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
TOTAL												4,024,069,093	4,175,256,043	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Gantung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Gantung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													3,834,373,529	3,669,296,294	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													2,183,999,997	2,183,998,997	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Pegawai	20 Orang	20 Orang				Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	2,183,999,997	2,183,998,997			
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %					0	0			
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													35,000,000	0	
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah pegawai yang ikut sosialisasi	2 Orang	2 Orang	-	0	0		15,000,000	0			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah pegawai yang ikut bimtek / pelatihan	3 Orang	3 Orang	-	0	0		20,000,000	0			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													340,921,282	166,593,882	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Persentase tersedianya instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan Persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga	100 % 100 %	100 % 100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	60,076,982	53,999,982			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000			



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Gantung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Gantung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					perlengkapan kantor dan rumah tangga						Gantung, Semua Kelurahan			
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Persentase tersedianya jasa administrasi kantor Persentase tersedianya peralatan / perlengkapan kantor dan rumah tangga	100 % 100 %	100 % 100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	61,000,000	51,000,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Persentase tersedianya alat tuliskan dan barang cetak	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	13,998,300	10,999,900	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	27 kali	27 kali	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	179,847,000	24,595,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											375,023,250	408,377,415	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah jenis kendaraan	3 unit	3 unit	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	46,000,000	65,400,000	
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah bangunan kantor yang dibangun	1 unit	1 unit	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	194,750,000	194,750,000	
	Pengadaan				Jumlah jenis						Kab.			



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Gantung

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Gantung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Timur, Gantung, Semua Kelurahan			
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											538,843,000	525,943,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	281,000,000	281,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	60,000,000	47,100,000	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	29,125,000	29,125,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	168,718,000	168,718,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											360,586,000	384,383,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah kendaraan dalam kondisi baik Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	14 unit 100 %	14 unit 100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	229,742,000	198,187,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Gantung

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Gantung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah bangunan kantor dalam kondisi baik Persentase perlengkapan/peralatan rumah dinas/jabatan dalam kondisi baik	1 unit 100 %	1 unit 100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	105,944,000	161,296,000	
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentase perlengkapan/peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	24,900,000	24,900,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											104,578,000	104,578,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											6,250,000	6,250,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan IKM	96.56 %	96.56 %	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	6,250,000	6,250,000	
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											98,328,000	98,328,000	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dipelihara	1 unit	1 unit				Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	98,328,000	98,328,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											6,043,500	368,526,525	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											3,043,500	3,043,500	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan				Jumlah anggota	70 Orang	70 Orang		0	0	Kab. Belitung	3,043,500	3,043,500	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Gantung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Gantung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										Gantung, Semua Kelurahan			
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											3,000,000	365,483,025	
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	35 Orang	35 Orang	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	3,000,000	365,483,025	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											408,349,800	246,610,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											408,349,800	246,610,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Jumlah Desa yang dibina	7 desa	7 desa	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	48,600,000	48,600,000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				Jumlah Desa yang menyampaikan dokumen keuangan (APBDes) tepat waktu	6 desa	6 desa	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	12,500,000	12,500,000	
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat				Jumlah prestasi yang diraih masyarakat mewakili kecamatan pada kegiatan kemasarakatan	17 prestasi	17 prestasi	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kelurahan	347,249,800	185,510,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Gantung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Gantung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
												Sebelum	Sesudah	
TOTAL												4,353,344,829	4,389,010,819	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Kelapa Kampit
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Kelapa Kampit

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah		
2	13	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												32,000,000	27,621,000	
2	13	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												32,000,000	27,621,000	
2	13	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				Jumlah APBDes yang di asistensi dan dimonev	12 APBDes	12 APBDes	-	0	0		32,000,000	27,621,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,304,661,054	3,163,743,544	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,109,229,996	2,109,229,996	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah pegawai	19 orang	19 orang					2,109,229,996	2,109,229,996		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												39,800,000	19,800,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah pakaian dinas yang dibuat/dibeli	40 stel	33 stel	-	0	0		19,800,000	19,800,000		
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi	2 orang	2 orang	-	0	0		10,000,000	0		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah aparatur yang terlatih	3 orang	3 orang	-	0	0		10,000,000	0		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												309,580,558	149,203,058	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Persentase tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	100 persen	100 persen	-	0	0		25,000,000	25,000,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				Persentase tersedianya alat tulis kantor dan	100 persen	100 persen	-	0	0		30,000,000	26,997,500		



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Kelapa Kampit
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Kelapa Kampit

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor									
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Persentase tersedianya peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga	100 persen	100 persen	-	0	0		9,999,558	9,999,558	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				tersedianya makan dan minum kantor	12 bulan	12 bulan	-	0	0		40,000,000	33,920,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				tersedianya cetakan dan penggandaan kantor	12 bulan	12 bulan	-	0	0		20,000,000	15,850,000	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	-	0	0		9,960,000	9,960,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah perjalanan dinas	35 kali	20 kali	-	0	0		174,621,000	27,476,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											50,000,000	50,000,000	
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 paket	1 unit	-	0	0		50,000,000	50,000,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											560,625,000	560,625,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 persen	100 persen	-	0	0		301,875,000	301,875,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan	100 persen	100 persen	-	0	0		66,000,000	66,000,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Kelapa Kampit
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Kelapa Kampit

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan	100 persen	100 persen	-	0	0		29,125,000	29,125,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan Terlaksananya kebersihan kantor	100 persen 12 bulan	100 persen 12 bulan	-	0	0		163,625,000	163,625,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											235,425,500	274,885,490	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan terpeliharanya kendaraan dinas	100 persen 12 bulan	100 persen 12 bulan	-	0	0		170,441,500	170,438,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	12 bulan	3 unit	-	0	0		39,984,000	79,447,490	
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				persentase terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 persen 12 bulan	100 persen 12 bulan	-	0	0		25,000,000	25,000,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											20,000,000	20,000,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											20,000,000	20,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan				Jumlah perizinan yang di Monitoring dan	0 0	0 0	-	0	0		20,000,000	20,000,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Kelapa Kampit
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Kelapa Kampit

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Jumlah peserta persentase Masyarakat yang puas atas pelayanan Kecamatan									
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											9,999,000	9,999,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											9,999,000	9,999,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang	150 orang	150 orang					9,999,000	9,999,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											70,000,000	461,925,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											60,000,000	461,925,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Jumlah kegiatan monitoring	3 kegiatan	0 kegiatan	-	0	0		30,000,000	0	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Jumlah kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	-	0	0		30,000,000	461,925,000	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											10,000,000	0	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di				Jumlah peserta	30 orang	30 orang	-	0	0		10,000,000	0	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Kelapa Kampit
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Kelapa Kampit

Sub Unit Organisasi : 10.1000.00



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,764,364,194	2,638,477,786	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,895,824,794	1,895,824,786	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	13 ORANG	15 ORANG	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor		100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	1,895,824,794	1,895,824,786	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											29,900,000	14,400,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia (Stel)	30 stel	24 stel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	14,400,000	14,400,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi		100 Persen 100 Persen	Jumlah pegawai yang ikut Bimtek/pelatihan	1 orang	1 orang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen		0	0	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang)	2 orang	2 orang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	10,000,000	0	
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK (Orang)	2 orang	1 orang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	5,500,000	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											179,038,500	127,816,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	100 %	6 Jenis	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	7,499,500	7,499,500	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (Jenis)	100 %	40 Jenis	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	45,011,600	41,328,600	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (Jenis)	100 %	5 Jenis	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	5,499,000	5,499,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis)	100 %	10 Jenis	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	32,187,500	27,462,500	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan	Cakupan layanan		100 Persen	jumlah barang cetakan dan	100 %	6 Jenis		0	100 Persen	Kab. Belitung	14.399.900	11.519.400	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			(Jenis)			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor			Pesak, Semua Kelurahan			
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan (Jenis)	100 %	3 Jenis	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	4,800,000	4,798,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)	20 kali	6 kali	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	69,641,000	29,709,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											116,649,900	56,394,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan		100 Persen	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	2 UNIT	2 UNIT	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 Nilai		55,200,000	0	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pemerintahan (Persentase)												
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 Persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	189 UNIT	137 UNIT	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 Nilai	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	61,449,900	56,394,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											431,312,500	434,062,500	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani (Jenis)	100 %	1 Jenis	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	3,750,000	2,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi (Jenis)	100 %	1 Jenis	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	12,000,000	16,500,000	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 Persen 100 Persen	Persentase tersedianya jasa administrasi	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Kebutuhan	0	100 Persen		0	0	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor												
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)	100 %	14 Orang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	415,562,500	415,562,500	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											111,638,500	109,980,500	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan (Unit)	7 UNIT	7 UNIT	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	104,138,500	99,480,500	
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan		100 Persen 100 Persen	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	100 %	10 Unit	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	7,500,000	10,500,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		(Persentase) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor												
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											82,891,500	7,228,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											11,996,000	7,228,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik		85,94 Persen 85.94 Persen 85.94 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan (Prioritas Kecamatan sinkronisasi perencanaan antara Kabupaten dan Desa) (dokumen)	2 dokumen	1 dokumen	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik (Persen)	0	85.94 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	11,996,000	7,228,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											2,095,500	0	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik		85.94 Persen 85.94 Persen	Jumlah Dokumen yang dilaporkan (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik (Persen)	0	85.94 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	2,095,500	0	
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											68,800,000	0	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan				Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dibangun dengan baik Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang	1 unit 1 unit	1 unit 1 unit					68,800,000	0	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Simpang Pesak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Umum													
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											2,999,000	297,544,500	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											0	297,544,500	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan (Persen) Persentase tingkat gangguan Kamtibmas		100 Persen 100 Persen	Jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Vertikal dan Lintas Sektor Lainnya yang hadir dalam Rapat_rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan (Orang)		15 orang	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik (Persen)		85.94 Persen	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	0	297,544,500	
7 01 04 2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah											2,999,000	0	
7 01 04 2.04 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Jumlah Peserta	20 orang	0 orang	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kelurahan	2,999,000	0	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											381,549,200	150,871,700	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											381,549,200	150,871,700	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Desa yang tertib		100 Persen	Jumlah Desa yang dibina dan	4 desa	4 desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur,	27,499,750	27,499,750	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Damar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Damar

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	13	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												11,600,000	11,600,000	
2	13	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												11,600,000	11,600,000	
2	13	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100 Persen	Jumlah Desa yang difasilitasi	5 desa	5 Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	11,600,000	11,600,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,068,093,850	2,938,380,700	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,915,290,826	1,948,457,754	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pegawai	18 PNS	18 PNS	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang		77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	1,915,290,826	1,948,457,754			
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 Persen	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang		77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	0	0			
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												66,192,250	31,592,250	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 Persen	Jumlah pakaian dinas	32 stel	32 stel	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	31,592,250	31,592,250			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 Persen	Jumlah pegawai yang ikut Bimtek/pelatihan	9 orang	0 orang	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	34,600,000	0			



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Damar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Damar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 Persen	17 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	14,599,500	14,599,500	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	100 Persen	49 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	54,199,524	62,371,596	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	100 Persen	10 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	22,000,000	26,695,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 Persen	5 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	25,000,000	19,999,850	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	20 kali	10 kali	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	102,827,000	10,927,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											244,049,250	147,866,250	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Cakupan layanan penunjang yang		100 Persen	Jumlah kendaraan dinas operasional atau	2 Unit	2 Unit	Indeks Kepuasan Layanan	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur,	63,200,000	63,200,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Damar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Damar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pelaksanaan urusan pemerintahan			tersedia						Semua Kelurahan			
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan	2 unit	1 unit	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	136,878,000	52,380,000	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis Barang	5 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	43,971,250	32,286,250	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											469,967,000	521,907,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani	100 Persen	10 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	25,000,000	15,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100 Persen	7 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	40,332,000	56,952,000	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	0	0	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Damar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Damar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen	14 Orang	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	404,635,000	449,955,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											153,968,500	153,964,500	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan	8 Unit	8 Unit	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	124,128,500	124,124,500	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah Bangunan Kantor dalam Kondisi Baik	5 Unit	5 Unit	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	15,850,000	15,850,000	
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	100 Persen	6 Unit	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	77 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	13,990,000	13,990,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											10,000,000	4,664,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											10,000,000	4,664,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		80 Persen	Jumlah Dokumen yang dilaporkan	100 Persen	1 Dokumen	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik	0	80 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	10,000,000	4,664,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Damar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Damar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											8,800,000	8,800,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 Persen	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Musrenbang Kecamatan	100 orang	100 orang	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik		80 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	8,800,000	8,800,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											9,599,700	262,665,000	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											4,799,850	0	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Jumlah orang	30 orang	30 orang	-	0	0	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	4,799,850	0	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											4,799,850	262,665,000	
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum		100 Persen	Jumlah Peserta Yang Hadir	60 orang	60 orang	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik	0	80 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	4,799,850	262,665,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											389,799,950	277,987,950	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											389,799,950	277,987,950	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa		100 Persen	Jumlah Desa yang dievaluasi dan dinilai	5 desa	5 desa	Persentase Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kelurahan	19,799,950	19,799,950	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Damar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Damar

DAS UNIT ORGANISASI : 16.10.00														



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,209,591,310	3,006,083,588	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,985,340,442	1,903,947,442	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)	15 orang	15 Orang	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)		77.5 %		1,985,340,442	1,903,947,442	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Persentase tersedianya jasa administrasi kantor	100 %	100 %	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)		77.5 %		0	0	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											54,000,000	26,700,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia (Stel)	30 Stel	25 Stel	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang, Semua Kelurahan	16,200,000	15,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	2 Orang	1 Orang	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang, Semua Kelurahan	10,000,000	0	
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan		100 %	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-	2 Orang	1 Orang	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang,	10,000,000	0	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		pemerintahan (Persentase)			(Orang)						Kelurahan			
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK (Orang)	5 Orang	3 Orang	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	17,800,000	11,700,000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											341,945,100	278,858,400	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	100 %	10 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	9,992,750	9,992,750	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (Jenis)	100 %	30 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	44,999,500	41,079,000	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (Jenis)	100 %	85 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	72,731,500	72,731,500	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis)	100 %	11 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang, Semua Kelurahan	44,998,000	39,518,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	100 %	2 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang, Semua Kelurahan	14,999,700	12,587,500	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan (Jenis)	100 %	3 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang, Semua Kelurahan	6,406,650	6,406,650	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)	20 Kali	15 Kali	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang, Semua Kelurahan	147,817,000	96,543,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											104,769,500	90,038,500	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 %	jumlah jenis barang	1 Jenis	1 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %		12,730,000	0	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Paket)	2 Jenis	5 Paket	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang, Semua Kelurahan	92,039,500	90,038,500	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											353,845,000	363,215,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani (Jenis) Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani (Jenis)	100 %	2 Orang 3 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang, Semua Kelurahan	62,540,000	62,540,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi (Jenis)	100 %	2 Jenis	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang, Semua Kelurahan	34,800,000	34,800,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)	100 %	11 Orang	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang, Semua Kelurahan	256,505,000	265,875,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											369,691,268	343,324,246	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan			100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Laik Jalan (Unit)	100 %	2 Unit	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang, Semua Kelurahan	45,344,500	37,346,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)												
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan (Unit)	8 Unit	8 Unit	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	115,000,000	96,650,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (Unit)	2 Unit	3 Unit	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	191,896,768	191,878,246	
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang direhab (Unit)	2 Jenis	28 Unit	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	0	77.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	17,450,000	17,450,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											19,909,500	19,909,500	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											9,194,500	9,194,500	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)		82.50 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan (Dokumen)	2 Kegiatan	1 Dokumen 72 Orang	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik (Persen)	0	82.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua	9,194,500	9,194,500	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Instansi Vertikal Terkait				Jumlah Kehadiran Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan (Orang)									
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											10,715,000	10,715,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)		82.50 %	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan (Dokumen)	2 Dokumen/Laporan	2 Dokumen/Laporan	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik (Persen)	0	82.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang, Semua Kelurahan	10,715,000	10,715,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											32,996,000	313,343,450	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											0	289,393,450	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan (Persen)		100 %	Jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Instansi Vertikal dan Lintas Sektor Lainnya yang hadir dalam Rapat_rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		50 Orang	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik (Persen)		82.5 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggang, Semua Kelurahan	0	289,393,450	
7 01 04 2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah											32,996,000	23,950,000	
7 01 04 2.04 01	Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penerapan	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan		100 %	Jumlah anggota Linmas yang dibina Jumlah Peserta Sosialisasi	20 Orang 70 Orang	20 Orang 70 Orang	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik (Persen)	0	82.5 %	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,996,000	23,950,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Perndang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											334,876,850	207,793,350	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											334,876,850	207,793,350	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi		100 %	Jumlah desa yang dibina dan dievaluasi	4 Desa	4 Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi (Persen)	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	28,496,500	24,533,000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi		100 %	Jumlah Desa yang Fasilitasi (Desa)	6 Laporan	4 Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi (Persen)	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	13,075,000	8,051,000	
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi		100 %	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi (Laporan)	25 Orang	1 Laporan	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi (Persen)	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kelurahan	6,795,000	5,256,000	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi		100 %	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi (Laporan)	25 Orang	1 Laporan	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi (Persen)	0	100 %		6,800,500	6,800,500	
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masvarakat	Persentase Desa yang Tertib Administrasi		100 %	Jumlah kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan yang dilaksanakan	12 Kegiatan	6 Kegiatan	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi (Persen)	0	100 %	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua	279,709,850	163,152,850	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Simpang Renggang

Sub Unit Organisasi : 14.14.000.000000 Kecamatan Simpang Kandang														
Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
TOTAL												3,597,373,660	3,547,129,888	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	10	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											13,600,000	0	
2	10	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											13,600,000	0	
2	10	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100 Persen 100 Persen	Jumlah lahan yang disurvey Jumlah pemanfaatan tanah yang dibina dan diawasi	4 dokumen 50 orang	4 dokumen 50 orang	Persentase Desa yang tertib administrasi yang dinilai dan dievaluasi	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	13,600,000	0		
2	13	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											78,100,000	58,606,500	
2	13	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											78,100,000	58,606,500	
2	13	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	Jumlah Kader Perempuan dan Kepemudaan yang diberdayakan	50 orang	50 orang	-Persentase Kader Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Perempuan yang menjadi prioritas	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	78,100,000	58,606,500		
2	13	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											402,400,000	313,541,000	
2	13	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											402,400,000	313,541,000	
2	13	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100 Persen 100 Persen	Jumlah Desa dan Lembaga yang dibina Jumlah Desa yang dievaluasi	4 desa 4 desa	4 desa 4 desa	Persentase Desa yang tertib administrasi yang dinilai dan dievaluasi	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	28,100,000	23,500,000		
2	13	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100 Persen 100 Persen	Jumlah APBDes yang diasistensi dan di movev	4 dokumen	4 dokumen	Persentase Desa yang tertib administrasi yang dinilai dan dievaluasi	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	17,600,000	17,600,000		



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 13 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa		100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Kegiatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan	10 paket	10 paket	Persentase Desa yang tertib administrasi yang dinilai dan dievaluasi	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	356,700,000	272,441,000	
2 19 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											22,600,000	19,339,500	
2 19 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											22,600,000	19,339,500	
2 19 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik		100 Persen	Jumlah peralatan dan perlengkapan olah raga yang tersedia Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dipelihara	12 buah 2 unit	12 buah 2 unit	-Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dipelihara	0	2 Unit	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	22,600,000	19,339,500	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,241,444,685	3,160,928,335	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,137,956,520	2,137,956,520	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah Pegawai	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	Tersedianya jasa administrasi perkantoran		14 Bulan	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	2,137,956,520	2,137,956,520	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											16,500,000	5,500,000	
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah Pegawai yang ikut bimtek/pelatihan	14 orang	14 orang	Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi	0	4 Orang	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	16,500,000	5,500,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 persen	100 persen	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	12,000,000	12,000,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase tersedianya Alat Tulis dan Barang Cetakan Persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	70,650,000	85,270,150	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase Tersedianya Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	100 persen	100 persen	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase tersedianya makanan dan minuman	100 persen	100 persen	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	53,250,000	45,270,000	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	100 persen	100 persen	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	9,888,000	9,888,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	30 kali	30 kali	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	124,828,000	85,554,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah Jenis Barang	5 unit	5 unit	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	18,831,500	18,831,500	
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		100 Persen	Jumlah Jenis Barang	10 unit	10 unit	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	28,925,665	28,925,665	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											459,395,000	445,470,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Persentase tersedianya jasa surat menyurat	100 persen	100 persen	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	254,200,000	253,500,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	100 persen	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	33,000,000	33,000,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen 100 Persen	Persentase tersedianya jasa administrasi keuangan Persentase tersedianya jasa jaminan barang milik daerah Persentase tersedianya jasa kebersihan kantor	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	172,195,000	158,970,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											289,220,000	266,262,500	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik Persentase tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14 unit 100 persen	14 unit 100 persen	-Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	247,820,000	220,785,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	-Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	17,600,000	21,677,500	
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	1 unit	1 unit	-Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	0	0	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 Persen	Persentase Barang dan Alat dalam Kondisi Baik	80 persen	80 persen	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	23,800,000	23,800,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											29,800,000	29,800,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											13,800,000	13,800,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik		100 Persen 100 Persen	Jumlah Partisipasi Masyarakat yang mengikuti kegiatan Musrenbang Kecamatan	100 orang	100 orang	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang	0	100 Orang	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	13,800,000	13,800,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											16,000,000	16,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 Persen	Jumlah Kegiatan Pelayanan terhadap masyarakat Jumlah Perizinan yang dimonev Persentase masyarakat yang merasa puas terhadap layanan	1 kegiatan 50 dokumen 90 persen	1 kegiatan 50 dokumen 90 persen	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	0	100 Persen	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	16,000,000	16,000,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											0	195,235,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											0	195,235,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan		100 Persen	Tersedianya satgas penanganan pandemi covid-19		1 kegiatan	Jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Vertikal dan Lintas Sektor Lainnya yang hadir		100 Orang	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	0	195,235,000	



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dendang

SUB-UNIT ORGANISASI : 10.10.000.000.0000 Kecamatan Bendaung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								Rapat_rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan						
TOTAL												3,787,944,685	3,777,450,335	



Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,331,692,269	2,395,847,219	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,032,452,600	1,525,900,300	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	JUmlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	10 Orang	14 bulan	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien		100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,032,452,600	1,525,900,300	
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	jumlah ppk pa pengurus barang bendahara pengeluaran	12 bulan	12 bulan	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien		100 persen		0	0	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											55,000,000	15,000,000	
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	jumlah pakaian dinas/lapangan /hari-hari tertentu beserta atribut kelengkapan yang tersedia	0	25 stell	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	0	8 orang	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	0	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											515,963,500	181,594,750	



Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	persentase pemuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	19 jenis	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,970,000	19,970,000	
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	12 bulan	41 jenis	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,245,000	44,290,500	
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase pemuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	31 jenis	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,119,000	22,119,000	
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pemuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	18 jenis	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,344,500	42,774,000	
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	persentase pemuhan kebutuhan administrasi		100 persen	jumlah barang cetakan dan penggunaan yang tersedia	12 bulan	4 jenis	tingkat persentase sistem kelembagaan dan	0	100 persen		24,940,000	19,951,250	



Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								yang efektif dan efisien						
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	jumlah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	12	20 kali	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen		349,345,000	32,490,000	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											67,075,000	67,075,000	
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		0 0	Tersedianya perlengkapan / peralatan gedung kantor	100 %	100 %	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen		0	0	
8 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		0 0	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	10 unit	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen		67,075,000	67,075,000	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											442,313,169	442,313,169	
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	jumlah layanan surat menyurat yang tertangani	12 bulan	4 jenis	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen		155,749,000	155,749,000	



Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan lainnya yang terpenuhi	12 bulan	5 jenis	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen		48,360,000	48,360,000	
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	5 jenis	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen		70,287,500	70,287,500	
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	4 orang	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen		167,916,669	167,916,669	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											218,888,000	163,964,000	
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	jumlah kendaraan dalam kondisi baik	12 bulan	10 unit	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	179,088,000	124,164,000	
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi		100 persen	jumlah peralatan dan mesin dan kondisi baik	0	52 unit	tingkat persentase sistem kelembagaan	0	100 persen		39,800,000	39,800,000	



Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
								ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien						
8 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100 persen	Terpenuhinya gedung kantor pada kantor kesbangpol Terpenuhinya rehabilitasi gedung kantor pada kantor kesbangpol	0 0	0 0	tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	0	100 persen		0	0	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											791,224,800	242,145,500	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											791,224,800	242,145,500	
8 01 02 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa		100 persen	jumlah laporan FPK/PPWK jumlah peserta yang mengikuti dialog ideologi bangsa	0 0	4 laporan 100 peserta	tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,726,300	81,100,500	
8 01 02 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa		100 persen	jumlah laporan gugus tugas revolusi mental jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi wasbang	0 0	4 laporan 100 peserta	tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162,845,000	161,045,000	
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa		100 persen	jumlah laporan koordinasi		9 penghargaan	tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	457,691,000	0	



Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa			cinta tanah air/jelajah nusantara jumlah peserta TOT wasbang/bela negara/kemah bakti jumlah peserta yang mengikuti festival kebhinnekaan daerah terlaksananya upacara hari- hari besar nasional	0	4 peserta 6 hari besar	dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa		100 persen	jumlah penghargaan lomba pembauran kebangsaan	0	9 penghargaan	tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,052,500	0	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											641,045,000	626,891,000	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik											641,045,000	626,891,000	
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	persentase tingkat pemahaman dan pengawasan politik yang ada di masyarakat		100 persen	jumlah parpol yang diverifikasi jumlah peserta pembinaan politik bagi masyarakat	100 % 100 %	10 parpol 30 peserta	tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua	548,634,200	548,634,200	



Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah													
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	persentase tingkat pemahaman dan pengawasan politik yang ada di masyarakat		100 persen	jumlah peserta bimtek LPJ parpol	0	30 peserta	tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,068,800	29,914,800	
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	persentase tingkat pemahaman dan pengawasan politik yang ada di masyarakat		100 persen	Jumlah laporan monev data situasi politik	0	1 laporan	tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,342,000	48,342,000	



Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											74,172,800	0	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											74,172,800	0	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	persentase ormas/LSM/OKP yang berstatus terdaftar		100 persen	Terlaksananya dialog antar ormas dan pemerintah Terverifikasinya semua ormas di belitung timur	0 0	50 ormas 40 ormas	tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,172,800	0	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											248,929,795	153,895,795	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											248,929,795	153,895,795	
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	persentase tingkat pembinaan kerukunan dan keselarasan di masyarakat		100 persen	jumlah pengawasan dan pembinaan penyalahgunaan narkoba jumlah peserta lomba menulis anti narkoba jumlah publikasi penyalahgunaan narkotika	0 0 0	5 THM 50 peserta 3 jenis	tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158,879,795	93,745,795	
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	persentase tingkat		100 persen	jumlah laporan FKUB	0	2 laporan	tingkat persentase	0	100 persen		90,050,000	60,150,000	



Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	keselarasan di masyarakat			jumlah peserta pembinaan FKUB			yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba						
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											301,922,000	533,574,300	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											301,922,000	533,574,300	
8 01 06 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik		100 persen	Tersediannya dokumen situasi dan kondisi konflik sosial di belitung timur	0	0	tingkat persentase penanganan konflik secara damai	0	100 persen		0	0	
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik		100 persen	jumlah laporan tim terpadu	0	4 laporan	tingkat persentase penanganan konflik secara damai	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	224,121,000	455,773,300	



Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	konflik												
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik		100 persen	Adanya peningkatan kerja sama dalam hal peningkatan keamanan di belitung timur Adanya peningkatan terhadap kewaspadaan dini di belitung timur	0 0	0 0	tingkat persentase penanganan konflik secara damai	0	100 persen		0	0	
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik		100 persen	jumlah laporan tim movev orang asing	0	2 laporan	tingkat persentase penanganan konflik secara damai	0	100 persen	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,801,000	77,801,000	



Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
												Sebelum	Sesudah	
	Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
TOTAL												5,388,986,664	3,952,353,814	



TABEL 3.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak terduga Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Plafon Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	361.072.241.948	352.352.329.325
2	Belanja Barang dan Jasa	306.423.318.417	336.665.904.934
3	Belanja Hibah	30.024.986.325	25.860.657.500
4	Belanja Bantuan Sosial	4.321.625.000	484.582.929
5	BELANJA MODAL	158.481.233.011	134.394.073.581
	Belanja Modal Tanah	48.495.000	48.495.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.977.548.293	47.631.398.193
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.139.496.838	38.242.385.096
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.584.318.409	46.416.168.061
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.731.374.471	1.954.627.231
	Belanja Modal Aset Lainnya	0	101.000.000
6	Belanja Tidak Terduga	3.748.591.256	946.960.362
7	Belanja Bagi Hasil	7.028.935.229	9.036.162.825
8	Belanja Bantuan Keuangan	96.261.343.663	94.575.508.500
	TOTAL	967.362.274.849	954.316.179.956

**TABEL 3.4 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pegawai yang disiplin berpakaian				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.000.000	39.000.000	
				Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.000.000	39.000.000	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.755.118.572	4.604.450.140	
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	359.683.550	349.721.440	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.000.000	7.500.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	437.575.000	449.375.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.717.982.000	2.399.803.240	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Desa yang tertib administrasi				
					Kecamatan Dendang	13.600.000	0	
				Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa				
					Kecamatan Dendang	13.600.000	0	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	696.050.430	674.712.680	
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	469.298.500	529.581.500	
				Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	788.450.430	734.112.680	
				Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.119.298.856	3.016.858.485	
				Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.119.298.856	3.016.858.485	
				Persentase pegawai yang disiplin berpakaian				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92.400.000	59.400.000	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.700.476.286	3.626.392.665	
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.165.348.930	1.204.294.180	
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	584.171.500	594.760.000	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.587.327.000	1.078.317.000	
				Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.587.327.000	1.078.317.000	
				Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.587.327.000	1.078.317.000	
				Rasio penduduk ber-KTP				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.587.327.000	1.078.317.000	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.000.645.870	585.709.870	
				penerbitan akta kelahiran Per jumlah kelahiran				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76.761.500	42.523.500	
				Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	549.460.000	207.462.000	
				Penerbitan akta kelahiran perjumlah kelahiran				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	374.424.370	335.724.370	
				Persentase kepemilak akta kelahiran usia 0 - 18 Tahun				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	374.424.370	335.724.370	
				Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	626.221.500	249.985.500	
				Rasio pasangan berakta nikah				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	451.185.870	378.247.870	
				Rasio pasangan berakte nikah				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	549.460.000	207.462.000	
				Rasio penerbitan akta kematian				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	626.221.500	249.985.500	
				Rasio perbitan akta kematian				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	374.424.370	335.724.370	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang mutakhir				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.644.454	252.262.892	
				Persentase ketersediaan tata kelola administrasi kependudukan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	251.798.954	188.114.892	
				Persentase pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.000.000	29.302.500	
				Persentase Pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	251.798.954	188.114.892	
				Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.644.454	252.262.892	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.352.500	78.497.500	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
					Kecamatan Dendang	78.100.000	58.606.500	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					Kecamatan Kelapa Kampit	32.000.000	27.621.000	
				Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa				
					Kecamatan Damar	11.600.000	11.600.000	
				Persentase Desa yang tertib administrasi				
					Kecamatan Dendang	402.400.000	313.541.000	
				Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa				
					Kecamatan Dendang	402.400.000	313.541.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	5.416.705.054	5.034.175.320	
				persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	4.951.981.494	5.027.499.468	
				persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	36.099.000	0	
				persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	7.375.079.585	6.929.497.503	
				persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	5.341.477.994	5.334.208.968	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				peningkatan investor baru yang berinvestasi (PMDN/PMA)				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	95.000.000	95.000.000	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				peningkatan investor baru yang berinvestasi (PMDN/PMA)				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	155.823.500	112.735.500	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase penyelesaian penanganan pengaduan tepat waktu				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	287.842.071	277.379.721	
				persentase penyelesaian perizinan tepat waktu				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	287.842.071	277.379.721	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	46.927.860	35.160.770	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	332.528.000	147.948.000	
				Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan				
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	332.528.000	147.948.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik				
					Kecamatan Dendang	22.600.000	19.339.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Dinas Perpustakaan	1.020.940.024	914.041.924	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Tingkat minat dan budaya baca serta keberadaan perpustakaan				
					Dinas Perpustakaan	1.072.567.871	856.958.621	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Persentase pengelolaan arsip secara elektronik				
					Dinas Perpustakaan	338.988.839	280.005.539	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Persentase dokumen/arsip yang diselamatkan dan dilestarikan				
					Dinas Perpustakaan	27.729.500	0	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Kualitas Pelayanan Pimpinan aparatur Perangkat Daerah				
					Sekretariat Daerah	657.340.000	657.340.000	
				Persentase Keikutsertaan Bimtek Pimpinan Daerah				
					Sekretariat Daerah	767.686.500	546.392.500	
				Persentase OPD yang efektif dan efisien				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sekretariat Daerah	670.333.000	488.500.750	
				Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian				
					Sekretariat Daerah	1.414.420.000	1.021.260.000	
				Persentase Pegawai Yang Mendapat Tambahan Sertifikat Keahlian				
					Sekretariat Daerah	508.938.500	280.672.500	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Sekretariat Daerah	9.923.623.420	9.709.352.070	
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja				
					Sekretariat Daerah	9.890.060.795	10.340.060.795	
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai				
					Sekretariat Daerah	7.592.942.670	6.433.140.670	
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Perencanaan				
					Sekretariat Daerah	138.656.100	145.389.800	
				Persentase unit layanan yang memiliki kelengkapan instrumen pelayanan publik				
					Sekretariat Daerah	670.333.000	488.500.750	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase Hibah dan Bantuan Sosial yang disalurkan				
					Sekretariat Daerah	8.815.502.849	10.225.957.400	
				Persentase Jenis Pembinaan Kesejahteraan Yang Dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	8.815.502.849	10.225.957.400	
				Persentase kebijakan kewilayahan yang difasilitasi				
					Sekretariat Daerah	599.179.834	500.452.834	
				Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi				
					Sekretariat Daerah	8.815.502.849	10.225.957.400	
				Persentase Kegiatan Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat Kab Beltim yang dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	8.815.502.849	10.225.957.400	
				Persentase Kerja Sama Daerah Yang Aktif				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sekretariat Daerah	140.520.000	153.963.500	
				Persentase pelaksanaan koordinasi yang difasilitasi				
					Sekretariat Daerah	599.179.834	500.452.834	
				Persentase pemenuhan data dan informasi				
					Sekretariat Daerah	1.084.671.850	888.290.100	
				Persentase Penanganan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin				
					Sekretariat Daerah	1.084.671.850	888.290.100	
				Persentase Penataan Pembentukan Produk Hukum Daerah				
					Sekretariat Daerah	1.084.671.850	888.290.100	
				Persentase penyelesaian kasus gugatan terhadap Pemerintah Daerah				
					Sekretariat Daerah	1.084.671.850	888.290.100	
				Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui website JDIH				
					Sekretariat Daerah	1.084.671.850	888.290.100	
				Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
					Sekretariat Daerah	599.179.834	500.452.834	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase jenis monitoring perekonomian dan Pembangunan daerah				
					Sekretariat Daerah	931.433.925	597.777.097	
				Persentase kebijakan ekonomi yang di implementasikan				
					Sekretariat Daerah	440.635.125	299.272.000	
				Persentase Paket Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi				
					Sekretariat Daerah	2.066.971.814	1.298.533.914	
				Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang difasilitasi				
					Sekretariat Daerah	2.066.971.814	1.298.533.914	
				Persentase Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dibina				
					Sekretariat Daerah	2.066.971.814	1.298.533.914	
				Persentase Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dipenuhi				
					Sekretariat Daerah	2.066.971.814	1.298.533.914	



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja				
					Sekretariat DPRD	19.076.407.063	18.339.996.563	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah				
					Sekretariat DPRD	13.190.882.500	10.510.301.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.600.445.800	1.022.522.780	
				1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.322.305.350	5.426.528.350	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				"Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.252.439.000	973.480.000	



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.252.439.000	973.480.000	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	735.695.300	529.427.750	
				Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.714.094.500	1.253.689.500	
				Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.714.094.500	1.253.689.500	
				Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	735.695.300	529.427.750	



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase OPD yang menyampaikan LK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	16.294.000	0	
				Persentase OPD yang menyampaikan LK Tepat Waktu				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	16.294.000	0	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.876.311.623	4.138.079.267	
				Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.549.561.106	1.355.910.606	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Persentase Data Pegawai ASN yang Akurat dan Terkini Berdasarkan Data Dasar Kepegawaian ASN dan Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran ASN				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.182.214.250	1.184.718.750	
				Presentase Aparatur yang Mendapatkan Pembinaan Karir dan Pengembangan Apatur				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.681.801.665	1.103.324.465	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.854.954.400	1.095.949.100	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase implemetasi rencana kelitbangan				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.722.471.350	1.848.537.500	
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.722.471.350	1.848.537.500	
				Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.722.471.350	1.848.537.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Inspektorat	6.797.989.110	5.822.313.176	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK				
					Inspektorat	1.394.058.200	1.492.258.200	
				Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat				
					Inspektorat	1.394.058.200	1.492.258.200	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti				
					Inspektorat	634.010.500	452.040.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah				
					Kecamatan Manggar	1.043.523.000	838.935.500	

					Kecamatan Gantung	3.834.373.529	3.669.296.294	
					Kecamatan Kelapa Kampit	2.749.814.996	2.729.584.996	
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)				
					Kecamatan Simpang Pesak	834.889.400	726.253.000	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Kecamatan Simpang Pesak	718.239.500	669.859.000	
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				
					Kecamatan Damar	2.924.934.850	2.870.501.700	
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Simpang Renggang	2.907.741.810	2.702.862.588	
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				
					Kecamatan Dendang	2.661.608.685	2.636.683.685	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Kecamatan Dendang	914.403.000	884.160.650	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Kecamatan Manggar	72.259.750	49.756.450	

					Kecamatan Gantung	104.578.000	104.578.000	
					Kecamatan Kelapa Kampit	20.000.000	20.000.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)				
					Kecamatan Simpang Pesak	26.087.500	14.456.000	
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik				
					Kecamatan Simpang Pesak	14.091.500	7.228.000	

					Kecamatan Simpang Pesak	68.800.000	0	
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Kecamatan Damar	10.000.000	4.664.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Simpang Renggang	19.909.500	19.909.500	
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Kecamatan Dendang	16.000.000	16.000.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (				
					Kecamatan Dendang	13.800.000	13.800.000	
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik				
					Kecamatan Dendang	13.800.000	13.800.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					Kecamatan Kelapa Kampit	9.999.000	9.999.000	
				Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
					Kecamatan Damar	8.800.000	8.800.000	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum				
					Kecamatan Manggar	24.048.000	517.940.000	

					Kecamatan Gantung	6.043.500	368.526.525	
					Kecamatan Kelapa Kampit	40.000.000	461.925.000	
				Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum				
					Kecamatan Damar	4.799.850	262.665.000	

					Kecamatan Damar	4.799.850	0	



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan (Persen)				
					Kecamatan Simpang Renggang	32.996.000	23.950.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan KDH di tingkat Desa				
					Kecamatan Manggar	530.868.231	389.992.481	

					Kecamatan Gantung	408.349.800	246.610.000	
					Kecamatan Kelapa Kampit	439.995.800	192.551.800	
				Persentase Desa yang tertib administrasi				
					Kecamatan Simpang Pesak	381.549.200	150.871.700	
				Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa				
					Kecamatan Damar	389.799.950	277.987.950	
				Persentase Desa yang Tertib Administrasi				
					Kecamatan Simpang Renggang	334.876.850	207.793.350	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.059.000	42.070.250	
				persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.348.903.100	1.787.426.800	
2	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat							



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				persentase pemenuhan administrasi kantor				
					Dinas Pendidikan	5.969.986.230	5.793.489.690	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				meningkatnya mutu pendidikan				
					Dinas Pendidikan	40.764.670.482	38.065.002.379	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pegawai yang disiplin berpakaian				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	361.335.000	37.450.000	
				Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	361.335.000	37.450.000	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	127.679.000	128.429.350	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.886.567.848	40.770.450.102	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	4.708.936.242	4.597.717.282	



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Berencana			
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	539.421.500	719.143.194	
				Persentase pemenuhan sarana prasarana kantor yang layak pakai				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	344.777.000	341.457.500	
				Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.459.169.218	7.404.766.072	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78.460.250	11.050.000	
				Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.461.590.563	4.768.599.092	
				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	115.974.000	77.414.000	



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Berencana			
				Persentase kepuasan pelanggan				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	57.312.885.926	46.566.080.561	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	449.375.000	400.982.500	
				Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	410.394.750	834.224.750	
				Pesentase Rumah Sakit dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.437.012.500	7.533.612.500	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang di inspeksi sanitasi				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.461.950	0	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Cakupan desa siaga aktif				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	81.628.500	19.772.500	
				Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83.893.000	10.311.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Keikutsertaan Pegawai dalam Diklat/Bimtek Peraturan Perundang-undangan				
					Satuan Polisi Pamong Praja	48.000.000	0	
				Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur				
					Satuan Polisi Pamong Praja	796.988.500	396.415.000	
				Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran				
					Satuan Polisi Pamong Praja	892.763.000	641.732.000	

					Satuan Polisi Pamong Praja	3.219.516.180	3.129.841.058	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				-				
					Satuan Polisi Pamong Praja	99.912.500	0	
				Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/kota				
					Satuan Polisi Pamong Praja	5.585.796.000	6.392.015.035	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.671.837.952	5.637.499.552	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	242.440.100	208.693.800	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33.299.150	33.299.150	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	170.645.500	101.917.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40.588.143	40.588.143	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.494.950	62.740.950	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.964.000	17.332.000	
			PROGRAM PENATAAN DESA					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99.699.950	0	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	88.582.300	40.612.500	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	62.110.900	17.399.900	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Persentase Kegiatan Pengendalian Penduduk				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	828.913.300	711.756.200	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	2.153.484.994	1.066.433.400	



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Berencana			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.687.651.008	1.598.833.308	
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja				
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.214.009.000	2.387.367.024	
				Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan				
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.028.349.008	4.101.965.332	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Persentase pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat				
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	671.367.000	449.041.500	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Persentase Atlet yang berprestasi				
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	841.472.000	447.978.500	
				Persentase pembinaan dan pasyarakatan olahraga				
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.186.396.500	803.299.000	
				Persentase pembinaan dan pengembangan kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi				
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	530.340.000	86.394.000	
				Persentase peningkatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga				
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	6.967.490.000	6.967.490.000	



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Cakupan pembinaan kepramukaan				
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	232.000.000	152.109.350	
3	Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian				
					Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	55.400.000	32.400.000	
				Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur				
					Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	414.203.500	365.178.000	
				Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran				
					Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.995.985.140	4.212.849.386	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				Persentase Peserta pelatihan yang terserap dunia kerja				
					Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	116.224.500	96.224.500	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Peserta pelatihan yang terserap dunia kerja				
					Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	603.190.000	530.313.000	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase pencari kerja yang ditempatkan				
					Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	141.686.000	81.202.500	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama				
					Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	223.383.000	273.667.000	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase koperasi yang tertib pertanggungjawaban dan pelaporan				
					Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	79.948.500	26.468.950	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Persentase koperasi yang tertib pertanggungjawaban dan pelaporan				
					Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	266.623.000	201.204.750	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Persentase Usaha mikro yang berkembang setelah mendapat pelatihan kewirausahaan				
					Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	278.691.300	204.338.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase Usaha mikro yang memperoleh akses permodalan				
					Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan	523.746.250	417.903.750	



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Menengah			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan				
					Dinas Perikanan	6.365.271.006	5.548.049.618	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Produksi Perikanan Tangkap				
					Dinas Perikanan	6.422.299.848	5.645.794.848	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Produksi Perikanan Budidaya				
					Dinas Perikanan	2.707.447.500	2.018.572.750	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Konsumsi Ikan				
					Dinas Perikanan	1.416.640.800	1.364.931.370	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET)				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	3.511.683.412	1.221.451.836	
				persentase penurunan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan tertib ukur dan tertib niaga				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	171.212.200	165.066.000	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET)				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	1.030.099.950	1.012.521.450	



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				industri kecil menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	104.414.450	0	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				persentase penurunan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan tertib ukur dan tertib niaga				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	313.141.607	302.086.607	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				industri kecil dan menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	1.311.609.760	712.208.170	
				pengembangan sentra IKM				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	1.311.609.760	712.208.170	
				persentase IKM yang produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	1.311.609.760	712.208.170	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				industri kecil menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	57.197.000	44.864.000	
4	Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.090.000	23.140.000	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.128.648.676	5.288.051.086	
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.008.903.400	1.862.844.400	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase desa yang memiliki akses embung /penampung air				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.913.832.397	4.482.038.506	
				Persentase kawasan banjir yang ditangani				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.913.832.397	4.482.038.506	
				Persentase luas irigasi yang dapat dialiri air irigasi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.803.796.055	3.627.406.235	
				Persentase turap/talud/bronjong dengan kondisi baik				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.913.832.397	4.482.038.506	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase rumah tangga pengguna air bersih				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.905.298.000	5.055.298.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase rumah tangga bersanitasi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.511.652.000	3.011.652.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.502.349.588	1.706.812.178	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase bangunan yang sesuai standar				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.370.345.500	5.370.345.500	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Panjang jalan kabupaten yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.644.853.076	31.086.798.076	
				Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.644.853.076	31.086.798.076	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase pengawasan tata ruang				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.347.847.500	1.347.847.500	
				Persentase tersusunnya perencanaan tata ruang kab.Belitung Timur				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.282.257.000	1.266.507.000	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
				Persentase penyelesaian, tertib administrasi penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	209.450.000	209.450.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Persentase penataan kawasan ruang terbuka hijau(RTH)				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	955.297.817	1.467.621.317	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja				
					Dinas Perhubungan	4.426.836.341	3.833.337.265	

					Dinas Perhubungan	1.195.234.500	1.195.234.500	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
					Dinas Perhubungan	12.097.359.345	11.586.285.945	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran				
					Dinas Perhubungan	870.393.985	772.163.985	



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.948.441.043	5.557.777.193	

					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	49.926.000	0	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				persentase pengembangan kebudayaan				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	746.992.000	753.488.000	
				Persentase Pengembangan Kebudayaan				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.094.755.000	1.566.435.750	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.518.217.750	2.291.494.230	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD Daerah				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.802.703.950	1.342.851.500	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.046.977.300	131.999.650	
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.766.830.300	2.640.578.792	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					

					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	378.217.300	733.256.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				
					Dinas Lingkungan Hidup	6.082.225.122	5.632.919.493	
				Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur				
					Dinas Lingkungan Hidup	6.082.225.122	5.632.919.493	
				Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah				
					Dinas Lingkungan Hidup	6.082.225.122	5.632.919.493	
				Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah				
					Dinas Lingkungan Hidup	6.082.225.122	5.632.919.493	
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja				
					Dinas Lingkungan Hidup	6.082.225.122	5.632.919.493	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
					Dinas Lingkungan Hidup	351.398.000	0	
				Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	351.398.000	0	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Indeks Kualitas Air				
					Dinas Lingkungan Hidup	818.507.800	665.798.650	
				Indeks Kualitas Lahan				
					Dinas Lingkungan Hidup	818.507.800	665.798.650	
				Indeks Kualitas Udara				
					Dinas Lingkungan Hidup	818.507.800	665.798.650	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				
					Dinas Lingkungan Hidup	321.165.000	71.770.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase Ketaatan Perusahaan dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3				
					Dinas Lingkungan Hidup	204.770.000	195.423.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH				
					Dinas Lingkungan Hidup	60.791.500	60.754.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
					Dinas Lingkungan Hidup	49.697.000	0	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
					Dinas Lingkungan Hidup	248.770.000	0	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Pengelolaan Sampah				
					Dinas Lingkungan Hidup	5.669.612.500	6.318.997.190	
6	Peningkatan Ketahanan Pangan							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pegawai yang disiplin berpakaian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	63.000.000	63.000.000	
				Persentase Pegawai yang mendapatkan tambahan sertifikat keahlian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	63.000.000	63.000.000	
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Pertanian dan Pangan	788.763.416	774.384.016	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor				
					Dinas Pertanian dan Pangan	95.698.916	94.696.516	
				Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai				
					Dinas Pertanian dan Pangan	630.064.500	616.687.500	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Ketersediaan Energi dan Protein				
					Dinas Pertanian dan Pangan	208.497.000	227.229.500	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Ketersediaan Energi dan Protein				
					Dinas Pertanian dan Pangan	112.000.000	11.600.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Ketersediaan Energi dan Protein				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pertanian dan Pangan	66.909.000	66.909.000	
				Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	66.909.000	66.909.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	34.182.500	34.182.500	
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	34.182.500	34.182.500	
				Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	34.182.500	34.182.500	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	197.587.500	177.587.500	
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	197.587.500	177.587.500	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase Penanganan Kasus Penyakit Ternak				
					Dinas Pertanian dan Pangan	249.937.122	241.737.122	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pertanian dan Pangan	633.912.000	225.875.500	
				Persentase penyuluh pertanian/perkebunan yang terlatih dan terampil				
					Dinas Pertanian dan Pangan	633.912.000	225.875.500	
				Persentase Petani yang mendapat pendidikan, pelatihan dan pembinaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	633.912.000	225.875.500	
7	1. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-Sektor Prioritas							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pegawai yang disiplin berpakaian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	29.000.000	15.500.000	
				Persentase Pegawai yang mendapatkan tambahan sertifikat keahlian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	29.000.000	15.500.000	
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Pertanian dan Pangan	8.822.719.472	8.893.003.709	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor				
					Dinas Pertanian dan Pangan	8.793.719.472	8.877.503.709	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Penerapan Teknologi Peternakan dalam Budidaya Ternak				
					Dinas Pertanian dan Pangan	170.651.500	152.767.500	
				Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	2.290.333.500	2.302.573.500	
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pertanian dan Pangan	2.290.333.500	2.302.573.500	
				Persentase Rata-Rata Peningkatan Populasi Ternak dan Produksi Hasil Pernakan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	199.100.000	199.100.000	
				Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	2.660.085.000	2.654.441.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	1.340.000.000	1.340.000.000	
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	1.340.000.000	1.340.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	46.963.200	46.963.200	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	47.349.500	47.349.500	
				Persentase Terklasifikasinya Kelas Kebun Perusahaan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	47.349.500	47.349.500	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	100.000.000	100.000.000	



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase penyuluh pertanian/perkebunan yang terlatih dan terampil				
					Dinas Pertanian dan Pangan	100.000.000	100.000.000	
				Persentase Petani yang mendapat pendidikan, pelatihan dan pembinaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	100.000.000	100.000.000	
8	5. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pegawai yang disiplin berpakaian				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	115.287.000	97.887.000	
				Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	115.287.000	97.887.000	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.042.803.917	4.790.092.400	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	349.920.000	117.078.000	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.915.000.000	4.915.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Cakupan puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.000.000	0	
				Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	184.955.350	33.317.350	
9	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.644.998.136	3.460.188.836	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Dinas Perpustakaan	27.600.000	24.600.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	2.002.442.800	1.038.491.000	



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Manusia			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)				
					Kecamatan Simpang Pesak	3.750.000	2.000.000	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Kecamatan Simpang Pesak	3.750.000	2.000.000	
				persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.970.000	19.970.000	
				persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.000.000	15.000.000	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Tingkat pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	791.224.800	242.145.500	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				persentase tingkat pemahaman dan pengawasan politik yang ada di masyarakat				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	641.045.000	626.891.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				persentase ormas/LSM/OKP yang berstatus terdaftar				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74.172.800	0	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				persentase tingkat pembinaan kerukunan dan keselarasan di masyarakat				



Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	158.879.795	93.745.795	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	301.922.000	533.574.300	

**TABEL 3.4 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
56	Pengendalian Lingkungan Hidup					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan			
				Dinas Lingkungan Hidup	6.082.225.122	5.632.919.493
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur			
				Dinas Lingkungan Hidup	6.082.225.122	5.632.919.493
			Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			
				Dinas Lingkungan Hidup	6.082.225.122	5.632.919.493
			Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			
				Dinas Lingkungan Hidup	6.082.225.122	5.632.919.493
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja			
				Dinas Lingkungan Hidup	6.082.225.122	5.632.919.493
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Dinas Lingkungan Hidup	351.398.000	0
			Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup			
				Dinas Lingkungan Hidup	351.398.000	0
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Indeks Kualitas Air			
				Dinas Lingkungan Hidup	818.507.800	665.798.650
			Indeks Kualitas Lahan			
				Dinas Lingkungan Hidup	818.507.800	665.798.650
			Indeks Kualitas Udara			
				Dinas Lingkungan Hidup	818.507.800	665.798.650
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
			Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			
				Dinas Lingkungan Hidup	321.165.000	71.770.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
			Persentase Ketaatan Perusahaan dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Lingkungan Hidup	204.770.000	195.423.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
			Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH			
				Dinas Lingkungan Hidup	156.596.500	161.469.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Dinas Lingkungan Hidup	49.697.000	0
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Dinas Lingkungan Hidup	248.770.000	0
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
			Persentase Pengelolaan Sampah			
				Dinas Lingkungan Hidup	5.669.612.500	6.318.997.190
57	Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.766.830.300	2.640.578.792
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				

				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.398.467.300	4.285.031.900
58	Pembangunan Berdemokrasi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	117.373.500	104.814.250
			persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.620.179.769	2.018.703.469



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
			Tingkat pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	791.224.800	242.145.500
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
			persentase tingkat pemahaman dan pengawasan politik yang ada di masyarakat			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	641.045.000	626.891.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
			persentase ormas/LSM/OKP yang berstatus terdaftar			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74.172.800	0
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
			persentase tingkat pembinaan kerukunan dan keselarasan di masyarakat			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	158.879.795	93.745.795
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
			persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	301.922.000	533.574.300
59	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor			
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.717.982.000	2.399.803.240
			Persentase Keikutsertaan Pegawai dalam Diklat/Bimtek Peraturan Perundang-undangan			
				Satuan Polisi Pamong Praja	48.000.000	0
			Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Satuan Polisi Pamong Praja	796.988.500	396.415.000
			Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran			
				Satuan Polisi Pamong Praja	892.763.000	641.732.000

				Satuan Polisi Pamong Praja	3.219.516.180	3.129.841.058
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			-			
				Satuan Polisi Pamong Praja	99.912.500	0
			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/kota			
				Satuan Polisi Pamong Praja	5.585.796.000	6.392.015.035
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
			Persentase Desa yang tertib administrasi			
				Kecamatan Dendang	13.600.000	0
			Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa			
				Kecamatan Dendang	13.600.000	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.132.471.930	1.346.219.180
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	469.298.500	529.581.500
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.224.871.930	1.446.501.180
			Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.335.000	2.900.000
			Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.335.000	22.956.000
			Persentase pegawai yang disiplin berpakaian			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92.400.000	100.282.000
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.022.933.930	1.303.996.680
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.601.770.430	1.875.800.680
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	584.171.500	594.760.000
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
			Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.587.327.000	1.078.317.000
			Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.587.327.000	1.078.317.000
			Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.587.327.000	1.078.317.000
			Rasio penduduk ber-KTP			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.587.327.000	1.078.317.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
			Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.000.645.870	585.709.870
			penerbitan akta kelahiran Per jumlah kelahiran			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76.761.500	42.523.500
			Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	549.460.000	207.462.000
			Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	374.424.370	335.724.370
			Persentase kepemilik akta kelahiran usia 0 - 18 Tahun			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	374.424.370	335.724.370
			Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	626.221.500	249.985.500
			Rasio pasangan berakta nikah			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	451.185.870	378.247.870
			Rasio pasangan berakte nikah			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	549.460.000	207.462.000
			Rasio penerbitan akta kematian			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	626.221.500	249.985.500
			Rasio perbitan akta kematian			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	374.424.370	335.724.370
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
			Persentase ketersediaan sarana dan prasaran yang mutakhir			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.644.454	252.262.892
			Persentase ketersediaan tata kelola administrasi kependudukan			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	251.798.954	188.114.892



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.000.000	29.302.500
			Persentase Pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	251.798.954	188.114.892
			Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.644.454	252.262.892
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
			Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.352.500	78.497.500
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
				Kecamatan Dendang	78.100.000	58.606.500
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				

				Kecamatan Kelapa Kampit	32.000.000	27.621.000
			Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa			
				Kecamatan Damar	11.600.000	11.600.000
			Persentase Desa yang tertib administrasi			
				Kecamatan Dendang	402.400.000	313.541.000
			Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa			
				Kecamatan Dendang	402.400.000	313.541.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			
				Dinas Komunikasi dan Informatika	5.416.705.054	5.034.175.320
			persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	4.228.000	4.228.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
			Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik			
				Kecamatan Dendang	22.600.000	19.339.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			
				Dinas Perpustakaan	4.024.949.302	3.915.051.202
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
			Tingkat minat dan budaya baca serta keberadaan perpustakaan			
				Dinas Perpustakaan	1.418.074.371	1.160.934.621
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
			Persentase pengelolaan arsip secara elektronik			
				Dinas Perpustakaan	338.988.839	280.005.539
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
			Persentase dokumen/arsip yang diselamatkan dan dilestarikan			
				Dinas Perpustakaan	27.729.500	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Kualitas Pelayanan Pimpinan aparatur Perangkat Daerah			
				Sekretariat Daerah	657.340.000	657.340.000
			Persentase Keikutsertaan Bimtek Pimpinan Daerah			
				Sekretariat Daerah	767.686.500	546.392.500
			Persentase OPD yang efektif dan efisien			
				Sekretariat Daerah	670.333.000	488.500.750
			Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian			
				Sekretariat Daerah	1.244.911.500	851.751.500
			Persentase Pegawai Yang Mendapat Tambahan Sertifikat Keahlian			
				Sekretariat Daerah	339.430.000	111.164.000



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			
				Sekretariat Daerah	9.923.623.420	9.709.352.070
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja			
				Sekretariat Daerah	9.890.060.795	10.340.060.795
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai			
				Sekretariat Daerah	7.592.942.670	6.433.140.670
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Perencanaan			
				Sekretariat Daerah	138.656.100	145.389.800
			Persentase unit layanan yang memiliki kelengkapan instrumen pelayanan publik			
				Sekretariat Daerah	670.333.000	488.500.750
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			Persentase Hibah dan Bantuan Sosial yang disalurkan			
				Sekretariat Daerah	8.815.502.849	10.225.957.400
			Persentase Jenis Pembinaan Kesejahteraan Yang Dilaksanakan			
				Sekretariat Daerah	8.815.502.849	10.225.957.400
			Persentase kebijakan kewilayahan yang difasilitasi			
				Sekretariat Daerah	599.179.834	500.452.834
			Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi			
				Sekretariat Daerah	8.815.502.849	10.225.957.400
			Persentase Kegiatan Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat Kab Beltim yang dilaksanakan			
				Sekretariat Daerah	8.815.502.849	10.225.957.400
			Persentase Kerja Sama Daerah Yang Aktif			
				Sekretariat Daerah	140.520.000	153.963.500
			Persentase pelaksanaan koordinasi yang difasilitasi			
				Sekretariat Daerah	599.179.834	500.452.834
			Persentase pemenuhan data dan informasi			
				Sekretariat Daerah	1.084.671.850	888.290.100
			Persentase Penanganan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Sekretariat Daerah	1.084.671.850	888.290.100
			Persentase Penataan Pembentukan Produk Hukum Daerah			
				Sekretariat Daerah	1.084.671.850	888.290.100
			Persentase penyelesaian kasus gugatan terhadap Pemerintah Daerah			
				Sekretariat Daerah	1.084.671.850	888.290.100
			Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui website JDIH			
				Sekretariat Daerah	1.084.671.850	888.290.100
			Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
				Sekretariat Daerah	599.179.834	500.452.834
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
			Persentase jenis monitoring perekonomian dan Pembangunan daerah			
				Sekretariat Daerah	931.433.925	597.777.097
			Persentase kebijakan ekonomi yang di implementasikan			
				Sekretariat Daerah	440.635.125	299.272.000
			Persentase Paket Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi			
				Sekretariat Daerah	2.066.971.814	1.298.533.914
			Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang difasilitasi			
				Sekretariat Daerah	2.066.971.814	1.298.533.914
			Persentase Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dibina			
				Sekretariat Daerah	2.066.971.814	1.298.533.914
			Persentase Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dipenuhi			
				Sekretariat Daerah	2.066.971.814	1.298.533.914
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja			
				Sekretariat DPRD	18.430.219.063	17.693.808.563
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
			Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah			
				Sekretariat DPRD	13.339.999.000	10.515.993.000



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)			
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.852.469.600	3.919.259.600
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
			"Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu			
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.878.500	5.895.000
			Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu			
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.878.500	5.895.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD			
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	783.312.000	412.719.000
			Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD			
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	783.312.000	412.719.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Jumlah pegawai yang disiplin berpakaian			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	81.020.000	34.030.000
			Persentase pegawai yang mendapat sertifikat keahlian			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	81.020.000	34.030.000
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.373.894.115	959.834.110
			Persentase pemenuhan kebutuhan kantor			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	8.798.896.241	10.348.854.893
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	960.072.166	885.413.257
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
			Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	107.147.912.399	104.945.021.437
			Persentase OPD yang menyampaikan LK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	295.715.500	301.580.000
			Persentase OPD yang menyampaikan LK Tepat Waktu			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	295.715.500	301.580.000
			Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	382.017.250	386.389.750
			Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	499.846.150	432.864.050
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
			Persentase Aset Tetap Tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	781.671.700	675.587.650
			Persentase Asset Tanah Pemda yang bersertifikat			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	781.671.700	675.587.650
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
			Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.124.189.850	973.011.900
			Pertumbuhan Sumber PAD			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.124.189.850	973.011.900
			Pertumbuhan Wajib Pajak			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.124.189.850	973.011.900
			Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah			
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.124.189.850	973.011.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor			
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.855.764.123	4.131.814.267
			Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.539.561.106	1.355.910.606
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
			Persentase Data Pegawai ASN yang Akurat dan Terkini Berdasarkan Data Dasar Kepegawaian ASN dan Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran ASN			
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.265.776.600	1.259.747.750
			Presentase Aparatur yang Mendapatkan Pembinaan Karir dan Pengembangan Apatur			
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.702.539.665	1.140.378.465
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan			
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.857.397.200	2.134.440.100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja			
				Inspektorat	6.797.989.110	5.822.313.176
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
			Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK			
				Inspektorat	1.394.058.200	1.492.258.200
			Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat			
				Inspektorat	1.394.058.200	1.492.258.200
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
			Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti			
				Inspektorat	634.010.500	452.040.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Kecamatan Manggar	3.386.907.112	3.206.479.112

				Kecamatan Gantung	3.834.373.529	3.669.296.294
				Kecamatan Kelapa Kampit	2.749.814.996	2.729.584.996
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)			
				Kecamatan Simpang Pesak	2.764.364.194	2.638.477.786
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			
				Kecamatan Simpang Pesak	2.647.714.294	2.582.083.786
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan			
				Kecamatan Damar	2.965.266.850	2.927.453.700
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)			
				Kecamatan Simpang Renggang	3.209.591.310	3.006.083.588
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan			
				Kecamatan Dendang	2.661.608.685	2.636.683.685
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			
				Kecamatan Dendang	914.403.000	884.160.650
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
			Indeks Kepuasan Masyarakat			
				Kecamatan Manggar	72.259.750	49.756.450

				Kecamatan Gantung	104.578.000	104.578.000
				Kecamatan Kelapa Kampit	20.000.000	20.000.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)			
				Kecamatan Simpang Pesak	26.087.500	14.456.000
			Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik			
				Kecamatan Simpang Pesak	14.091.500	7.228.000



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Kecamatan Simpang Pesak	68.800.000	0
			Indeks Kepuasan Masyarakat			
				Kecamatan Damar	10.000.000	4.664.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)			
				Kecamatan Simpang Renggang	19.909.500	19.909.500
			Indeks Kepuasan Masyarakat			
				Kecamatan Dendang	16.000.000	16.000.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat (			
				Kecamatan Dendang	13.800.000	13.800.000
			Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik			
				Kecamatan Dendang	13.800.000	13.800.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

				Kecamatan Kelapa Kampit	9.999.000	9.999.000
			Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
				Kecamatan Damar	8.800.000	8.800.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum			
				Kecamatan Manggar	24.048.000	517.940.000

				Kecamatan Gantung	6.043.500	368.526.525
				Kecamatan Kelapa Kampit	40.000.000	461.925.000
				Kecamatan Simpang Pesak	2.999.000	0
			Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum			
				Kecamatan Damar	4.799.850	262.665.000

				Kecamatan Damar	4.799.850	0



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan (Persen)			
				Kecamatan Simpang Renggang	32.996.000	313.343.450
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
			Persentase Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan KDH di tingkat Desa			
				Kecamatan Manggar	540.854.231	401.080.481

				Kecamatan Gantung	408.349.800	246.610.000
				Kecamatan Kelapa Kampit	439.995.800	192.551.800
			Persentase Desa yang tertib administrasi			
				Kecamatan Simpang Pesak	381.549.200	150.871.700
			Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa			
				Kecamatan Damar	389.799.950	277.987.950
			Persentase Desa yang Tertib Administrasi			
				Kecamatan Simpang Renggang	334.876.850	207.793.350
60	Pembangunan Kesehatan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pegawai yang disiplin berpakaian			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	550.622.000	174.337.000
			Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	550.622.000	174.337.000
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.783.717.843	17.171.522.244
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	41.221.977.484	44.642.952.438
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.708.936.242	4.597.717.282
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.915.000.000	4.915.000.000
			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi perkantoran			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	374.218.500	376.598.500
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.123.356.912	1.354.507.285
			Persentase pemenuhan sarana prasarana kantor yang layak pakai			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	325.040.000	323.312.500
			Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.490.363.088	7.467.942.942
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78.460.250	11.050.000
			Cakupan puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46.499.840	27.499.840
			Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.560.358.647	17.999.474.433
			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	115.974.000	77.414.000
			Persentase kepuasan pelanggan			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	57.312.885.926	57.229.825.243
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	449.375.000	400.982.500
			Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.971.864.750	5.633.017.250
			Persentase Rumah Sakit dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.437.012.500	7.533.612.500
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
			Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang di inspeksi sanitasi			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.461.950	0
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Cakupan desa siaga aktif			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45.561.000	3.570.000
			Cakupan Desa Siaga Aktif			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	127.521.550	71.231.300
			Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83.893.000	10.311.000
			Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan Kesehatan			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.900.000	6.900.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
			Persentase Kegiatan Pengendalian Penduduk			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	848.899.800	729.235.200
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
			Persentase wanita dengan usia kawin pertama < 21 tahun			
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.195.708.994	1.727.966.394
61	Pembangunan Pendidikan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			persentase pemenuhan administrasi kantor			
				Dinas Pendidikan	169.458.578.602	160.750.207.614
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			meningkatnya mutu pendidikan			
				Dinas Pendidikan	47.064.729.482	45.527.740.374



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
			meningkatnya mutu PTK			
				Dinas Pendidikan	378.350.000	79.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan			
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.533.269.008	1.416.821.308
			Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja			
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.214.009.000	2.387.367.024
			Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan			
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.873.967.008	3.919.953.332
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
			Persentase pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat			
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	671.367.000	449.041.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
			Persentase Atlet yang berprestasi			
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	961.366.000	562.320.500
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasana Olahraga yang memadai			
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	111.394.500	127.769.000
			Persentase pembinaan dan pemasyarakatan olahraga			
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.186.396.500	803.299.000
			Persentase pembinaan dan pengembangan kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi			
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	530.340.000	86.394.000



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase peningkatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga			
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	6.967.490.000	6.967.490.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
			Cakupan pembinaan kepramukaan			
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	232.000.000	152.109.350
62	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.090.000	23.140.000
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.912.526.676	6.166.441.086
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.008.903.400	1.862.844.400
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
			Persentase desa yang memiliki akses embung /penampung air			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.913.832.397	4.482.038.506
			Persentase kawasan banjir yang ditangani			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.913.832.397	4.482.038.506
			Persentase luas irigasi yang dapat dialiri air irigasi			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.803.796.055	3.627.406.235
			Persentase turap/talud/bronjong dengan kondisi baik			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.913.832.397	4.482.038.506
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase rumah tangga pengguna air bersih			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.905.298.000	5.055.298.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
			Persentase rumah tangga bersanitasi			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.511.652.000	3.011.652.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.502.349.588	1.706.812.178
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
			Persentase bangunan yang sesuai standar			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.370.345.500	5.370.345.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
			Panjang jalan kabupaten yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.644.853.076	31.086.798.076
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.644.853.076	31.086.798.076
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
			Persentase pengawasan tata ruang			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.347.847.500	1.347.847.500
			Persentase tersusunnya perencanaan tata ruang kab.Belitung Timur			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.282.257.000	1.266.507.000
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
			Persentase penyelesaian, tertib administrasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	209.450.000	209.450.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
			Persentase penataan kawasan ruang terbuka hijau(RTH)			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	955.297.817	1.467.621.317
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja			
				Dinas Perhubungan	3.208.466.441	2.909.311.365

				Dinas Perhubungan	1.195.234.500	1.195.234.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
			Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
				Dinas Perhubungan	12.097.359.345	11.586.285.945
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
			Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran			
				Dinas Perhubungan	870.393.985	772.163.985
63	Peningkatan Ekonomi Masyarakat					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian			
				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	55.400.000	32.400.000
			Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur			
				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	414.203.500	365.178.000
			Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran			
				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.995.985.140	4.212.849.386
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Peserta pelatihan yang terserap dunia kerja			
				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	116.224.500	96.224.500
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
			Persentase Peserta pelatihan yang terserap dunia kerja			
				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	603.190.000	530.313.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan			
				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	141.686.000	81.202.500
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama			
				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	223.383.000	273.667.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pegawai yang disiplin berpakaian			
				Dinas Pertanian dan Pangan	63.000.000	63.000.000
			Persentase Pegawai yang mendapatkan tambahan sertifikat keahlian			
				Dinas Pertanian dan Pangan	63.000.000	63.000.000
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Dinas Pertanian dan Pangan	788.763.416	774.384.016
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor			
				Dinas Pertanian dan Pangan	95.698.916	94.696.516
			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai			
				Dinas Pertanian dan Pangan	630.064.500	616.687.500
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
			Ketersediaan Energi dan Protein			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Pertanian dan Pangan	799.056.000	607.629.500
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
			Ketersediaan Energi dan Protein			
				Dinas Pertanian dan Pangan	112.000.000	11.600.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
			Ketersediaan Energi dan Protein			
				Dinas Pertanian dan Pangan	66.909.000	66.909.000
			Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan			
				Dinas Pertanian dan Pangan	66.909.000	66.909.000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
			Persentase koperasi yang tertib pertanggungjawaban dan pelaporan			
				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	79.948.500	26.468.950
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
			Persentase koperasi yang tertib pertanggungjawaban dan pelaporan			
				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	266.623.000	201.204.750
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
			Persentase Usaha mikro yang berkembang setelah mendapat pelatihan kewirausahaan			
				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	278.691.300	204.338.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
			Persentase Usaha mikro yang memperoleh akses permodalan			
				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	523.746.250	417.903.750
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	4.951.981.494	5.027.499.468
			persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	36.099.000	0
			persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	7.375.079.585	6.929.497.503
			persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	5.341.477.994	5.334.208.968
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
			peningkatan investor baru yang berinvestasi (PMDN/PMA)			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	95.000.000	95.000.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
			peningkatan investor baru yang berinvestasi (PMDN/PMA)			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	155.823.500	112.735.500
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
			Persentase penyelesaian penanganan pengaduan tepat waktu			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	287.842.071	277.379.721
			persentase penyelesaian perizinan tepat waktu			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	287.842.071	277.379.721
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	258.214.500	369.963.500
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
			Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	46.927.860	35.160.770
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan			
				Dinas Perikanan	6.365.271.006	5.548.049.618
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
			Produksi Perikanan Tangkap			
				Dinas Perikanan	6.422.299.848	5.645.794.848
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
			Produksi Perikanan Budidaya			
				Dinas Perikanan	2.707.447.500	2.018.572.750
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
			Konsumsi Ikan			
				Dinas Perikanan	1.416.640.800	1.364.931.370
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pegawai yang disiplin berpakaian			
				Dinas Pertanian dan Pangan	29.000.000	15.500.000
			Persentase Pegawai yang mendapatkan tambahan sertifikat keahlian			
				Dinas Pertanian dan Pangan	29.000.000	15.500.000
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Dinas Pertanian dan Pangan	8.907.295.472	8.979.579.709
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor			
				Dinas Pertanian dan Pangan	8.878.295.472	8.962.079.709



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
			Persentase Penerapan Teknologi Peternakan dalam Budidaya Ternak			
				Dinas Pertanian dan Pangan	170.651.500	152.767.500
			Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan			
				Dinas Pertanian dan Pangan	2.324.516.000	2.336.756.000
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan			
				Dinas Pertanian dan Pangan	2.324.516.000	2.336.756.000
			Persentase Rata-Rata Peningkatan Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan			
				Dinas Pertanian dan Pangan	199.100.000	199.100.000
			Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian			
				Dinas Pertanian dan Pangan	2.694.267.500	2.688.623.500
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
				Dinas Pertanian dan Pangan	3.163.875.000	3.127.917.500
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan			
				Dinas Pertanian dan Pangan	3.163.875.000	3.127.917.500
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Persentase Penanganan Kasus Penyakit Ternak			
				Dinas Pertanian dan Pangan	249.937.122	241.737.122
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
			Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan			
				Dinas Pertanian dan Pangan	46.963.200	46.963.200
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
			Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian			
				Dinas Pertanian dan Pangan	733.912.000	325.875.500
			Persentase penyuluh pertanian/perkebunan yang terlatih dan terampil			
				Dinas Pertanian dan Pangan	733.912.000	325.875.500



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Petani yang mendapat pendidikan, pelatihan dan pembinaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan			
				Dinas Pertanian dan Pangan	733.912.000	325.875.500
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
			Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET)			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	3.511.683.412	1.221.451.836
			persentase penurunan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan tertib ukur dan tertib niaga			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	171.212.200	165.066.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
			Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET)			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	1.030.099.950	1.012.521.450
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
			industri kecil menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	104.414.450	0
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
			persentase penurunan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan tertib ukur dan tertib niaga			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	313.141.607	302.086.607
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
			industri kecil dan menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan			



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	1.311.609.760	712.208.170
			pengembangan sentra IKM			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	1.311.609.760	712.208.170
			persentase IKM yang produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	1.311.609.760	712.208.170
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
			industri kecil menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan			
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	57.197.000	44.864.000
64	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.113.963.856	3.013.958.485
			Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.113.963.856	3.013.958.485
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.113.963.856	3.013.958.485
65	Pengembangan Pariwisata					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan			
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.979.821.183	5.611.141.183



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	49.926.000	0
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
			persentase pengembangan kebudayaan			
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	746.992.000	753.488.000
			Persentase Pengembangan Kebudayaan			
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.094.755.000	1.566.435.750
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
			Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur			
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.577.014.200	2.356.452.180
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
			Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD Daerah			
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.802.703.950	1.342.851.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
			Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.398.492.350	1.046.824.650
79	Pembangunan Sosial					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.804.560.452	5.765.892.052
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				

				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	242.440.100	208.693.800
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33.299.150	33.299.150
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA				

				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.728.500	0
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				

				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40.588.143	40.588.143
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				

				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	243.981.000	216.234.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				

				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.494.950	62.740.950
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				

				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.964.000	17.332.000
		PROGRAM PENATAAN DESA				

				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99.699.950	0
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				

				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	88.582.300	40.612.500
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	62.110.900	17.399.900



TABEL 3.6 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase pengawasan tata ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase koperasi yang tertib pertanggungjawaban dan pelaporan		
				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Usaha mikro yang berkembang setelah mendapat pelatihan kewirausahaan		
				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Konsumsi Ikan		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase implemetasi rencana kelitbangan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	



Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			persentase pemenuhan administrasi kantor		
				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			meningkatnya mutu pendidikan		
				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang dilaksanakan		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan		
				Dinas Perikanan	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		
				Sekretariat DPRD	



Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Presentase Aparatur yang Mendapatkan Pembinaan Karir dan Pengembangan Apatur		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		
				Inspektorat	
			Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat		
				Inspektorat	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		
				Kecamatan Simpang Renggang	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum		
				Kecamatan Damar	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				



Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase kepuasan pelanggan		
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat sesuai standar		
				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase luas irigasi yang dapat dialiri air irigasi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Panjang jalan kabupaten yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Cakupan rumah layak huni yang terjangkau		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Rasio rumah terkena bencana alam/sosial yang dibantu		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			



**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase desa yang memiliki akses embung /penampung air		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase kawasan banjir yang ditangani		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase turap/talud/bronjong dengan kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase bangunan yang sesuai standar		



Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Persentase penyelesaian, tertib administrasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai aspek pelaporankinerja dalam AKIP perangkat daerah Nilai aspek perencanaan Daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang mutakhir		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase ketersediaan tata kelola administrasi kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase infrastruktur TIK yang terintegrasi		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase sistem informasi untuk layanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dikembangkan		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		
				Dinas Perpustakaan	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Tingkat minat dan budaya baca serta keberadaan perpustakaan		
				Dinas Perpustakaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Persentase pengelolaan arsip secara elektronik		
				Dinas Perpustakaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Kualitas Pelayanan Pimpinan aparatur Perangkat Daerah		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Keikutsertaan Bimtek Pimpinan Daerah		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase OPD yang efektif dan efisien		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Pegawai Yang Mendapat Tambahan Sertifikat Keahlian		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		
				Sekretariat Daerah	



Sinergitas Program Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Perencanaan		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase unit layanan yang memiliki kelengkapan instrumen pelayanan publik		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase kebijakan kewilayahan yang difasilitasi		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase pelaksanaan koordinasi yang difasilitasi		
				Sekretariat Daerah	
			Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase jenis monitoring perekonomian dan Pembangunan daerah		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase kebijakan ekonomi yang di implementasikan		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 3. Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 5. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	



Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah		
				Kecamatan Manggar	
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		
				Kecamatan Simpang Renggang	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan (Persen)		
				Kecamatan Simpang Renggang	
			Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan		
				Kecamatan Dendang	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Desa yang Tertib Administrasi		
				Kecamatan Simpang Renggang	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			persentase tingkat pembinaan kerukunan dan keselarasan di masyarakat		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 disajikan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan Tahun 2021 dan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini diharapkan menjadi arah dan pedoman dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diajukan bersama-sama dengan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 Ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Mudah-mudahan pada waktunya nanti, perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dapat disepakati bersama-sama antara Eksekutif dan Legislatif sehingga proses penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dapat segera dilakukan.

Akhirnya, semoga dengan tersusun dan dibahasnya perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dapat menjadi instrumen yang penting dalam proses perencanaan dan penganggaran yang sangat berguna dalam proses pembangunan di Belitung Timur.

Terima Kasih.